



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kota Semarang yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan perlu disusun perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
- b. perencanaan pembangunan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- c. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 20 tahun dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- d. bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa Wali Kota untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan.
- (2) RPJPD disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Wali Kota.
- (4) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD.

Pasal 3

- (1) RPJPD dimulai pada tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2045.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : Pendahuluan;
 - b. bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. bab III : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. bab IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. bab VI : Penutup.
- (3) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-251/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Semarang yang merupakan dokumen yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan dari tahun 2025-2045. Pelaksanaan RPJPD Kota Semarang 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kota Semarang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 164

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak di pesisir laut Jawa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak dan tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur. Secara administratif Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.

Pembangunan Kota Semarang selama dua puluh tahun telah dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Semarang tahun 2005-2025, yang dijabarkan dalam empat tahapan lima tahunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Saat ini RPJPD Tahun 2005-2025 telah memasuki tahap akhir dan akan berakhir pada tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian daerah dalam mewujudkan visi pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 tercapai sebesar 95,61% dengan kategori sangat tinggi.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan kinerja pembangunan daerah Kota Semarang, dan sejalan dengan berakhirnya tahapan RPJPD Tahun 2005-2025, sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Kota Semarang harus menyusun RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Pembangunan Kota Semarang 2025-2045 juga disusun untuk dapat mendukung pencapaian cita-cita besar bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dengan menyelaraskan visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yaitu Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 juga diarahkan untuk menghadapi tren dinamika global dan nasional yang mempengaruhi beberapa aspek pembangunan daerah seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dinamika tersebut terutama dipicu oleh megatren global seperti dinamika geopolitik dan geoekonomi, perubahan demografi, urbanisasi global, perubahan iklim, revolusi teknologi, dan beberapa tren dunia yang berdampak pada pembangunan di Kota Semarang. Hal ini menuntut respons mitigasi dan adaptasi yang cepat dengan segala potensi yang dimiliki. Respons terhadap dinamika yang serba cepat ini diperlukan percepatan pembangunan dengan pendekatan transformasi dalam setiap aspek pembangunan. Transformasi untuk merespons dinamika juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dengan menyeimbangkan faktor ketahanan sumber daya alam dan budaya agar tetap tangguh dalam menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dimungkinkan terjadi di masa yang akan datang.

RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 disusun secara simultan, terkoordinasi, selaras, dan berpedoman dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, serta sesuai dengan kewenangan dan

karakteristik Kota Semarang. Secara substansi, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa hal antara lain:

- 1) Penyelarasan visi, misi, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045;
- 2) Penyelarasan visi, misi, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama Provinsi Jawa Tengah dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
- 3) Keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJPD tahun 2005-2025 yang dinilai masih relevan di Kota Semarang;
- 4) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- 5) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- 6) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, isu-isu strategis, dan rekomendasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045
- 7) Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
- 8) Rencana Induk Perindustrian
- 9) Rencana Induk Pariwisata
- 10) Permasalahan dan isu strategis yang berkembang
- 11) Regulasi yang berlaku saat ini

Penyusunan RPJPD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi secara langsung aspirasi dan kebutuhan mereka. Proses penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan RPJPD meliputi pembentukan tim penyusun
- 2) Konsultasi publik rancangan awal RPJPD;
- 3) Fasilitasi rancangan awal RPJPD ke Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Fasilitasi rancangan awal RPJPD ke Gubernur;
- 5) Penyusunan rancangan RPJPD;
- 6) Musrenbang RPJPD;
- 7) Pembahasan Raperda RPJPD bersama DPRD;
- 8) Evaluasi raperda RPJPD kepada Kementerian Dalam Negeri;
- 9) Penetapan peraturan daerah RPJPD.

RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama dua puluh tahun ke depan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

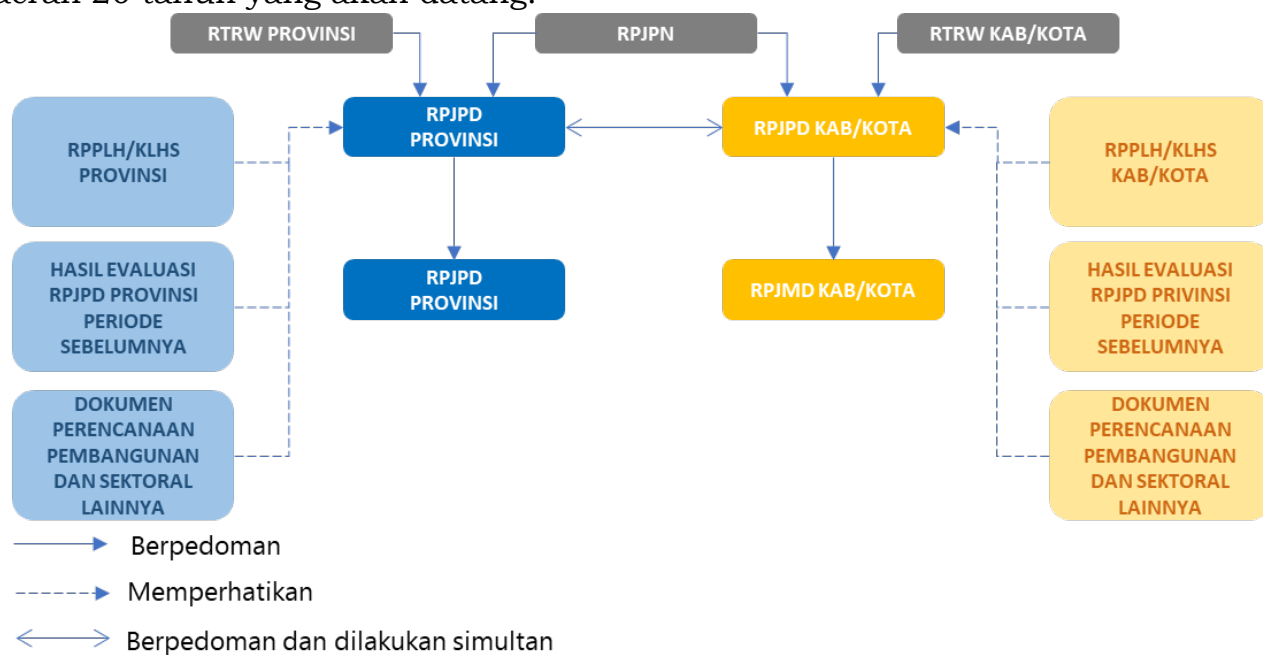
Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kota Semarang memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis, baik secara nasional maupun regional Provinsi Jawa Tengah. RPJPD Kota Semarang Tahun 2025–2045 akan dijadikan sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Semarang pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Sehingga antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara selaras dan relevan. Secara skematis, hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar 1.

Selain berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, dalam penyusunannya RPJPD Kota Semarang 2025-2045 memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045/RPPLH, hasil Evaluasi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya seperti Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pariwisata yang bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah 20 tahun yang akan datang.



Gambar 2.
Sistematika Penyusunan RPJPD Kota Semarang 2025-2045
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Penyusunan dokumen KLHS RPJPD dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Substansi KLHS RPJPD bertujuan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), daya dukung dan daya tampung lingkungan serta isu-isu strategis menjadi dasar, terintegrasi, dan termuat dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045. Sedangkan substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan SDA serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian pembangunan periode RPJPD 2005-2025, dan Rekomendasi terhadap penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Secara sistematika, hubungan penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 disajikan dalam gambar 2

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 adalah merumuskan cita-cita pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dan RTRW Kota Semarang.

1.4.2 Tujuan

- 1) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang akan dituangkan dalam RPJMD.
- 3) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA RPJPD

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum yang diuraikan dalam gambaran kondisi geografi dan demografi, kondisi kesejahteraan masyarakat, kondisi perekonomian daerah, kondisi kualitas sumber daya manusia, kondisi sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kebencanaan, kondisi tata kelola pemerintahan, kondisi proyeksi demografi, pengembangan wilayah, dan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum kondisi daerah dengan memperhatikan kondisi tantangan pembangunan serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat cita-cita pembangunan daerah Kota Semarang 2045 yang dituangkan dalam visi dan misi pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2025-2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat tentang empat tahapan arah kebijakan, sasaran pokok pembangunan daerah disertai indikator kinerja pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045.

BAB VI PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan harapan berkenaan dengan pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 serta menggarisbawahi tentang pentingnya RPJPD bagi pembangunan daerah Kota Semarang selama tahun 2025-2045.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

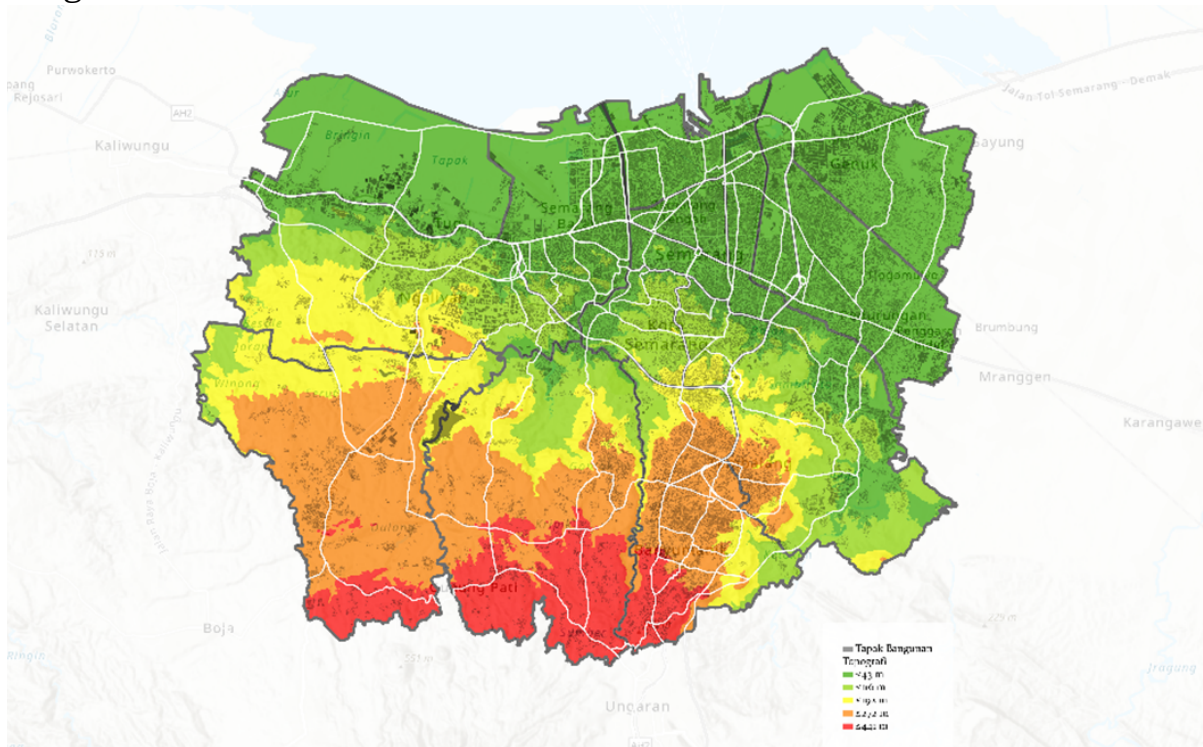
2.1.1 Kondisi Geografis

1) Wilayah Administrasi

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran sentral dan strategis di Indonesia, khususnya Regional Kedungsepur (Kendal – Demak – Ungaran – Semarang – Purwodadi). Kota Semarang memiliki luas sebesar 373,70 km² yang terbagi menjadi 16 kecamatan dengan 177 kelurahan. Pada tahun 2023 ini jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1,6 juta jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 4.534,07 jiwa/km².

Kota Semarang adalah kota ekonomi, budaya dan komersial yang penting di Indonesia. Kota Semarang merupakan wilayah metropolitan terbesar ke-5 di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pertumbuhan populasi yang dinamis dari 1 juta menjadi 1,7 juta jiwa pada tahun 20 tahun dan sekarang menjadi kota terbesar ke-5 di Indonesia. Perkembangan ini tidak hanya menghasilkan pembangunan ekonomi yang kuat dan peningkatan pendapatan, namun juga meningkatkan sejumlah masalah terkait perubahan iklim dan kesenjangan sosial. Sama seperti kota-kota lain di Indonesia, Kota Semarang juga mengalami keterbatasan infrastruktur perkotaan, khususnya di daerah yang rawan terhadap risiko seperti banjir. Ada banyak penyebab dan faktor yang mendasari serangkaian tantangan perkotaan dan iklim, seperti urbanisasi, alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan.

Kota Semarang terletak di pantai utara Pulau Jawa, di lokasi pusat yang strategis dan merupakan penghubung utama bagi jaringan transportasi domestik yaitu transportasi udara, air dan darat internasional. Dilayani oleh salah satu pelabuhan tersibuk dan terbesar di Asia, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menjadi pintu gerbang internasional ke Jawa Tengah untuk angkutan penumpang dan barang. Oleh karena itu, posisinya yang penting secara regional dan nasional seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kota.



Gambar 3.
Kondisi Topografi Kota Semarang
Sumber: Dinas Penataan Ruang, 2024

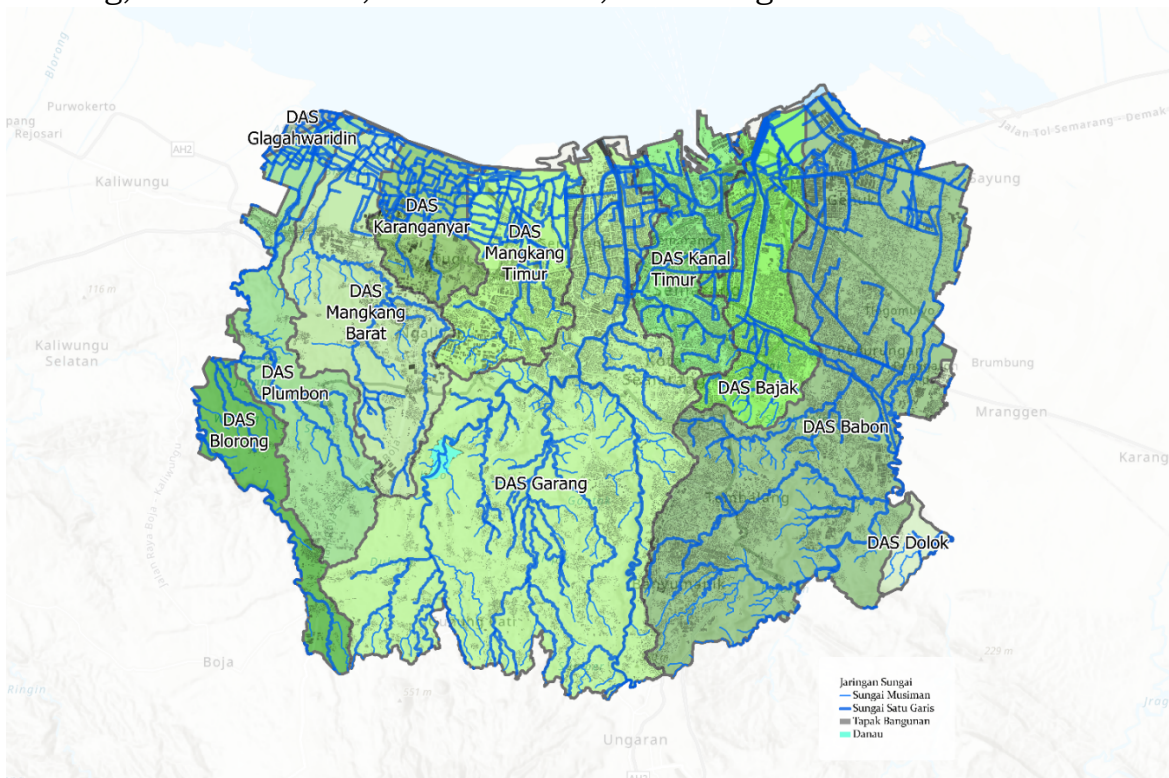
2) Topografi dan Morfologi

Secara topografis, Kota Semarang merupakan kota yang memiliki karakteristik fisik yang lengkap sehingga memiliki potensi daya tarik khusus bagi masyarakat juga tantangan pembangunan. Kota Semarang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi atau perbukitan. Bagian utara Kota Semarang merupakan pantai dan dataran rendah dengan kemiringan 0-2 % dan mempunyai ketinggian 0,75-3,5 mdpl. Bagian selatan Kota Semarang merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 2-40 % dan mempunyai ketinggian 90-359 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen dan Gunungpati.

Kota Semarang mempunyai ketinggian sekitar 0,75-348 mdpl. Ketinggian 0,75-90 mdpl berada di kawasan Pusat Kota Semarang (dataran rendah Semarang bagian utara) yang diwakili oleh titik tinggi di daerah pantai Pelabuhan Tanjung Emas, Simpang Lima dan Candi Baru. Ketinggian 90,5-348 mdpl terletak pada daerah pinggir Kota Semarang, yang diwakili oleh titik tinggi berlokasi di Jatingaleh, Gombel, Banyumanik, Tembalang, Mijen dan Gunungpati.

3) Hidrologi

Potensi air di Kota Semarang bersumber dari sungai-sungai yang mengalir di Kota Semarang, antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjir Kanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali KripiK, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata air di Gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegangan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali KripiK. Berdasarkan hasil pengukuran, Kali Garang, Kali Kreo, dan Kali KripiK secara berurutan mempunyai debit sebesar 53,0%, 34,7%, dan 12,3% dari debit total. Sungai-sungai tersebut dikelola dalam 11 DAS, yaitu DAS Tugu, DAS Babon, DAS Banjir Kanal Barat, DAS Banjir Kanal Timur, DAS Barat, DAS Bringin, DAS Blorong, DAS Plumbon, DAS Silandak, DAS Tengah dan DAS Timur.



Gambar 4.

Kondisi Hidrologi Kota Semarang

Sumber: Dinas Penataan Ruang, 2024

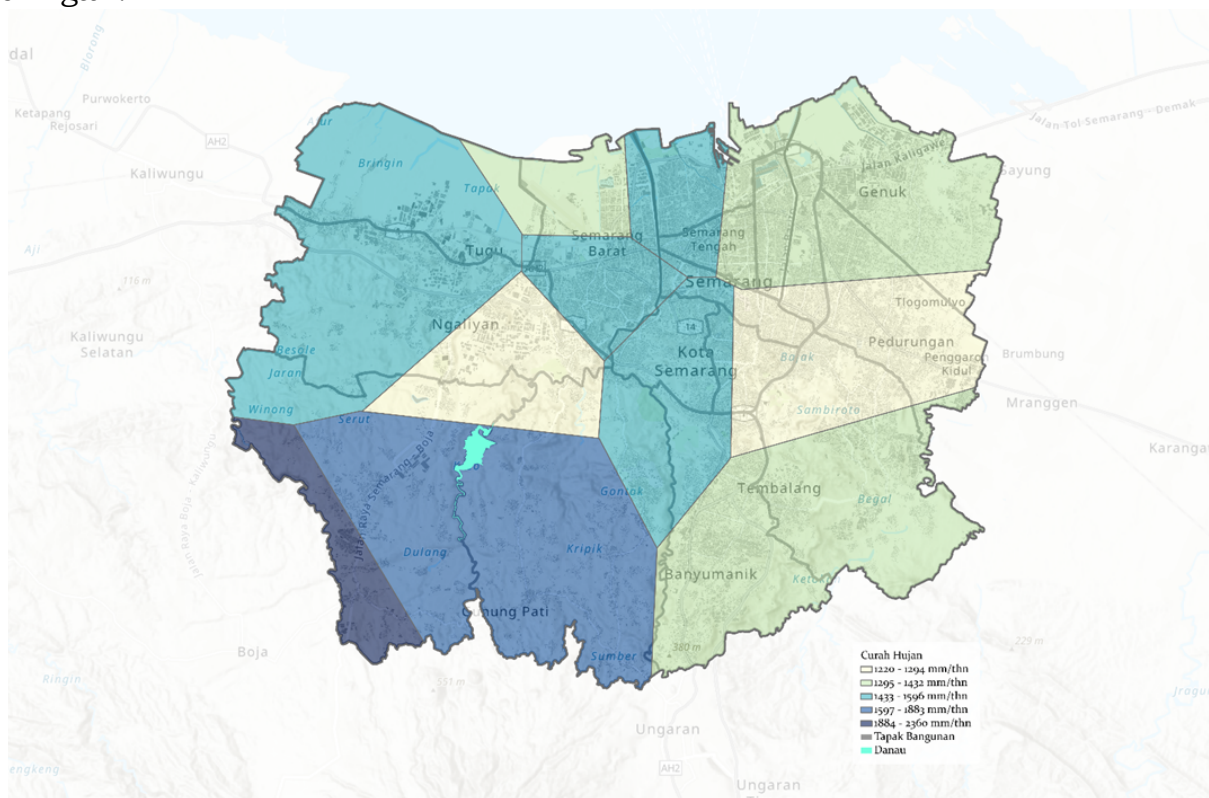
Kota Semarang juga memiliki polder, waduk, dan embung yang terdistribusi di beberapa daerah di Kota Semarang. Waduk Jatibarang memiliki volume paling besar dalam menyediakan air baku dan sekaligus berperan sebagai pengendali banjir di Kota Semarang. Saat ini, peran Waduk Jatibarang semakin meluas, selain sebagai penyedia air baku dan pengendali banjir, waduk ini juga dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata di Kota Semarang. Lokasinya yang dekat dengan objek wisata Goa Kreo,

juga menjadi salah satu pendukung pengembangan pariwisata. Selain Waduk Jatibarang, waduk dan embung lainnya juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pariwisata, seperti Waduk Diponegoro dan Embung Bukit Semarang Baru.

Selain itu, potensi sumber daya air di Kota Semarang juga ditunjang dengan ketersediaan cadangan air tanah. Cekungan Air Tanah (CAT) di Kota Semarang terdapat pada akuifer dangkal dan dalam. Wilayah bagian Selatan dan cenderung daerah yang tinggi seperti Tembalang, Ngaliyan dan Mijen merupakan kecamatan dengan cekungan air tanah paling luas dan potensial.

4) Klimatologi

Secara klimatologi, Kota Semarang mempunyai iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Jumlah curah hujan di Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 2.664 mm. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah utara barat laut menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober, angin bertiup dari selatan tenggara menciptakan musim kemarau karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini yaitu memiliki curah hujan yang lebih rendah, kelembaban lebih rendah, sehingga cuaca terasa lebih kering. Kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 70% sampai dengan 92%. Tekanan udara rata-rata bervariasi antara 1008,40 mb sampai dengan 1011,30 mb. Kecepatan angin rata-rata bervariasi antara 1,11 m/detik sampai dengan 1,89 m/detik. Dengan kondisi seperti ini, Kota Semarang perlu mewaspadaai ancaman banjir pada periode bulan November hingga Mei, sementara itu pada periode Juni hingga Oktober perlu intervensi untuk mengatasi ancaman kekeringan.



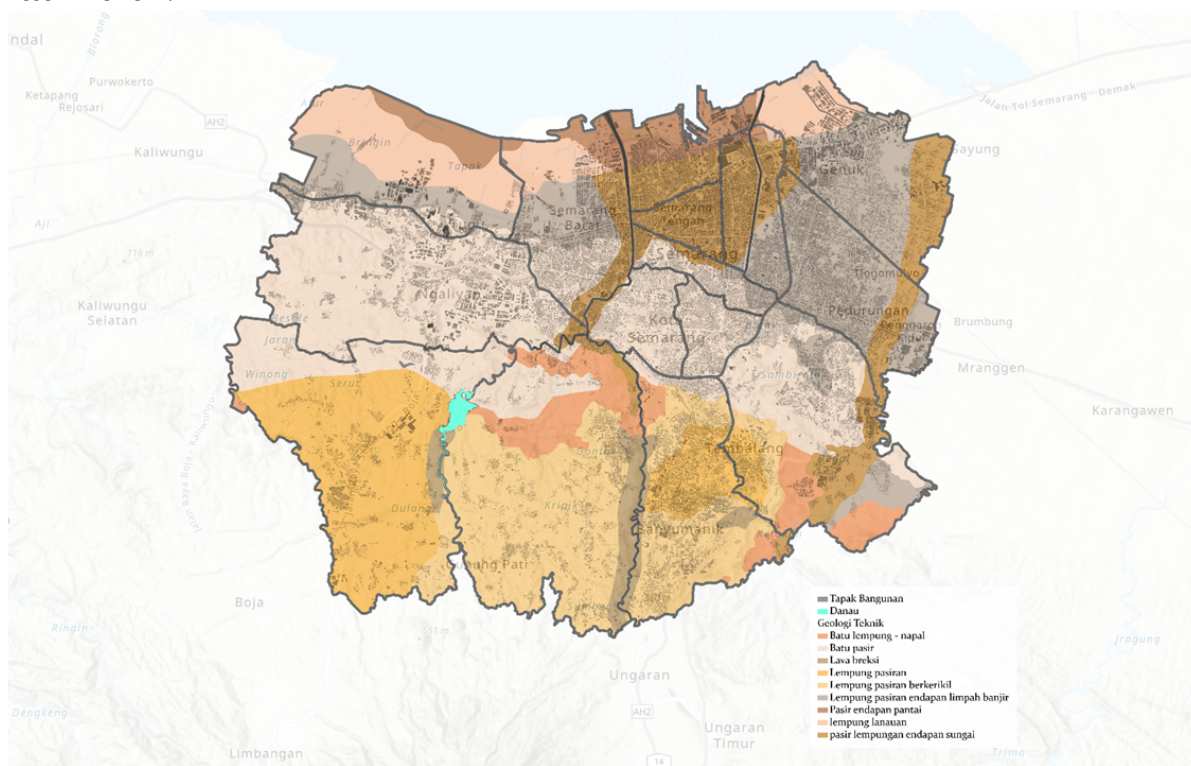
Gambar 5.
Kondisi Klimatologi Kota Semarang
Sumber: Dinas Penataan Ruang, 2024

5) Geologi dan Jenis Tanah

Struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu struktur *joint* (kekar), patahan (*fault*), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu, heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran sungai Kaligarang adalah merupakan patahan Kaligarang yang membujur arah utara sampai selatan di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel.

Patahan ini bermula dari Ondorante ke arah utara hingga Bendan Duwur. Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro, ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kaligarang serta beberapa mata air di Bendan Duwur.

Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, spesifiknya pada daerah perumahan Bukit Kencana Jaya dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan. Formasi geologi di Kota Semarang terdiri dari alluvium, andesit, gunung api Gajah Mungkur, gunung api Kaligesik, Formasi Damar, Formasi Kalibeng, Formasi Kaligetas, dan Formasi Kerek.



Gambar 6. Kondisi Geologi Kota Semarang

Sumber: Dinas Penataan Ruang, 2024

Sementara itu, jenis tanah yang ada di Kota Semarang memiliki tujuh jenis, yaitu aluvial, asosiasi aluvial kelabu, gerosol, grumosol, latosol coklat, latosol coklat kemerahan, dan mediteran coklat tua. Bagian selatan Kota Semarang seperti Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan didominasi oleh litologi dengan jenis latosol coklat, latosol coklat kemerahan, dan mediteran coklat tua yang kurang peka terhadap erosi. Untuk Kecamatan Ngaliyan, bagian atasnya memiliki litologi asosiasi aluvial kelabu atau merupakan tanah yang subur dan tidak peka akan erosi, begitu juga dengan Kecamatan Tembalang, bagian atasnya memiliki litologi aluvial dan gerosol yang bersifat peka akan erosi. Untuk jenis litologi di bagian utara Kota Semarang didominasi oleh litologi jenis aluvial, asosiasi aluvial kelabu dan sedikit jenis grumosol yang berada di Kecamatan Genuk, semua jenis tanah ini tergolong tidak peka terhadap erosi.

6) Indeks Ketahanan Pangan

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Semarang sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan, meskipun tidak begitu signifikan. Komponen kunci dari indeks ini untuk skala kota melibatkan aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, karena fungsi kota yang bukan sebagai produsen melainkan sebagai konsumen, sehingga mengandalkan pasokan pangan dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya yang merupakan daerah penghasil pangan

Selama periode tahun 2018 hingga 2023, Indeks Ketahanan Pangan Kota Semarang mengalami tren peningkatan. Dimulai dari 85,93 pada tahun 2018, terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan indeks mencapai 84,66. Namun, kota ini mampu pulih dan bahkan mencapai tingkat indeks tertinggi sepanjang periode pada tahun 2023 dengan angka 87,73. Indeks Ketahanan Pangan Kota Semarang telah

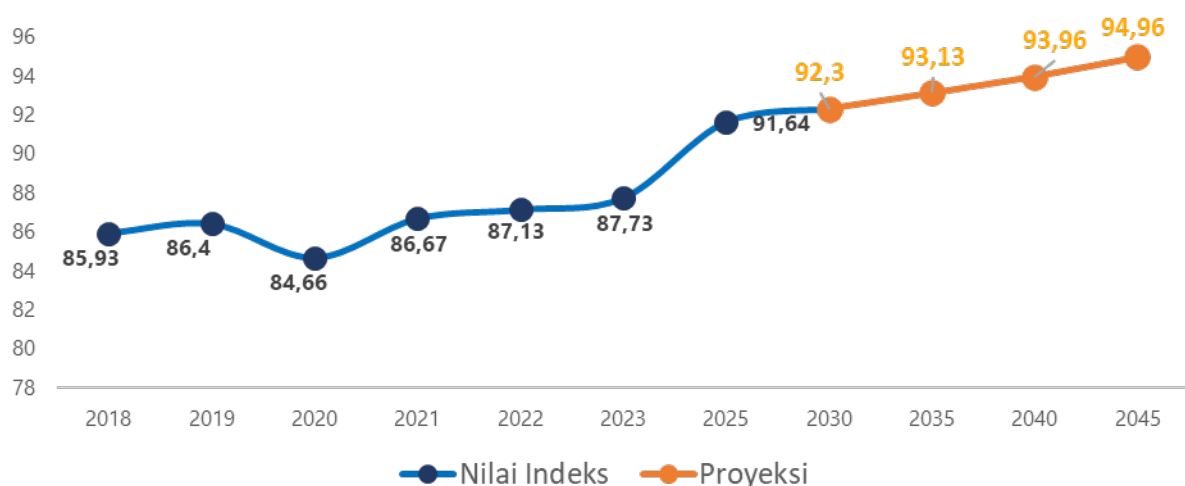
menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2023. Melihat tren ini, pemerintah Kota Semarang menargetkan untuk terus meningkatkan indeks ini hingga tahun 2045. Berdasarkan target capaian, indeks diharapkan akan mencapai 91,64 pada tahun 2025, 92,30 pada tahun 2030, 93,13 pada tahun 2035, 93,96 pada tahun 2040, dan akhirnya mencapai 94,96 pada tahun 2045.

Terdapat beberapa langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam menjaga ketahanan pangan. Salah satunya yaitu dengan melakukan kolaborasi berbagai penelitian mengenai bidang ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan tidur sebagai *urban farming*. Beberapa penelitian telah dilakukan seperti varietas benih padi untuk wilayah pesisir dan mina padi. Selain itu, dengan keterbatasan lahan yang ada di Kota Semarang, maka Pemerintah Kota juga mendorong lahan-lahan yang tidak terpakai seperti lahan bengkok milik pemerintah dapat digunakan sebagai *urban farming*. Upaya penanaman di lahan tidur ini selain mendorong ketahanan pangan juga merupakan upaya konservasi tanah. Dalam jangka panjang, upaya kolaborasi penelitian dan pemanfaatan lahan tidur untuk *urban farming* ini diharapkan dapat menciptakan model pertanian perkotaan yang berkelanjutan, yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Selain itu, optimalisasi sistem logistik daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi distribusi pangan juga menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk dapat mencakup seluruh penduduk Kota Semarang. Pada sisi pemanfaatan pangan, aksi terhadap penurunan *Food Loss and Food Waste (FLW)* juga didorong untuk menciptakan iklim transformasi sistem pangan baik dari hulu hingga hilir.

2018 - 2045

Grafik Indeks Ketahanan Pangan



Gambar 7.

Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Semarang tahun 2018-2045

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

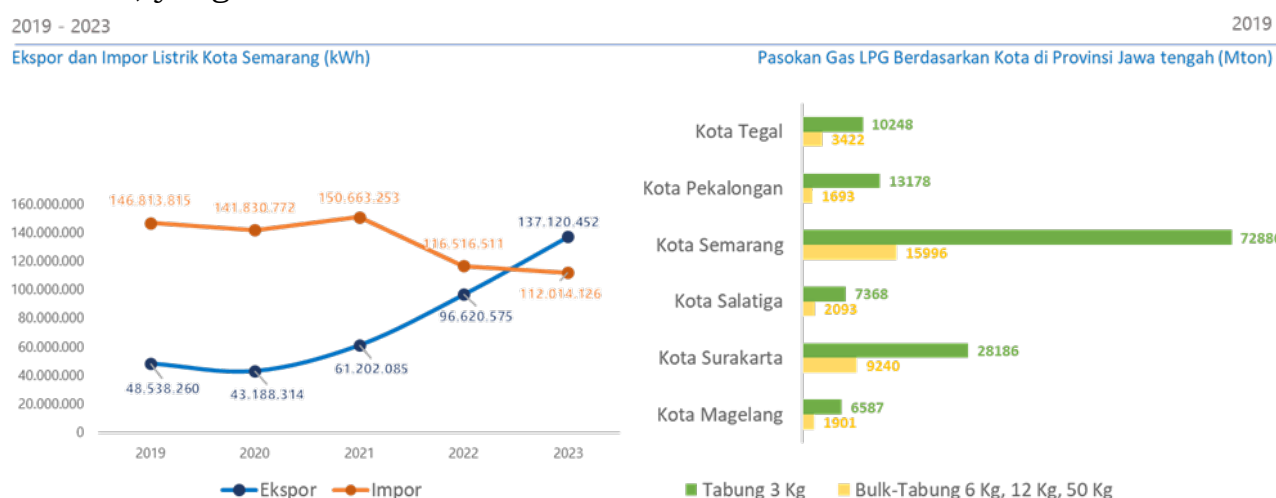
7) Indeks Ketahanan Energi

Sektor energi merupakan elemen vital dalam dinamika perkembangan kota. Energi tidak hanya mencakup energi fosil seperti minyak dan gas, tetapi juga energi baru terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, panas laut, ombak, serta turunannya seperti listrik dan bahan bakar yang diperlukan untuk berbagai kegiatan perkotaan.

Terkait energi listrik, ketersediaan listrik Kota Semarang selalu surplus, bahkan hampir mencapai 50% jika dibandingkan dengan konsumsi per tahunnya. Sektor rumah tangga selalu menjadi sektor yang paling banyak menggunakan listrik, diikuti dengan sektor industri dan sosial bisnis. Hal ini menandakan bahwa Kota Semarang merupakan kota yang memiliki banyak hunian yang tersebar, dan aktivitas hunian tersebut juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi Kota Semarang baik skala mikro maupun makro. Sebaran pelanggan listrik Kota Semarang sejak tahun 2016

telah meningkat sebesar 40% hingga tahun 2023, walaupun kenaikan pasokannya tidak signifikan (hanya 10%). Di sisi lain, sejak tahun 2021 impor listrik di Kota Semarang terus meningkat, yang diakibatkan oleh naiknya permintaan listrik baik di Kota Semarang dan sekitarnya. Ketahanan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk transportasi dan Gas Bumi untuk aktivitas rumah tangga dan industri juga meningkat dari tahun ke tahun, walaupun harga gas non-subsidi terus fluktuatif, sama halnya dengan harga BBM yang mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.

Tentu untuk saat ini, kondisi energi di Kota Semarang cukup untuk menghidupi aktivitas Kota Semarang, namun belum ada back-up dari sistem kelistrikan skala kota yang dapat digunakan apabila terjadi kondisi darurat. Hal ini adalah *concern* dari pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan energi perkotaan, yang dimulai dari ketahanan listrik kota.



Gambar 8.
Pasokan Energi dan Listrik di Kota Semarang
Sumber: KLHS RPJPD Kota Semarang, 2023

Transisi energi dimulai dari semua sisi, baik dari penggunaan energi baru terbarukan dan penggunaan energi yang lebih bersih. Sebagai contoh, pembangkit listrik yang ada di Kota Semarang merupakan pembangkit listrik bertenaga gas, yang dimana bahan tersebut dinilai lebih bersih dari pembangkit listrik batubara. Ada pula pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang berada di Waduk Jatibarang sebesar 1,5 MW, dan telah banyak pembangkit listrik tenaga surya/solar panel untuk aktivitas perkantoran dan perumahan. Selain dari listrik, ada pula transisi energi dari gas LPG menuju gas CNG yang disalurkan melalui Jaringan Gas Rumah Tangga. Hingga tahun 2022, telah terdapat 13.854 sambungan rumah tangga yang terlayani, dan akan terus ditingkatkan dalam rangka transisi dan ketahanan energi perkotaan.

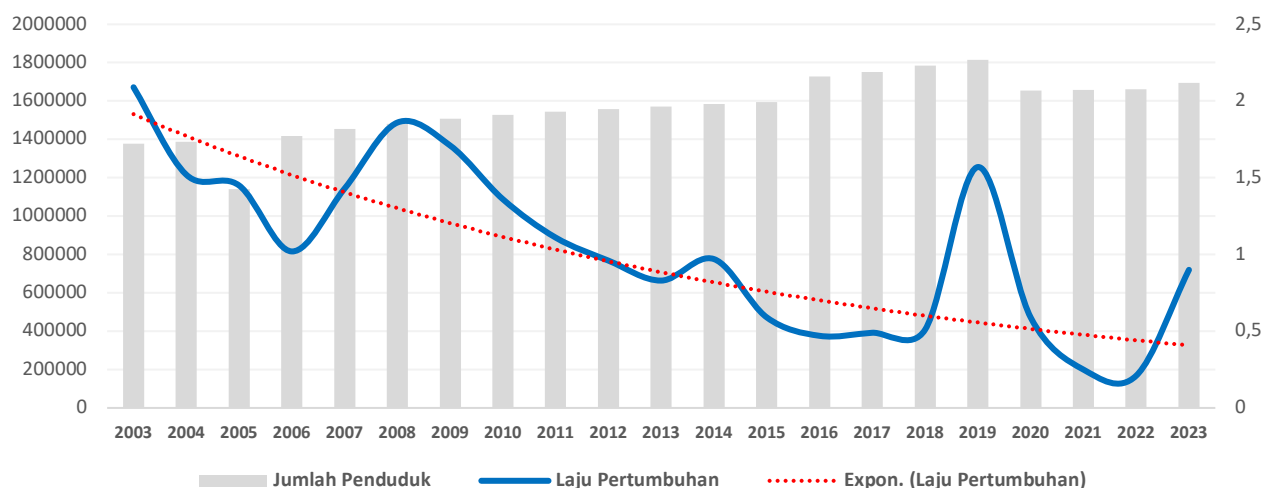
2.1.2 Demografi

1) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan demografi Kota Semarang selama 20 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan meningkat. Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 yang tercatat pada BPS hamper mencapai 1,7 juta jiwa, sementara itu pada tahun 2000 tercatat mencapai 1,3 juta jiwa. Artinya terjadi penambahan penduduk sekitar 300 ribu jiwa selama 20 tahun terakhir akibat migrasi maupun kelahiran.

Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang menunjukkan fluktuatif walaupun kecenderungannya menurun selama 20 tahun terakhir. Namun, pada tahun 2023 laju pertumbuhan Kota Semarang cenderung kembali meningkat yaitu sebesar 0,90 dari tahun sebelumnya hanya sebesar 0,21. Terdapat beberapa periode yang menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2008, 2014 dan 2019. Mengikuti pola peningkatan yang terjadi pada tahun-tahun tersebut, prediksi demografi di masa depan menunjukkan bahwa Kota Semarang kemungkinan akan mengalami perubahan signifikan dalam struktur penduduknya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tren ini antara lain adalah urbanisasi, kebijakan ekonomi, dan perubahan sosial. Di masa depan, pertumbuhan penduduk yang lebih stabil atau bahkan meningkat dapat membawa tantangan dan peluang baru bagi Kota Semarang.

Tantangan yang mungkin dihadapi termasuk pengelolaan kepadatan penduduk, penyediaan layanan publik yang memadai, serta pengembangan kebijakan perencanaan kota yang berkelanjutan.

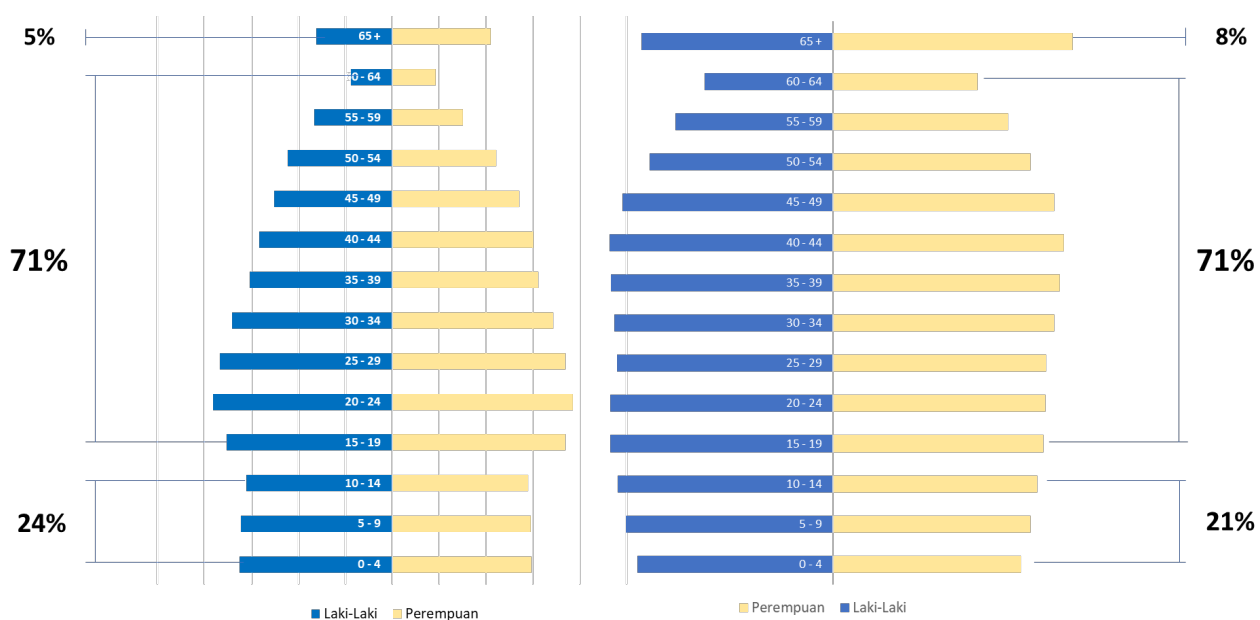


Gambar 9.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Selama 20 Tahun Terakhir
Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

2) Komposisi Penduduk

Kota Semarang memiliki proporsi usia produktif yang cenderung dominan selama 10 tahun terakhir dengan rasio jenis kelamin yang cukup seimbang. Kota Semarang juga diprediksi turut mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045.

Struktur Penduduk 2012 dan 2023



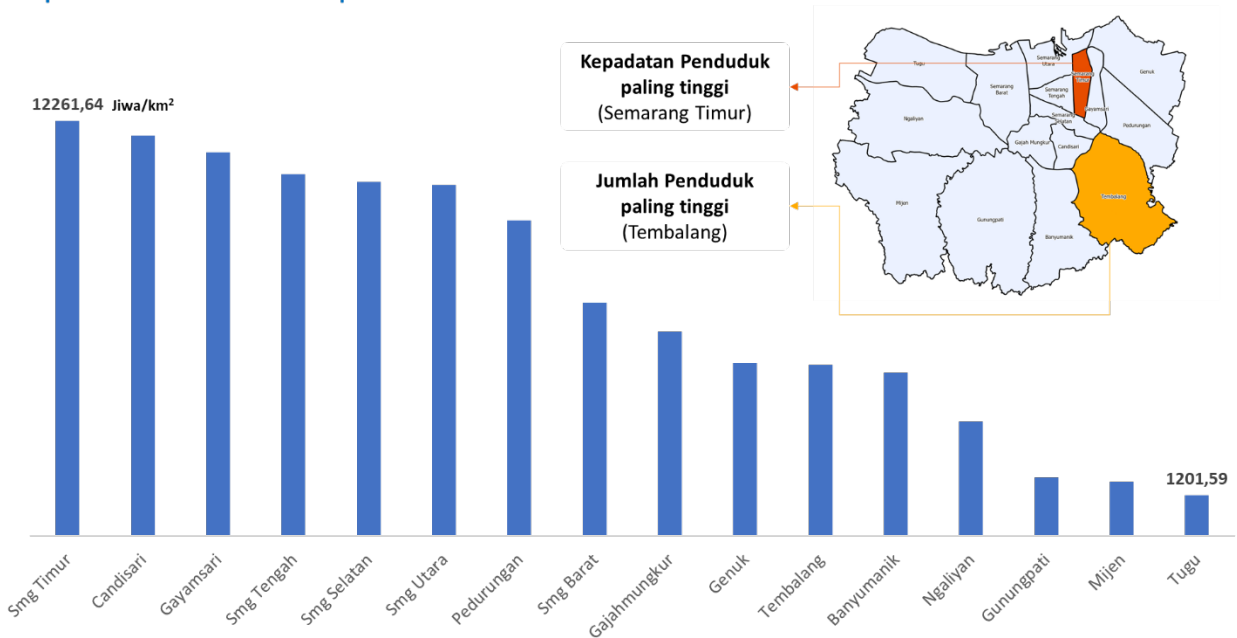
Gambar 10.
Struktur Penduduk 2012 dan 2022
Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Namun, kondisi kependudukan Kota Semarang di masa depan perlu diwaspadai melihat penduduk usia tua semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dari perubahan bentuk piramida penduduk yang semakin dominan pada rentang 35 – 49 tahun. Rasio ketergantungan juga menunjukkan hal yang serupa, bahwa kecenderungannya semakin meningkat. Melihat kondisi tersebut, maka kebutuhan lapangan pekerjaan dan pembangunan yang ramah lansia perlu menjadi prioritas di masa depan.

3) Kepadatan Penduduk

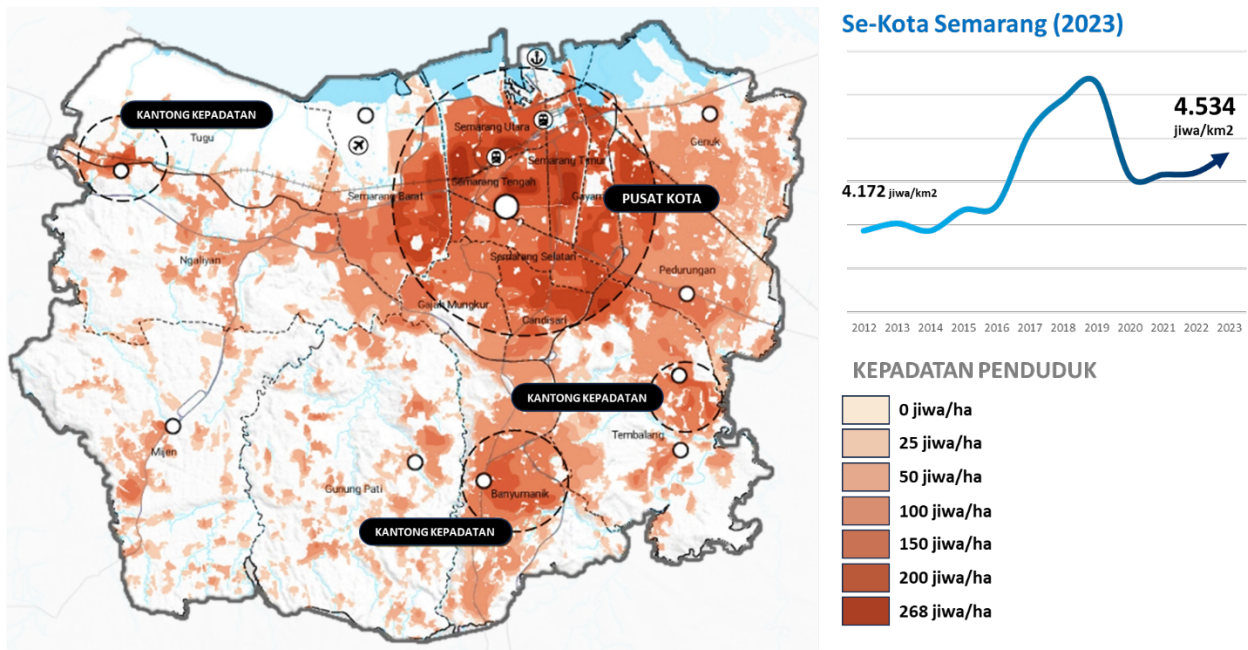
Kepadatan penduduk Kota Semarang terus meningkat setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir. Diketahui, kepadatan penduduk Kota Semarang tahun 2023 mencapai 4.534,07 jiwa/km². Pola distribusi kepadatannya terpusat di sekitar pusat kota, namun kantong-kepadatan cenderung muncul di wilayah pinggiran Kota Semarang, seperti di Banyumanik, Tembalang dan Tugu. Hal ini mengindikasikan Kota Semarang mulai mengalami pertumbuhan yang tidak teratur ke wilayah pinggiran yang disebut *urban sprawl*.

Kepadatan Penduduk per Kecamatan tahun 2023



Gambar 11.
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023
Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

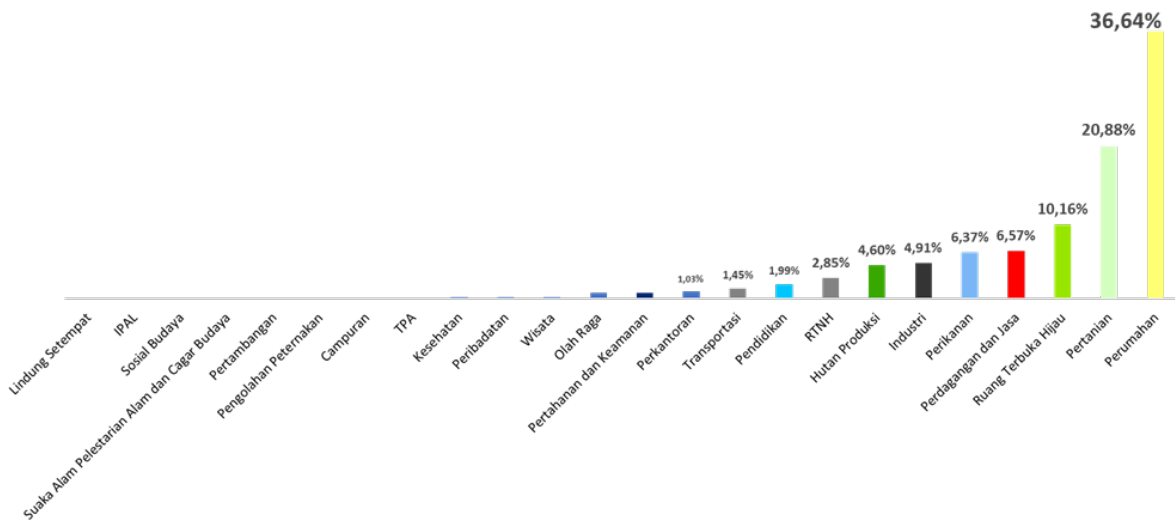
Distribusi Kepadatan Penduduk



Gambar 12.
Distribusi Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2023
Sumber: UN-Habitat, 2023

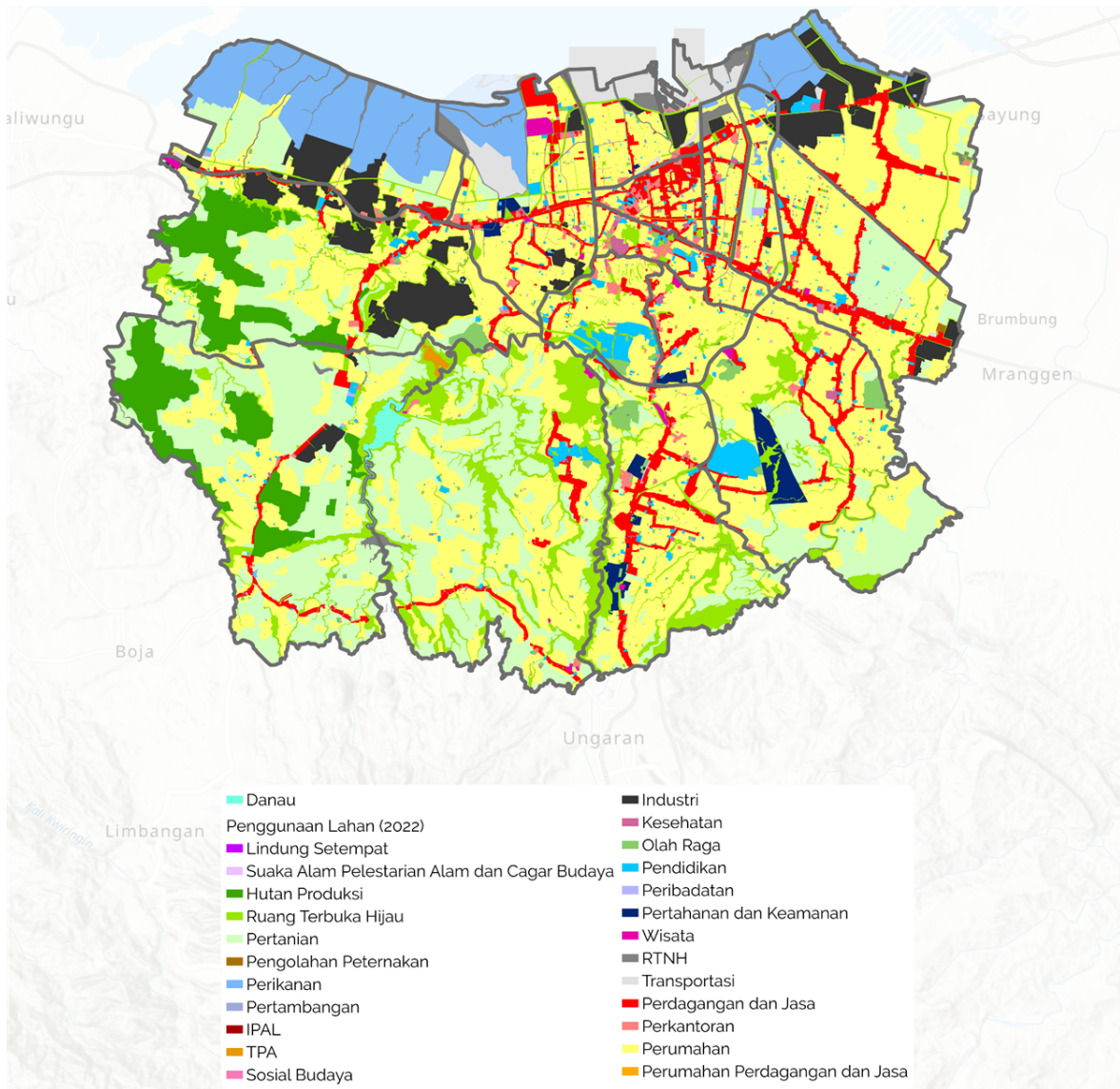
2.1.3 Penggunaan Lahan

Kota Semarang sebagai kota metropolitan didominasi oleh penggunaan lahan berupa perumahan sebesar 36,64% yang tersebar di seluruh wilayah pada tahun 2022. Namun, Kota Semarang masih memiliki kawasan pertanian di wilayah pinggirannya sebesar 20,88% yang tersebar di Kecamatan Tugu, Genuk, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati dan Tembalang. Selain itu, persentase ruang terbuka hijau Kota Semarang juga masih rendah hanya sebesar 10,16% dan paling banyak tersebar di Kecamatan Gunungpati. Sementara itu, wilayah pusat kotanya didominasi oleh perdagangan jasa dan perumahan. Sebagai kota metropolitan, penggunaan lahan campuran di Kota Semarang masih tergolong rendah yaitu kurang dari 1%. Padahal, penggunaan lahan campuran (*mixed use development*) merupakan salah satu aspek pendukung kota kompak dalam pembangunan kota berkelanjutan yang berorientasi pada suatu pengembangan kawasan dengan berbagai fungsi seperti hunian, komersial, perkantoran, dan sarana pendukung lainnya yang dikembangkan dan dibangun dalam satu kawasan.



Gambar 13.
Persentasi Penggunaan Lahan Kota Semarang tahun 2022
Sumber: Dinas Penataan Ruang, 2022

Perkembangan lahan terbangun Kota Semarang selama 20 tahun terakhir menggambarkan pola yang cenderung tidak terencana. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan lahan terbangun yang mulai cenderung ke wilayah pinggiran seperti ditunjukkan pada Gambar 14. Kondisi ini juga dibuktikan dari jumlah penduduk yang semakin tinggi di wilayah pinggiran, seperti Kecamatan Tembalang. Data juga menunjukkan selama 2016 hingga 2021, terjadi penambahan luas permukiman sebesar 90%. Hal ini berimplikasi pada lahan lainnya menunjukkan penurunan yang signifikan lebih dari 5%, seperti perkebunan, sawah, semak belukar, tambak, badan air dan lahan terbuka. Penggunaan lahan jenis perkebunan merupakan kawasan yang paling banyak mengalami penurunan, yaitu sebesar 42,37% selama 2016 hingga 2021. Perkembangan lahan terbangun dengan pola tidak terencana (*urban sprawl*) seperti ini tentunya berimplikasi pada pembangunan di masa depan. Jangkauan pelayanan kota yang semakin sulit, keterbatasan ruang terbuka hijau, dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru merupakan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perkembangan *urban sprawl*. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kota perlu mengarah pada pembangunan kota kompak dan berkelanjutan, khususnya pada pembangunan campuran, terintegrasi dengan layanan transportasi dan hunian vertikal serta sarana prasarana yang memadai.



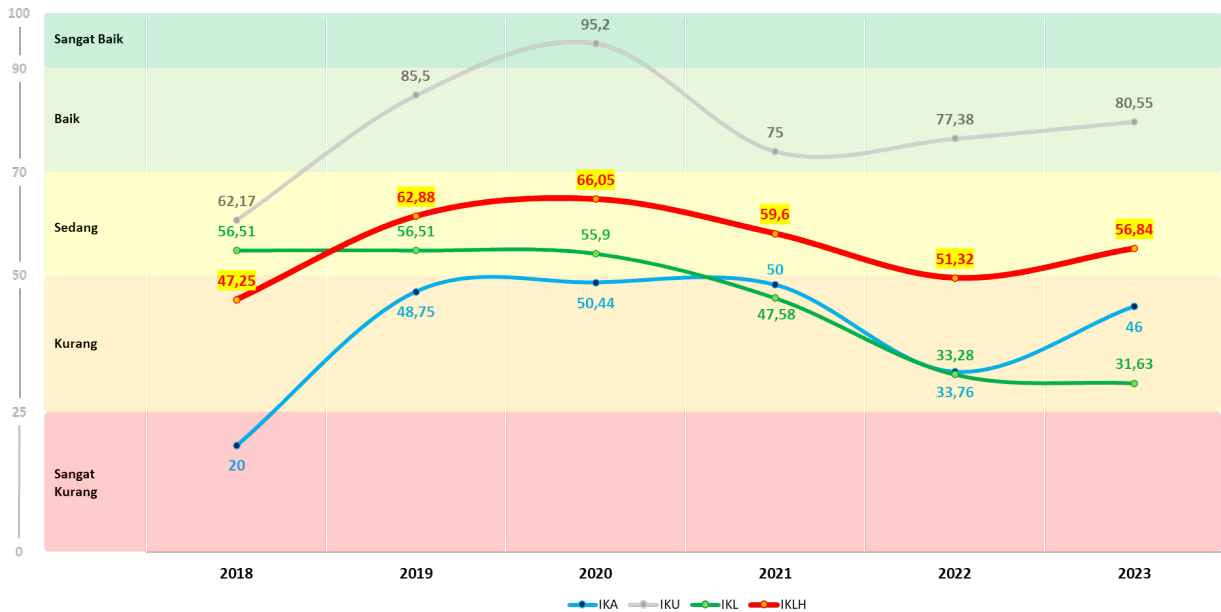
Gambar 14.
Peta Penggunaan Lahan Kota Semarang tahun 2022
Sumber: Dinas Penataan Ruang, 2022

2.1.4 Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di suatu daerah dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas indikator berupa indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara ambians (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKL). IKLH disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dihitung dengan bobot masing-masing yaitu 37,6% indeks kualitas air, 40,5% indeks kualitas udara, dan 21,9% indeks kualitas lahan. Namun yang perlu diketahui, IKLH Tahun 2023 terdapat angka konversi berdasarkan pada S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024.

Gambaran kondisi lingkungan hidup Kota Semarang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 yaitu sebesar 56,84 atau tergolong dalam kategori sedang. Berdasarkan indeks penyusunnya, diketahui bahwa IKA dan IKL merupakan aspek yang tergolong rendah atau kurang. Kualitas air sungai di Kota Semarang, pada musim kemarau, dari 56 titik pemantauan kualitas air, 9 titik dalam kondisi cemar ringan, 22 titik dalam kondisi cemar sedang, dan 25 titik dalam kondisi cemar berat. Dengan semakin meningkatnya intensitas kegiatan di Kota Semarang, dikhawatirkan akan semakin banyak bahan pencemar dan limbah yang masuk ke saluran drainase dan berakhir di sungai. Sementara IKL mengukur persentase tutupan lahan hutan di suatu daerah. Tutupan hutan Kota Semarang yang tergolong rendah menjadi salah satu penyebab IKL rendah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Semarang



Gambar 15.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2016 – 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Sementara itu, IKU di Kota Semarang tergolong baik walaupun mengalami penurunan di tahun 2020. Indeks kualitas udara di Kota Semarang dihitung berdasarkan kualitas udara ambians di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas yang diwakili oleh 2 (dua) parameter, yaitu parameter SO_2 dan NO_2 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyumbang tertinggi unsur pencemaran udara di Kota Semarang berada pada kawasan transportasi sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sepanjang jalur jalan perlu diperhatikan untuk menurunkan dampak pencemaran udara pada kawasan transportasi.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2023, nilai IKL cenderung mengalami penurunan setiap tahun, sementara nilai IKU berfluktuasi namun pada tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan ke arah positif. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa komponen yang diperkirakan belum mampu mengangkat nilai IKLH adalah komponen air dan lahan. Oleh sebab itu perlu adanya upaya-upaya peningkatan nilai kualitas air dan lahan untuk meningkatkan nilai kualitas lingkungan hidup di Kota Semarang.

2.1.5 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari Business as usual pada tahun 2030. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyusun inventarisasi GRK, termasuk Kota Semarang.

Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kota Semarang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2022 mengalami tren turun sebesar 0,41% atau 21,98 Gg CO_2eq . Tren penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan di sektor pengadaan dan penggunaan energi sebesar 5,84%. Proporsi sumber emisi terbesar dari sektor pengadaan dan penggunaan energi mencapai 69,03% atau setara dengan 3.646,39 Gg CO_2eq , dengan kategori kunci yaitu transportasi (31,03%), industri energi (20,59%), limbah cair industri (19,05%), industri manufaktur (10,37%), pembuangan sampah padat (5,39%), residential (5,16%), pelumas (3,26%) dan limbah cair domestik (3,14%).

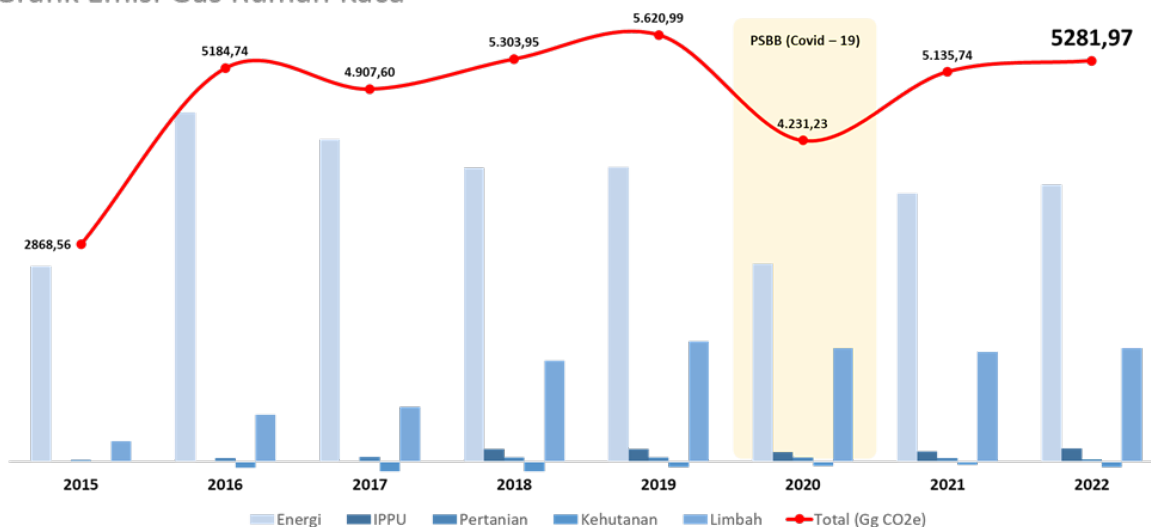
Faktor lainnya juga disebabkan oleh sektor kehutanan yang terjadi penurunan pada kegiatan pertanian dan pemakaian pupuk sebesar 39,98%. Sedangkan untuk sektor IPPU dan Pengelolaan Limbah terjadi tren kenaikan sebesar

7,15% atau setara dengan 11,82 Gg CO₂eq untuk sektor IPPU dan 165,88 Gg CO₂eq (12,45%) untuk sektor pengelolaan limbah. Dalam kurun waktu 2018-2022, emisi tertinggi dihasilkan pada tahun 2019 sebesar 5.620,98 Gg CO₂eq, sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat maka terjadi penurunan emisi menjadi 12.062,92 Gg CO₂eq di tahun 2020. Selain adanya pembatasan kegiatan masyarakat penurunan tersebut terjadi juga permasalahan kebocoran sumur gas pada PLTGU Semarang sehingga suplai produksi listrik menjadi turun. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kebijakan perubahan penggunaan BBM dengan tidak menggunakan bahan bakar premium dan beralih ke pertalite dan pertamax.

Kontribusi Emisi GRK tahun 2023
304,48 TonCO₂e

Kontribusi Sektor Terbesar ke GRK
Sektor Energi (69%)

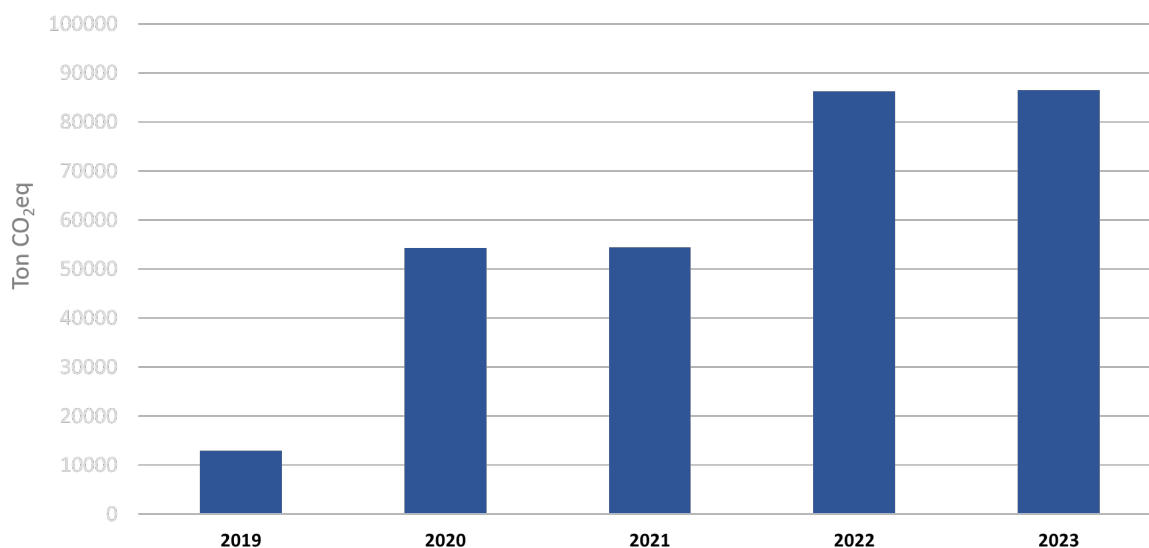
Grafik Emisi Gas Rumah Kaca



Gambar 16.
 Grafik Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2015 – 2022
 Sumber: Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, 2022

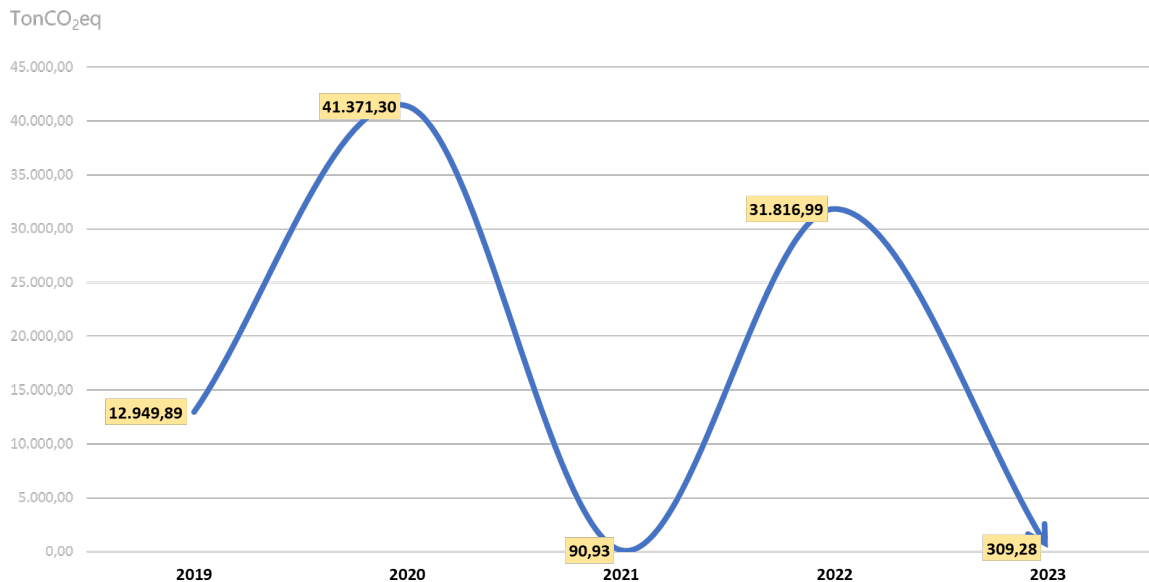
Capaian Pembangunan Rendah Karbon

Total pencapaian penurunan emisi dan intensitas emisi Kota Semarang



Gambar 17.
 Potensi Penurunan Emisi GRK Kota Semarang secara Kumulatif
 Sumber: AKSARA, 2024

Penurunan Emisi GRK Tahunan

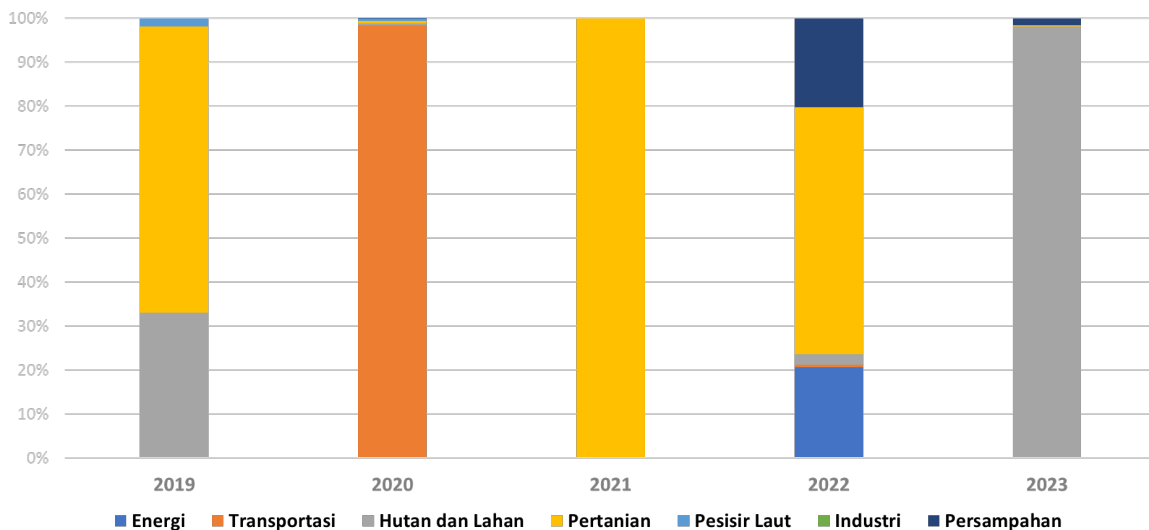


Gambar 18.
Penurunan Emisi GRK Kota Semarang secara Tahunan
Sumber: AKSARA,2024

Berdasarkan AKSARA (Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional) oleh Bappenas, diketahui bahwa capaian Kota Semarang dalam penurunan emisi terus meningkat sampai tahun 2023. Pada tahun 2023, potensi penurunan emisi GRK Kota Semarang mencapai 86.538,4 TonCO₂eq atau meningkat sebesar 73.589 TonCO₂eq selama lima (5) tahun terakhir secara kumulatif. Sementara itu, penurunan emisi per tahunnya dikontribusi oleh sektor yang berbeda-beda. Tahun 2023, sektor hutan dan lahan merupakan kontributor terbesar yaitu mencapai 304,48 TonCO₂eq sedangkan penurunan emisi GRK paling besar yaitu terjadi pada tahun 2020 sebesar 41.370,30 TonCO₂eq.

Kontribusi Penurunan Emisi berdasarkan Sektor

Proporsi penurunan emisi bersih berdasarkan pelaporan Rencana Aksi Daerah dari semua sektor pembangunan utama



Gambar 19.
Kontribusi Penurunan Emisi GRK berdasarkan Sektor
Sumber: AKSARA,2024

Kemajuan ini menunjukkan bahwa Kota Semarang telah mengadopsi berbagai inisiatif dan kebijakan yang efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sektor hutan dan lahan memainkan peran penting dengan melibatkan strategi seperti penghijauan kota, rehabilitasi lahan kritis, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, upaya pengurangan emisi juga melibatkan sektor energi

melalui penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi di gedung-gedung publik dan swasta.

2.1.6 Kebencanaan dan Ancaman Perubahan Iklim

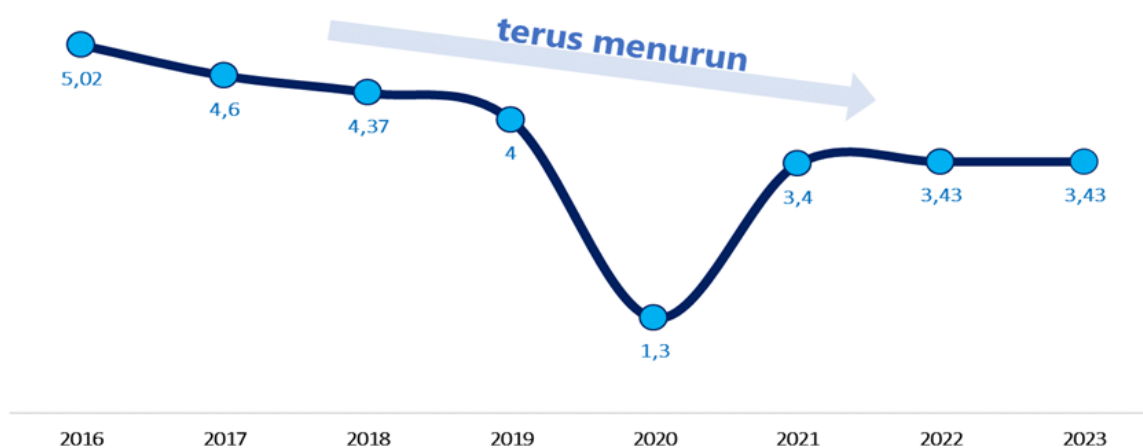
1) Bencana Banjir dan Rob

Kota Semarang yang memiliki kondisi geografis yang beragam dan berlokasi di wilayah pesisir turut berimplikasi pada ancaman kebencanaan dan perubahan iklim yang menghambat pembangunan kota. Banjir rob merupakan salah satu dampak perubahan iklim yang paling dirasakan oleh masyarakat di pesisir. Selain itu, wilayah permukiman di pesisir juga diperparah dengan penurunan muka tanah yang selalu membebani ekonomi masyarakat. Di samping itu, Kota Semarang juga menghadapi risiko tinggi terkait dengan peningkatan intensitas curah hujan yang dapat menyebabkan banjir cepat di berbagai daerah kota.

Bencana banjir di Kota Semarang terbagi menjadi dua yaitu banjir yang terjadi sebab adanya peningkatan curah hujan dan banjir yang berasal rob air laut (banjir laut pasang). Peningkatan *surface run off* yang menyebabkan banjir terjadi sebab adanya pertumbuhan kawasan terbangun terutama pada kawasan dataran tinggi sehingga air hujan tidak dapat diserap oleh tanah dan menimbulkan banjir kiriman pada kawasan dataran rendah. Banjir kiriman juga mengakibatkan terjadinya pengikisan pada lereng sungai sehingga meningkatkan laju sedimentasi. Adapun banjir rob umumnya terjadi sebab adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Banjir rob dapat terjadi apabila saat terjadi air pasang, permukaan daratan lebih rendah daripada permukaan air laut.

Beberapa penyebab banjir yang terjadi di Kota Semarang berdasarkan hasil inventarisasi penyebab banjir dari BPBD Kota Semarang meliputi curah hujan tinggi, meluapnya sungai, tanggul jebol, sampah yang menumpuk di saluran air, gorong-gorong tidak berfungsi optimal untuk menyalurkan air sebab terdapat sampah, dan saluran drainase tidak mampu menampung air hujan.

Mayoritas kawasan berkepadatan tinggi di Kota Semarang terdampak oleh banjir, seperti Kecamatan Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Barat dan Gayamsari. Secara total, sebanyak 23% penduduk Kota Semarang terdampak banjir. Penggunaan lahan di kawasan ini juga biasanya paling beragam, dengan aktivitas industri dan komersial yang besar. Oleh karena itu, pusat perekonomian utama kota berisiko terkena banjir, yang berarti banyak kelompok masyarakat dan mata pencaharian mereka yang terkena dampaknya. Selain kawasan pusat kota dan pesisir, terdapat kelompok besar penduduk yang tinggal di Genuk di sebelah timur kota serta kawasan berkepadatan rendah yang juga terdampak banjir, seperti Tembalang dan sekitar Mangkang.

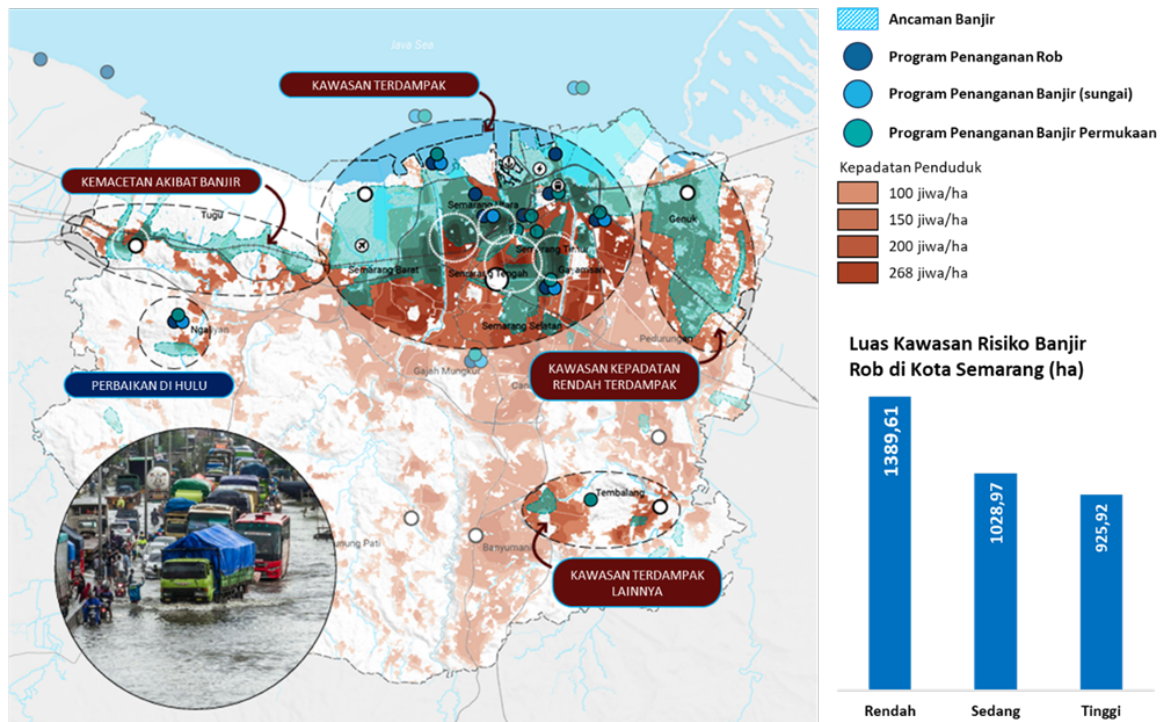


Gambar 20.

Capaian Persentase Kawasan Banjir Dan Rob Kota Semarang

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Risiko Bencana Banjir dan Rob Kota Semarang

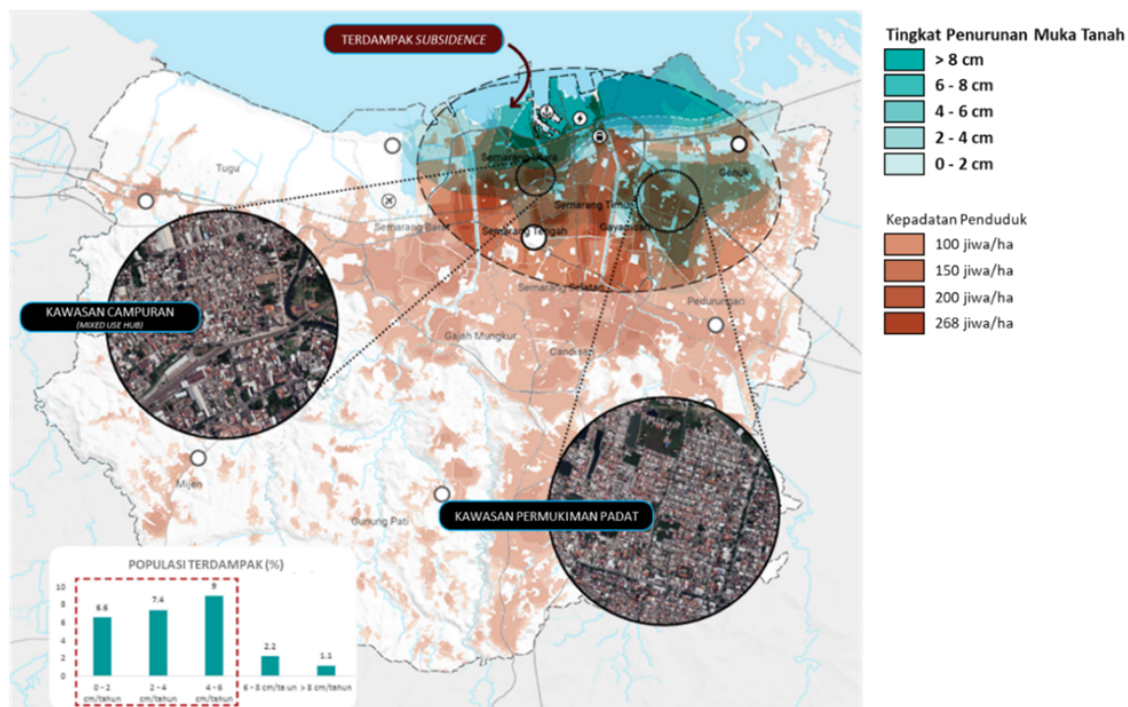


Gambar 21.

Risiko Bencana Banjir dan Rob Kota Semarang

Sumber: UN-Habitat, 2023

Risiko Penurunan Muka Tanah Kota Semarang



Gambar 22.

Tingkat Risiko Penurunan Muka Tanah di Kota Semarang

Sumber: UN-Habitat, 2023

2) Penurunan Muka Air Tanah (*Land Subsidence*)

Kota Semarang juga dihadapkan pada penurunan muka tanah yang memperparah risiko banjir dan juga kerusakan bangunan sehingga meningkatkan kerentanan kota. Penurunan muka tanah juga berdampak pada siklus air sehingga mempengaruhi kebutuhan pelayanan air masyarakat. Pemenuhan kebutuhan air melalui pengambilan air tanah yang dilakukan oleh masyarakat dan industri yang menyebabkan semakin tipisnya akuifer. Kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan muka tanah dan kejadian tanah longsor di dataran tinggi. Dengan demikian masyarakat semakin rentan terhadap risiko banjir dan kelangkaan air.

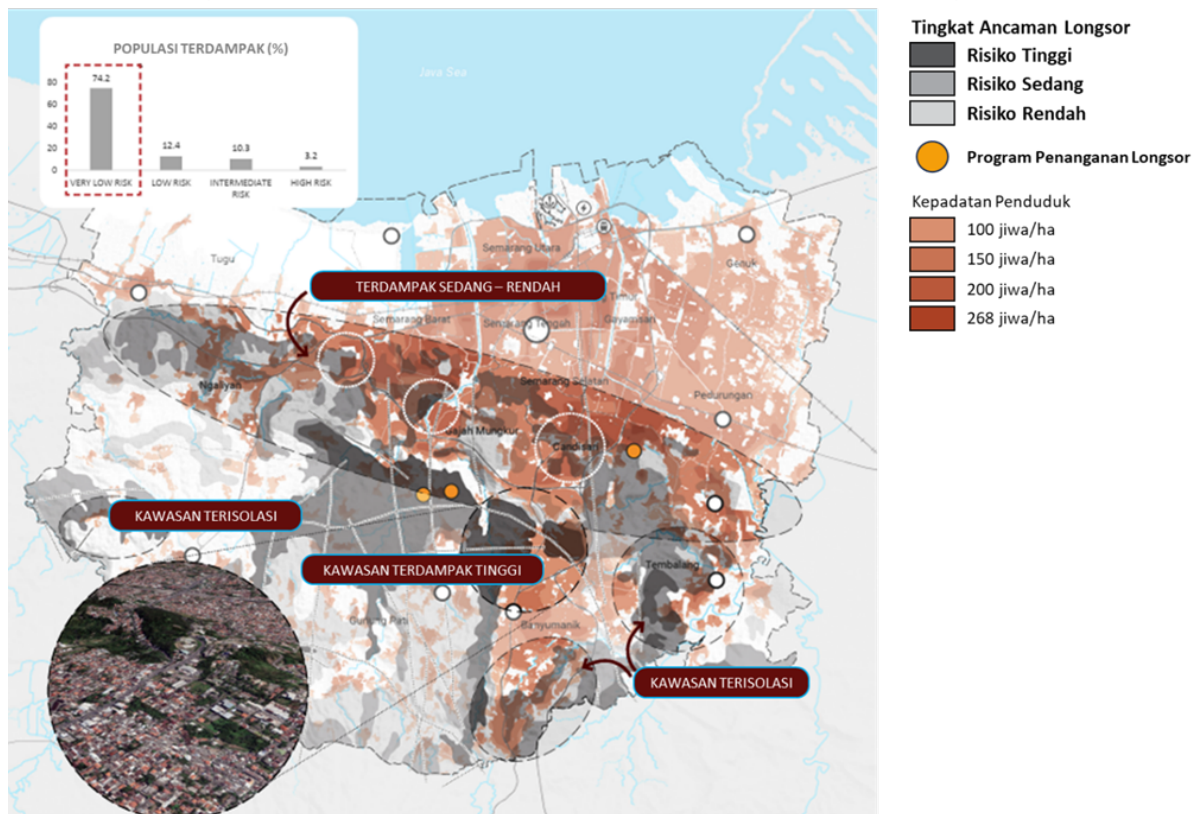
Penurunan tanah di Kota Semarang terjadi di beberapa kecamatan dengan tingkat risiko amblesan yang berbeda-beda. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Gayamsari, Genuk, Semarang Timur dan Semarang Utara. Luasan risiko amblesan (8-9 cm/tahun) terluas 3.706,98 ha disusul Kecamatan Genuk dengan luas 1.009,59 Ha. Lokasi yang mempunyai amblesan parah berada di wilayah pesisir utara, sementara terdapat 4 (empat) kecamatan yang tidak mengalami amblesan yaitu Kecamatan Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, dan Banyumanik.

Berdasarkan studi terbaru tentang penurunan muka tanah di Kota Semarang dalam program *Water Management* oleh Kerjasama Witteveen+Bos dengan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2020, laju penurunan muka tanah di Kota Semarang selama periode April 2016 hingga Oktober 2019 sebesar 0-2 cm/tahun di sebelah barat daya hingga mencapai 13 cm/tahun di area timur laut Semarang. Terdapat beberapa penyebab penurunan muka tanah yang relevan dengan kondisi Kota Semarang yaitu pengambilan air tanah, tekanan objek di permukaan, aktivitas tektonik, dan konsolidasi alami. Potensi dampak aktivitas tektonik terhadap penurunan tanah di Semarang sangat kecil jika dibandingkan dengan penurunan muka tanah yang diamati. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi fisiografi Jawa bagian utara serta adanya peningkatan jumlah penduduk dan permintaan air bersih untuk pembangunan dan aktivitas penduduk lainnya terutama untuk kegiatan industri yang memerlukan air dalam jumlah besar.

3) Bencana Longsor

Meskipun pesisir Semarang merupakan dataran rendah dan datar, wilayah ke selatannya cenderung berbukit dan dataran tinggi hingga kaki Gunung Ungaran. Hal ini menyebabkan lahan yang luas semakin rentan terhadap longsor di sekitar bagian tengah selatan dan barat daya. Kejadian bencana longsor di Kota Semarang terjadi sebab adanya kerentanan gerakan tanah menengah sampai tinggi, berada di daerah patahan/sesar, semakin berkurangnya pepohonan yang menahan tanah agar tidak mudah retak, tingginya curah hujan sehingga menyebabkan erosi pada daerah lereng, adanya area pertanian di lereng alih-alih pepohonan dengan perakaran kuat, adanya beban berat bangunan pada tanah di tepi lereng, dan material timbunan yang belum padat sempurna.

Risiko Longsor dan Gerakan Tanah Kota Semarang



Gambar 23.
Tingkat Risiko Longsor di Kota Semarang
Sumber: UN-Habitat, 2023

Sebanyak 25% dari total populasi Kota Semarang terdampak bencana longsor dengan 3,2% merupakan terdampak paling tinggi. Berdasarkan data dari BPBD Kota Semarang, kawasan rawan longsor kelas tinggi meliputi 15 dari 16 kecamatan. Sementara kecamatan dengan kawasan longsor kelas sangat tinggi meliputi 8 dari 16 kecamatan yaitu Kecamatan Mijen, Ngaliyan, Gunungpati, Gajahmungkur, Candisari, Banyumanik, Tembalang, dan Semarang Barat.

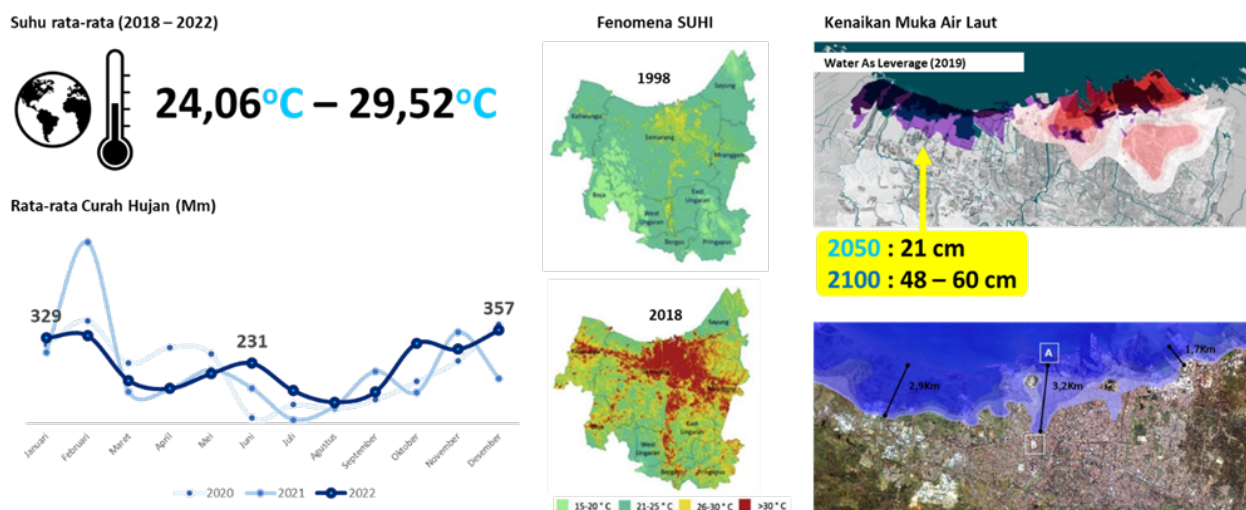
Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat kebutuhan yang kuat untuk mendukung pengendalian dan penegakan peraturan bangunan di daerah dataran tinggi. Sementara itu, perkembangan pemanfaatan ruang di masa depan menunjukkan peningkatan pertumbuhan permukiman di daerah-daerah yang akan mengakibatkan pembangunan yang mahal dan tidak terencana (*sprawling*) sehingga menempatkan lebih banyak orang dalam risiko bencana longsor.

4) Kondisi Perubahan Iklim

Di masa depan, Kota Semarang juga dihadapkan pada bahaya ancaman perubahan iklim yang semakin tinggi. Tingginya ancaman perubahan iklim akan meningkatkan kerentanan kota jika tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas daerah. Berdasarkan kajian kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim Kota Semarang pada tahun 2010, iklim di Kota Semarang telah mengalami perubahan. Terjadi tren peningkatan suhu permukaan rata-rata selama 100 tahun terakhir serta terjadi pergeseran awal musim hujan dan perubahan frekuensi curah hujan ekstrem. Berdasarkan data tahun 2018-2022, suhu udara rata-rata di Kota Semarang berkisar antara 24,06°C sampai dengan 29,52°C. Suhu relatif tinggi terjadi pada bulan Maret hingga November yang merupakan masa peralihan dan sebaliknya, turun pada saat musim hujan pada bulan Desember hingga Februari. Selain itu, tingginya urbanisasi di Kota Semarang juga berimplikasi pada munculnya fenomena *surface urban heat islands* (SUHI). Mayoritas wilayah Kawasan Metropolitan Semarang memiliki suhu permukaan di angka 30°C dan kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh positif urbanisasi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim yang semakin parah juga ditunjukkan melalui kenaikan muka air laut di Kota Semarang. Berdasarkan skenario perubahan ketinggian muka air laut yang dilakukan oleh CCROM IPB tahun 2010, diketahui bahwa pada tahun 2050 ketinggian muka air laut diperkirakan sekitar 21 cm. Menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang mengombinasikan pendekatan *nature-based*, dan solusi *hard infrastructure* untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan lingkungan. Strategi *nature-based* melibatkan restorasi dan pelestarian ekosistem pesisir, seperti mangrove dan hutan bakau, yang berfungsi sebagai penghalang alami terhadap gelombang pasang dan abrasi serta membantu menyerap karbon. Selain itu, pengelolaan wilayah pesisir dengan zonasi yang tepat dan penggunaan infrastruktur hijau seperti terumbu buatan dan sabuk hijau dapat memperkuat pertahanan pesisir. Sebagai pelengkap, solusi *hard infrastructure* menjadi penting untuk memberikan perlindungan fisik terhadap dampak kenaikan muka air laut. Ini meliputi pembangunan dan penguatan tanggul laut serta dinding penahan gelombang untuk melindungi wilayah pesisir dari erosi dan banjir. Pembangunan sistem pompa air dan drainase yang terintegrasi juga menjadi solusi untuk wilayah yang sudah berada di bawah permukaan air laut. Ke depan perlu ditingkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pompa ini melalui pembenahan sistem dan sub-sistem drainase. Dengan kombinasi strategi *nature-based* dan solusi *hard infrastructure*, masyarakat dapat meminimalkan dampak negatif kenaikan muka air laut serta meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan, pada tahun 2100, ketinggian muka air laut yang terjadi di Kota Semarang diperkirakan sekitar 48-60 cm. Hingga tahun 2050, diperkirakan akan terjadi peningkatan suhu permukaan hingga 1,2 °C serta curah hujan yang mencapai 558.07 mm/bulan. Muka air laut naik hingga 21 cm dan peluang terjadinya iklim ekstrem di Kota Semarang juga meningkat. Kenaikan komponen iklim tersebut meningkatkan risiko dari Kota Semarang terhadap perubahan iklim. Pada tingkat kota, perubahan iklim akan berpengaruh pada ekosistem, manusia atau masyarakat, ekonomi, dan infrastruktur. Hal ini erat kaitannya dengan meningkatnya bahaya iklim baik berupa bencana maupun non-bencana. Sementara itu di tingkat mikro, perubahan iklim berdampak pada tingginya risiko banjir, tanah longsor, dan

kekeringan. Dampak non-bencana meliputi demam berdarah, ISPA, dan diare juga turut dirasakan.

Kondisi Perubahan Iklim Kota Semarang



Gambar 24.

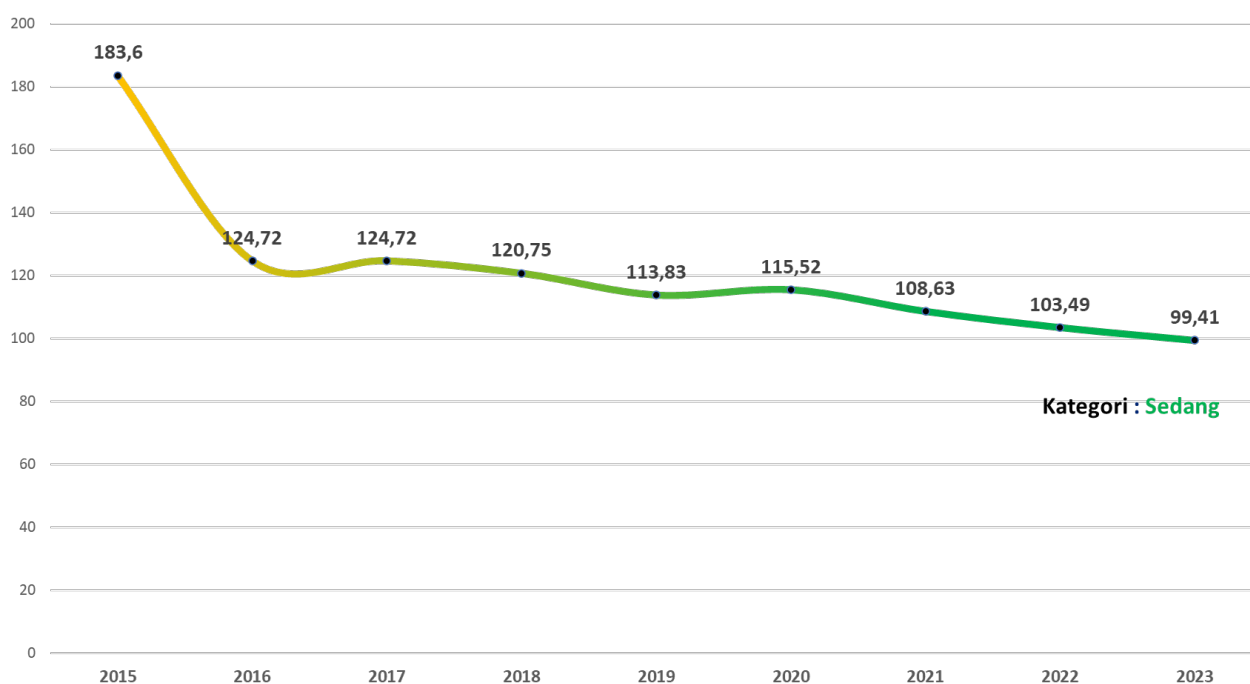
Indikator Perubahan Iklim di Kota Semarang

Sumber: RAD - API, 2019

Oleh karena itu, upaya adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan dengan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Program yang disusun juga perlu diidentifikasi melalui skala kota (makro) hingga ke tingkat mikro (kelurahan) berdasarkan komponen adaptasi transformatif serta mengacu pada tingkat bahaya dan risiko.

5) Kapasitas Daerah

IKD Kota Semarang berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Kota Semarang diketahui pada tahun 2022 nilainya mencapai 0,65 dengan kategori cukup baik. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indeks untuk mengukur ketahanan atau kapasitas dari suatu daerah dalam menanggulangi sebuah bencana. Nilai IKD berada pada rentang nol hingga satu. IKD Kota Semarang pada tahun 2021 berada di angka 0,64 dan pada tahun 2022 mencapai 0,65. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa ketahanan Kota Semarang dalam menanggulangi bencana berada pada kategori yang cukup baik, terlebih terdapat peningkatan nilai IKD, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam mengelola kebencanaan juga semakin baik.



Gambar 25.

Indeks Risiko Bencana dan Ketahanan Daerah

Sumber: Inarisk BNPB, 2024

Meski demikian, nilai IKD ini harus terus ditingkatkan, mengingat Kota Semarang memiliki tingkat rawan kebencanaan yang cukup tinggi, baik itu bencana alam, maupun bencana non alam. Beberapa bencana yang dimaksud tersebut di antaranya adalah banjir, banjir rob, tanah longsor dan kekeringan, kebakaran, kecelakaan industri maupun Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti wabah penyakit.

Peningkatan nilai IKD ini berbanding terbalik dengan Indeks Risiko Bencana Kota Semarang yang terus menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketangguhan Kota Semarang dalam menanggulangi bencana terus meningkat, baik itu melalui upaya mitigasi struktural maupun non struktural. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam mengelola kebencanaan juga semakin baik. Salah satu upaya mitigasi struktural yang dilakukan

Kota Semarang adalah membangun tanggul laut untuk mengurangi dampak abrasi dan rob. Upaya ini juga didukung oleh program penanaman mangrove di sepanjang garis pantai. Sedangkan upaya mitigasi non struktural yang dilakukan antara lain adalah melakukan sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana, memperkuat jejaring kerjasama antar lembaga, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, Kota Semarang dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain yang rentan terhadap bencana. Meski demikian, nilai IKD harus terus ditingkatkan hingga ke tingkat komunitas atau masyarakat, mengingat Kota Semarang memiliki tingkat rawan kebencanaan yang cukup tinggi, ditambah dengan ancaman perubahan iklim.

2.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung dan daya tampung suatu daerah diukur melalui kebutuhan dan ketersediaan dari aspek lahan terbangun, lahan pertanian, lahan ekonomi, air, pangan dan fungsi lindung. Dengan mengetahui status daya dukung dan daya tampung, maka daerah dapat mengukur batasan pembangunan di masa depan.

Berdasarkan perhitungan, kondisi ketersediaan air di Kota Semarang tahun 2021 sebesar 223 juta m³. Sementara itu, kondisi ketersediaan lahan pangan tahun 2021 sebesar 48.830 ha yang dihitung melalui lahan sawah, tambak, tubuh air, kemudian semak belukar. Jika dilihat dari perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air setiap kecamatan maka terdapat empat kecamatan dalam status surplus, sedangkan 12 kecamatan mengalami defisit air. Ditinjau dari distribusi ketersediaan air diketahui bahwa ketersediaan air yang paling besar berlokasi di lahan non-terbangun seperti sawah dan perkebunan yang terdistribusi terutama di bagian barat dan selatan Kota Semarang. Ketersediaan air di bagian barat Kota Semarang cenderung lebih besar dibandingkan di area lainnya. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan wilayah sungai yang mana bagian barat Kota Semarang termasuk pada wilayah sungai Bodri-Kuto, sedangkan bagian lainnya termasuk pada wilayah sungai Jratunseluna. Meskipun wilayah sungai Bodri-Kuto memiliki total debit yang lebih kecil tetapi cakupan area distribusinya lebih kecil dibandingkan WS Jratunseluna. Selain air permukaan, potensi sumber daya air di Kota Semarang juga ditunjang dengan ketersediaan cadangan air tanah. Jika dilihat distribusi ketersediaan menurut kecamatan maka secara administrasi dapat dilihat bahwa ketersediaan paling tinggi berada di Kecamatan Mijen dan Gunungpati serta Ngaliyan yang mana ketiganya berada pada wilayah barat dan selatan Kota Semarang.

Sementara itu, status daya dukung dan daya tampung lahan pangan menunjukkan bahwa mayoritas lahan berstatus defisit. Secara administrasi Kecamatan Tugu, Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Ngaliyan memiliki wilayah defisit yang relatif kecil dibandingkan wilayah lainnya. Status tersebut selaras dengan fakta di lapangan bahwa kecamatan tersebut berada di pinggiran Kota Semarang yang memiliki banyak lahan non-terbangun.

DDLB Kota Semarang sebesar 1,09 yang termasuk daya dukung lahan terbangun bersyarat atau sedang. Hal tersebut dimaksudkan bahwa di Kota Semarang untuk daya dukung bangunan masih diperbolehkan dengan ketentuan bersyarat karena meninjau karakteristik Kota Semarang yang rawan longsor dan rawan banjir. Sebagian besar kecamatan di Kota Semarang tergolong dalam kondisi jenuh karena terdapat sekitar 10 kecamatan yang memiliki kondisi DDLB yang sudah

terlampau meliputi Kecamatan Banyumanik, Candisari, Gajah Mungkur, Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Tembalang. Hal tersebut mengindikasikan terdapat beberapa kecamatan di Kota Semarang dimana pembangunannya telah melampaui daya dukung yang ada sehingga lebih baik untuk tidak dilakukan pembangunan dan disarankan untuk menambah RTH agar kondisi lahan tidak jenuh.

Tingginya lahan terbangun, juga berpengaruh pada status daya dukung lainnya, seperti DDLp dan DDL yang menunjukkan klasifikasi rendah hingga sangat rendah. Lahan terbangun yang tinggi mengindikasikan kawasan budidaya yang tinggi serta aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga DDE mendapatkan skor yang tinggi.

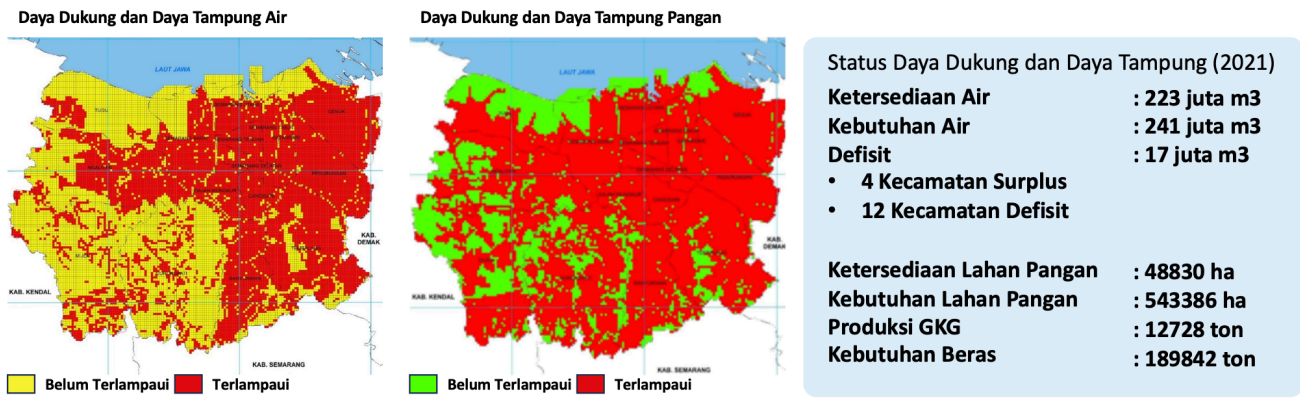
Walaupun Kota Semarang tergolong pada kawasan metropolitan, namun di wilayah pinggirannya, seperti Mijen dan Ngaliyan masih terdapat aktivitas pertanian. Oleh karena itu, nilai DDLp yang tergolong rendah merupakan hal yang wajar bagi daerah perkotaan yang dominan pada sektor industri dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan pangannya, maka Kota Semarang membutuhkan daerah di sekitarnya yang masih didominasi oleh kawasan perdesaan dan pertanian. Dari keempat daerah yang berdekatan dengan Kota Semarang, Kabupaten Grobogan mengalami surplus beras yang paling banyak yaitu 333.043 ton di tahun 2016 atau dengan DDL untuk pangan sebesar 298%. Kemudian juga di Kabupaten Demak mengalami surplus beras sebesar 241.760 ton atau DDL pangan sebesar 273%. Selain itu, pasokan beras di Kota Semarang juga didukung daerah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Melihat kondisi ini, Kota Semarang perlu menjalin kerjasama antar daerah untuk mencukupi kebutuhan pangannya.

Daya dukung lindung menurut kecamatan menunjukkan hasil yang bervariasi, di Kecamatan Tugu dengan nilai DDL 0,6 termasuk menandakan bahwa fungsi lindung tergolong sedang. Kemudian untuk kecamatan lainnya memiliki nilai $DDL < 1$ dengan kategori kualitas DDL rendah yaitu Kecamatan Banyumanik, Gajah Mungkur, Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Semarang Barat, dan Tembalang. Kemudian terdapat DDL fungsi lindung yang tergolong sangat rendah yang terdapat di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Candisari, Pedurungan, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, dan Semarang Utara. Kualitas DDL yang sangat rendah berimplikasi pada meningkatnya risiko ancaman kebencanaan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti banjir dan longsor. Ancaman perubahan iklim yang semakin tidak terprediksi di masa depan turut memperparah ancaman banjir, kekeringan sekaligus ketahanan pangan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi secara struktural untuk menjaga kawasan lindung.

Sementara itu, status kemampuan lahan di Kota Semarang meliputi kelas II, III, IV, dan VI. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, penentuan kemampuan lahan dilakukan untuk mengetahui kapasitas lingkungan alam. Penentuan kemampuan lahan ditentukan dengan overlay peta kemiringan tanah, jenis tanah, kerawanan bencana (erosi dan tanah longsor), dan drainase. Kemampuan lahan diklasifikasikan ke dalam 8 kelas dengan kelas I-IV merupakan lahan yang cocok untuk penggunaan budidaya dan pertanian sedangkan kemampuan lahan kelas V-VIII sesuai untuk lahan konservasi atau kawasan lindung.

Sebagian besar kelas kemampuan lahan Kota Semarang berada di lahan kelas IV seluas 16.777,56 ha (42,57%). Karakteristik dari kelas lahan IV adalah sesuai untuk kawasan budidaya. Selain itu, kemampuan lahan kelas II sebesar 4.640,12 ha (11,77%) dan kemampuan lahan kelas III sebesar 14.468,69 ha (36,71%) tidak terdapat faktor pembatas sehingga sesuai untuk kawasan budidaya. Namun, terdapat penggunaan lahan yang terdapat di kelas VI yang kurang sesuai untuk kawasan budidaya karena memiliki fungsi lindung, dengan luas kelas VI sebesar 3.529,53 ha (8,95%). Berikut merupakan persebaran kemampuan lahan menurut kecamatan di Kota Semarang.

Status Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Semarang (2021)



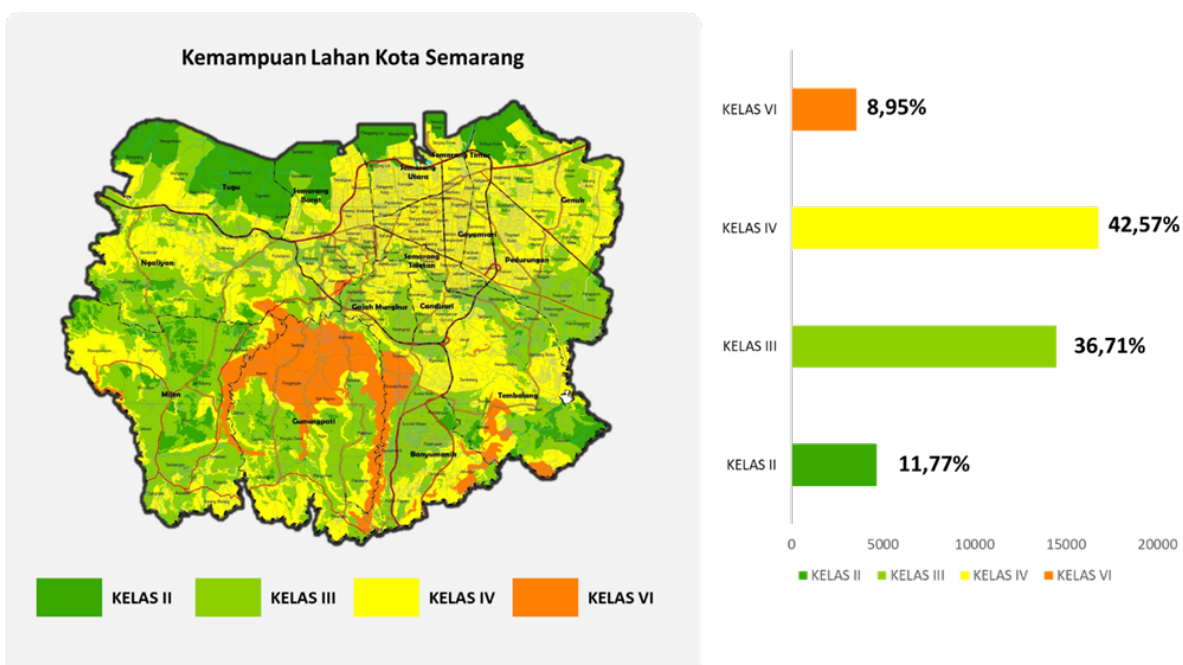
Prakiraan tahun 2045

Kebutuhan Air Domestik Kota Semarang:
3816,39 liter/detik

Kebutuhan Pangan Kota Semarang:
110851,78 ton/tahun

Gambar 26.
 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Semarang
 Sumber: KLHS RPJPD Kota Semarang, 2023

Kemampuan lahan di Kota Semarang menurut kecamatan untuk kelas II terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Candisari, Kecamatan Semarang Selatan, dan Semarang Tengah. Kelas kemampuan lahan yaitu kelas II paling banyak terdapat di Kecamatan Tugu seluas 1.503,51 ha. Kemudian untuk kelas III hampir di seluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Semarang Tengah, yang paling luas terdapat di Kecamatan Mijen seluas 3.044,74 ha. Kelas kemampuan lahan VI kurang sesuai untuk kawasan budidaya agar tidak membebani lahan. Kelas kemampuan lahan VI terdapat di Kecamatan Banyumanik, Gajah Mungkur, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Semarang Barat, dan Tembalang, yang paling luas terdapat di Kecamatan Gunungpati seluas 2.182,27 ha.



Gambar 27.
 Kemampuan Lahan Kota Semarang
 Sumber: KLHS RPJPD Kota Semarang, 2023

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA

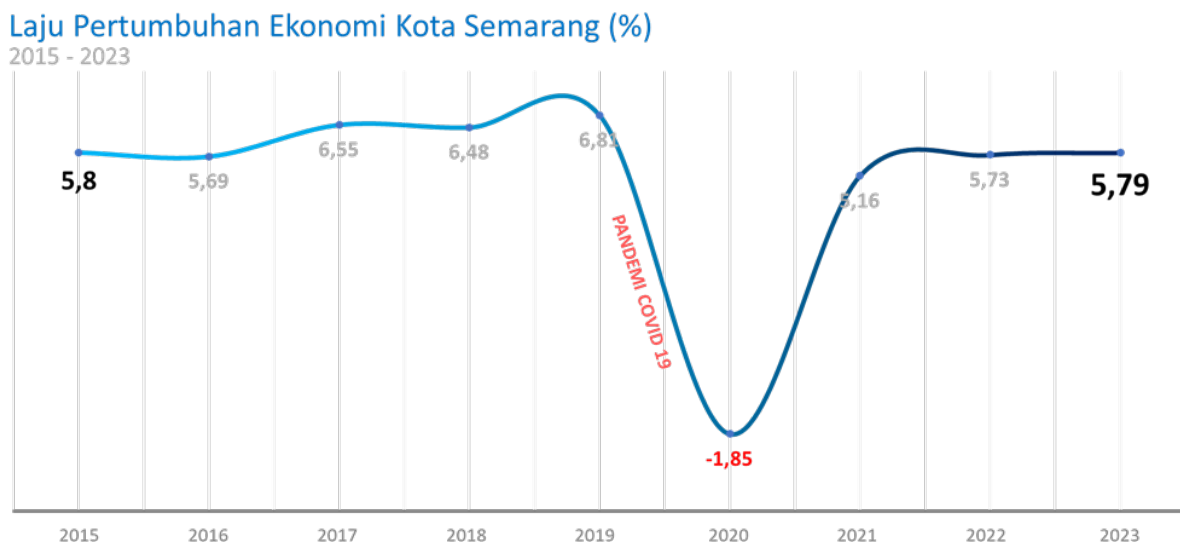
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Dalam perencanaan pembangunan daerah, kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi akan fokus pada peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan. Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu daerah adalah melalui indikator ekonomi makro, meliputi PDRB, pendapatan per kapita, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang selama 2015 hingga 2023 mengalami penurunan yang tidak signifikan dan cenderung stabil pada kisaran angka 5 hingga 6%. Namun, pada tahun 2020, perekonomian Kota Semarang terguncang oleh pandemi covid-19 dan mengakibatkan penurunan hingga -1,85%. Kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat menyebabkan perekonomian di Kota Semarang dan kota-kota lainnya di Indonesia mengalami resesi. Walaupun begitu, pada tahun 2021, Kota Semarang berhasil melakukan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 5,16%.

Pada tahun 2022, perekonomian Kota Semarang terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,73%, didorong oleh peningkatan aktivitas sektor perdagangan, pariwisata, dan industri kreatif yang kembali bergerak. Pemerintah kota juga memperkenalkan berbagai inisiatif untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) serta meningkatkan investasi infrastruktur, yang turut berkontribusi pada pemulihan ekonomi.

Memasuki tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tetap stabil dan meningkat di sekitar 5,79%. Pemerintah kota terus berupaya untuk memperkuat daya saing ekonomi dengan meningkatkan efisiensi birokrasi dan menyediakan insentif bagi investor. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami tantangan berat akibat pandemi, Kota Semarang berhasil menunjukkan resiliensi dan kemampuan untuk bangkit kembali. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan diharapkan dapat terus terjaga, seiring dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih baik.



Gambar 28.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang tahun 2015 – 2023

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Sementara itu, ketimpangan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti indeks gini, tingkat kemiskinan dan proporsi pemerataan pendapatan. Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa indeks gini di Kota Semarang selama periode Tahun 2020-2022 terus mengalami kenaikan. Tahun 2021 peningkatan indeks gini di Kota Semarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 12% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 2%. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan

Nasional, capaian indeks gini di Kota Semarang cenderung lebih tinggi. Meskipun menunjukkan perbaikan dan kondisinya lebih baik dari sebagian besar kota metropolitan di Indonesia, namun kondisi ketimpangan di Kota Semarang masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dari proporsi pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, diketahui bahwa lebih dari 50% ekonomi Kota Semarang dikuasai oleh 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Penyusunan program dan kegiatan yang berfokus pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran untuk masyarakat yang termasuk dalam 40% penduduk berpendapatan rendah, perlu diupayakan menjadi prioritas dalam 20 tahun ke depan. Perluasan akses ke sarana pendidikan dan kesehatan, peningkatan cakupan perlindungan sosial, perluasan kesempatan bekerja dan berusaha, perluasan akses permodalan dan pemasaran, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka indeks gini di Kota Semarang.

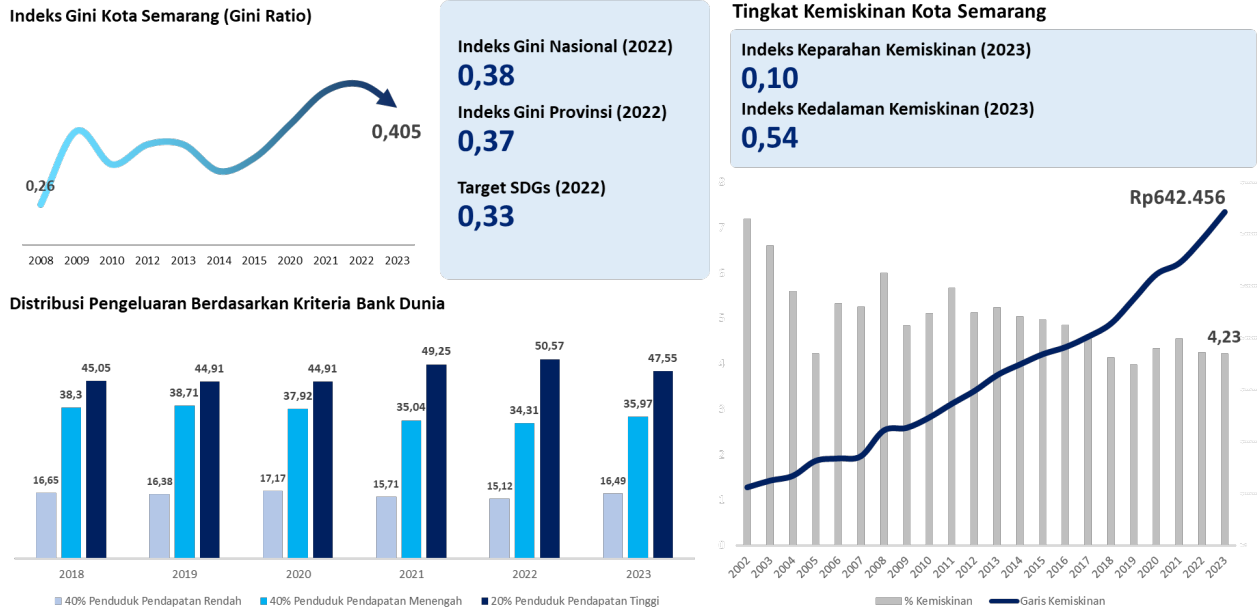
Namun, tingkat kemiskinan di Kota Semarang selama 20 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan walaupun garis kemiskinannya selalu meningkat. Saat ini, persentase kemiskinan di Kota Semarang sebesar 4,23% dari total penduduk atau sebesar 80.530 jiwa. Jumlah ini tergolong naik dari tahun sebelumnya yaitu 79.870 jiwa yang tergolong penduduk miskin. Adanya pandemi yang menyebabkan krisis global merupakan salah satu faktor jumlah penduduk miskin di Kota Semarang bertambah. Banyak dari usaha industri dan umkm mengalami penurunan pendapatan sehingga para pekerja terdampak pada pemutusan hubungan kerja. Meskipun begitu, capaian Kota Semarang masih tergolong lebih baik dari capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Untuk mengukur kemiskinan, suatu daerah juga perlu mempertimbangkan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2018-2022) di Kota Semarang relatif mengalami penurunan. Tahun 2019 indeks kedalaman kemiskinan di Kota Semarang sebesar 0,57 menurun sekitar 2% dari tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Kota Semarang adalah 0,68 atau meningkat 19% dari tahun 2019. Sedangkan, Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) di Kota Semarang menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar 0,12 pada tahun 2018 menjadi 0,11 pada tahun 2022. Akan tetapi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Semarang pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 33,3% sebagai dampak terjadinya pandemi sehingga menyebabkan kesenjangan antar penduduk miskin tinggi kembali.

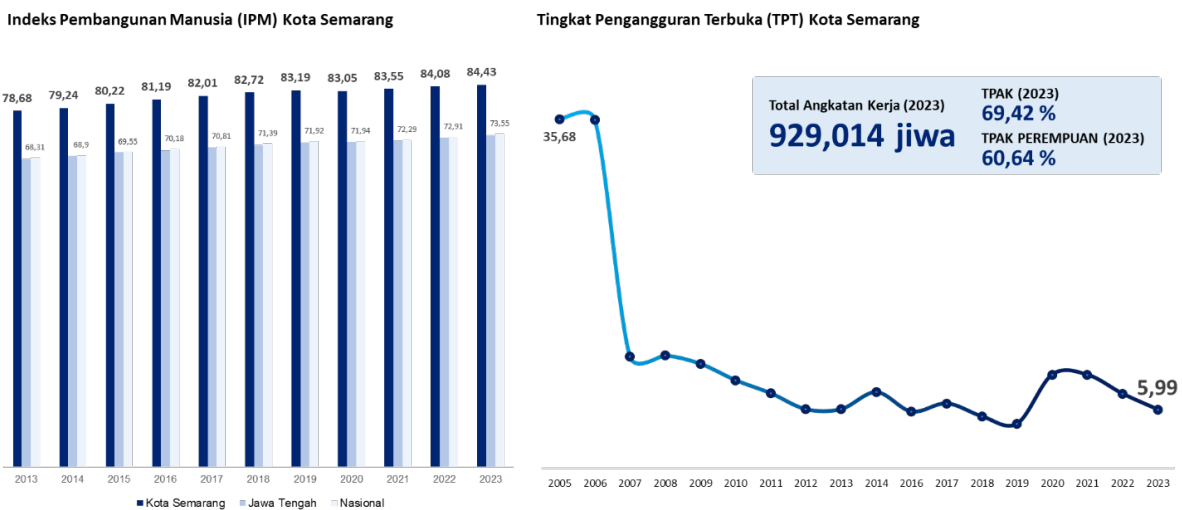
Selain ketimpangan, kesejahteraan ekonomi suatu daerah juga ditinjau dari kualitas pembangunan sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pembangunan Terbuka hingga Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tergolong lebih baik yaitu sebesar 84,43. Kondisi ini didukung dari peningkatan akses pendidikan dan umur harapan hidup yang terus meningkat. Hasilnya, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Semarang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran Kota Semarang mencapai 5,99% dengan total angkatan kerja sebesar 929,014 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Semarang pun sudah tergolong baik, yaitu sebesar 69,42% walaupun ini perlu terus untuk ditingkatkan. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki memiliki kesempatan kerja yang lebih baik yaitu sebesar 95,09 jika dibandingkan perempuan di Kota Semarang.

Indikator Ketimpangan Ekonomi Kota Semarang



Gambar 29.
Indikator Ketimpangan Ekonomi Kota Semarang
Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Indikator Pembangunan Manusia Kota Semarang



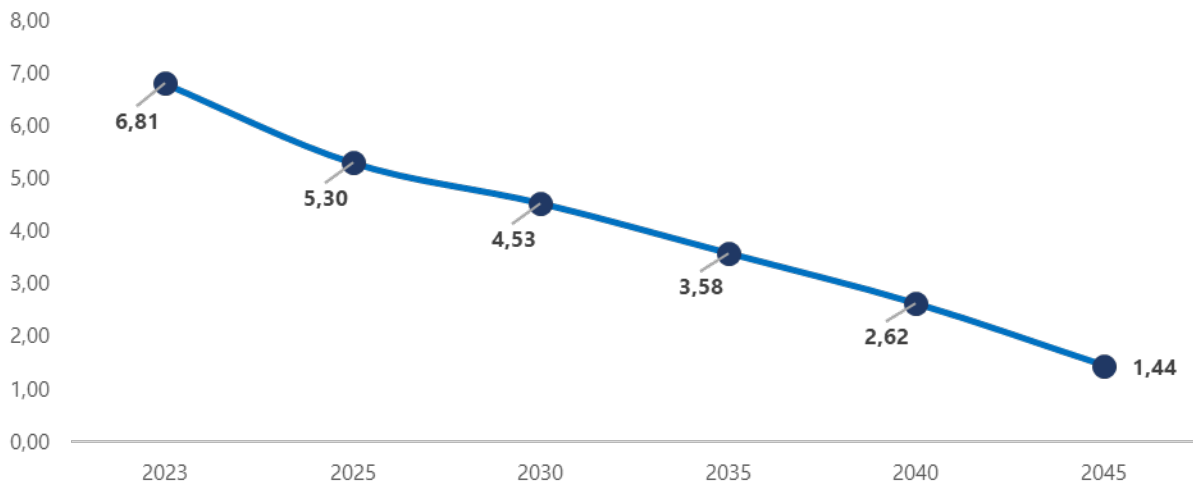
Gambar 30.
Indikator Pembangunan Manusia Kota Semarang
Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

1) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan adalah ukuran yang menunjukkan persentase populasi yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang mencukupi dalam hal jumlah maupun kualitas, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi atau konflik. Kota Semarang menargetkan penurunan prevalensi kekurangan konsumsi pangan hingga 1,44% di tahun 2045. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program dan intervensi untuk meningkatkan akses pangan bergizi, edukasi gizi, dan program intervensi gizi bagi kelompok rentan.

2025 – 2045
Pertumbuhan

Grafik Proyeksi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan



Gambar 31.

Grafik Proyeksi Persentase Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Semarang tahun 2023-2045

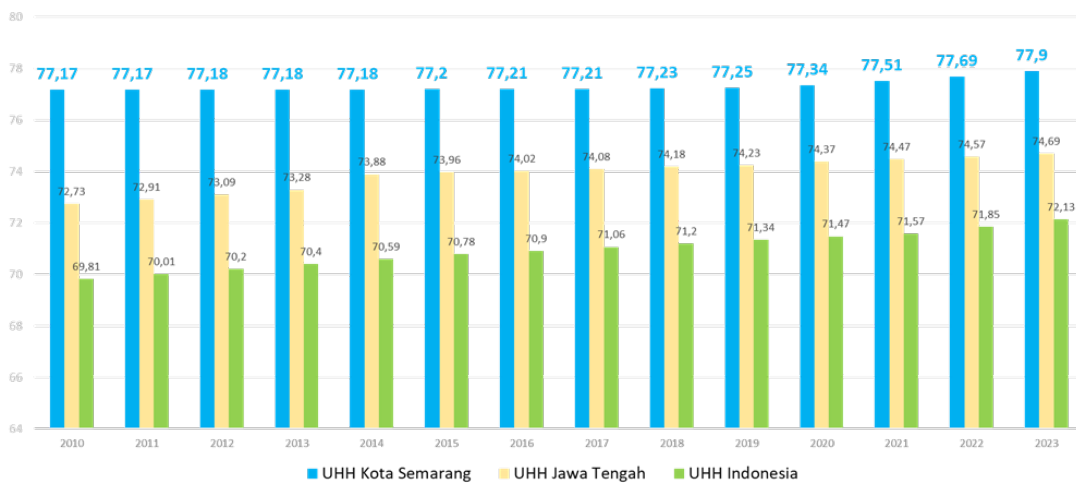
Sumber: KLHS RPJPD Kota Semarang, 2023

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Secara keseluruhan, gambaran umum kesejahteraan sosial budaya di Kota Semarang mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek, namun masih dihadapkan pada tantangan yang kompleks terkait dengan kesenjangan sosial, ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Umur harapan hidup, sebagai indikator utama kesejahteraan sosial, menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup penduduk. Pada tahun 2023, angka umur harapan hidup masyarakat Kota Semarang mencapai 77,9 dan hal ini lebih tinggi dari angka umur harapan hidup pada tingkat provinsi dan nasional. Angka ini juga meningkat sebesar 0,73 tahun selama 10 tahun terakhir.

Umur Harapan Hidup Kota Semarang

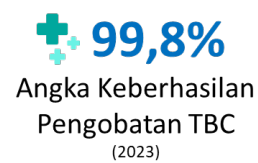
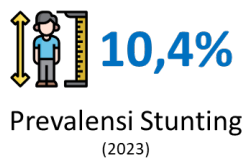


Gambar 32.

Umur Harapan Hidup Kota Semarang

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Perbedaan umur harapan hidup Kota Semarang yang lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional menunjukkan adanya keberhasilan dalam penyediaan layanan kesehatan yang efisien dan inklusif. Faktor-faktor seperti infrastruktur kesehatan yang memadai, aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang baik, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan ini.



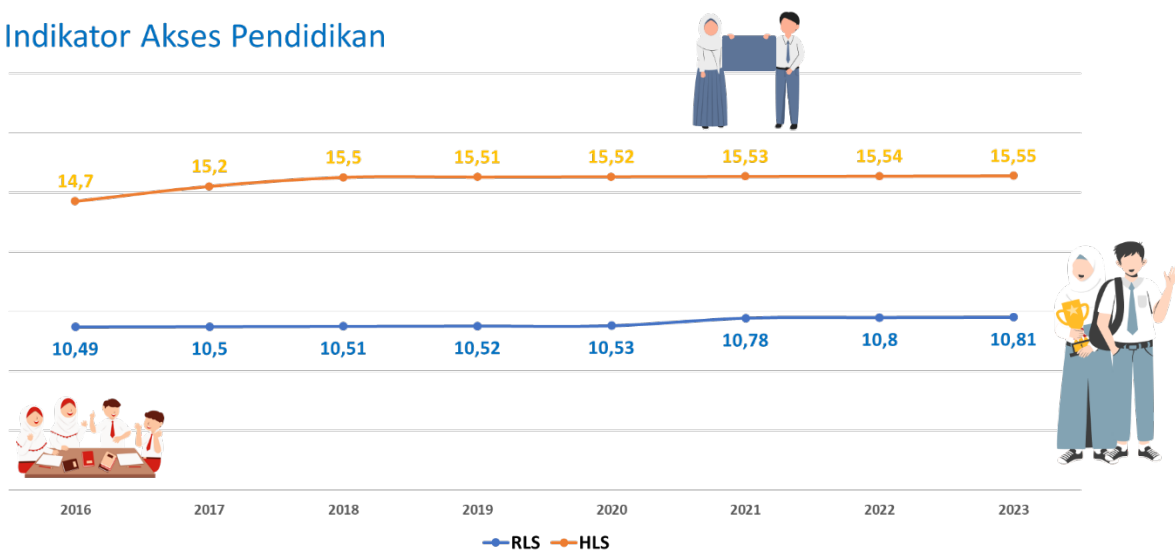
Gambar 33.
Indikator Capaian Layanan Kesehatan di Kota Semarang
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Masalah stunting, yang mencerminkan kondisi gizi buruk pada anak-anak, masih menjadi perhatian serius dalam gambaran kesejahteraan sosial budaya Kota Semarang. Terdapat 10,4% kasus stunting yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2023. Meskipun upaya-upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap gizi dan perawatan kesehatan anak, stunting tetap menjadi masalah yang kompleks, terutama di kalangan keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Selain stunting, ada beberapa permasalahan kesehatan masyarakat lainnya yang juga perlu mendapat perhatian di Kota Semarang. Salah satunya adalah *Tuberculosis* (TBC), yang merupakan penyakit menular yang sering kali terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan sanitasi yang buruk. Meskipun telah ada program-program pencegahan dan pengobatan TBC yang diterapkan di Kota Semarang, masih terdapat tantangan dalam menjangkau semua individu yang membutuhkan perawatan, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan.

Selain itu, cakupan jaminan kesehatan juga merupakan permasalahan penting dalam upaya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan di Kota Semarang. Meskipun telah ada program-program jaminan kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terlayani oleh program tersebut. Faktor-faktor seperti kurangnya informasi, birokrasi yang rumit, dan ketidaktahuan tentang pentingnya jaminan kesehatan juga dapat menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai.

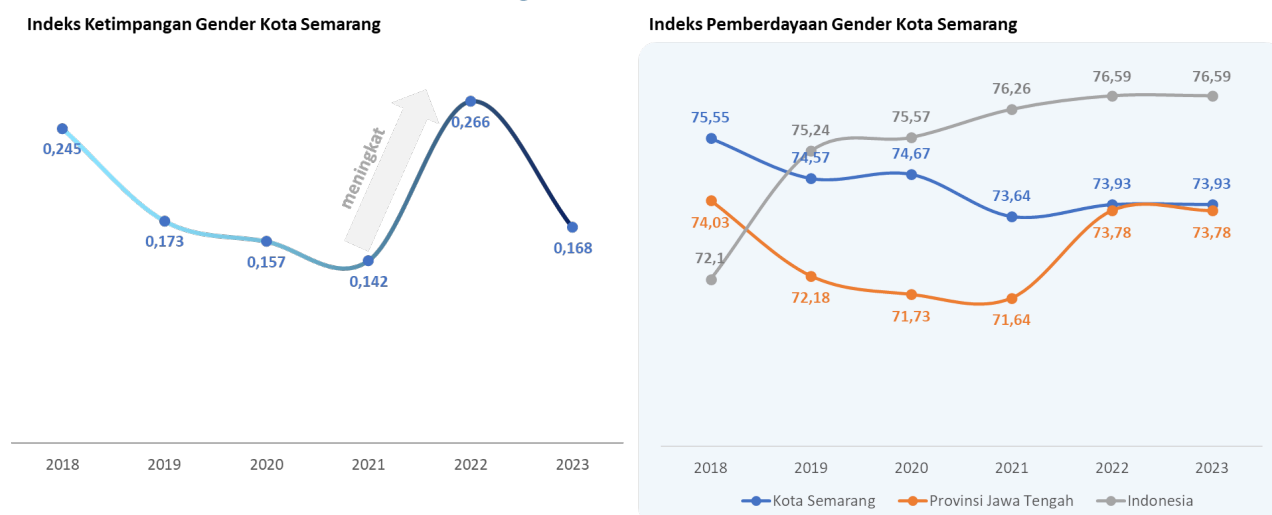
Indikator Akses Pendidikan



Gambar 34.
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Semarang
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Sementara itu, rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat akses dan partisipasi dalam pendidikan di Kota Semarang. Meskipun telah ada peningkatan dalam tingkat sekolah wajib dan aksesibilitas pendidikan, masih terdapat tantangan dalam hal kualitas pendidikan dan kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat. Kondisi ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di kota-kota negara maju. Di Tokyo, misalnya, rata-rata lama sekolah penduduknya bisa mencapai 12 hingga 15 tahun, Demikian pula, Singapura memiliki sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan berfokus pada pencapaian akademis, sehingga rata-rata lama sekolah penduduknya juga cenderung tinggi.

Inklusivitas, Gender dan Keluarga



Gambar 35.
Inklusivitas, Gender dan Keluarga Kota Semarang
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Di Kota Semarang, inklusivitas, gender, dan peran keluarga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, permasalahan ketimpangan yang meningkat dan penurunan Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan adanya ketidaksetaraan yang masih ada dalam berbagai aspek kehidupan di kota ini. Capaian Indeks Ketimpangan Gender yang ada di Kota Semarang dari tahun 2018 sampai tahun 2023 mengalami naik turun. Indeks Ketimpangan Gender mengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Sementara itu, indeks pemberdayaan gender mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Semarang menunjukkan perkembangan fluktuatif serta lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Penurunan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Semarang menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mengalami penurunan.

Sementara itu, kondisi pelestarian budaya di Kota Semarang, tercermin dari rendahnya persentase satuan pendidikan yang memiliki guru mengajar mulok dan jumlah pengunjung tempat sejarah yang masih rendah, menunjukkan tantangan dalam melestarikan warisan budaya dan sejarah kota. Rendahnya fokus pada pembelajaran budaya dan sejarah di tingkat pendidikan serta kurangnya minat masyarakat untuk menjelajahi warisan sejarah dapat mengancam kelestarian budaya Kota Semarang.

Di masa depan, permasalahan yang perlu difokuskan berdasarkan pada kondisi di atas adalah pada kelompok usia lanjut di Kota Semarang, termasuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, dan pelestarian budaya. Dengan meningkatnya harapan hidup, populasi lanjut usia di Kota Semarang juga dapat meningkat, sehingga diperlukan upaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Pelestarian Budaya

Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Guru yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah dan atau Kesenian

26,71%



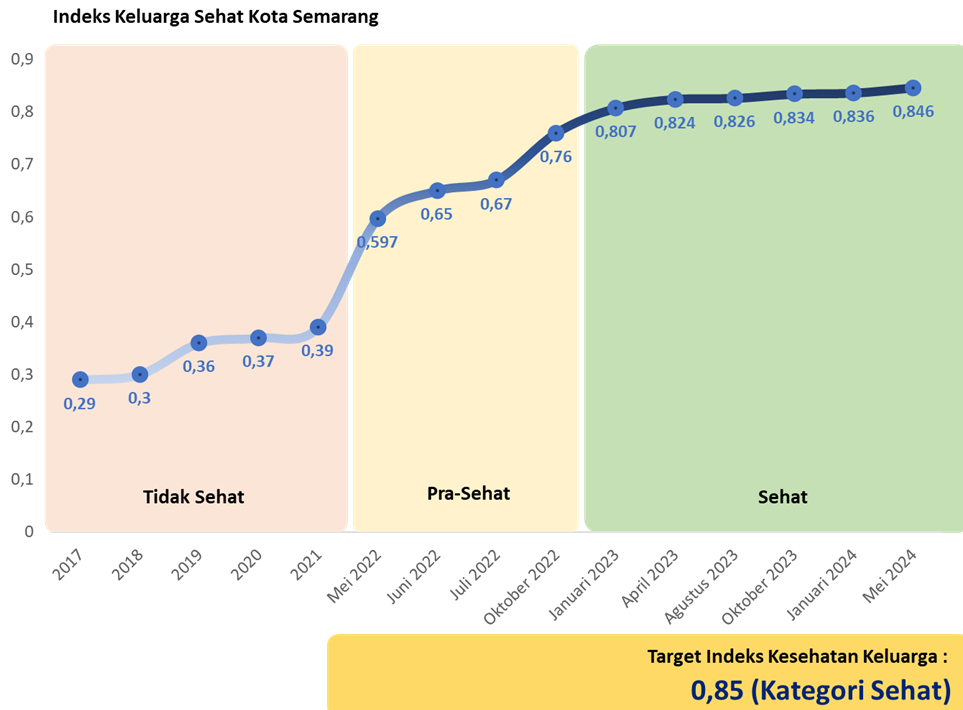
Jumlah Pengunjung Tempat Sejarah

4.641 orang



Gambar 36. Pelestarian Budaya Kota Semarang

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024



Gambar 37.

Indeks Keluarga Sehat

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2017, Indeks Keluarga Sehat di Kota Semarang berada pada angka 0,29 dan dikategorikan sebagai "Tidak Sehat". Status ini berlanjut hingga tahun 2021, dengan indeks secara bertahap naik dari 0,30 pada tahun 2018 menjadi 0,39 pada tahun 2021, namun masih dalam kategori "Tidak Sehat". Pada Mei 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dengan indeks mencapai 0,597, mengubah status menjadi "Pra-Sehat." Kenaikan ini terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya, dengan indeks mencapai 0,65 pada Juni 2022 dan 0,67 pada Juli 2022. Pada Oktober 2022, indeks naik lebih tinggi lagi menjadi 0,76, tetap dalam kategori "Pra-Sehat."

Memasuki tahun 2023, status kesehatan keluarga di Semarang semakin membaik. Pada Januari 2023, indeks mencapai 0,807 dan untuk pertama kalinya masuk ke dalam kategori "Sehat." Peningkatan ini terus berlanjut dengan indeks mencapai 0,824 pada April 2023, 0,826 pada Agustus 2023, dan 0,834 pada Oktober 2023. Pada Januari 2024, indeks sedikit meningkat menjadi 0,836, dan pada Mei 2024 mencapai 0,846, semakin mendekati target yang ditetapkan yaitu 0,85. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam Indeks Keluarga Sehat di Kota Semarang. Perubahan status dari "Tidak Sehat" ke "Pra-Sehat" dan akhirnya menjadi "Sehat" menunjukkan bahwa program dan upaya peningkatan kesehatan keluarga di kota ini berhasil. Jika tren positif ini terus berlanjut, Kota Semarang berpotensi mencapai atau bahkan melampaui target indeks 0,85 dalam waktu dekat. Kota Semarang menempati urutan pertama di Provinsi Jawa Tengah dengan angka Indeks Keluarga Sehat 0,486, disusul Kota Surakarta dan Kabupaten Kudus.

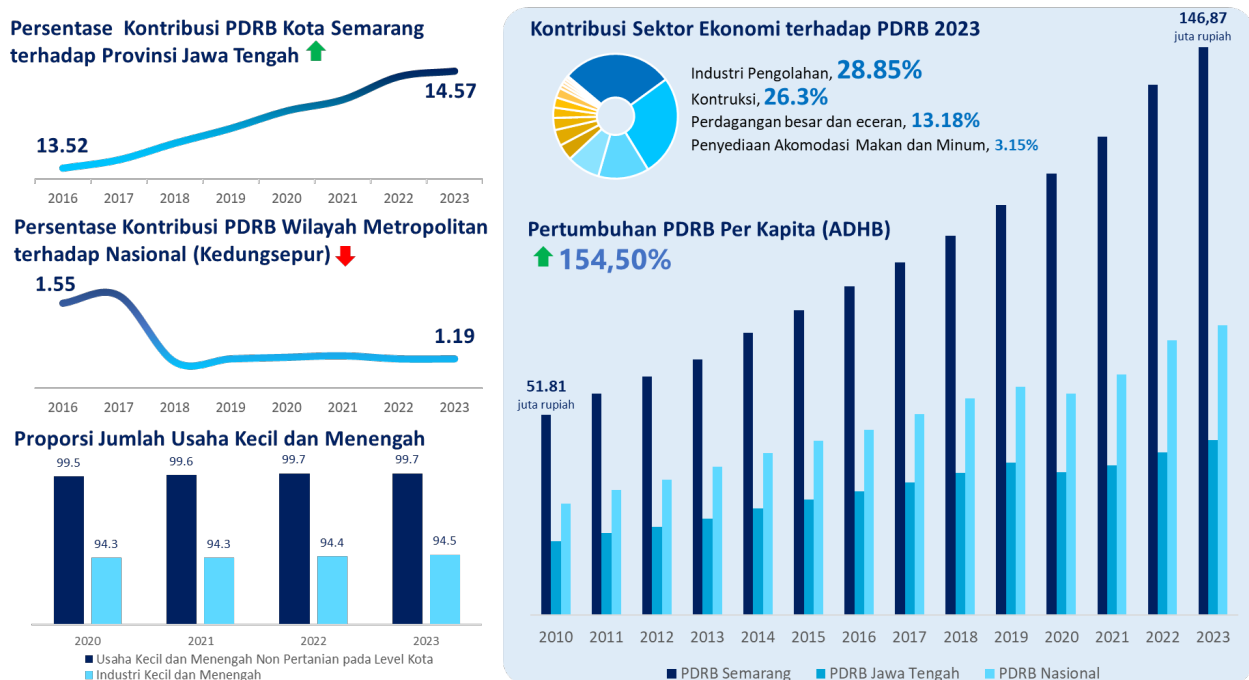
2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

1) Komposisi dan Kontribusi PDRB Kota Semarang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi suatu barang atau jasa dikurangi nilai input yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Komposisi dan Kontribusi PDRB Kota Semarang



Gambar 38.

Komposisi dan Kontribusi PDRB Kota Semarang

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

PDRB per kapita Kota Semarang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB per kapita di tahun 2010 sebesar 51,81 juta rupiah menjadi 146,87 juta rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Semarang dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang stabil, tumbuh positif, dan berhasil menghadapi ancaman dan tekanan global. Selain itu, tren peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang dengan asumsi tingkat kesenjangan rendah.

Perbandingan PDRB dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi ekonomi Kota Semarang terhadap perekonomian wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini, kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Semarang terhadap Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan indikator atau tolok ukur pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dan juga Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, analisis ini juga dapat membantu dalam mengetahui sektor-sektor yang menjadi andalan kawasan tersebut yang berkontribusi terhadap total PDRB yang tinggi.

Kontribusi PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kota Semarang terhadap Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 hingga 2023. Terdapat peningkatan kontribusi sepanjang periode tersebut, yang dapat diartikan bahwa ekonomi Kota Semarang mengalami pertumbuhan. Peningkatan kontribusi PDRB menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kenaikan tersebut bisa disebabkan oleh peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, atau pertumbuhan sektor industri dan jasa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, PDRB atas dasar harga konstan Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 161,85 juta Rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 5,79%.

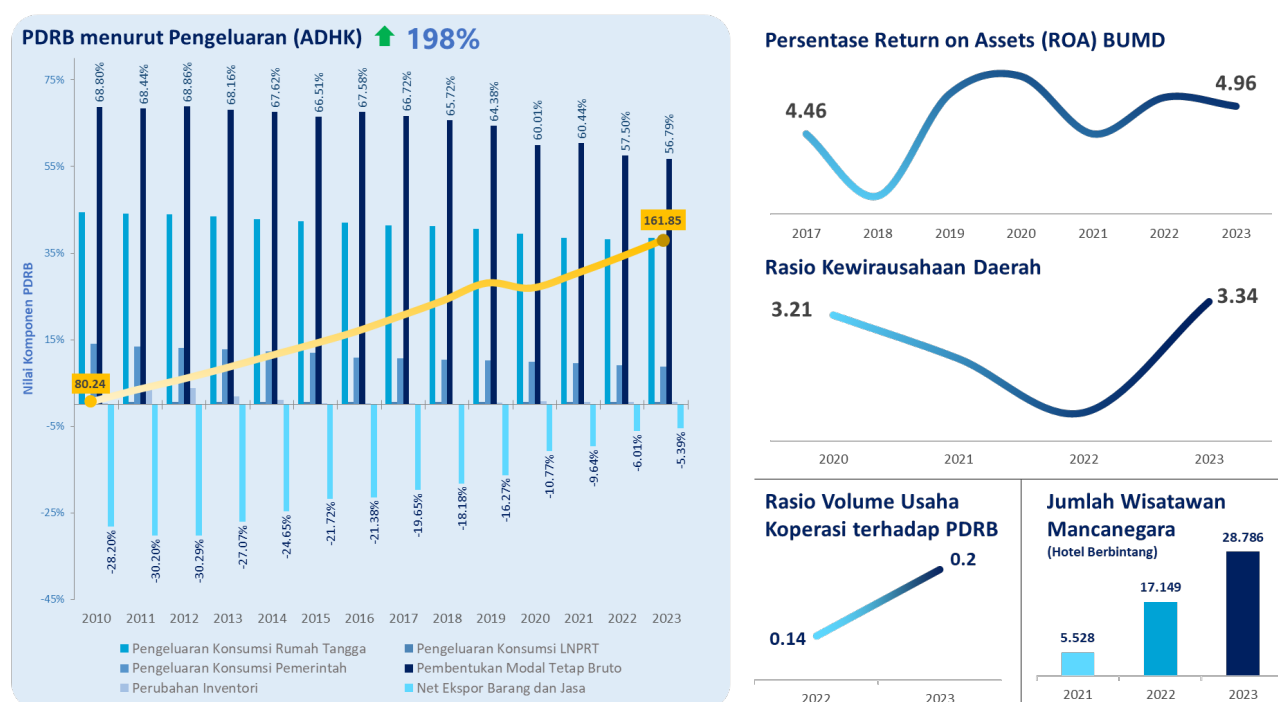
Kontributor utama PDRB Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Namun, pada konstelasi wilayah metropolitan Kedungspur mengalami stagnasi kontribusi terhadap lingkup nasional.

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian serta proporsi jumlah industri kecil dan menengah melebihi 90% pada skala kota. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi di Kota Semarang didominasi oleh sektor-sektor kecil dan menengah. UKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan menciptakan nilai tambah dalam ekonomi kota. Ketergantungan yang tinggi pada UKM dapat menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki keragaman ekonomi yang baik dan mungkin lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi.

2) Pertumbuhan dan Investasi Ekonomi

PDRB ADHK adalah PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga yang sama dari tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu menghitung total pengeluaran untuk konsumsi akhir, investasi, dan ekspor neto. Dari jenis pengeluaran, distribusi PDRB ADHK Pengeluaran dengan tahun dasar 2010 hingga tahun 2022 didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), diikuti dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Secara tren dari tahun 2010, nilai PMTB bergerak stagnan dan mulai menurun, karena persentase pengeluaran perlahan mulai diakomodir oleh peningkatan Net Ekspor.

Indikator Kinerja Bisnis Daerah



Gambar 39. Indikator Kinerja Bisnis Kota Semarang
Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Pada tahun 2010-2012 terjadi kecenderungan peningkatan yang tidak signifikan nilai net ekspor yang dapat menandai bahwa adanya kenaikan lini ekspor di Kota Semarang. Perekonomian dunia yang mulai bangkit pasca pandemi Covid-19 berdampak pada nilai ekspor di Kota Semarang yang mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2020-2023 menjadi sebesar -5.39%. Kenaikan angka ini mencatatkan kinerja positif dari lini ekspor Kota Semarang dan menjadikan tanda bahwa perekonomian Indonesia khususnya di daerah Kota Semarang semakin kuat. Selain itu, pertumbuhan manufaktur juga mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Semarang yang bernilai tambah tinggi semakin meningkat.

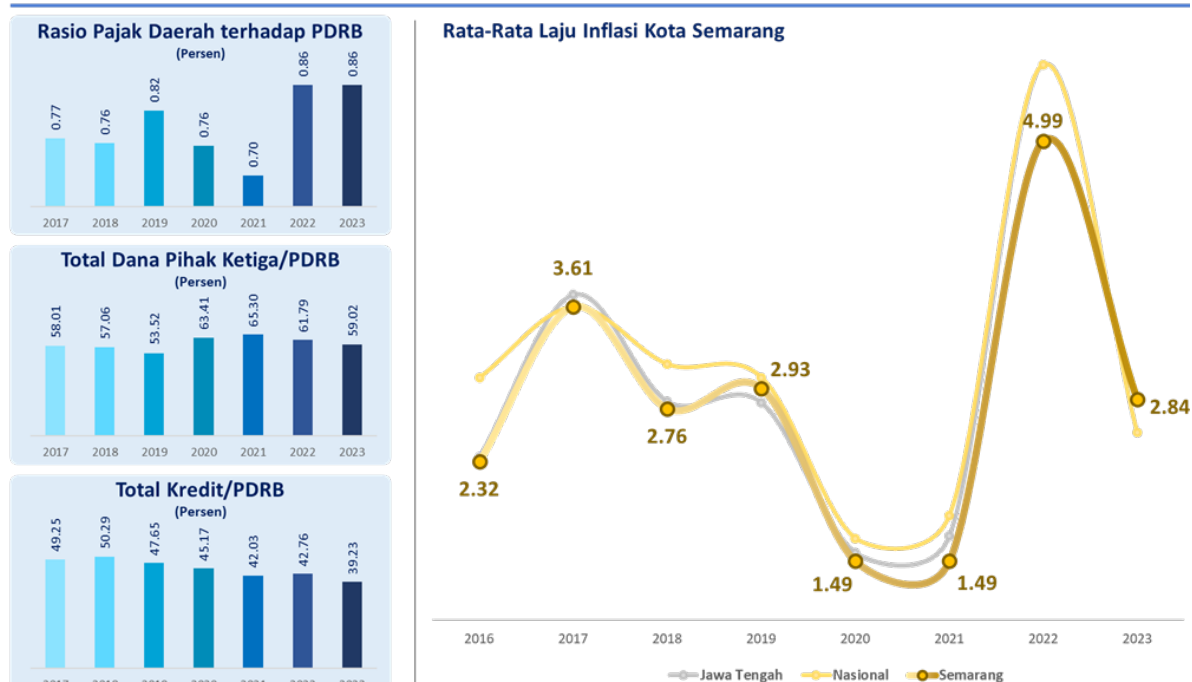
Return on Assets (ROA) BUMD digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menghasilkan laba. Tren ROA dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi dalam kategori

rendah dalam efisiensi BUMD dalam menghasilkan laba dari asetnya. Rasio Kewirausahaan Daerah adalah sebuah indikator yang mengukur tingkat kewirausahaan di suatu daerah. Rasio ini dapat memberikan pemahaman tentang seberapa besar kegiatan wirausaha di Kota Semarang yang dapat memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Grafik di atas mengindikasikan fluktuasi dalam tingkat kewirausahaan di daerah tersebut dari tahun 2020 hingga 2023, tetapi secara keseluruhan tingkat kewirausahaan daerah di Kota Semarang masih sangat rendah.

3) Indikator Keuangan dan Makroekonomi

Sejak tahun 2016, secara umum inflasi Kota Semarang berada pada angka 1-3% dan tergolong stabil. Tingkat inflasi di Kota Semarang cenderung lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional dan Jawa Tengah, tren positif ini menunjukkan bahwa komitmen dan konsistensi Kota Semarang dalam mengendalikan laju inflasi cukup berhasil.

Indikator Keuangan dan Makroekonomi



Gambar 40.

Indikator Keuangan dan Makroekonomi Kota Semarang

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Tabel 1.

Overlay LQ dan Shift-Share Kota Semarang Tahun 2017-2021

| Kode | Sektor | LQ | DS |
|------|---|-----------|------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Non-Basis | Tidak Kompetitif |
| B | Pertmbangan dan Penggalian | Non-Basis | Tidak Kompetitif |
| C | Industri Pengolahan | Non-Basis | Kompetitif |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | Basis | Tidak Kompetitif |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | Basis | Tidak Kompetitif |
| F | Konstruksi | Basis | Tidak Kompetitif |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran | Basis | Kompetitif |
| H | Transportasi dan Pergudangan | Basis | Tidak Kompetitif |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Non-Basis | Tidak Kompetitif |
| J | Informasi dan Komunikasi | Basis | Tidak Kompetitif |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | Basis | Tidak Kompetitif |
| L | Real Estate | Basis | Kompetitif |
| MN | Jasa Perusahaan | Basis | Kompetitif |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | Basis | Kompetitif |
| P | Jasa Pendidikan | Non-Basis | Tidak Kompetitif |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Non-Basis | Kompetitif |
| RSTU | Jasa Lainnya | Non-Basis | Tidak Kompetitif |

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

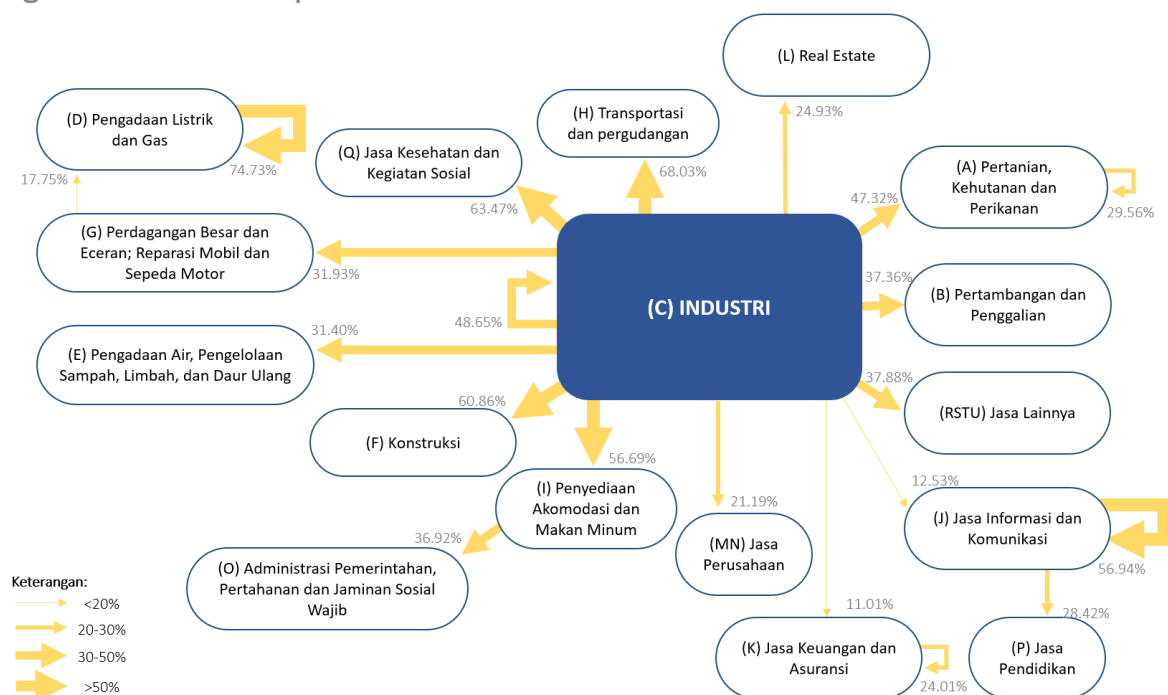
4) Potensi dan Interaksi Sektor Ekonomi Daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor basis yang memiliki nilai $LQ > 1$ dan sektor kompetitif yang memiliki nilai positif adalah sektor perdagangan besar dan eceran, sektor *real estate*, sektor jasa perusahaan, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Namun, terdapat beberapa sektor kompetitif non-basis yang masih perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan untuk meningkatkan perekonomian yaitu sektor industri pengolahan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selain itu, terdapat sektor basis non-kompetitif di Kota Semarang yang masih memerlukan peningkatan produktivitas, inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan antara lain sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, dan sektor jasa keuangan dan asuransi.

Sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan dapat dilihat melalui interaksi ekonomi wilayah. Koefisien *Input-Output* menggambarkan hubungan dinamis antar sektor produksi ekonomi melalui penyebaran input maupun output sektor-sektor ekonomi tersebut. Koefisien ini mempunyai manfaat untuk kegiatan perencanaan pembangunan maupun analisis, sebab perencanaan sektoral dengan menggunakan model yang diturunkan dari tabel *Input-Output* dapat dilakukan secara simultan dan memperlihatkan aspek keterkaitan antar sektor. Sejak tahun 2013, secara sektoral rata-rata distribusi PDRB tertinggi Kota Semarang berada pada sektor industri pengolahan, diikuti dengan sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi. Gambar 41, Gambar 42, dan Gambar 43 menyajikan gambaran tentang penerimaan input dan keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) unggulan dalam perekonomian di Kota Semarang secara menyeluruh.

2016
Rata-Rata Penerimaan Input Sektor Industri Manufaktur
34,35%

Bagan Penerimaan Input



Gambar 41.

Bagan Penerimaan Input Sektor Industri Manufaktur Tahun 2016

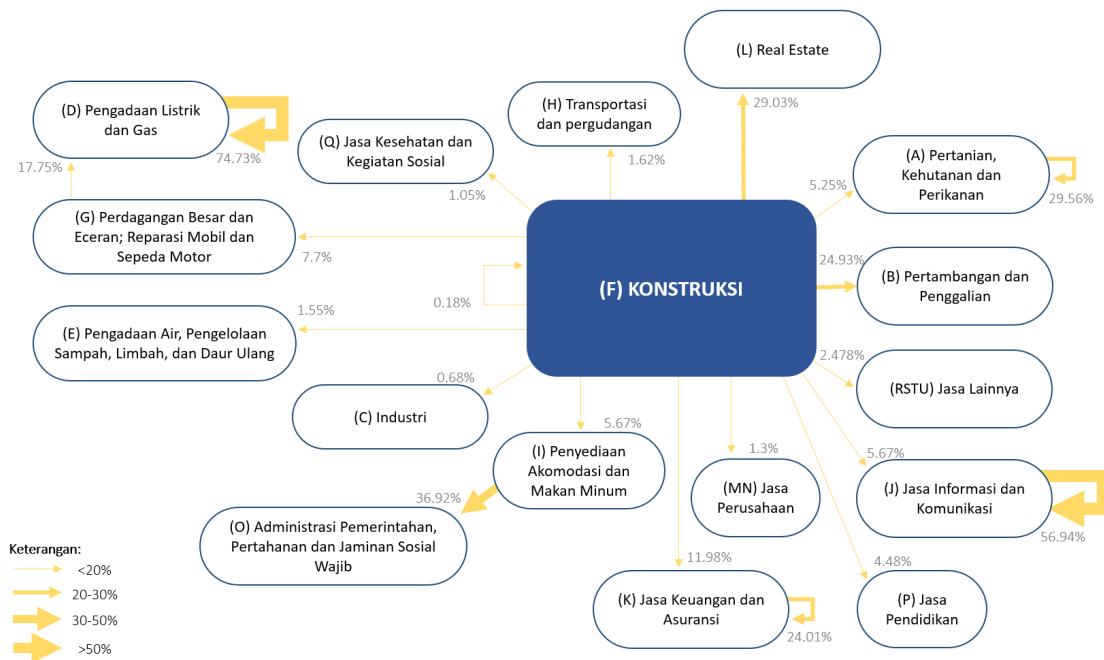
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Bagan penerimaan input industri menjelaskan bahwa sektor industri pengolahan merupakan pemberi input terbesar bagi hampir seluruh sektor ekonomi di Kota Semarang. Pemberian input dari sektor industri ke sektor-sektor lain tersebut berkisar antara 20%-70%. Sektor penerima input terbesar dari sektor Industri adalah sektor transportasi dan pergudangan (68.03%), kemudian berturut-turut adalah

sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (63.47%), sektor konstruksi (60.86%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (56.69%), sektor industri (48.65%), sektor pertanian (47.32%), sektor jasa lainnya (37.88%), sektor pertambangan dan galian (37.36%) serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (31.93%). Sedangkan sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memperoleh input 31.4%.

2016
Rata-Rata Penerimaan Input Sektor Konstruksi
6,09%

Bagan Penerimaan Input



Gambar 42.
Bagan Penerimaan Input Sektor Konstruksi Tahun 2016
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Bagan penerimaan input konstruksi menjelaskan bahwa sektor konstruksi masih memberikan input yang kecil ke sektor lainnya. Namun, terdapat dua sektor yang menerima input cukup besar yaitu sektor real estate (29,03%) dan sektor pertambangan dan penggalian (24,93%). Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor konstruksi di Kota Semarang antara lain jumlah proyek dan realisasi investasi. Selain itu, dukungan regulasi pemerintah, kebijakan-kebijakan sektoral, dan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif juga dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor konstruksi.

Bagan penerimaan input perdagangan menjelaskan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran masih memberikan input yang kecil ke sektor lainnya. Pemberian input dari sektor perdagangan besar dan eceran ke sektor-sektor lain tersebut berkisar antara 7-25%. Sektor penerima input terbesar dari sektor perdagangan adalah sektor konstruksi (23,06%) dan sektor transportasi dan pergudangan (20,13%). Pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier memengaruhi kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran ke sektor ekonomi lain.

Bagan Penerimaan Input



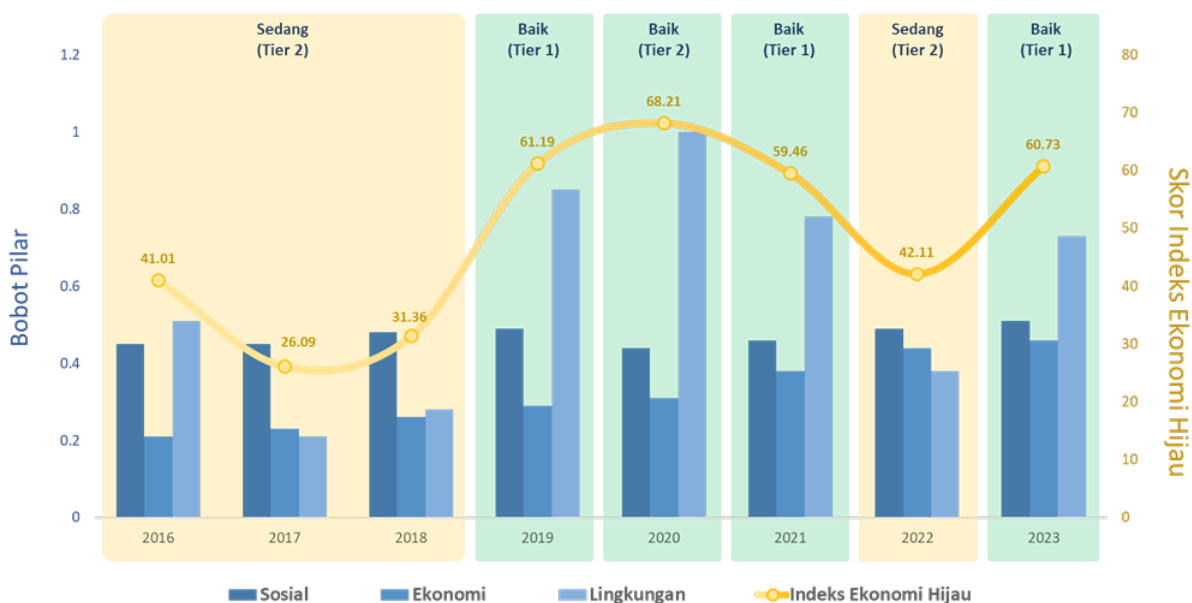
Gambar 43.

Bagan Penerimaan Input Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2016
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

5) Indeks Ekonomi Hijau Kota Semarang

Perhitungan Indeks Ekonomi Hijau terdiri dari 3 pilar, yakni pilar lingkungan (mencakup Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air), pilar sosial (Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Tingkat Kemiskinan), dan pilar ekonomi (PDRB per kapita dan Produktivitas Pertanian). Perhitungan dari pilar tersebut menggunakan pembobotan, dengan bobot pilar lingkungan adalah yang tertinggi (50%) dibanding dengan bobot pilar ekonomi (30%) dan pilar sosial (20%).

Grafik Indeks Ekonomi Hijau



Gambar 44.

Indeks Ekonomi Hijau
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

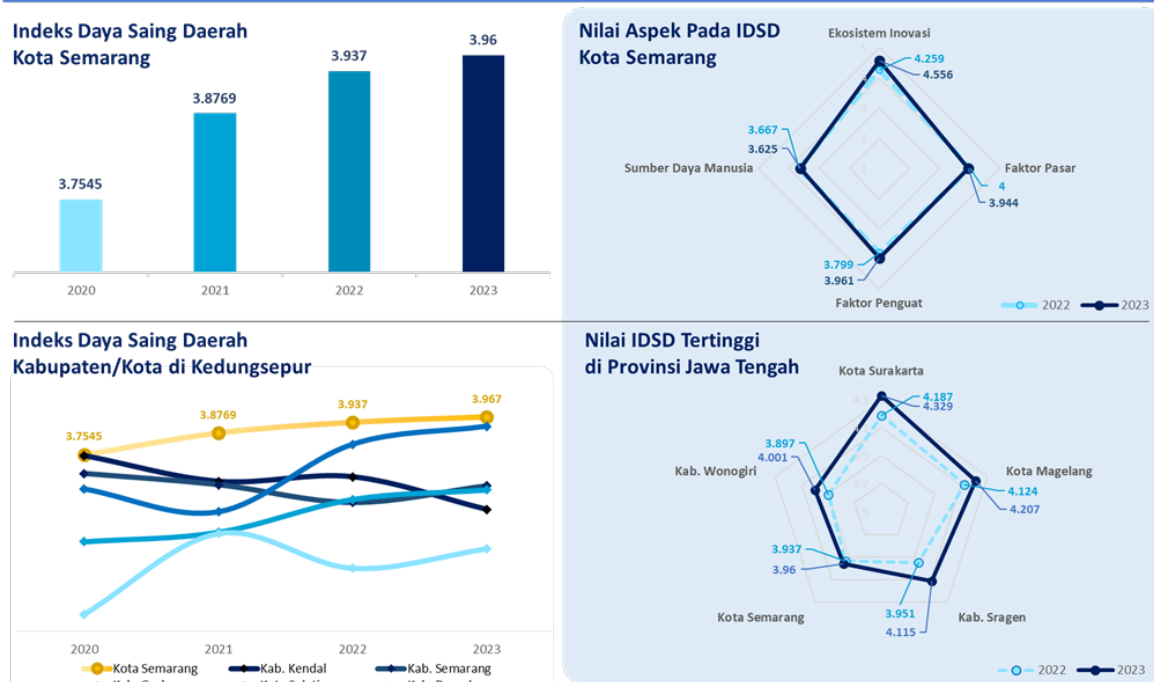
Awal perkembangan ekonomi hijau dimulai sejak tahun 2016, dimana hingga pada tahun 2018 Kota Semarang berada pada kategori Sedang Tier 2. Pada tahun 2019, angka tersebut naik secara signifikan hingga menyentuh kategori Baik Tier 1. Hal ini kembali berlanjut hingga tahun 2020 menjadi kategori Baik Tier 2, dikarenakan adanya Covid sehingga mobilitas dibatasi dan meningkatkan nilai pilar lingkungan, dan pada tahun 2021 kembali menjadi kategori Baik Tier 1. Namun, aktivitas pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 membuat nilai pilar lingkungan menurun, sehingga pada tahun 2022 Kota Semarang kembali pada kategori Sedang Tier 2. Tahun 2023, angka ini kembali meningkat dan kembali menuju kategori Baik Tier 1. Ditargetkan pada pembangunan ke depan, aspek lingkungan tetap menjadi pertimbangan dalam pertumbuhan ekonomi.

6) Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran produktivitas daerah yang akan merefleksikan kemampuan daerah dalam bersaing baik secara nasional maupun global. Indeks Daya Saing Daerah diukur dengan menilai ekosistem inovasi, faktor pasar, faktor penguat dan sumber daya manusia. Indeks daya saing daerah Kota Semarang cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2020 Kota Semarang memiliki skor indeks daya saing daerah sebesar 3,7545 selanjutnya pada tahun 2021 menjadi 3,8769, pada tahun 2022 sebesar 3,937, dan pada tahun 2023 sebesar 3,960. Dalam konteks pembangunan, Kota Semarang selalu meningkatkan kemampuan untuk bersaing.

Selain itu nilai Indeks Daya Saing Daerah berdasarkan empat aspek penilaian tidak semua aspek mengalami kenaikan. Aspek faktor pasar mengalami penurunan dari 4 menjadi 3.944 sedangkan aspek sumber daya manusia mengalami penurunan dari 3,667 menjadi 3,625. Meskipun begitu untuk aspek ekosistem inovasi dan aspek faktor penguat mengalami kenaikan. Dengan demikian dalam meningkatkan daya saing ke depan dapat fokus ke aspek yang nilainya masih kurang dan cenderung menurun.

Indeks Daya Saing Daerah Kota Semarang



Gambar 45.

Indeks Daya Saing Daerah Kota Semarang

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Indeks Daya Saing Daerah Kota Semarang selama empat tahun terakhir selalu lebih unggul dibanding wilayah lain dalam Wilayah Pengembangan Kedungsepur (Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Grobogan, Kota Semarang). Hal ini disebabkan oleh peran Kota Semarang sebagai pusat distribusi konsumsi sektor-sektor unggulan di daerah Kedungsepur. Skor indeks daya saing daerah tahun

Kota Semarang tahun 2020 hingga tahun 2023 selalu berada di atas kabupaten/kota lain di Wilayah Pengembangan Kedungsepur. Skor Indeks Daya Saing Daerah Kota Semarang cenderung stabil dibanding kabupaten/kota lain di Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang fluktuatif.

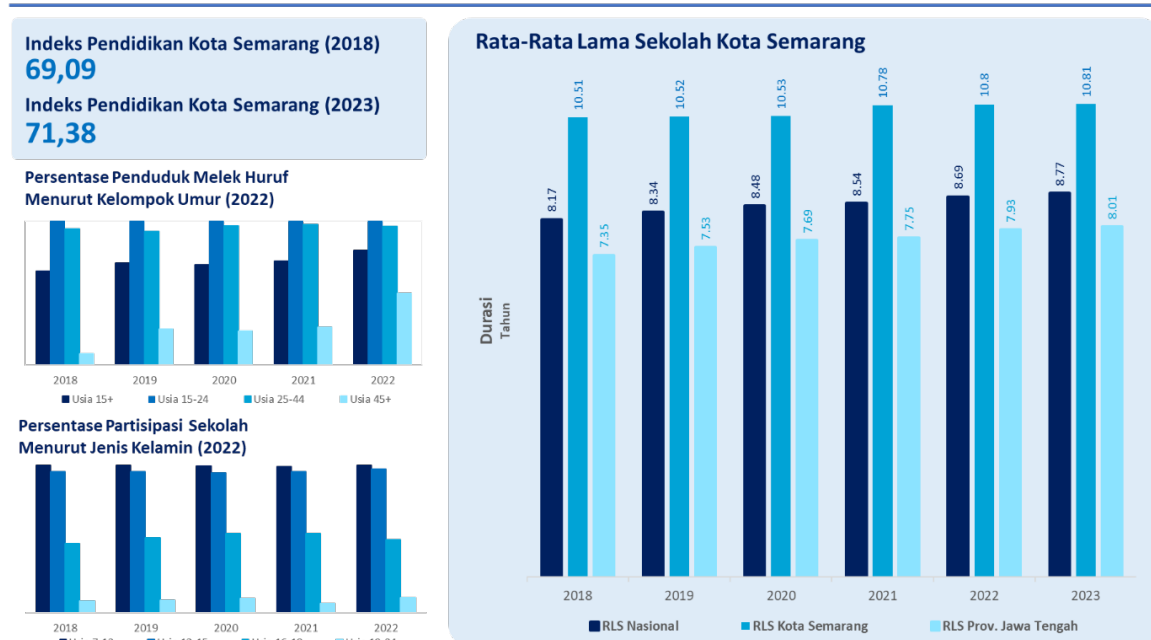
Indeks Daya Saing Daerah Kota Semarang tidak selalu menempati posisi teratas di Provinsi Jawa Tengah namun selalu masuk dalam 5 besar teratas. Pada tahun 2022, Kota Semarang menempati posisi ke 4 dengan skor 3,93. Sedangkan, pada tahun 2023 skor IDSD Kota Semarang meningkat menjadi 3,96 tetapi peringkat Kota Semarang dalam lingkup Jawa Tengah turun ke posisi 5.

2.3.2 Daya Saing SDM

1) Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan dihitung dengan mempertimbangkan tiga indikator, yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka melek huruf (AMH), dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indeks Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2018 sebesar 69,08 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 71,38. Indeks Pendidikan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat suatu wilayah. APS menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Angka partisipasi sekolah yang tinggi menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. AMH persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan, RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Capaian RLS yang tinggi menunjukkan sistem pendidikan berjalan semakin baik (UNESCO, 2009).

Kondisi Pendidikan Kota Semarang



Gambar 46.

Kondisi Pendidikan Kota Semarang

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

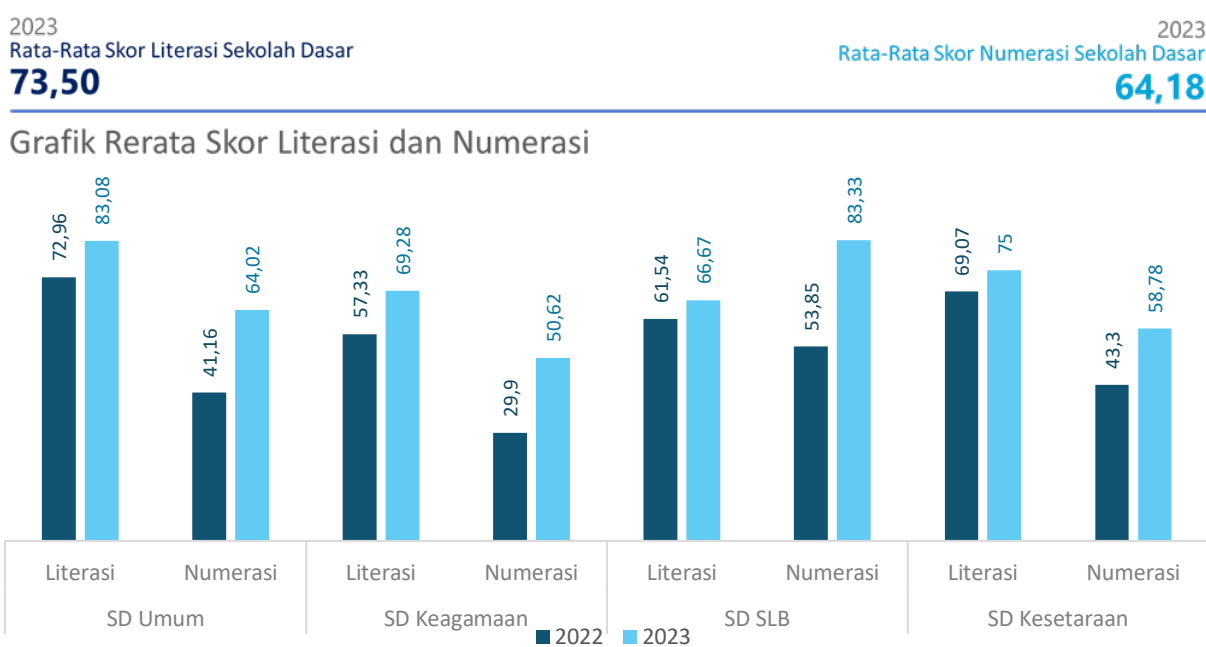
Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang pada gambar di atas, RLS di Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, RLS di Kota Semarang mencapai 10,78 tahun. Angka tersebut meningkat menjadi 10,80 tahun pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 10,81 tahun pada tahun 2023. Peningkatan RLS di Kota Semarang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kota Semarang semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan RLS di Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan

kualitas sumber daya manusia di Kota Semarang, sehingga dapat meningkatkan daya saing Kota Semarang di tingkat nasional maupun internasional.

Selama 5 tahun terakhir, angka melek huruf di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas tercatat 97,91 persen dan pada tahun 2022 telah mencapai 97,91 persen. Jika dibandingkan kelompok umur lainnya, angka melek huruf kelompok umur 15-24 tahun adalah yang tertinggi pada setiap periodenya yang mencapai angka 100 persen, yang berarti penduduk kelompok tersebut sudah tidak ada yang buta huruf. Capaian terendah ada pada kelompok umur 45 tahun keatas, meskipun angkanya terus meningkat namun masih dibawah 98 persen. Hal ini dipengaruhi oleh para penduduk lansia yang tidak pernah bersekolah sehingga tidak dapat membaca dan menulis. Sedangkan, capaian APS pada ketiga periode tersebut tidak menunjukkan perbedaan.

2) Rerata Skor Literasi dan Numerasi

Rerata skor literasi dan numerasi mencerminkan nilai rata-rata dari hasil ujian atau penilaian literasi dan numerasi yang dilakukan pada sekelompok individu dalam jenjang pendidikan tertentu. Penilaian rerata skor literasi dan numerasi dalam rencana pembangunan dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan atau kemajuan sehingga pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan, mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan, dan mengarahkan sumber daya manusia dengan lebih berdaya saing. Pada tahun 2023, skor literasi dan numerasi Kota Semarang secara keseluruhan sebesar 64,37.



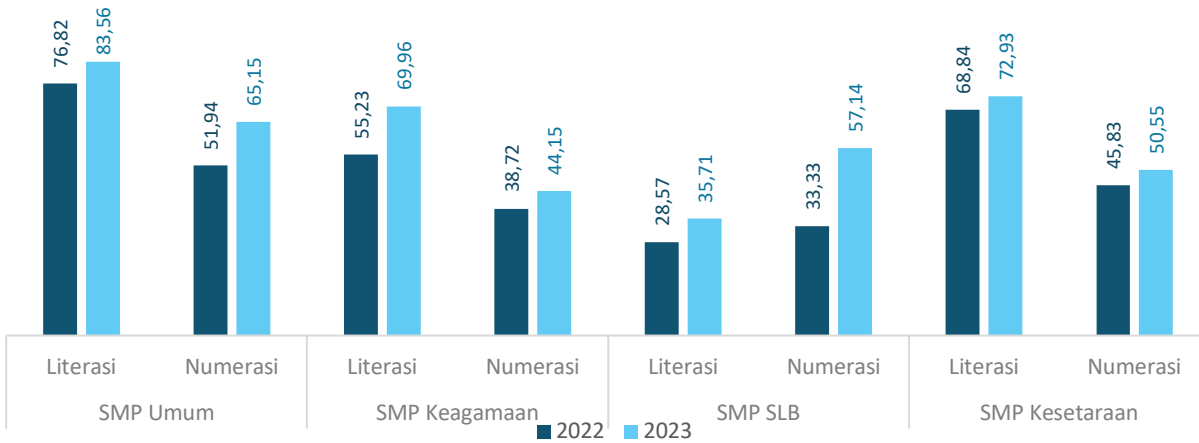
Gambar 47.

Skor Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2022 – 2023

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2023

Grafik di atas menunjukkan rata-rata skor literasi dan numerasi di berbagai jenis sekolah dasar pada tahun 2022-2023. Sekolah Dasar Umum di Kota Semarang Tahun 2023 memiliki skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya kecuali dengan SD SLB yang memiliki skor numerasi lebih tinggi. SD SLB umumnya memiliki rasio guru – siswa yang lebih kecil dibandingkan SD Umum dan memiliki pengajaran yang lebih khusus sehingga dapat memiliki skor yang cenderung lebih tinggi. Rata-rata skor literasi di seluruh sekolah dasar adalah 73,50. Sedangkan, rata-rata skor numerasi di seluruh sekolah dasar adalah 64,18.

Grafik Rerata Skor Literasi dan Numerasi



Gambar 48.

Skor Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan Menengah Atas Tahun 2022 – 2023
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2023

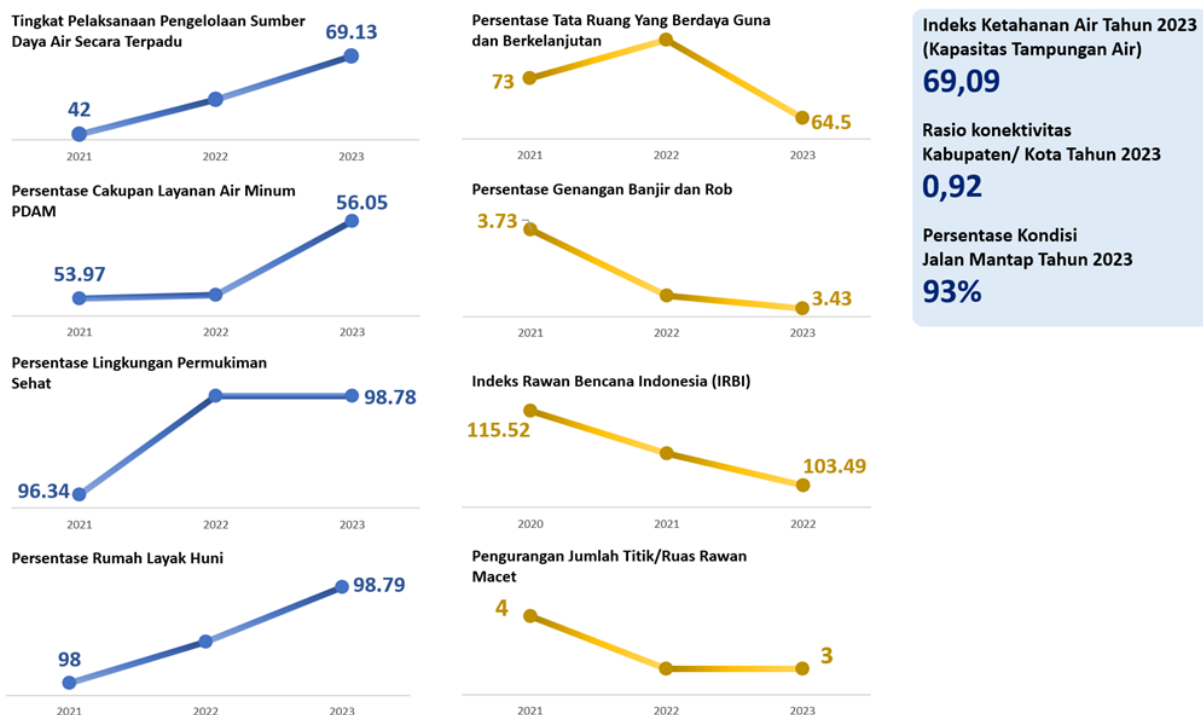
Grafik di atas menunjukkan rata-rata skor literasi dan numerasi siswa di berbagai jenis sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota Semarang untuk tahun 2022 dan 2023. SMA Umum memiliki skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibandingkan jenis SMA yang lain. Secara keseluruhan, skor literasi cenderung pada jenjang ini lebih tinggi daripada skor numerasi di semua jenis sekolah.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah

1) Indeks Kulaitas Layanan Infrastruktur

Kualitas Layanan Infrastruktur digunakan untuk mengukur kinerja infrastruktur pada berbagai bidang. Indeks ini terdiri dari beberapa aspek yang diukur dari tahun 2021-2023. Indeks ini membantu dalam menilai efisiensi, efektivitas, dan biaya infrastruktur dengan melibatkan pengguna, pemilik, operator, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kualitas Layanan Infrastruktur



Gambar 49.

Capaian Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Semarang
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Pada indikator kualitas layanan infrastruktur terdapat beberapa penilaian yang mengalami peningkatan antara lain pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu mengalami peningkatan menjadi 69,13 pada tahun 2023. Selain itu, aspek yang mengalami peningkatan lainnya antara lain cakupan layanan air minum PDAM, lingkungan permukiman yang tergolong sehat, jumlah rumah layak huni, kondisi jalan mantap, dan indeks ketahanan air. Sedangkan, aspek yang mengalami penurunan antara lain persentase genangan banjir dan rob, titik/ruas rawan macet, indeks rawan bencana, dan persentase tata ruang yang berdaya saing guna dan berkelanjutan.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

1) Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparat Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Berikut merupakan data mengenai indikator keamanan dan ketertiban di Kota Semarang.

Tabel 2.

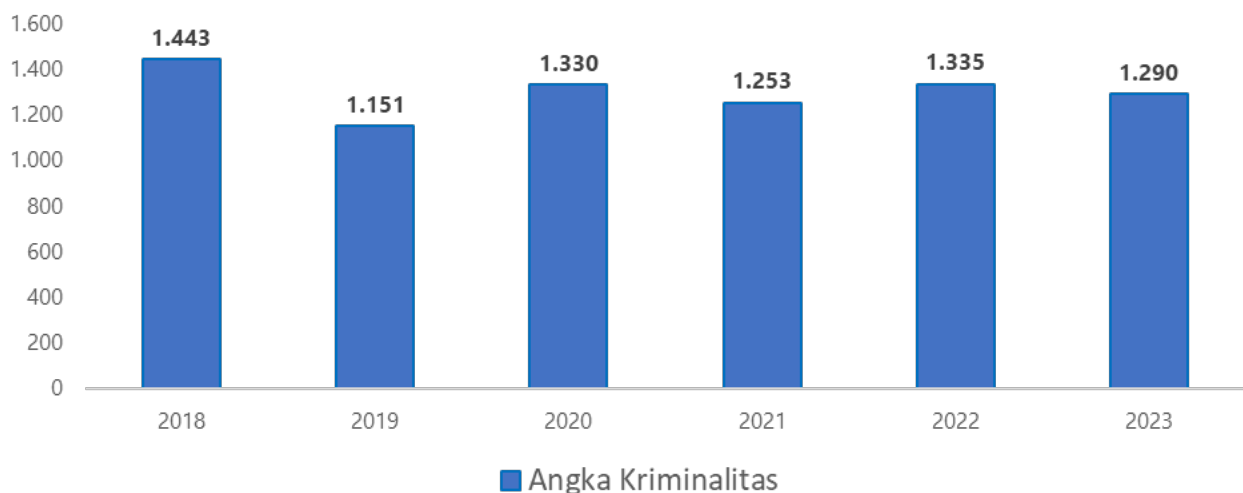
Angka Kriminalitas dan Ketertiban Kota Semarang Tahun 2018-2022

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | | | | | |
|----|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Angka Kriminalitas | Kejadian | 1.443 | 1.151 | 1.330 | 1.253 | 1.335 | 1.290 |
| 2 | Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban | % | NA | 15 | 12,37 | 11,47 | 10,46 | 11,66 |

Sumber: Satpol PP Kota Semarang, 2024

2018 - 2023

Grafik Angka Kriminalitas Kota Semarang 2018-2023



Gambar 50.

Angka Kriminalitas Kota Semarang Tahun 2018-2022

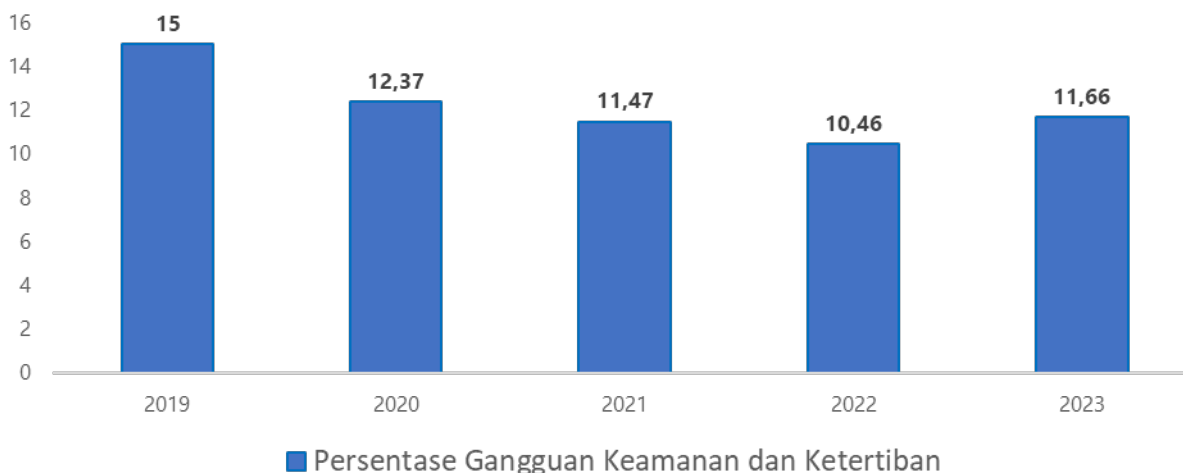
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Dalam rentang tahun 6 tahun terakhir (2018 – 2023) perkembangan angka kriminalitas di Kota Semarang mengalami fluktuasi yang beragam. Pada rentang 2019 hingga 2020 terjadi kenaikan angka kriminalitas yang dipicu oleh melemahnya perekonomian masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Dengan melemahnya perekonomian masyarakat dan desakan dari kebutuhan hidup, maka hal apapun akan dilakukan oleh seorang individu untuk dapat tetap menyambung hidup. Pada

tahun 2021 angka kriminalitas sebesar 1253 kejadian, menurun dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2020 yang sebesar 1330 kejadian, dan keadaan ini juga membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruhi oleh aktivitas kelompok masyarakat.

2019 - 2023

Grafik Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2019-2023



Gambar 51.
Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Pada tahun 2023 pencapaian pada indikator persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban turun menjadi sebesar 11,66%, yang terdiri dari 1.404 angka gangguan keamanan dan ketertiban, dan 1.290 angka kriminalitas di Kota Semarang.

2) Kemudahan Perizinan

Sampai dengan tahun 2021, Perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi lokal SIIMUT (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) dengan 27 jenis layanan. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengajuan perizinan berusaha serta pengajuan perizinan lainnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang dan daerah lainnya menggunakan layanan melalui OSS (*Online Single Submissions*) yang dikembangkan pemerintah pusat untuk semua proses registrasi. Adapun karakteristik izin berusaha oleh pelaku usaha adalah: berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Tentunya dalam masa peralihannya, terdapat beberapa kendala dalam pelayanan perijinan tersebut. Dan sampai dengan saat ini telah dilakukan integrasi secara bertahap antara sistem OSS dengan SIIMUT, meski belum sepenuhnya dapat terwujud. Dalam peningkatan pelayanan tentang perijinan berusaha, selain dilakukannya integrasi sistem juga mengajukan ijin kepada Lembaga OSS untuk mendapatkan Notifikasi Komitmen pelaku usaha di OSS, serta tetap mengoperasikan SIIMUT bagi perijinan dan Non perijinan yang tidak terfasilitasi dalam OSS dan PP Nomor 24 tahun 2018. Berikut merupakan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di Kota Semarang.

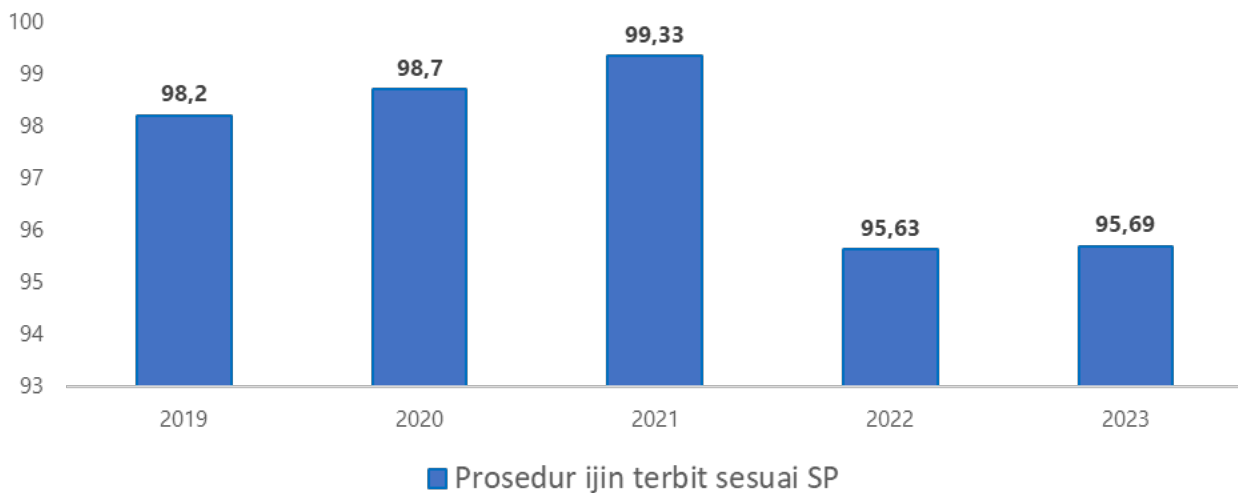
Sejak diberlakukannya SP tentang prosedur ijin terbit di Kota Semarang pada 2020, terjadi tren kenaikan pada kinerja perijinan di Kota Semarang sebesar 1,63% pada 2022.

Tabel 3.
Realisasi Kinerja Fungsi Kemudahan Perijinan

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis) | % | NA | 98,20 | 98,70 | 99,33 | 95,63 | 95,69 |

2019 - 2023

Grafik Prosedur ijin terbit sesuai SP 2019-2023



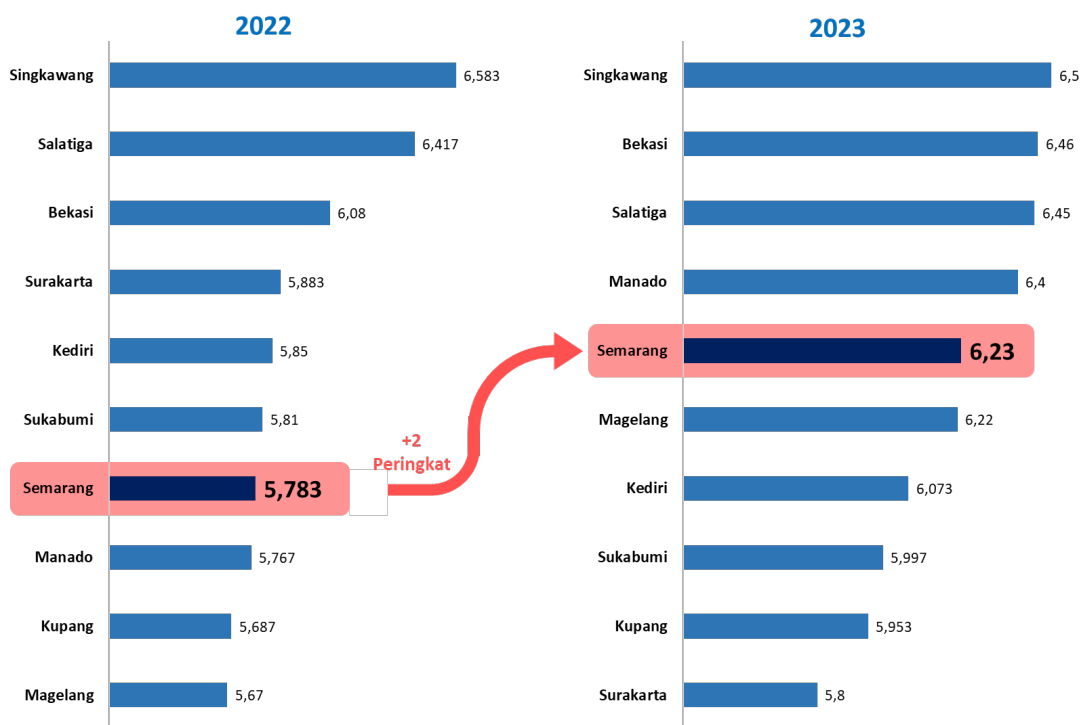
Gambar 52.
Persentase Prosedur Ijin Terbit Sesuai SP
Sumber: DPMPTSP Kota Semarang 2024

3) Indeks Kota Toleran

Kota dengan tingkat toleransi yang tinggi cenderung menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis dan hal tersebut penting bagi kenyamanan dan keamanan investor. Masyarakat yang memiliki sikap saling menghargai dan inklusif terhadap berbagai macam karakteristik sosial budaya akan berdampak pada stabilitas sosial yang semakin baik. Stabilitas sosial ini yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi. Investor cenderung akan memilih lokasi yang aman, stabil dan harmonis untuk menanamkan modal mereka di suatu wilayah. Oleh karena itu, kota yang memiliki skor tinggi dalam Indeks Kota Toleran biasanya juga memiliki daya saing iklim investasi yang lebih baik, karena lingkungan sosial yang harmonis dan toleran adalah salah satu faktor penting dalam keputusan investasi.

Studi Indeks Kota Toleran yang dilakukan oleh SETARA Institute telah menghasilkan peringkat 94 kota di Indonesia yang memiliki skor toleransi tertinggi hingga terendah. SETARA Institute mengidentifikasi tiga aspek dalam memperkuat ekosistem toleransi di suatu kota, yaitu kepemimpinan masyarakat (societal leadership), kepemimpinan politik (political leadership), dan kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership). Berikut merupakan 10 kota dengan peringkat Indeks Kota Toleran tahun 2022 dan 2023 tertinggi di Indonesia.

Kota Semarang merupakan salah satu dari 10 kota dengan Indeks Kota Toleran tertinggi di Indonesia selama tahun 2022 dan 2023. Peringkat Kota Semarang juga meningkat dari peringkat ketujuh menjadi peringkat kelima di tahun 2023. Hal ini menunjukkan ekosistem toleransi yang semakin baik di Kota Semarang. Selain itu, prestasi ini juga bentuk keseriusan pemerintah kota dan masyarakat dalam mengelola toleransi.



Gambar 53.
10 Kota dengan Indeks Kota Toleran Tertinggi tahun 2022-2023
Sumber: SETARA Institute, 2024

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa hal yang membentuk ekosistem toleransi di Kota Semarang semakin baik. Salah satunya yaitu melalui pembentukan Kampung Moderasi Beragama di 2 Kelurahan dan pemberdayaan Kampung Pancasila yang berkolaborasi dengan elemen masyarakat sipil. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memiliki Panduan Kerukunan Hidup Umat Beragama. FKUB di Kota Semarang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok agama yang berbeda dan berperan dalam menjembatani dialog antar umat beragama. Selain antar kelompok agama, FKUB juga memiliki peran dalam menciptakan kegiatan inklusif yang dapat diikuti oleh semua warga sehingga dapat meningkatkan jejaring dan kerja sama dengan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

Ekosistem toleransi yang kuat menjadi modal bagi seluruh elemen kota untuk terus mendorong kemudahan dalam pengurusan izin dengan menciptakan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan kota.

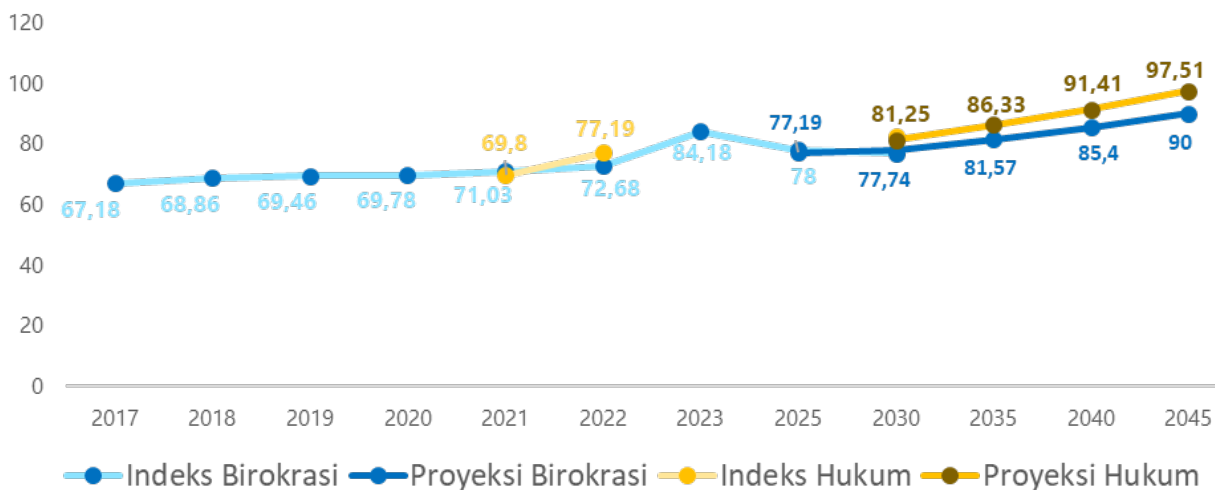
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Aspek Reformasi Birokrasi

Kinerja reformasi birokrasi (RB) di Kota Semarang dari tahun 2015 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2015 mendapatkan nilai sebesar 56,1 (CC) menjadi sebesar 72,68 (BB) pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 29,55 persen dari tahun 2015 – 2022. Indeks Reformasi Hukum adalah salah satu bagian dari proses monitoring dengan tujuan untuk melihat bagaimana regulasi berjalan dengan baik, tepat guna, dan tepat sasaran. Indeks Reformasi Hukum Kota Semarang tahun 2022 yaitu 77,19% masuk dalam kategori cukup baik.

Nilai IRB (Indeks Reformasi Birokrasi) dan Indeks Reformasi Hukum yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan RB di Kota Semarang selalu mengalami perbaikan dan perkembangan. Akan tetapi, IRB ini masih perlu dilakukan peningkatan. Hal ini mengingat masih adanya gap nilai yang cukup besar untuk mencapai titik IRB yang maksimal. Indeks Integritas Nasional adalah upaya menilai risiko korupsi pada sistem pemerintahan daerah tertentu. Nilainya mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 namun mengalami kebaikan 1,01% pada tahun 2023.

Grafik Indeks Reformasi Birokrasi



Gambar 54.

Grafik Indeks Reformasi Birokrasi dan Hukum Kota Semarang Tahun 2017 –2045

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Diproyeksikan, indeks reformasi birokrasi dan reformasi hukum di Kota Semarang akan mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2045. Dari target reformasi birokrasi 77,01 dan reformasi hukum 82,73 di tahun 2030 hingga mencapai 90 untuk reformasi birokrasi dan 97,51 untuk reformasi hukum di tahun 2045. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, demi pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Dalam jangka panjang, peningkatan indeks reformasi birokrasi dan hukum ini diharapkan dapat membawa Kota Semarang menjadi salah satu kota dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia.

2.4.2 Indeks Integritas Nasional

Kota Semarang menunjukkan tren positif dalam hal integritas nasional, dengan indeks yang terus meningkat dari beberapa tahun belakangan. Di tahun 2023, indeks integritas nasional Kota Semarang menunjukkan kemajuan yang signifikan walaupun terjadi penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Indeks integritas nasional bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi pemerintah. Sehingga indikator ini perlu mendapatkan dukungan/dilaksanakan oleh Kab/Kota.

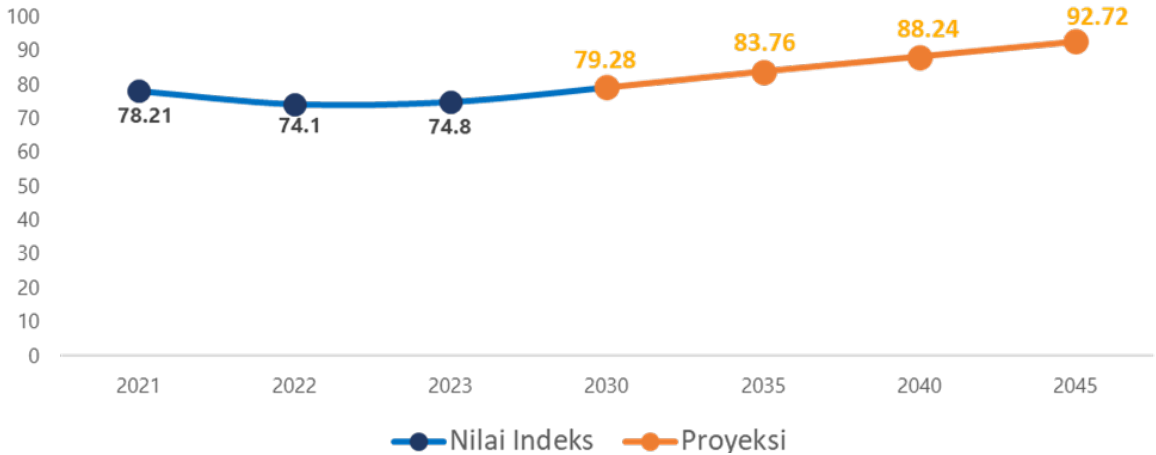
Pemerintah Kota Semarang menargetkan untuk terus meningkatkan indeks ini hingga mencapai 92,72 di tahun 2045. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah kota dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi fokus utama. Melalui program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, ASN diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan etika kerja mereka, sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas tinggi. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi, juga akan diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam upaya reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Dengan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan target peningkatan indeks tata kelola pemerintahan ini dapat tercapai dengan baik.

2021 - 2023

Pertumbuhan

1,01%

Grafik Indeks Integritas Nasional



Gambar 55.

Grafik Indeks Integritas Nasional Kota Semarang 2021-2045

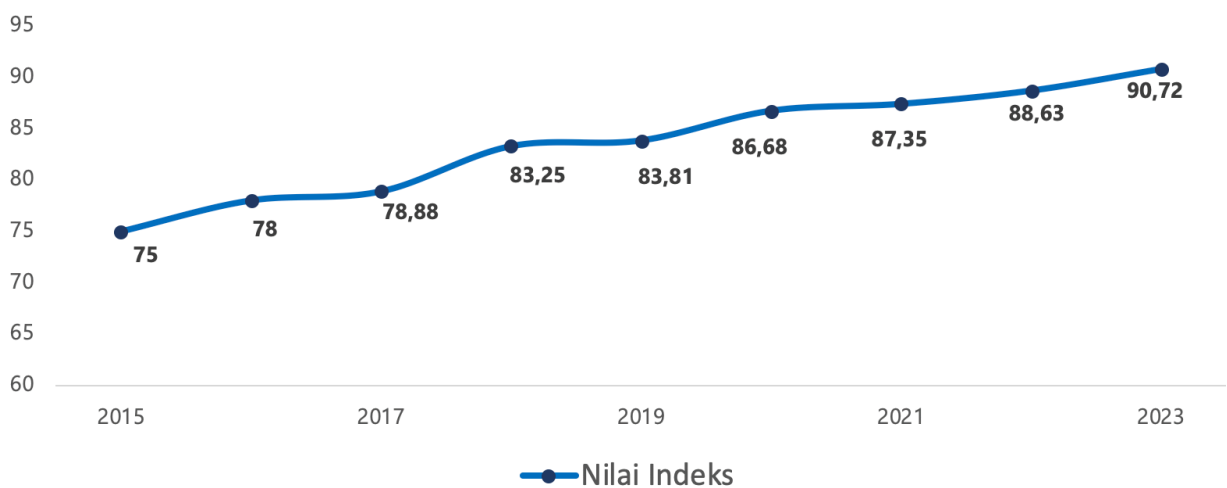
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

2.4.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang setiap tahun mengalami kenaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin naiknya indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat Kota Semarang dari tahun 2015 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan skor mulai dari 75 pada 2015 menjadi 88,63 pada 2022 dapat dilihat pada grafik di atas. Peningkatan kualitas hasil ini akan menjadi modal untuk meningkatkan pelayanan publik di masa depan, dengan didukung teknologi informasi untuk mempercepat penyediaan layanan.

2015 - 2023

Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat



Gambar 56.

Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2015 – 2022

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

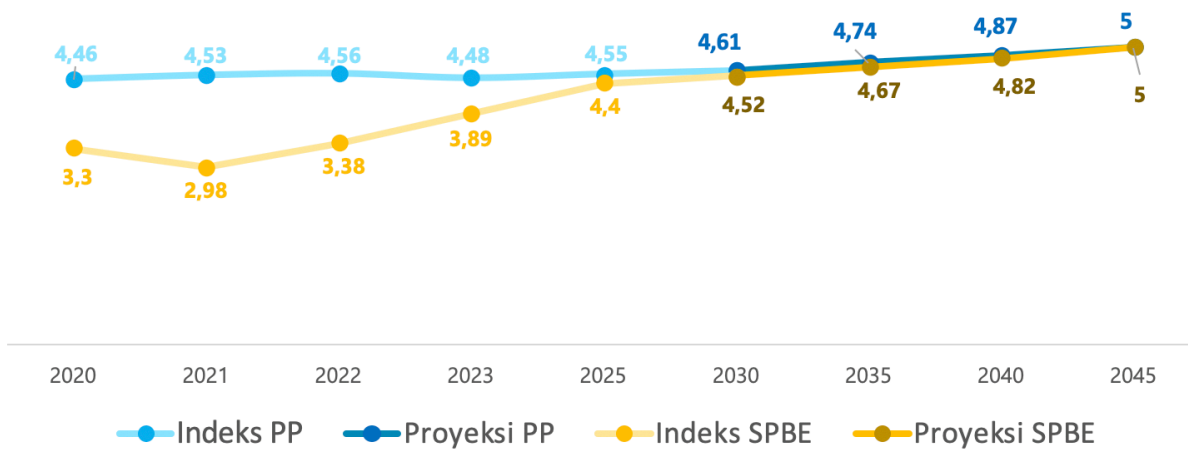
Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang dilakukan oleh sebuah instansi dalam melayani masyarakat menggunakan beberapa aspek yaitu aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, aspek SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi. Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) menilai sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi secara efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2020 - 2045
 Pertumbuhan
0,45%

Pertumbuhan
18,9%

Grafik Indeks Pelayanan Publik

Grafik Indeks Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik



Gambar 57.

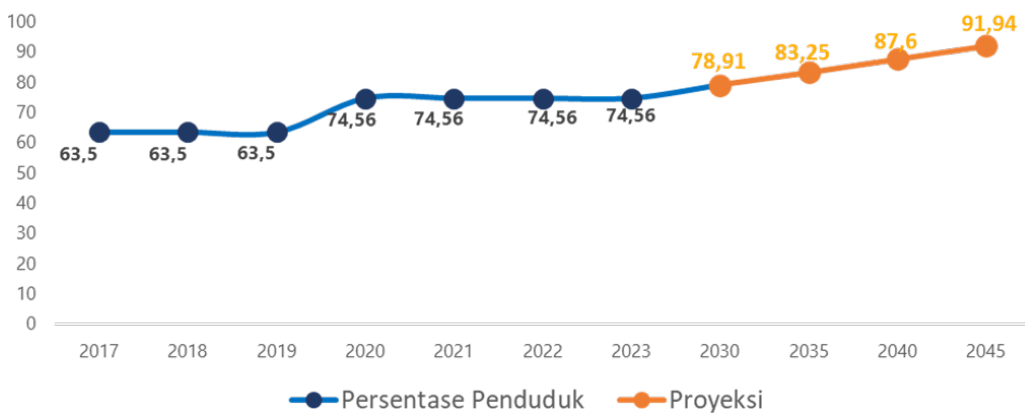
Grafik Indeks Pelayanan Publik dan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik Kota Semarang Tahun 2022-2045

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Nilai Indeks SPBE dan Nilai Pelayanan Publik Kota Semarang yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun begitu perlu strategi yang lebih matang untuk mencapai target indeks yang diharapkan. Nilai indeks tersebut selain menunjukkan peningkatan pelayanan juga menunjukkan bahwa warga Kota Semarang semakin terhubung dengan pemerintah setempat. Maka, nilai indeks ini perlu ditingkatkan lagi untuk mencerminkan bahwa masyarakat percaya kinerja pemerintah dan mampu untuk memberikan pelayanan.

2015 - 2022
 Pertumbuhan
24,27%

Grafik Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya



Gambar 58.

Grafik Penduduk Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

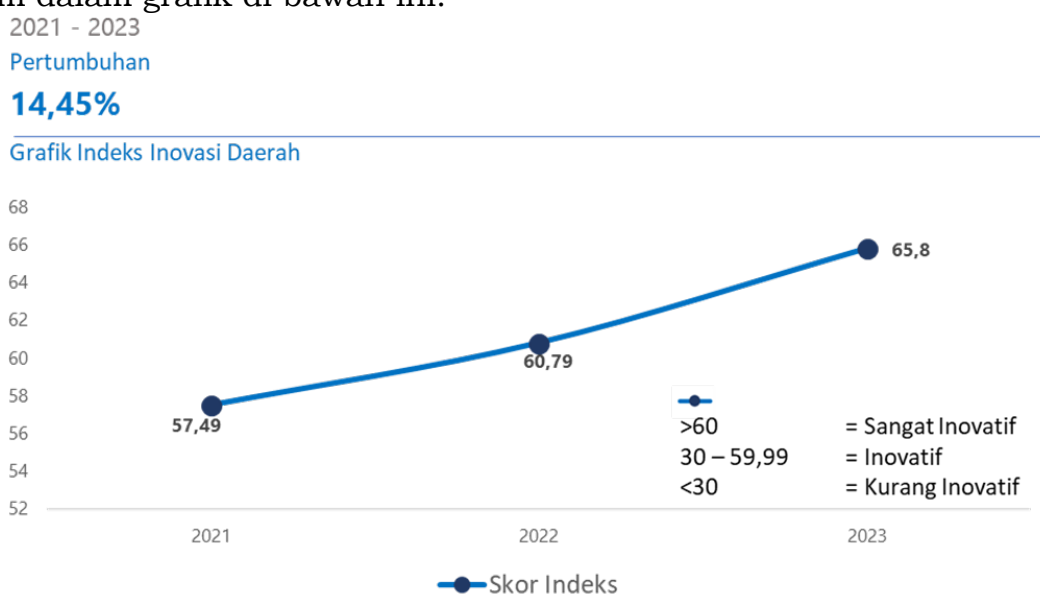
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Persentase penduduk yang merasa aman ketika berjalan sendirian semakin meningkat setiap tahunnya walaupun masih terdapat kurang lebih 25% penduduk yang merasa kurang aman dan nyaman ketika berjalan sendirian berdasarkan data tahun 2023. Untuk mencapai target sempurna diperlukan perbaikan sistem dan prasarana publik agar lebih inklusif. Merasa aman adalah hak dan kebutuhan dasar masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Maka dari itu persentase Penduduk yang Merasa Aman berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggal menunjukkan bahwa lingkungan aman dan tertib serta tidak ada risiko tindak kriminal dan tindak yang merugikan lainnya.

2.4.4 Indeks Inovasi Daerah

Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terwujud melalui penerapan inovasi. Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Kinerja inovasi daerah diukur melalui indeks yang mempertimbangkan aspek kualitas dan kuantitas inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Penilaian inovasi ini dilakukan melalui Indeks Inovasi Daerah (IID) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan pada tabel IID Kota Semarang Tahun 2019-2023, sebagaimana yang tercantum dalam grafik di bawah ini.



Gambar 59.
Grafik Indeks Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2023

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, IID Kota Semarang terus mengalami peningkatan skor dan kategori pada tahun 2021, Kota Semarang mencapai skor 57,49 dengan kategori inovatif, sementara pada dua tahun berikutnya, kota ini berhasil meningkat menjadi kategori sangat inovatif dengan skor 60,79 pada tahun 2022 dan 65,8 pada tahun 2023. Prestasi ini membawa Kota Semarang meraih penghargaan sebagai salah satu kota Terinovatif dalam Innovative Government Award pada tahun 2022 dan 2023.

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota diwajibkan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD. Hasil dari evaluasi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan RPJPD periode berikutnya. Capaian evaluasi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 60.

Grafik Evaluasi Terhadap Hasil Capaian Indikator Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 – 2025

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

1) Capaian Evaluasi RPJPD Periode I (Tahun 2005-2010)

Pencapaian pelaksanaan tahap I dari RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 memiliki progres positif dengan capaian pelaksanaan pembangunan mencapai progres 91,25 persen dengan kategori capaian SANGAT TINGGI. Terdapat 77 indikator pembangunan yang memiliki capaian sangat tinggi dan 7 indikator memiliki capaian Sangat Rendah. Indikator dengan capaian sangat rendah antara lain menurunnya angka kematian ibu sebesar 40/100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, menurunnya jumlah pelanggaran Perda 10% per tahun, persentase peningkatan Nilai PMA dan PMDN, meningkatkan produksi perikanan darat rata-rata 3% setiap tahun dan perikanan laut rata-rata 2% tiap tahun, meningkatnya tingkat produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, serta pencemaran status mutu air.

2) Capaian Evaluasi RPJPD Periode II (Tahun 2010-2015)

Pada pelaksanaan pembangunan periode 2010-2015, capaian pelaksanaan pembangunan mencapai 96,50 persen dengan kategori capaian SANGAT TINGGI. Adapun pelaksanaan pembangunan yang cukup rendah yaitu terkait penambahan jumlah pasar tradisional modern per tahun dan persentase gizi buruk.

3) Capaian Evaluasi RPJPD III (Tahun 2016-2021)

Capaian periode pembangunan tahap III RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata capaian pembangunan mencapai 97,27 persen dengan kategori capaian SANGAT TINGGI. Kondisi ini merupakan salah satu upaya dari pemulihan dampak pandemi COVID-19 yang cukup mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di tahun 2020 hingga 2021. Meskipun begitu, masih terdapat kondisi pembangunan yang masih perlu dioptimalkan kembali yaitu tingkat kearifan budaya lokal yang masih dalam lingkungan capaian sedang.

4) Capaian Evaluasi RPJPD Periode IV (Tahun 2021-2026)

Capaian pembangunan tahap IV RPJMD memakai target, realisasi dan capaian 2022. Pada capaian ini hampir seluruh indikator memiliki kategori capaian SANGAT TINGGI, dengan rata-rata capaian 97,44 persen. Hanya tiga indikator pembangunan yang memiliki capaian rendah dan sangat rendah yakni nilai ekspor, indeks kualitas air, dan indeks profesionalitas ASN. Keempat poin tersebut diharapkan dirumuskan turunan kebijakannya dalam pelaksanaan pembangunan ke depan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Kota Semarang pada masa yang akan datang.

Berikut adalah rekomendasi tindak lanjut yang diusulkan dalam evaluasi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025:

- 1) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang ke depan, diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat setinggi-tingginya sebagai wajah Kota Semarang pada tahun 2045. Selain itu, perlu adanya kesesuaian substansial dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Perlu adanya sinergi dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Jika terdapat urgensi positif dalam perbaikan pembangunan ke depan (adanya peraturan/kajian/kondisi force majeure lainnya), maka dapat melakukan penyusunan perubahan RPJPD Kota Semarang .
- 3) Optimalisasi dalam pemerataan hasil pembangunan harus ditingkatkan oleh stakeholder mengingat capaian Indeks Gini yang meningkat sehingga perlu diturunkan kembali melalui peningkatan kesejahteraan berkeadilan. Sebagai Kota Besar, fokus pembangunan perekonomian dapat dioptimalkan pada pemenuhan investasi pada sektor UMKM dengan harapan memiliki penyerapan tenaga kerja cukup signifikan dan berdaya saing.
- 4) Dalam menurunkan angka pengangguran, perlu adanya kemitraan-kemitraan dalam perekrutan angkatan kerja yang berkualitas, termasuk didalamnya penyelenggaraan pelatihan/pendidikan/bimtek.
- 5) Peningkatan SDM tidak hanya secara umum, namun juga terkait pembangunan berkeadilan baik dalam kesetaraan gender, disabilitas dan sebagainya. Selain itu perlunya peningkatan edukasi masyarakat dalam berbudaya, literasi membaca hingga penggunaan media sosial.
- 6) Meningkatkan budaya inovatif yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal baik pada pemerintahan maupun sektor swasta.
- 7) Sisa tiga tahun pelaksanaan pembangunan jangka panjang diharapkan mampu berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

Berdasarkan hasil analisis diproyeksikan bahwa kelompok umur lansia akan mulai mendominasi Kota Semarang dengan pertumbuhan dari 2020 – 2045 meningkat sebanyak 20%, berdasarkan jenis kelamin akan didominasi oleh penduduk perempuan dengan persentase sebanyak 51% dari total jumlah penduduk pada tahun 2045. Pengembangan pembangunan dan peningkatan kebutuhan lapangan kerja yang inklusif dan berbasis gender perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan yang disusun oleh pemerintah kota. Selain itu, persebaran kepadatan penduduk semakin meningkat ke wilayah pinggiran pusat kota yang akan mempengaruhi kebutuhan hunian dan pemenuhan sarana prasarana dasar perkotaan. Pertumbuhan penduduk ini tentu akan mempengaruhi kebutuhan sarana kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan lainnya. Penjelasan detail dan lebih lanjut pada bagian proyeksi jumlah penduduk total, proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, dan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana di Kota Semarang.

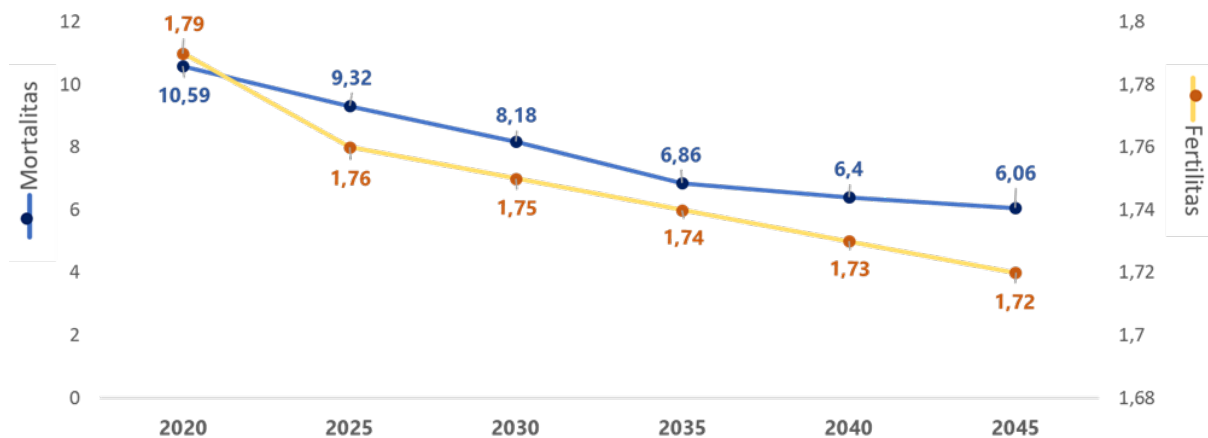
1) Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang

Parameter proyeksi penduduk di Kota Semarang menggunakan BPS Kota Semarang dengan data dasar tahun 2020 yang bersumber dari *long form* hasil sensus penduduk 2020. *Total Fertility Rate* (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita. Diproyeksikan kondisi TFR mengalami penurunan dari tahun 2025-2045, penurunan TFR yang ada di masyarakat dimungkinkan terjadi salah satunya karena adanya pola faktor usia pernikahan di masyarakat semakin tinggi mulai berkisar antara 25-30 tahun, sehingga menyebabkan kecenderungan angka kelahiran juga semakin kecil.

2020 - 2045
Penurunan Mortalitas
42,77%

2020 - 2045
Penurunan Fertilitas
3,9%

Grafik TFR dan IMR



*) Keterangan:

Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Gambar 61.

Grafik TFR dan IMR Kota Semarang Tahun 2020 – 2045

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Selain itu menurut *New Household Economics* adanya kecenderungan meningkatnya pendapatan dan pendidikan penduduk perempuan menyebabkan semakin banyaknya waktu yang digunakan untuk mengurus anak (khususnya waktu ibu), sehingga berdampak pada berkurangnya minat melahirkan anak di usia muda atau dengan rentan waktu pendek (Ritonga,2003:7). Dengan mempertimbangkan tren pola kehidupan masyarakat di Kota Semarang maka TFR di Kota Semarang dari tahun 2025 hingga 2045 terus mengalami penurunan dari nilai 1,76 tahun 2025 menjadi 1,72 di tahun 2045.

Parameter yang kedua yang digunakan untuk memproyeksi jumlah penduduk adalah *Infant Mortality Rate (IMR)*. Angka kematian bayi/*Infant Mortality Rate* adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kondisi IMR di Kota Semarang diproyeksi terus mengalami penurunan dengan mempertimbangkan semakin baiknya pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak sehingga tingkat kematian bayi dapat terus ditekan dan diminimalisir. Selain itu semakin meningkatnya tingkat pendidikan ibu juga memiliki peran yang penting dalam penurunan IMR di Kota Semarang selama 20 tahun yang akan datang. Kondisi IMR di tahun 2025 diproyeksikan berada di angka 9,32 kemudian berangsur menurun hingga tahun 2045 IMR di Kota Semarang sebar 6,06 (Gambar 2.6.1).

Tabel 4.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Semarang

| Penduduk Tahun 2023 | Satuan | Proyeksi Penduduk (Orang) | | | | |
|---------------------|--------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1.694.743 | Orang | 1.722.421 | 1.782.575 | 1.828.904 | 1.859.868 | 1.874.716 |

Sumber: Laporan Akhir Analisis Demografi Kota Semarang, 2023

2023 – 2045
 Pertumbuhan
13,6%

Grafik Proyeksi Penduduk 2025-2045



Gambar 62.
 Grafik Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045
 Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Diproyeksikan pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.722.421 jiwa, meningkat sebesar 3,49% menjadi 1.782.575 jiwa pada tahun 2030. Selanjutnya, terjadi peningkatan sebesar 2,60% menjadi 1.828.904 jiwa pada tahun 2035, lalu meningkat lagi sebesar 1,69% menjadi 1.859.868 jiwa pada tahun 2040. Peningkatan terakhir diproyeksikan sebesar 0,80% pada tahun 2045, mencapai jumlah penduduk sebanyak 1.874.716 jiwa.

2) Proyeksi Struktur Penduduk

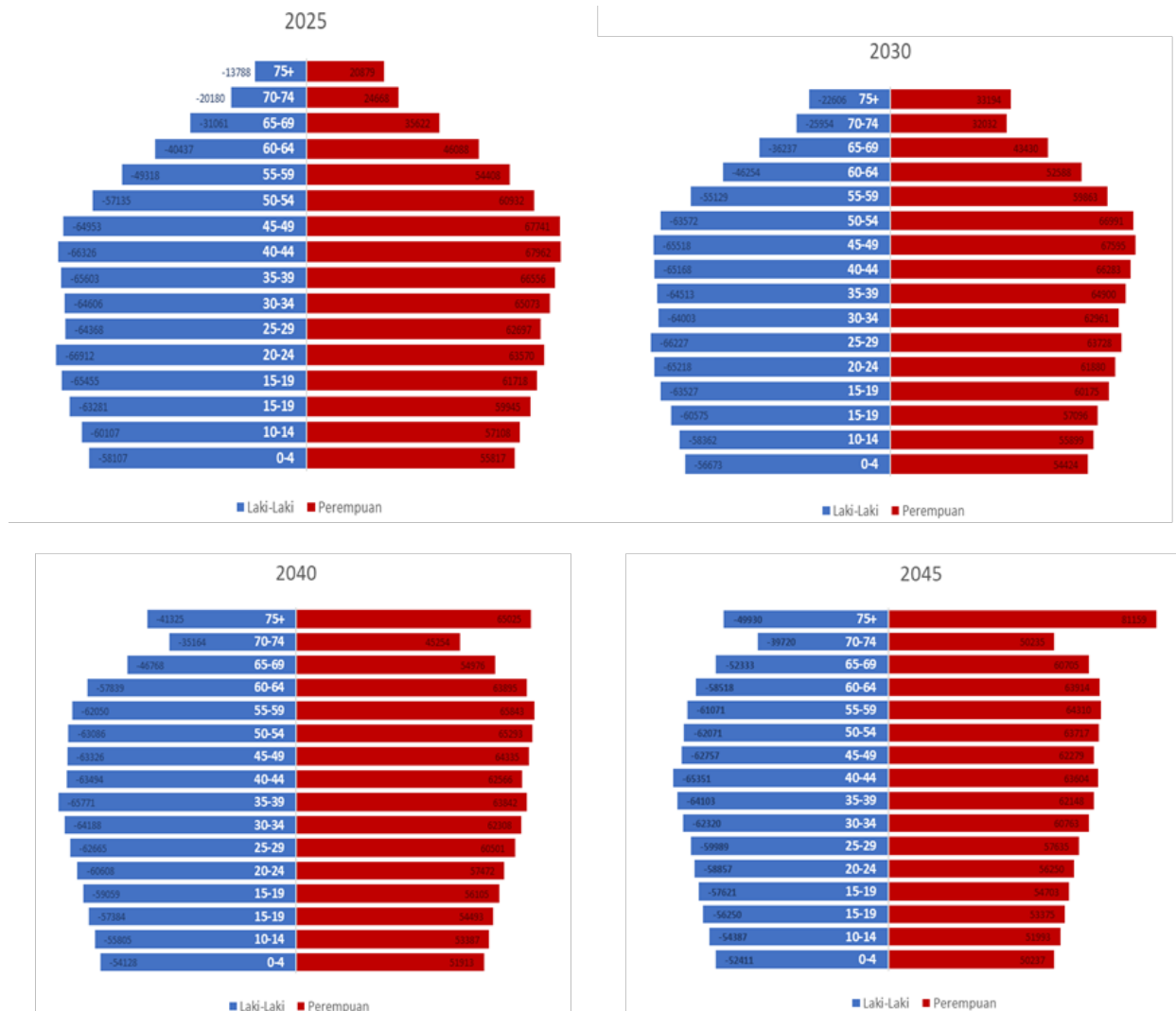
Proyeksi jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2025 adalah 851.637 orang, kemudian meningkat menjadi 879.536 orang pada tahun 2030, 899.978 orang pada tahun 2035, 912.660 orang pada tahun 2040, dan 917.689 orang pada tahun 2045.

Tabel 5.

Proyeksi Struktur Penduduk Kota Semarang

| Jenis Kelamin | Penduduk Tahun 2023 (Orang) | Proyeksi Penduduk (Orang) | | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Laki-Laki | 838.437 | 851.637 | 879.536 | 899.978 | 912.660 | 917.689 |
| Perempuan | 856.306 | 870.784 | 903.039 | 928.926 | 947.208 | 957.027 |
| Rasio | 97,9 | 97,8 | 97,4 | 96,9 | 96,4 | 95,9 |

Sumber: Laporan Akhir Analisis Demografi Kota Semarang, 2023



Gambar 63.
 Proyeksi Struktur Penduduk Kota Semarang tahun 2025 – 2045
 Sumber: Laporan Akhir Analisis Demografi Kota Semarang, 2023

Sedangkan proyeksi jumlah penduduk perempuan pada tahun 2025 adalah 870.784 orang, kemudian meningkat menjadi 903.039 orang pada tahun 2030, 928.926 orang pada tahun 2035, 947.208 orang pada tahun 2040, dan 957.027 orang pada tahun 2045. Rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan pada tahun 2023 adalah 97,9, dan diproyeksikan akan menjadi 97,8 pada tahun 2025, 97,4 pada tahun 2030, 96,9 pada tahun 2035, 96,4 pada tahun 2040, dan 95,9 pada tahun 2045.

Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan diproyeksikan terus meningkat dari tahun 2023 hingga 2045, dengan rasio laki-laki terhadap perempuan yang menurun, yang mengindikasikan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan lebih cepat dan memerlukan perencanaan kebijakan yang matang untuk mengantisipasi perubahan demografi dan kebutuhan sosial ekonomi di masa depan.

3) Proyeksi Distribusi Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk di Kota Semarang selain di hitung secara matematis juga memperhatikan kebijakan pengembangan infrastruktur dalam beberapa dokumen perencanaan ruang di Kota Semarang. Dari tahun 2025 hingga 2045 terdapat 7 kecamatan yang terus mengalami pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yakni Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Pedurungan, Genuk, dan Ngaliyan. Selain karena tren selama 10 tahun kebelakang di 7 kecamatan tersebut terus mengalami kenaikan, pertambahan jumlah penduduk juga diprediksi terjadi karena arah persebaran penduduk yang mulai menuju daerah pinggi (pusat pelayanan kota) atau daerah perbatasan, dan juga karena faktor pembangunan infratraktur daerah pinggiran kota yang semakin massif. Dilain sisi pertambahan jumlah penduduk di 7 kecamatan tersebut, menyebabkan jumlah penduduk di 9 kecamatan lainnya semakin menurun setiap tahunnya.

Hingga akhir 2045, terdapat 4 kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni Kecamatan Candisari, Semarang Timur, Semarang Tengah, dan Tugu, dimana ke-4 kecamatan tersebut saat ini dapat dikatakan sebagai pusat perkotaan yang nantinya diprediksi penduduknya akan cenderung bergeser ke daerah pinggiran yang memiliki kemudahan akses mobilitas, cenderung terhindar dari macet, dan memiliki luas lahan yang cukup memadai untuk tempat tinggal. Secara rinci proyeksi jumlah penduduk di Kota Semarang berdasarkan kecamatan pada tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.
Proyeksi Distribusi Penduduk Kota Semarang Tahun 2025-2045

| Kecamatan | Penduduk Tahun 2023 (Orang) | Proyeksi Penduduk (Orang) | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Mijen | 56.570 | 100.328 | 122.796 | 149.069 | 171.399 | 177.508 |
| Gunungpati | 75.027 | 113.089 | 128.740 | 144.898 | 155.732 | 163.831 |
| Banyumanik | 128.225 | 149.586 | 155.556 | 159.496 | 166.084 | 172.017 |
| Gajahmungkur | 63.430 | 51.650 | 45.294 | 36.631 | 27.300 | 24.128 |
| Semarang Selatan | 82.931 | 51.808 | 41.008 | 28.882 | 21.891 | 19.818 |
| Candisari | 79.902 | 72.190 | 66.966 | 59.268 | 48.749 | 44.354 |
| Tembalang | 142.941 | 221.346 | 256.573 | 295.815 | 330.863 | 348.778 |
| Pedurungan | 175.770 | 202.856 | 211.113 | 217.443 | 221.536 | 223.078 |
| Genuk | 91.527 | 144.999 | 168.835 | 195.084 | 211.348 | 216.464 |
| Gayamsari | 73.584 | 67.550 | 62.859 | 55.671 | 48.641 | 43.694 |
| Semarang Timur | 78.889 | 59.252 | 50.761 | 40.257 | 32.344 | 27.918 |
| Semarang Utara | 127.921 | 111.418 | 103.435 | 93.132 | 85.154 | 79.437 |
| Semarang Tengah | 71.674 | 46.618 | 37.212 | 26.173 | 20.026 | 16.603 |
| Semarang Barat | 158.981 | 142.529 | 134.363 | 123.859 | 112.664 | 108.714 |
| Tugu | 30.904 | 33.114 | 31.409 | 27.196 | 24.134 | 21.149 |
| Ngaliyan | 120.922 | 154.087 | 165.653 | 176.030 | 182.004 | 187.225 |
| Jumlah | 1.559.198 | 1.722.420 | 1.782.573 | 1.828.904 | 1.859.869 | 1.874.716 |

Sumber: Laporan Akhir Analisis Demografi Kota Semarang, 2023

Data ini menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2045, terdapat pertumbuhan signifikan dalam jumlah penduduk di beberapa kecamatan seperti Mijen, Tembalang, dan Ngaliyan, sementara kecamatan lain seperti Gajahmungkur, Semarang Selatan, dan Semarang Tengah mengalami penurunan jumlah penduduk, yang mengindikasikan adanya pergeseran konsentrasi penduduk dan kemungkinan perubahan kebutuhan infrastruktur dan layanan di masing-masing kecamatan.

4) Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk usia 0-44 tahun selama 2025-2045 setiap tahunnya diproyeksikan akan terus mengalami penurunan, dikarenakan semakin kecilnya angka kelahiran yang disebabkan oleh adanya perubahan pola hidup penduduk khususnya perempuan, dari segi pendidikan maupun pendapatan/pekerjaan. Selanjutnya jumlah penduduk usia 45-49 tahun diprediksi akan mulai mengalami penurunan di tahun 2040 hingga 2045, sedangkan jumlah penduduk usia 55-95 tahun akan mulai mengalami penurunan di tahun 2045.

Berbanding terbalik dengan kondisi jumlah penduduk usia ≤ 54 tahun, jumlah penduduk usia ≥ 64 tahun akan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2025-2045. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk lansia (usia tua) kan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci kondisi jumlah penduduk berdasarkan usia di Kota Semarang tahun 2025 hingga 2045 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 7.

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kota Semarang Tahun 2025-2045

| Kelompok Usia | Penduduk Tahun 2023 (Orang) | Proyeksi Penduduk (Orang) | | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 0-4 | 114.139 | 113.924 | 111.097 | 108.847 | 106.041 | 102.648 |
| 5-9 | 120.325 | 117.215 | 114.261 | 111.436 | 109.192 | 106.380 |
| 10-14 | 124.657 | 123.226 | 117.671 | 114.709 | 111.877 | 109.625 |
| 15-19 | 128.960 | 127.173 | 123.702 | 118.130 | 115.164 | 112.324 |
| 20-24 | 129.453 | 130.482 | 127.098 | 123.645 | 118.080 | 115.107 |
| 25-29 | 127.625 | 127.065 | 129.955 | 126.591 | 123.166 | 117.624 |

| Kelompok Usia | Penduduk Tahun 2023 (Orang) | Proyeksi Penduduk (Orang) | | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 30-34 | 130.860 | 129.679 | 126.964 | 129.858 | 126.496 | 123.083 |
| 35-39 | 133.310 | 132.159 | 129.413 | 126.716 | 129.613 | 126.251 |
| 40-44 | 135.199 | 134.288 | 131.451 | 128.727 | 126.060 | 128.955 |
| 45-49 | 128.500 | 132.694 | 133.113 | 130.335 | 127.661 | 125.036 |
| 50-54 | 113.331 | 118.067 | 130.563 | 131.046 | 128.379 | 125.788 |
| 55-59 | 98.848 | 103.726 | 114.992 | 127.299 | 127.893 | 125.381 |
| 60-64 | 81.143 | 86.525 | 98.842 | 109.791 | 121.734 | 122.432 |
| 65+ | 128.393 | 146.198 | 193.453 | 241.774 | 288.512 | 334.082 |
| Jumlah | 1.694.743 | 1.722.421 | 1.782.575 | 1.828.904 | 1.859.868 | 1.874.716 |

Sumber: Laporan Akhir Analisis Demografi Kota Semarang, 2023

Jika dilihat dari komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tua (≥ 65 tahun), diproyeksikan jumlah usia produktif masih mendominasi atau lebih banyak dibandingkan usia non produktif (penduduk usia muda dan tua) di tahun 2025 hingga 2045. Meskipun demikian angka ketergantungan penduduk diproyeksikan terus mengalami peningkatan dari 2025 angka ketergantungan sebesar 40,97% (artinya dalam 100 penduduk usia produktif menanggung beban 41 penduduk usia non produktif) meningkat setiap tahunnya hingga ditahun 2045 angka ketergantungan Kota Semarang menjadi 53,42% artinya dalam 100 penduduk usia produktif menanggung beban 53 penduduk usia non produktif). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan beban ekonomi dan sosial pada penduduk usia produktif untuk menopang penduduk usia non produktif.

Tabel 8.

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kota Semarang Tahun 2025-2045

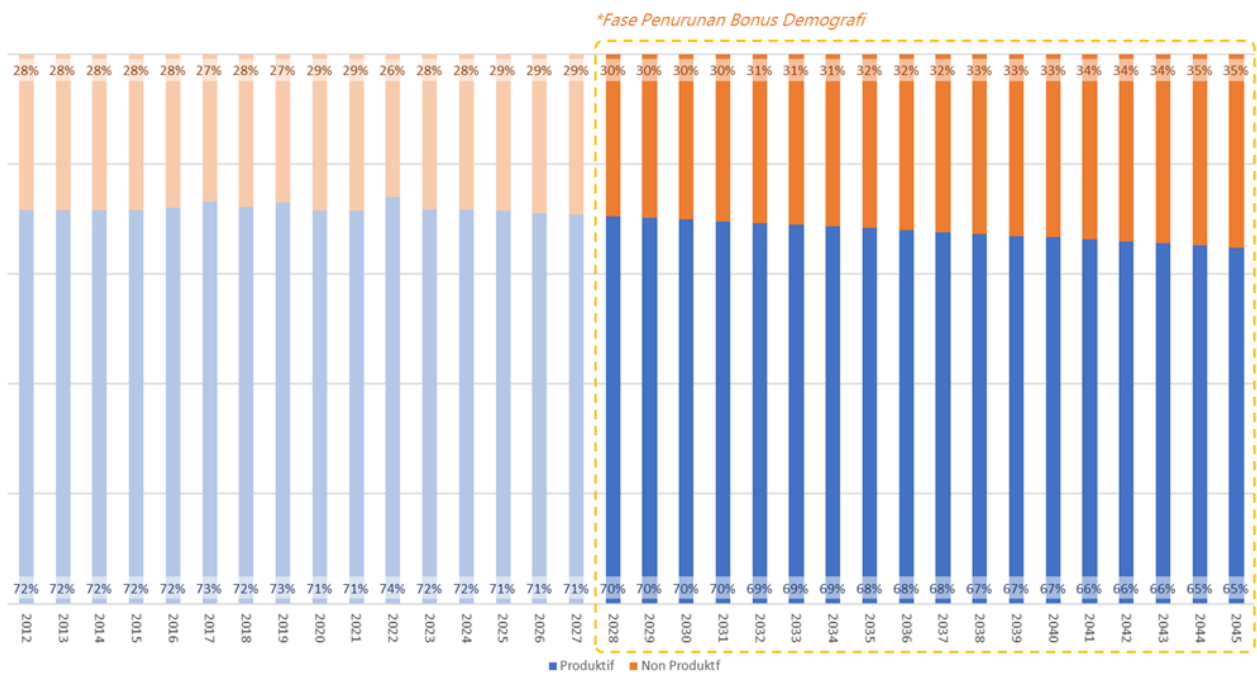
| Kelompok Usia | Penduduk Tahun 2023 (Orang) | Proyeksi Penduduk (Orang) | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 0-14 (usia muda) | 359.121 | 354.365 | 343.029 | 334.992 | 327.110 | 318.653 |
| 15-64 (usia produktif) | 1.207.229 | 1.221.858 | 1.246.093 | 1.252.138 | 1.244.246 | 1.221.981 |
| ≥ 65 (usia tua) | 128.393 | 146.198 | 193.453 | 241.774 | 288.512 | 334.082 |
| Angka Ketergantungan | 40,38 | 40,97 | 43,05 | 46,06 | 49,48 | 53,42 |

Sumber: Laporan Akhir Analisis Demografi Kota Semarang, 2023

5) Proyeksi Bonus Demografi

Data bonus demografi Kota Semarang menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga 2045, penduduk usia produktif (15-64 tahun) selalu mendominasi lebih dari 65% dari total penduduk, dengan puncaknya mencapai 74% pada tahun 2022. Setelah puncaknya, persentase penduduk usia produktif menurun secara bertahap hingga mencapai 65% pada tahun 2045. Penurunan bonus demografi ini secara signifikan diprediksi mulai tahun 2028. Sementara itu, persentase penduduk non produktif (usia muda 0-14 tahun dan usia tua ≥ 65 tahun) meningkat dari 28% pada tahun 2012 menjadi 35% pada tahun 2045. Dengan peningkatan jumlah penduduk non produktif, beban ekonomi pada penduduk usia produktif akan semakin besar. Pada tahun 2045, setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 35 penduduk non produktif, dibandingkan dengan 28 penduduk non produktif pada tahun 2012. Penurunan bonus demografi mengindikasikan bahwa diperlukan perencanaan strategis untuk menghadapi perubahan komposisi penduduk ini. Kebijakan harus difokuskan pada pemberdayaan penduduk usia produktif, serta dukungan sosial dan ekonomi untuk penduduk non produktif.

Meskipun jumlah penduduk usia produktif tetap dominan, perubahan kecil namun konsisten dalam komposisi usia produktif dan non produktif menunjukkan adanya dinamika demografi yang memerlukan perencanaan strategis untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Dengan meningkatnya proporsi penduduk non produktif, potensi pertumbuhan ekonomi dapat terpengaruh, karena lebih banyak sumber daya yang harus dialokasikan untuk mendukung penduduk non produktif.



Gambar 64.

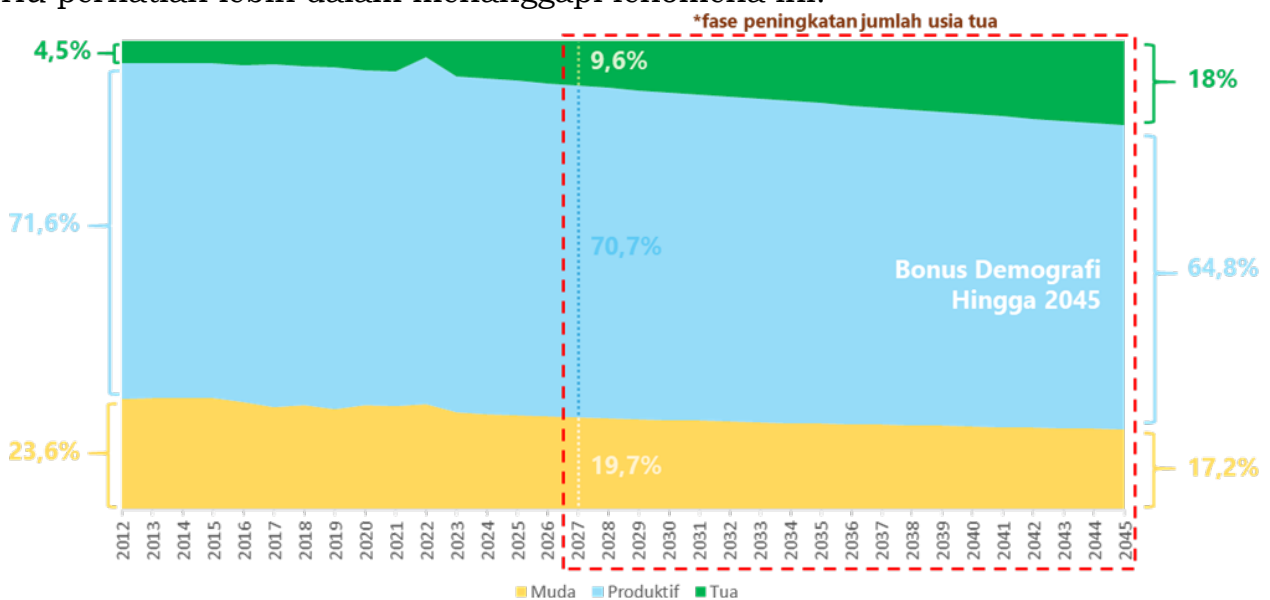
Proyeksi Bonus Demografi Kota Semarang Hingga Tahun 2045

Sumber: Laporan Akhir Analisis Demografi Kota Semarang, 2023

6) Proyeksi Penduduk Usia Tua

Berdasarkan kelompok usia, proyeksi jumlah penduduk usia 0-44 tahun selama periode 2025-2045 menunjukkan kecenderungan penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya angka kelahiran yang dipengaruhi oleh perubahan pola hidup masyarakat, terutama perempuan, baik dari segi pendidikan maupun pendapatan/pekerjaan. Sementara itu, proyeksi jumlah penduduk usia 45-49 tahun menunjukkan mulai terjadi penurunan pada tahun 2040 hingga 2045. Sedangkan, untuk kelompok usia 55-95 tahun, diprediksi akan mulai mengalami penurunan pada tahun 2045.

Berdasarkan hasil proyeksi, secara agregat jumlah usia produktif tetap mendominasi dibanding usia tua dan usia muda. Namun, secara persentase proporsi usia tua terus meningkat, proporsi usia muda menurun, dan proporsi usia produktif cenderung stabil dengan persentase yang tidak berubah secara signifikan. Peningkatan jumlah usia tua akan dimulai pada tahun 2027 dan diproyeksikan akan terus meningkat sampai 2045. Hal ini menjadi isu terkait kependudukan yaitu aging population, walaupun secara proporsi masih rendah dibanding usia produktif namun perlu perhatian lebih dalam menanggapi fenomena ini.



Gambar 65.

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

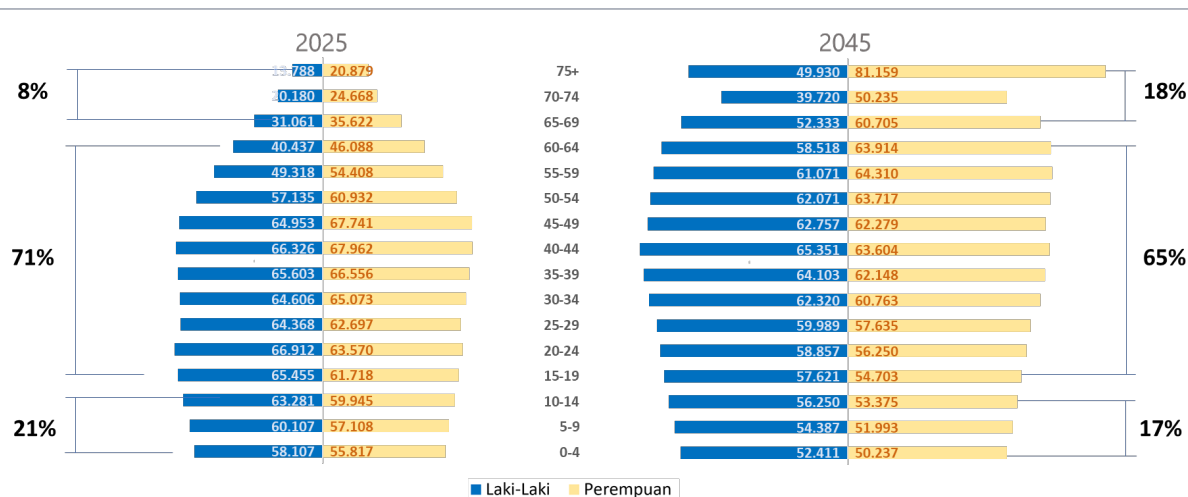
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Jika dilihat dari komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tua (≥ 65 tahun), diproyeksikan jumlah usia produktif masih mendominasi atau lebih banyak dibandingkan usia non produktif (penduduk usia muda dan tua) di tahun 2025 hingga 2045. Meskipun demikian angka ketergantungan penduduk diproyeksikan terus mengalami peningkatan dari 2025 angka ketergantungan sebesar 40,97%, meningkat setiap tahunnya hingga ditahun 2045 angka ketergantungan Kota Semarang menjadi 53,42%.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, Kota Semarang akan mengalami bonus demografi pada kisaran tahun 2030-2040. Sehingga dalam rentan waktu tersebut perlu diperkirakan dan dipersiapkan kebijakan terkait peningkatan kualitas SDM untuk menyiapkan tenaga kerja yang produktif dan unggul sehingga dapat menekan angka pengangguran. Di tahun 2025 perlu adanya kebijakan berbasis peningkatan SDM yang berdaya saing untuk mendorong kompetensi masyarakat sekaligus mendorong terbukanya peluang usaha baru. Memasuki Tahun 2030 hingga 2040 perlu penguatan kapasitas SDM dan penguatan sektor usaha baik dibidang UMKM maupun sektor yang berpotensi lainnya untuk mendorong serapan tenaga kerja dan tumbuhnya ekonomi masyarakat yang mandiri. Selanjutnya memasuki tahun 2045 perlu adanya dorongan untuk menumbuhkan peluang kerja berbasis lansia sebagai upaya memfasilitasi masyarakat usia lansia yang membutuhkan pekerjaan.

Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dari tahun 2025 hingga 2045 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2025 hingga 2030 diproyeksikan piramida penduduk Kota Semarang berbentuk Piramida stasioner berbentuk granat atau segi empat dengan jumlah penduduk paling banyak pada usia produktif. Sedangkan memasuki tahun 2035-2045 piramida penduduk di Kota Semarang diproyeksikan berbentuk Piramida konstruktif memiliki bentuk seperti batu nisan atau guci terbalik dengan jumlah penduduk usia >75 tahun lebih besar dibanding penduduk usia lainnya.

Piramida Penduduk Tahun 2025 dan 2045



Gambar 66.

Grafik Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2025 dan 2045

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1) Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Serta Pengaruhnya Terhadap Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Proyeksi jumlah penduduk di Kota Semarang selain dihitung secara matematis juga memperhatikan kebijakan pengembangan infrastruktur dalam beberapa dokumen perencanaan ruang di Kota Semarang. Dari tahun 2025 hingga 2045 terdapat 7 kecamatan yang terus mengalami pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yakni Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Pedurungan, Genuk, dan Ngaliyan. Selain karena tren selama 10 tahun terakhir di 7 kecamatan tersebut terus mengalami kenaikan, pertambahan jumlah penduduk juga diprediksi terjadi karena arah persebaran penduduk yang mulai menuju daerah

pinggir (pusat pelayanan kota) atau daerah perbatasan, dan juga karena faktor pembangunan infrastruktur daerah pinggiran kota yang semakin masif. Dilain sisi pertambahan jumlah penduduk di 7 kecamatan tersebut, menyebabkan jumlah penduduk di 9 kecamatan lainnya semakin menurun setiap tahunnya.

Hingga akhir 2045, terdapat 4 kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni Kecamatan Candisari, Semarang Timur, Semarang Tengah, dan Tugu, dimana ke-4 kecamatan tersebut saat ini dapat dikatakan sebagai pusat perkotaan yang nantinya diprediksi penduduknya akan cenderung bergeser ke daerah pinggiran yang memiliki kemudahan akses mobilitas, cenderung terhindar dari macet, dan memiliki luas lahan yang cukup memadai untuk tempat tinggal. Secara rinci proyeksi jumlah penduduk di Kota Semarang berdasarkan kecamatan pada tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan banyak penduduk persatuan luas wilayah. Perhitungan tersebut sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Klasifikasi kepadatan penduduk menurut SNI 03- 6981-2004 disebut rendah ketika kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/ha, sedang ketika diantara 151-200 jiwa/ha, tinggi ketika kepadatan antara 201-400 jiwa/ha dan sangat padat ketika lebih dari 400 jiwa/ha.

Dalam rentang waktu 20 tahun, mulai dari tahun 2025 hingga 2045, diproyeksikan bahwa kepadatan penduduk di Kota Semarang akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun 2025, diperkirakan kepadatan penduduk di Kota Semarang mencapai 4.608 jiwa/km². Selanjutnya, diprediksi bahwa angka ini akan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai proyeksi kepadatan penduduk sebesar 5.016 jiwa/km² pada tahun 2045.

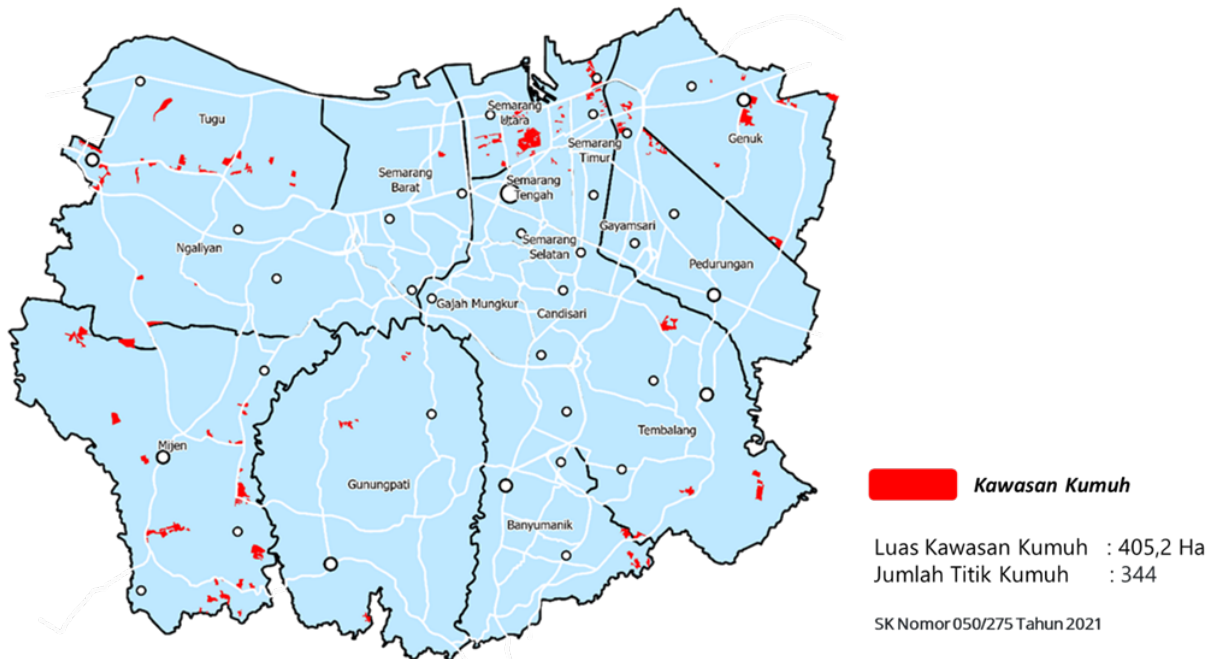
Pada tahun 2025, diproyeksikan terdapat 5 Kecamatan di Kota Semarang dengan kepadatan penduduk berstatus rendah, yaitu Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tugu, dan Ngaliyan. Sementara itu, dalam rentang tahun 2030-2035, proyeksi menunjukkan bahwa 5 kecamatan akan tetap memiliki kepadatan penduduk berstatus rendah, yaitu Kecamatan Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Tugu, dan Ngaliyan. Kemudian, di periode tahun 2040 hingga 2045, proyeksinya berkembang menjadi enam kecamatan dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah, melibatkan Kecamatan Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Semarang Tengah, Tugu, dan Ngaliyan. Informasi lebih rinci mengenai proyeksi kondisi kepadatan penduduk di Kota Semarang Tahun 2025-2045 dapat ditemukan dalam tabel 2.6.1.

2) Proyeksi Sarana Prasarana Rumah dan Tempat Tinggal

Pemenuhan kebutuhan rumah/tempat tinggal sering kali dihadapkan pada permasalahan pemukiman kumuh yang cenderung mengakibatkan munculnya rumah tidak layak huni. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Semarang menetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh seluas 431,54 ha yang meliputi 45 kelurahan di 13 kecamatan yang tertuang melalui SK Wali Kota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang. Kondisi di dalam SK Wali Kota Semarang tersebut merupakan data dasar untuk penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang kemudian tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Tahun 2022 hingga 2026. Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kota Semarang tersebut menjadi acuan prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman bersama pemerintah provinsi dan pusat.

Melihat persebaran kawasan kumuh di Kota Semarang, diketahui bahwa kawasan kumuh terpusat di titik-titik pusat permukiman. Contohnya seperti di Semarang Utara, Genuk, Tugu dan Mijen. Kawasan kumuh di Kota Semarang merupakan salah satu permasalahan yang menghambat pembangunan kota di masa depan. Kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak memenuhi syarat kesehatan, sanitasi, dan keamanan. Menurut data BPS tahun 2019, terdapat 1.072 hektar kawasan kumuh di Kota Semarang, yang meliputi 15 kecamatan dan 74 kelurahan. Implikasi dari kondisi ini adalah meningkatnya risiko penularan penyakit,

pencemaran lingkungan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merencanakan dan melaksanakan program penataan kawasan kumuh yang berkelanjutan, partisipatif, dan inklusif.



Gambar 67.
Lokasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Semarang
Sumber: SK Walikota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021

Kawasan permukiman kumuh yang terdapat di Kota Semarang berupa kawasan kumuh bertipologi permukiman kumuh pesisir, permukiman kumuh pinggir kota, permukiman kumuh pusat kota, permukiman padat bangunan, permukiman baru, permukiman genangan banjir, permukiman dekat sungai, permukiman bantaran sungai, permukiman dekat pertanian dan permukiman pesisir.

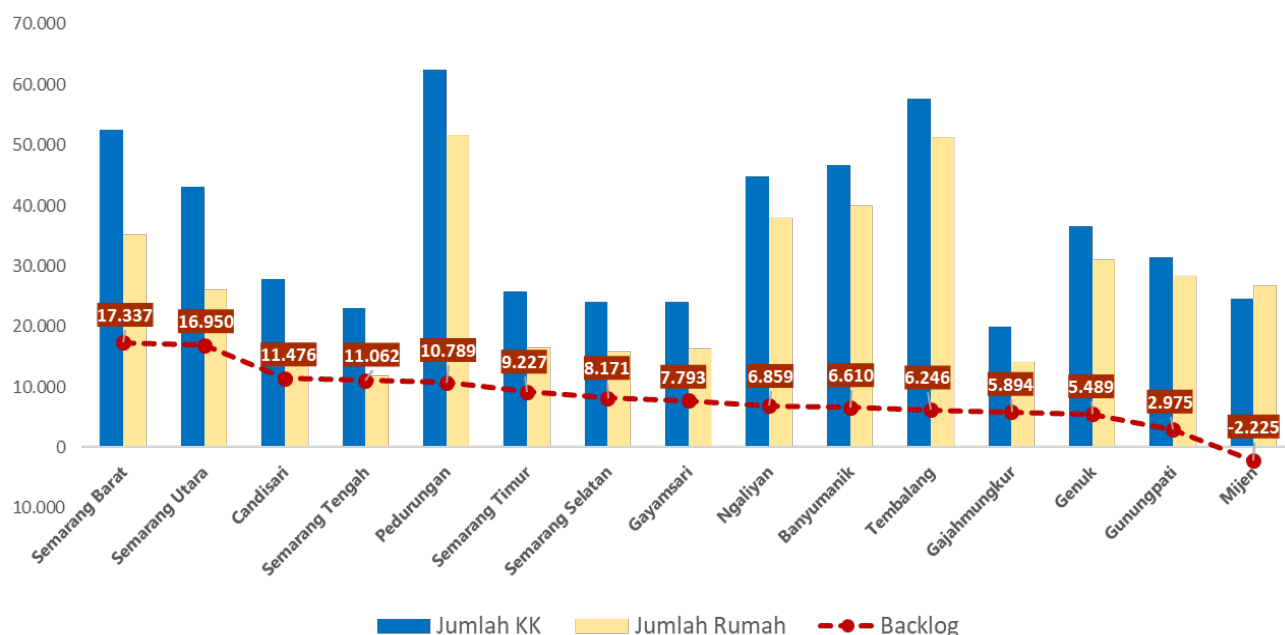
Selanjutnya untuk menentukan kebutuhan rumah perlu untuk melihat kondisi eksisting Backlog rumah di suatu daerah. Backlog rumah adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah. Backlog rumah dari perspektif kependudukan dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal yaitu satu keluarga menghuni satu rumah. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Backlog* rumah dari perspektif kependudukan adalah

$$\text{Backlog} = \Sigma \text{Keluarga} - \Sigma \text{rumah}$$

Namun, dalam kenyataannya, banyak keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri atau tinggal bersama dengan keluarga lain. Hal ini menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk dan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatasi backlog rumah dengan menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan program perumahan bersubsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

124.653

Grafik Backlog Kota Semarang per Kecamatan



Gambar 68.

Grafik Backlog Kota Semarang Per Kecamatan Tahun 2022

Sumber: RP3 Kota Semarang Tahun, 2022

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Data dasar RTLH menjadi salah satu data yang perlu diperhatikan untuk melihat kondisi kebutuhan rumah atau tempat tinggal masyarakat ke depannya. Hingga bulan November 2023 masih terdapat 6.113 RTLH di Kota Semarang, dengan jumlah RTLH terbanyak berada di Kecamatan Semarang Utara. Dalam jangka waktu 20 tahun mendatang, dari tahun 2025-2045 diproyeksikan kebutuhan tempat tinggal bagi warga Kota Semarang terus mengalami kenaikan, dengan asumsi pada setiap keluarga terdiri dari tiga orang.

Berdasarkan Penyusunan Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022, rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Semarang adalah sebanyak 3,03 yang artinya setiap keluarga rata-rata terdiri dari 3 orang. Apabila diasumsikan 1 Kepala Keluarga memiliki 1 hunian, maka kebutuhan hunian Kota Semarang pada tahun 2025-2045 adalah seperti pada tabel 9.

Tabel 9.

Proyeksi Jumlah Hunian Kota Semarang Tahun 2025-2045

| Kelompok Usia | Tahun 2023 | Tahun | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 359.121 | 354.365 | 343.029 | 334.992 | 327.110 | 318.653 |
| Jumlah Kepala Keluarga Penduduk (Jiwa) | 359.121 | 354.365 | 343.029 | 334.992 | 327.110 | 318.653 |
| Luas Kavling (m2) | | 41.338.098 | 42.781.793 | 43.893.705 | 44.636.849 | 44.993.197 |
| Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit) | 497.786 | 574.140 | 594.192 | 609.635 | 619.956 | 624.906 |

Sumber: Laporan Akhir Masterplan Hunian Vertikal, 2022

Kebutuhan hunian Kota Semarang adalah sebanyak 574.140 hunian pada tahun 2025, 594.192 hunian pada tahun 2030, 609.635 hunian pada tahun 2035, 619.956 hunian pada tahun 2040, dan 624.906 hunian pada tahun 2045. Dalam jangka waktu 20 tahun mendatang, dari tahun 2025-2045 diproyeksikan kebutuhan tempat tinggal bagi warga Kota Semarang terus mengalami kenaikan, dengan asumsi pada setiap keluarga terdiri dari tiga orang. Adapun proyeksi kebutuhan tempat

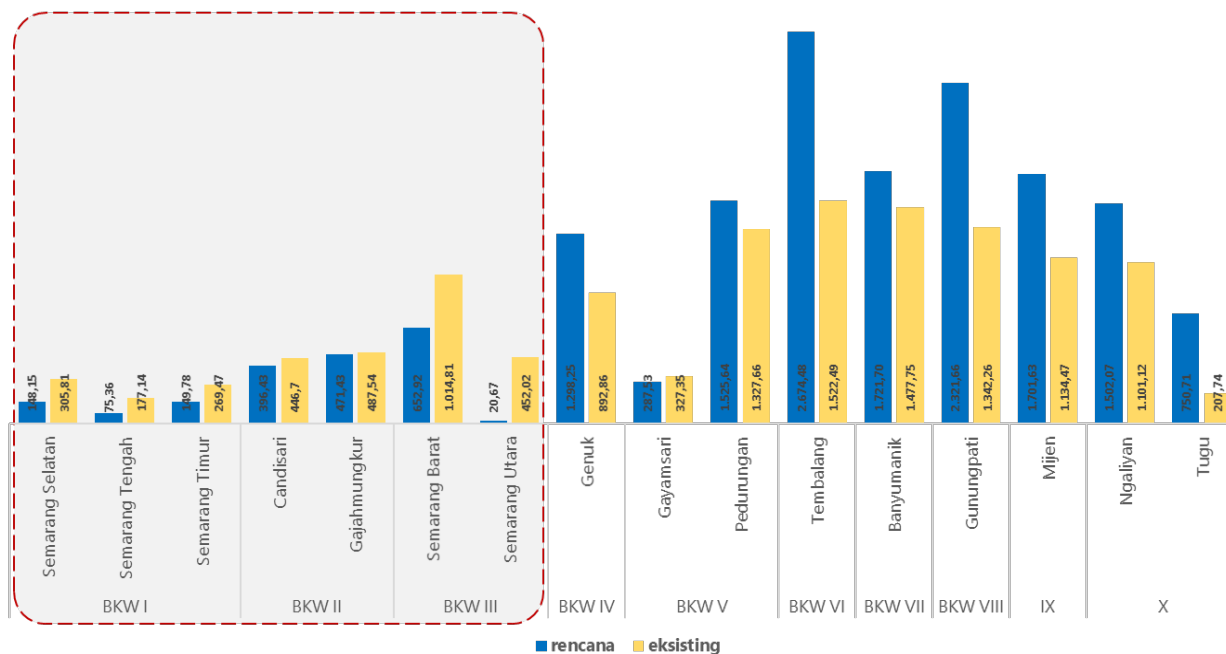
tinggal di Kota Semarang di Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan dengan peruntukan lahan dan ketersediaan lahan yang ada agar tidak terjadi kesalahan penggunaan lahan di masa yang akan datang.

Kebutuhan luas kavling minimum hunian Kota Semarang adalah sebesar 41.338.098 m² pada tahun 2025, 42.781.793 m² pada tahun 2030, 43.893.705 m² pada tahun 2035, 44.636.849 m² pada tahun 2040, dan 44.993.197 m² pada tahun 2045. Pada tahun 2022 kepadatan hunian Kecamatan Tembalang yaitu 19 hunian per hektar. Dengan arahan luasan kawasan pada RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 yaitu 2674,48 ha di Kecamatan Tembalang maka diproyeksikan kepadatan hunian pada 2045 yaitu menjadi 44 hunian per hektar. Peningkatan kepadatan hunian ini terjadi pada hampir seluruh kecamatan di Kota Semarang.

Kawasan Arahan Hunian Vertikal

Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Grafik Penggunaan Lahan Eksisting dan Rencana Penggunaan Lahan



Gambar 69.

Grafik Penggunaan Lahan Eksisting dan Rencana Penggunaan Lahan Bappeda Kota Semarang, 2022

Sumber: Laporan Akhir Masterplan Hunian Vertikal, 2022

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menghadapi meningkatnya kepadatan hunian ini adalah dengan membangun hunian vertikal. Ciri khas dari hunian vertikal ini biasanya dibangun di kawasan yang padat penduduk dan mobilitas massa yang tinggi. Namun, tidak semua kawasan dapat diletakkan tipologi hunian vertikal karena dipengaruhi oleh beberapa aspek. Berdasarkan Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, bahwa arahan pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal di Kota Semarang yaitu berada di BWK I, BWK II, dan BWK III.

3) Kebutuhan Air bersih

Penyediaan air bersih menjadi salah satu komponen yang penting dalam perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk dalam suatu kota. Pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Semarang diperoleh dari berbagai sumber meliputi jaringan perpipaan, sumur gali terlindungi, sumur gali pompa, terminal air, mata air terlindungi dan penampungan air hujan. Ketersediaan air bersih kini menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan sesuai dengan amanah *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang tercantum dalam tujuan ke 6 yaitu peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi mengingat ketersediaan air bersih yang semakin tidak berimbang dengan pertambahan jumlah penduduk. Indikator ketersediaan air bersih dalam rumah tangga dapat dilihat dari sumber air minum yang digunakan,

serta jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Tabel 10.
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Semarang tahun 2025-2045

| Uraian | Baseline (2023) | Tahun | | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 1.694.743 | 1.722.421 | 1.782.575 | 1.828.904 | 1.859.868 | 1.874.716 |
| Jumlah Kepala Keluarga | 359.121 | 354.365 | 343.029 | 334.992 | 327.110 | 318.653 |
| Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (L/Hari) | | 206.690.490 | 213.908.966 | 219.468.527 | 223.184.247 | 224.965.984 |

Sumber: Laporan Akhir Analisis Demografi Kota Semarang, 2023

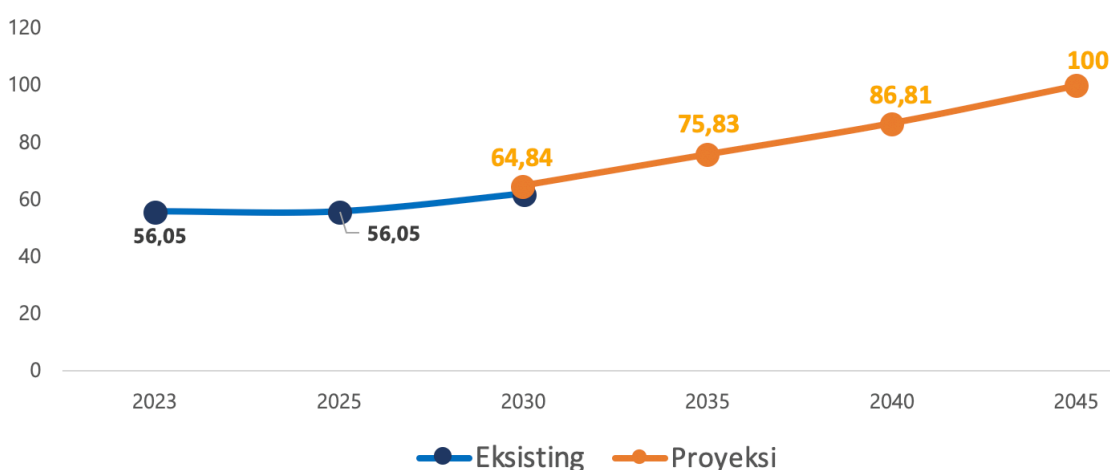
Terdapat sebanyak 98,48% rumah tangga di Kota Semarang yang menggunakan sumber air minum terlindung, sedangkan 1,52% sisanya menggunakan sumber air minum dari sumber tak terlindung. Dari sumber air minum terlindung yang digunakan oleh rumah tangga, sebagian besar rumah tangga menggunakan sumber air minum yang berasal dari air kemasan bermerek/isi ulang, yaitu sebesar 63,77%. Secara rinci gambaran persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kota Semarang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja juga menjadi syarat ketersediaan air bersih. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, agar tidak mencemari sumber air minum, maka lubang penampungan tinja sebaiknya berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. Tercatat bahwa sekitar 75,47% rumah tangga sudah memiliki sumber air minum yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat penampungan tinja terdekat. Sementara itu, rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minumnya ke tempat penampungan tinja sebesar 10,61%.

Berdasarkan SNI 19-6728.1-2002 Tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya-Bagian 1: Sumber Daya Air Spasial, konsumsi air penduduk perkotaan adalah sebesar 120 L/hari untuk setiap orang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (2007) juga menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan kebutuhan pokok minimal pemakaian air setiap orang. Angka tersebut termasuk dalam kategori akses optimal menurut *World Health Organization* (WHO) (2003).

Kebutuhan air bersih Kota Semarang adalah sebanyak 206.690.490 L/hari pada tahun 2025, 213.908.966 L/hari pada tahun 2030, 219.468.527 L/hari pada tahun 2035, 223.184.247 L/hari pada tahun 2040 dan 224.965.984 L/hari pada tahun 2045.

2023 - 2045

Grafik Proyeksi Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaian



Gambar 70.

Grafik Proyeksi Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaian

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Berdasarkan data BPS, sejak 2019 konsep yang digunakan mengacu pada metadata *SDGs* di mana rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) jika sumber air minum utamanya adalah ledeng, air terlindungi, atau air hujan. Air terlindungi dapat berupa sumur bor/pompa, sumur terlindungi, atau mata air terlindungi. Rumah tangga yang menggunakan air kemasan akan dianggap memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, atau air hujan.

Air minum perpipaan adalah air yang telah melalui proses penyaringan, pemurnian, dan distribusi oleh pemerintah atau badan pengelola air sehingga aman untuk diminum oleh masyarakat setelah memenuhi standar kualitas air minum. Penggunaan sistem perpipaan ini memastikan akses yang mudah dan praktis bagi masyarakat untuk mendapatkan pasokan air bersih di rumah mereka.

Pada tahun 2023, sebanyak 56,05% rumah tangga dapat mengakses air siap minum perpipaan, di targetkan akan terus meningkat setiap tahunnya untuk menjamin pelayanan fasilitas dasar perkotaan yang layak bagi seluruh penduduk. Hingga 2045 diproyeksikan sebanyak 78,56% rumah tangga dapat mengakses air siap minum perpipaan.

4) Kebutuhan energi dan Listrik

Kebutuhan energi listrik dilihat dari konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita adalah jumlah energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan di suatu daerah, dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode satu tahun. Hal tersebut menunjukkan rata-rata konsumsi energi listrik tiap penduduk. Konsumsi energi listrik Kota Semarang pada tahun 2021 adalah sebesar 2.943.455.470 kWh. Jika dibagi dengan jumlah penduduknya pada tahun 2021, maka diperoleh konsumsi listrik per kapita sebesar 1.777 kWh per kapita. Angka tersebut meningkat sebesar 0,24% dari konsumsi listrik per kapita tahun 2020 (1.773 kWh). Mengacu pada perhitungan pertumbuhan konsumsi listrik per kapita tersebut, maka kebutuhan energi listrik Kota Semarang pada tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 11.
Proyeksi Energi Listrik Kota Semarang Tahun 2025-2045

| Uraian | Baseline (2023) | Tahun | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 1.694.743 | 1.722.421 | 1.782.575 | 1.828.904 | 1.859.868 | 1.874.716 |
| Jumlah Kepala Keluarga | 359.121 | 354.365 | 343.029 | 334.992 | 327.110 | 318.653 |
| Kebutuhan Energi Listrik (kWh) | | 3.090.326.566 | 3.236.874.080 | 3.360.625.921 | 3.457.818.437 | 3.526.040.105 |

Sumber: Laporan Akhir Analisis Demografi Kota Semarang, 2023

Kebutuhan energi listrik Kota Semarang adalah sebanyak 3.090.326.566 kWh pada tahun 2025, 3.236.874.080 kWh pada tahun 2030, 3.360.625.921 kWh pada tahun 2035, 3.457.818.437 kWh pada tahun 2040, dan 3.526.040.105 kWh pada tahun 2045.

Kebutuhan energi dapat dipenuhi dari berbagai sumber alternatif yang berkelanjutan, seperti matahari, air, dan sampah. Energi matahari dapat dimanfaatkan melalui teknologi panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi listrik, sementara energi air atau hidroelektrik memanfaatkan kekuatan air yang mengalir untuk menghasilkan listrik melalui turbin. Kedua sumber energi ini merupakan bagian dari solusi energi terbarukan yang semakin efisien dan terjangkau, berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Salah satu sumber energi yang semakin mendapat perhatian adalah sampah. Dengan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018, sampah dapat diolah untuk menghasilkan listrik atau panas. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah

yang perlu dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga menyediakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan sumber energi dari matahari, air, dan sampah, kita dapat menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Pengelolaan sampah dianggap sebagai masalah kritis di Indonesia yang membutuhkan tindakan segera. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia sedang menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Peraturan ini menetapkan percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah di 12 (dua belas) kota, termasuk Semarang, melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Sebagai ibu kota Provinsi, Kota Semarang adalah salah satu kota terbesar di Jawa Tengah dan menjadi pusat kegiatan ekonomi. Pada tahun 2016, sekitar 1,6 juta orang tinggal di kota ini, yang menghasilkan sekitar 780 ton sampah per hari, sebagian besar harus dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan sampah akan sejalan dengan pertumbuhan penduduk Semarang sekitar 0,5–1% per tahun, jumlah sampah yang tiba di TPA Jatibarang tercatat rata-rata sebesar 1.072 ton per hari pada tahun 2019 dan sekitar 816 ton per hari pada tahun 2020. Namun demikian, data yang tersedia untuk tahun 2020 hanya mencakup tiga bulan (Februari, Maret, dan April) dan tidak ada data lain yang tersedia. Pengiriman sampah antara bulan Februari dan Maret 2020 secara signifikan lebih rendah daripada rata-rata pada tahun 2019, kemungkinan disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas di Kota Semarang dan mengurangi jumlah orang yang bepergian ke Semarang karena pembatasan perjalanan.

TPA Jatibarang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang dan telah beroperasi sejak tahun 1993. Pengelola TPA Jatibarang adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. TPA Jatibarang secara efektif sudah penuh, tetapi sampah terus diterima, ditumpuk, dan dipadatkan untuk memperpanjang masa operasionalnya sementara strategi pengelolaan sampah alternatif sedang diidentifikasi dan dikembangkan. Pemerintah Kota Semarang sangat membutuhkan solusi alternatif pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Perlu pertimbangan mengenai keberlanjutan pengelolaan sampah menjadi energi untuk solusi.

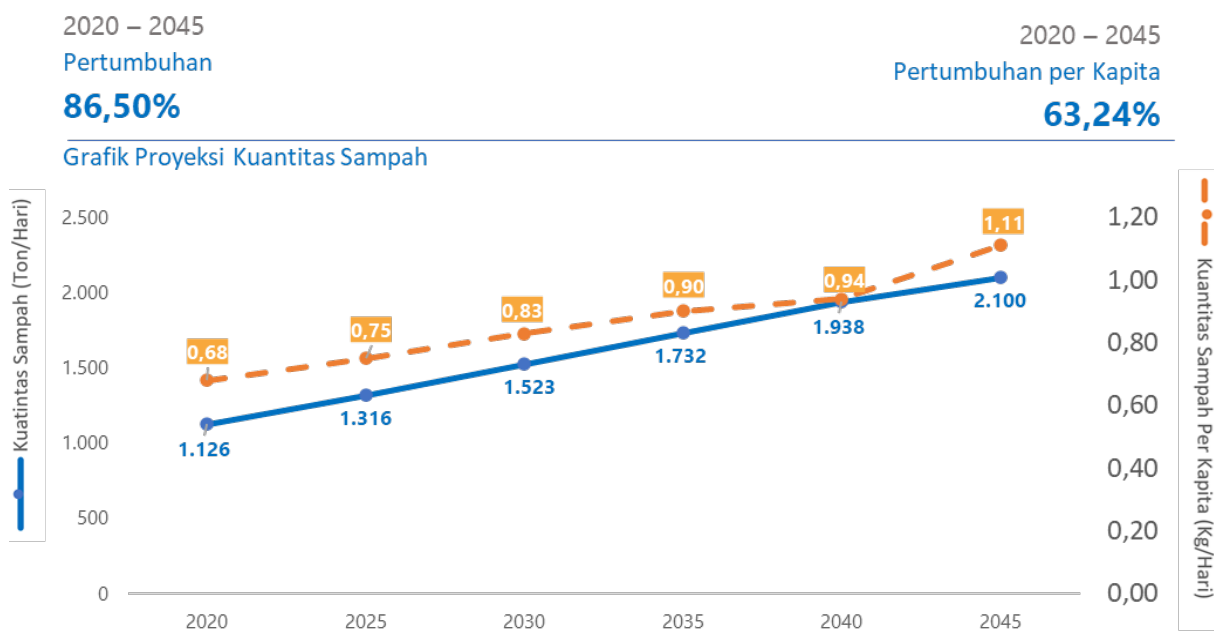
5) Kebutuhan Saranan Prasarana Persampahan

Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Semarang setiap tahunnya sangat pesat. Penambahan jumlah penduduk tidak hanya berasal dari pertumbuhan alami melalui kelahiran, tetapi juga berasal dari dampak urbanisasi yang besar. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan konsumsi yang akibatnya peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota di Indonesia, demikian juga di Kota Semarang. Tidak terkelolanya sampah mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan dengan meningkatnya pencemaran lingkungan, tanah, air, dan udara. Berdasarkan Laporan Akhir Review Masterplan Persampahan 2022, disebutkan proyeksi timbulan sampah di Kota Semarang 2100 ton per harinya.

Apabila tidak dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi potensi timbulan sampah atau mengurangi jumlah sampah yang harus dikelola di TPA, dikhawatirkan sarana dan prasarana yang ada tidak akan mampu mengelola sampah, dan TPA yang ada juga tidak akan mampu lagi menampung sampah yang perlu dikelola. Dampaknya, akan terjadi pencemaran lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup sebab banyaknya sampah yang tidak terkelola. Untuk itu perlu adanya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA Jatibarang.

Berdasarkan SNI 3242:2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, terdapat 3 klasifikasi TPS dengan perbedaan pada kualitas tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan (a) ruang pemilahan, (b) pengomposan sampah organik, (c) gudang, (d) tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container, dan (e) luas lahan, dimana tipe III merupakan tipe yang terbesar. Kebutuhan TPS Kota Semarang berdasarkan klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: TPS tipe I sebanyak 689 unit pada tahun 2025, 713 unit pada tahun 2030, 732 unit pada tahun 2035, 744 unit pada tahun

2040, dan 750 unit pada tahun 2045; TPS tipe II sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 unit pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045; serta TPS tipe III sebanyak 14 unit pada tahun 2025, 15 unit pada tahun 2030, 15 unit pada tahun 2035, 15 unit pada tahun 2040, dan 16 unit pada tahun 2045. Untuk mengurangi timbulan sampah dari TPS yang dibawa ke TPA, setiap TPS dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. Sehingga, dilakukan perencanaan pengembangan TPS menjadi TPST. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Saat ini terdapat 3 (tiga) TPST aktif di Kota Semarang yaitu TPST Unnes, TPST BSB, dan TPST Gemah. (Laporan Akhir Review Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Semarang, 2022)



Gambar 71.
Grafik Proyeksi Kuantitas Sampah
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2022

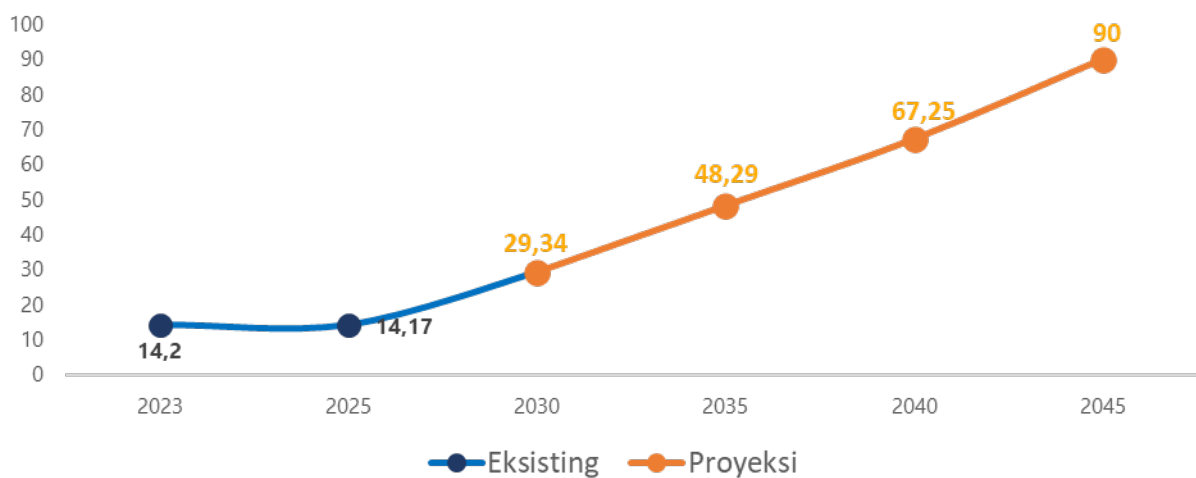
Tabel 12.
Proyeksi Timbulan Sampah dan Kebutuhan TPST Kota Semarang Tahun 2025-2045

| Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Tahun | | | | |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 1.694.743 | 1.722.421 | 1.782.575 | 1.828.904 | 1.859.868 | 1.874.716 |
| Jumlah Kepala Keluarga | 359.121 | 354.365 | 343.029 | 334.992 | 327.110 | 318.653 |
| Proyeksi Timbulan Sampah (kg/Hari) | 1.195.192 | 1.205.695 | 1.247.802 | 1.280.233 | 1.301.908 | 1.312.302 |
| Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Sumber: Laporan Akhir Analisis Demografi Kota Semarang, 2023

Pada 2023, persentase sampah yang terolah masih dalam angka 14,2%, angka tersebut masih lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 16,2% menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Disisi lain, diproyeksikan bahwa kuantitas timbulan sampah akan meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu, terdapat komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk menanggulangi permasalahan ini dengan menyusun target hingga tahun 2045 yaitu 90% sampah terolah.

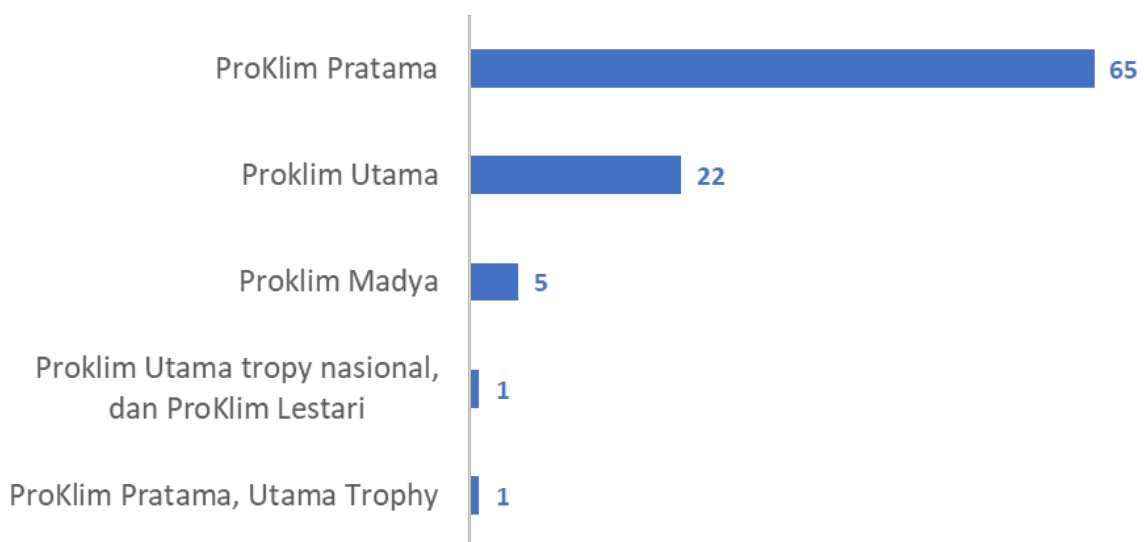
Grafik Proyeksi Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah



Gambar 72.
 Grafik Proyeksi Persentase Timbulan Sampah Terolah
 Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Pengelolaan sampah tidak hanya tugas pemerintah semata. Masyarakat dan sektor privat juga dapat terlibat menjadi aktor penting dalam menangani sampah agar tidak terbuang begitu saja sehingga sampah dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya. Bank Sampah adalah sistem pengelolaan limbah anorganik yang berbasis rumah tangga. Tempat pengolahan sampah menerapkan prinsip 3R yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle* yang berarti mengurangi jumlah sampah, menggunakan barang yang masih layak pakai, dan mendaur ulang limbah menjadi benda yang bermanfaat seperti TPS3R dan Bank Sampah. Keberadaan TPS 3R dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah. Berdasarkan Permen LHK No. 14 Tahun 2021 Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Jumlah Program Kampung Iklim Kota Semarang



Gambar 73.
 Grafik Jumlah Program Kampung Iklim 2016 – 2023 di Kota Semarang
 Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Bank sampah yang telah terbentuk menjadi cikal bakal pembentukan Program Kampung Iklim (ProKlim) di wilayahnya. Dengan adanya Bank Sampah yang

terintegrasi dengan Proklim diharapkan mampu mendukung pengelolaan sampah yang mengedepankan pengurangan sampah semaksimal mungkin dari hulu untuk mengurangi timbulan sampah yang berakhir di TPA. Terdapat 97 Proklim dengan rincian 5 Proklim Madya, 66 Proklim Pratama, dan 24 Proklim Utama. Selain itu, Bank Sampah dan Proklim memiliki peran penting dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca pada tingkat tapak. Dengan demikian keduanya mampu memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pengendalian dampak perubahan iklim dari lingkup masyarakat terkecil.

Menanggapi kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan beberapa upaya baik dalam pengurangan maupun penanganan sampah. Dalam hal pengurangan sampah, telah diterbitkan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Pelaku usaha yang meliputi hotel, restoran dan sejenisnya serta toko modern dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau Styrofoam. Kota Semarang juga mendorong pembentukan dan operasional Bank Sampah dan TPS3R untuk mengurangi sampah sehingga telah terbentuk lebih dari 100 Bank Sampah dan 38 TPS3R (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2019).

Penerapan kebijakan pengurangan plastik di Semarang telah dilakukan oleh beberapa pelaku usaha. Pelaksanaan kebijakan pengendalian ini telah menurunkan penggunaan plastik sebesar 300,22 Ton/Tahun atau setara dengan pengurangan sampah sebesar 0,07% dari jumlah timbulan sampah. Data tersebut merupakan rekapitulasi data monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2020.

Pengurangan sampah yang disasar mencakup Bank Sampah, Pemulung, TPS, dan TPS3R. Pemilihan ini didasarkan pada pengumpulan yang bersifat langsung sehingga bahan daur ulang dapat diyakini berasal dari Kota Semarang. Jumlah Bank Sampah di Kota Semarang mencapai 160 Bank Sampah tersebar yang tersebar di 92 kelurahan. Jumlah nasabah seluruh Bank Sampah mencapai lebih dari 12.000 KK, baik yang aktif maupun pasif dalam pengumpulan bahan daur ulang. Mengingat profil Bank Sampah yang heterogen dalam ukuran, jumlah nasabah, jenis sampah yang dikumpulkan, maupun intensitas operasinya maka kontribusi pengurangan sampahnya dilakukan secara sensus dengan mendatangi 160 unit Bank Sampah. Hasilnya, seluruh Bank Sampah mengumpulkan bahan daur ulang sebanyak 330 ton per tahun pada tahun 2020. Jumlah bahan daur ulang ini bernilai sebesar Rp. 456 juta. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (2021), terdapat 300 TPS terdiri dari 282 TPS dan 18 TPS3R yang beroperasi selayaknya TPS. Untuk mengetahui jumlah volume sampah di Kota Semarang, dilakukan survei di 36 TPS sebagai sampel. Hasil survei menunjukkan rerata pengurangan sampah di TPS mencapai 2,4 ton/tahun. Jumlah sampah yang dikurangi oleh TPS dengan dilakukannya pemilahan daur ulang oleh petugas TPS sebesar 720 ton per tahun. Dari 24 TPS3R yang tercatat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, hanya enam unit yang memenuhi kriteria. Keenam TPS3R tersebut kemudian didata pengurangan sampahnya.

Tabel 13
Pengurangan Sampah oleh TPS3R di Kota Semarang

| NAMA TPS3R | KELURAHAN | KECAMATAN | TOTAL |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| TPS3R Sido Rahayu | Purwosari | Mijen | 5,8 Ton |
| TPS3R Ngudi Kamulyan | Sampang | Gajah Mungkur | 0,2 Ton |
| TPS3R Dadi Resik | Pedurungan Lor | Pedurungan | 2,7 Ton |
| TPS3R Mukti Asih | Muktiharjo Kidul | Pedurungan | 0,8 Ton |
| TPS3R Skala Kota BSB | Jatisari | Mijen | 24 Ton |
| TPS3R Karya Melati | Mangkang Kulon | Tugu | 2,1 Ton |

Sumber: Laporan Akhir Kajian Pengelolaan Sampah di Tingkat Hulu

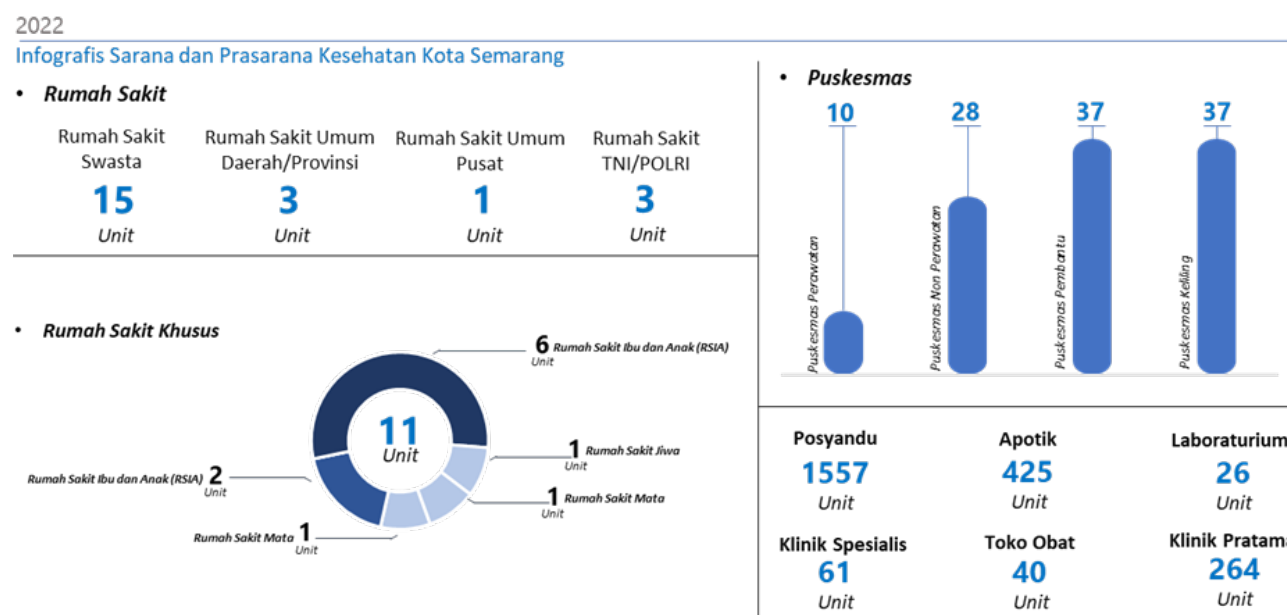
Pelaku pengumpul/daur ulang sampah yang berupaya dalam pengurangan sampah berikutnya adalah pemulung. Untuk mengetahui volume sampah yang dikurangi diperlukan survei kepada pemulung untuk mengetahui volume sampah yang dikumpulkan. Pengambilan sampel dilakukan kepada dua jenis pemulung yang berbeda yaitu pemulung pada tingkat sumber dalam hal ini mengumpulkan sampah

dari rumah tangga, jalan, sungai, dan pertokoan. Pengurangan sampah saat ini mencapai 5,11% terdiri dari pembatasan 0,07% dan pengambilan daur ulang 5,04% termasuk pengambilan di TPA. Kontributor pengurangan sampah terbesar adalah pemulung khususnya pemulung di TPA. Pemulihan bahan daur ulang di tingkat hulu yang berperan besar selain pemulung adalah TPS3R 5,93 ton per unit per tahun, disusul pemulung 3,69 ton per orang per tahun, TPS sebesar 2,40 ton per unit per tahun, dan Bank Sampah 2,06 per unit per tahun.

6) Kebutuhan Sarana Kesehatan

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa. Sebagai kota metropolitan, Semarang memiliki beragam tantangan dan peluang dalam bidang kesehatan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sarana kesehatan.

Di sisi lain, Semarang juga memiliki potensi untuk menjadi pusat kesehatan di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, dengan adanya beberapa rumah sakit besar, universitas kedokteran, dan pusat penelitian kesehatan. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sistem kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Semarang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, jumlah sarana kesehatan di Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 74.
Infografis Sarana dan Prasarana Kesehatan Kota Semarang
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Jumlah sarana kesehatan tersebut masih belum merata di seluruh wilayah Kota Semarang. Puskesmas dan rumah sakit masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah pinggirannya masih kurang. Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di wilayah pinggiran menjadi terbatas.

Kebutuhan posyandu Kota Semarang adalah sebanyak 1.378 unit pada tahun 2025, 1.426 unit pada tahun 2030, 1.463 unit pada tahun 2035, 1.488 unit pada tahun 2040, dan 1.500 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum posyandu Kota Semarang adalah sebesar 82.676 m² pada tahun 2025, 85.564 m² pada tahun 2030, 87.787 m² pada tahun 2035, 89.274 m² pada tahun 2040, dan 89.986 m² pada tahun 2045.

Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) atau klinik bersalin berfungsi melayani ibu, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun. Kebutuhan BKIA atau klinik bersalin Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum BKIA atau klinik bersalin Kota Semarang adalah

sebesar 172.242 m² pada tahun 2025, 178.257 m² pada tahun 2030, 182.890 m² pada tahun 2035, 185.987 m² pada tahun 2040, dan 187.472 m² pada tahun 2045.

Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil. Kebutuhan puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan Kota Semarang adalah sebesar 17.224 m² pada tahun 2025, 17.826 m² pada tahun 2030, 18.289 m² pada tahun 2035, 18.599 m² pada tahun 2040, dan 18.747 m² pada tahun 2045.

Puskesmas dan balai pengobatan berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit serta melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya. Selain itu, puskesmas dan balai pengobatan juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyuluhan, konseling, dan advokasi kesehatan. Puskesmas dan balai pengobatan harus memiliki fasilitas, peralatan, dan tenaga kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal, efisien, dan profesional kepada masyarakat. Kebutuhan puskesmas dan balai pengobatan Kota Semarang adalah sebanyak 14 unit pada tahun 2025, 15 unit pada tahun 2030, 15 unit pada tahun 2035, 15 pada tahun 2040, dan 16 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum puskesmas dan balai pengobatan Kota Semarang adalah sebesar 14.354 m² pada tahun 2025, 14.855 m² pada tahun 2030, 15.241 m² pada tahun 2035, 15.499 m² pada tahun 2040, dan 15.623 m² pada tahun 2045.

Apotek berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan. Kebutuhan apotek Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum apotek Kota Semarang adalah sebesar 14.354 m² pada tahun 2025, 14.855 m² pada tahun 2030, 15.241 m² pada tahun 2035, 15.499 m² pada tahun 2040, dan 15.623 m² pada tahun 2045.

Tabel 14.

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Kota Semarang 2025-2045

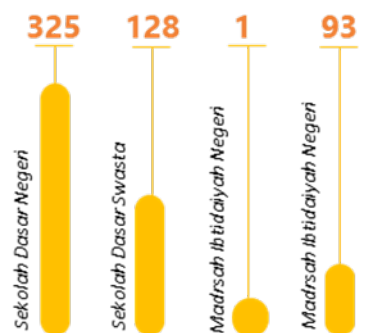
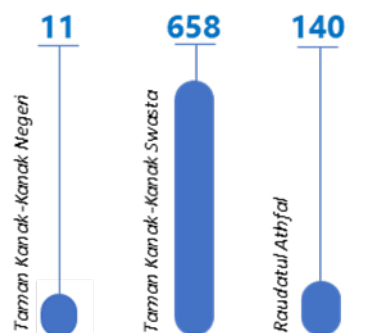
| Uraian | Baseline (2023) | Tahun | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 1.694.743 | 1.722.421 | 1.782.575 | 1.828.904 | 1.859.868 | 1.874.716 |
| Jumlah Kepala Keluarga | 359.121 | 354.365 | 343.029 | 334.992 | 327.110 | 318.653 |
| Proyeksi Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| • Posyandu | | 1375 | 1426 | 1463 | 1488 | 1500 |
| • BKIA | | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 |
| • Puskesmas | | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| • Balai Pengobatan | | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 |
| • Apotek | | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 |

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

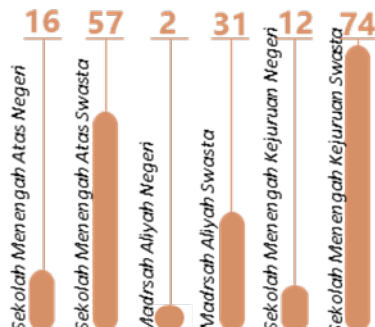
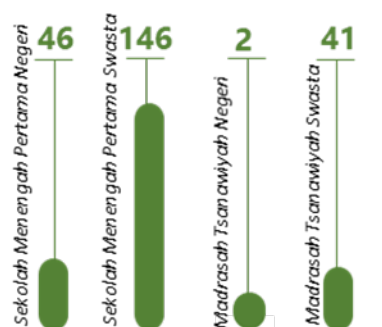
7) Kebutuhan Sarana Pendidikan

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa. Sebagai kota metropolitan, Semarang memiliki beragam tantangan dan peluang dalam bidang pendidikan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sarana pendidikan. Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap pendidikan di wilayah pedesaan menjadi terbatas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan proyeksi sarana bidang pendidikan di Kota Semarang.

- **Setara Taman Kanak-Kanak**



- **Setara Menengah Pertama**



Gambar 75.

Grafik Infografis Sarana dan Prasarana Kota Semarang Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Taman kanak-kanak (TK) merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra-belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain sebesar 75%, selebihnya bersifat pengenalan. Kebutuhan TK Kota Semarang adalah sebanyak 1.378 unit pada tahun 2025, 1.426 unit pada tahun 2030, 1.463 unit pada tahun 2035, 1.488 pada tahun 2040, dan 1.500 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum TK Kota Semarang adalah sebesar 688.968 m² pada tahun 2025, 713.030 m² pada tahun 2030, 731.562 m² pada tahun 2035, 743.947 m² pada tahun 2040, dan 749.887 m² pada tahun 2045.

Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program belajar selama 6 tahun. Kebutuhan SD Kota Semarang adalah sebanyak 1.077 unit pada tahun 2025, 1.114 unit pada tahun 2030, 1.143 unit pada tahun 2035, 1.162 pada tahun 2040, dan 1.172 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum SD Kota Semarang adalah sebesar 2.153.026 m² pada tahun 2025, 2.228.218 m² pada tahun 2030, 2.286.130 m² pada tahun 2035, 2.324.836 m² pada tahun 2040, dan 2.343.396 m² pada tahun 2045.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program belajar selama 3 tahun setelah SD. Kebutuhan SMP Kota Semarang adalah sebanyak 359 unit pada tahun 2025, 371 unit pada tahun 2030, 381 unit pada tahun 2035, 387 pada tahun 2040, dan 391 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum SMP Kota Semarang adalah sebesar 3.229.539 m² pada tahun 2025, 3.342.328 m² pada tahun 2030, 3.429.196 m² pada tahun 2035, 3.487.254 m² pada tahun 2040, dan 3.515.094 m² pada tahun 2045.

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa. Kebutuhan SMA Kota Semarang adalah sebanyak 359 unit pada tahun 2025, 371 unit pada tahun 2030, 381 unit pada tahun 2035, 387 pada tahun 2040, dan 391 unit pada tahun 2045. Kebutuhan

luas lahan minimum SMA Kota Semarang adalah sebesar 4.485.471 m² pada tahun 2025, 4.642.122 m² pada tahun 2030, 4.762.772 m² pada tahun 2035, 4.843.408 m² pada tahun 2040, dan 4.882.074 m² pada tahun 2045.

Tabel 15.

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2045

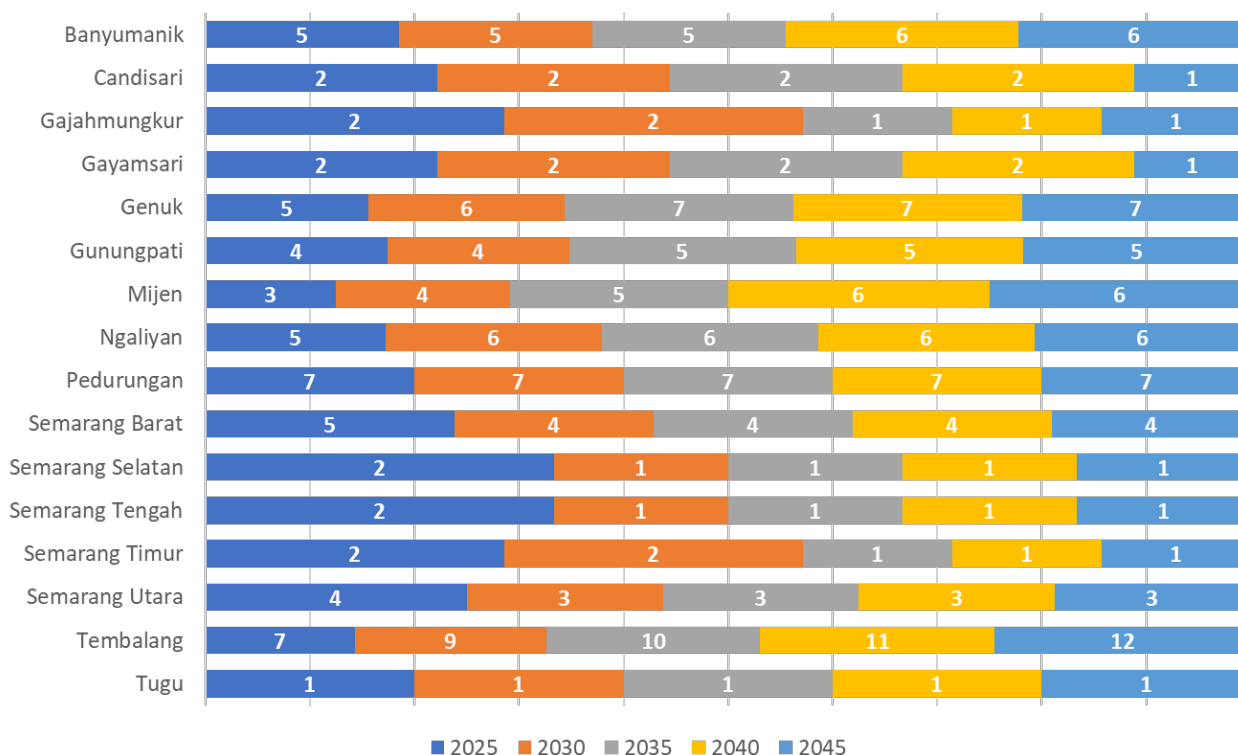
| Uraian | Baseline (2023) | Tahun | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 1.694.743 | 1.722.421 | 1.782.575 | 1.828.904 | 1.859.868 | 1.874.716 |
| Jumlah Kepala Keluarga | 359.121 | 354.365 | 343.029 | 334.992 | 327.110 | 318.653 |
| Proyeksi Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| • TK | | 1378 | 1426 | 1463 | 1488 | 1500 |
| • SD/MI | | 1077 | 1114 | 1143 | 1162 | 1172 |
| • SMP/MTs | | 389 | 371 | 381 | 387 | 391 |
| • SMA/MA/SMK | | 389 | 371 | 381 | 387 | 391 |
| • TK | | 1378 | 1426 | 1463 | 1488 | 1500 |

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

8) Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga

Pusat pertokoan dan/atau pasar lingkungan menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa. Kebutuhan pusat pertokoan dan/atau pasar lingkungan Kota Semarang adalah sebanyak 57 unit pada tahun 2025, 59 unit pada tahun 2030, 61 unit pada tahun 2035, 62 pada tahun 2040, dan 62 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum pusat pertokoan dan/atau pasar lingkungan Kota Semarang adalah sebesar 574.140 m² pada tahun 2025, 594.192 m² pada tahun 2030, 609.635 m² pada tahun 2035, 619.956 m² pada tahun 2040, dan 624.906 m² pada tahun 2045.

Kebutuhan Pusat Pertokoan dan Pasar



Gambar 76.

Grafik Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga

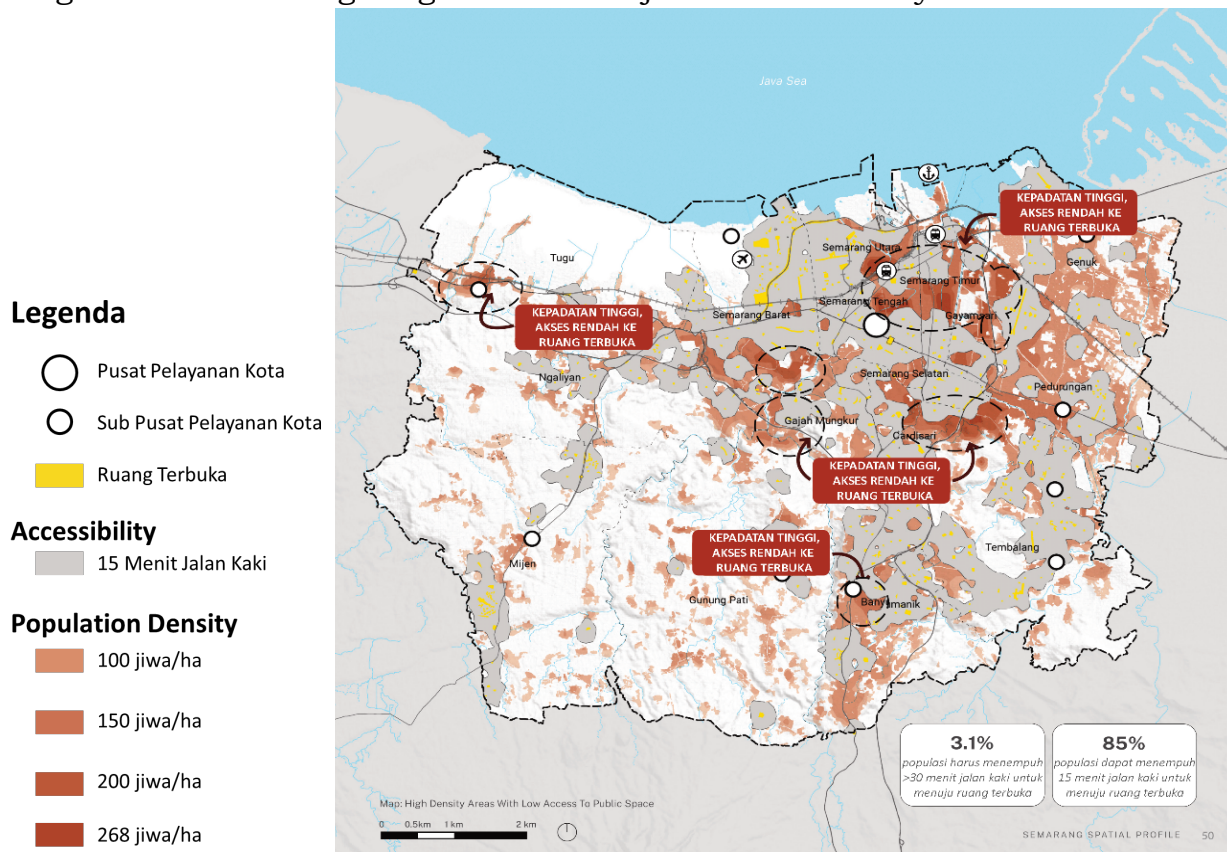
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Pusat perbelanjaan dan niaga selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, dan elektronik, juga untuk pelayanan jasa, seperti perbengkelan, reparasi, tempat hiburan, serta kegiatan niaga lainnya, seperti kantor, bank, industri

kecil, dan lain-lain. Kebutuhan pusat perbelanjaan dan niaga Kota Semarang adalah sebanyak 14 unit pada tahun 2025, 15 unit pada tahun 2030, 15 unit pada tahun 2035, 15 pada tahun 2040, dan 16 unit pada tahun 2045. Kebutuhan luas lahan minimum pusat pertokoan dan/atau pasar lingkungan Kota Semarang adalah sebesar 516.726 m² pada tahun 2025, 534.772 m² pada tahun 2030, 548.671 m² pada tahun 2035, 557.961 m² pada tahun 2040, dan 562.415 m² pada tahun 2045.

9) Kebutuhan Sarana Rekreasi, Hiburan, RTH, dan Lainnya

Ruang publik menjadi elemen penting dalam membangun kota yang inklusif, berfungsi sebagai platform untuk membentuk komunitas yang lebih aman, mengurangi ketidaksetaraan spasial, serta mengembalikan unsur alam ke dalam kota. Di Indonesia, ruang publik hanya diartikan sebagai RTH dan tidak melibatkan plaza, jalan, dan trotoar dalam definisinya. Pemerintah Kota Semarang mengidentifikasi ruang terbuka hijau sebagai salah satu indikator kunci untuk mengukur kualitas lingkungan dan manajemen sumber daya alam.



Gambar 77.

Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik

Sumber: UN Habitat, 2022

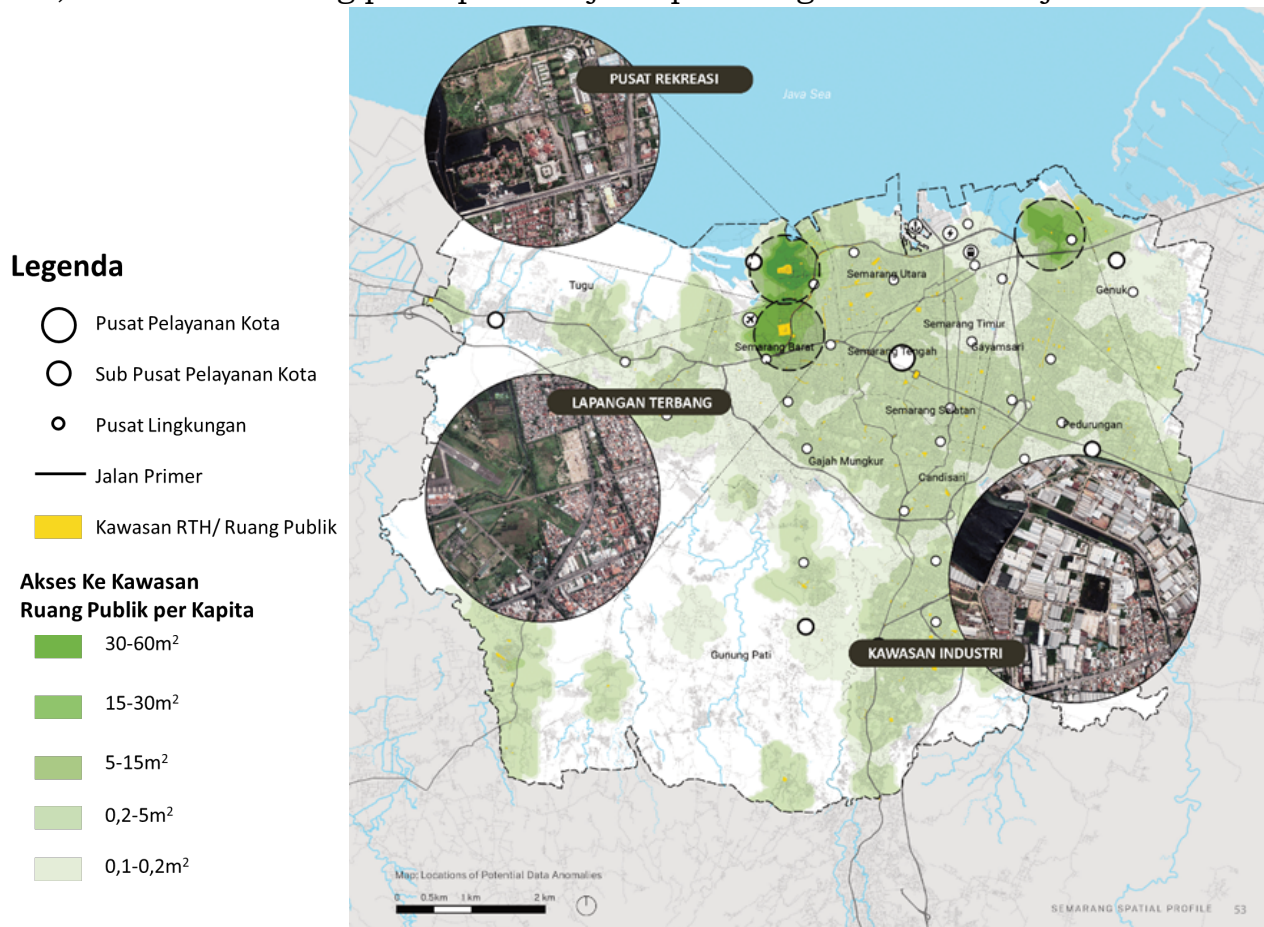
Meskipun definisi UN-Habitat lebih luas dan mencakup plaza, fasilitas rekreasi, serta fasilitas olahraga sebagai contoh, disarankan untuk mengalokasikan 10-15% dari total area perkotaan untuk ruang publik (tidak termasuk jalan dan trotoar). Namun, bahkan dengan definisi yang lebih inklusif ini, hanya 0,7% dari seluruh wilayah kota yang diamanatkan untuk ruang publik, dengan tambahan 1,2% untuk rekreasi, jauh di bawah rekomendasi minimal 10-15%.

Sebanyak 85% dari total populasi Semarang dapat mengakses ruang publik terbuka dalam waktu berjalan kaki selama 15 menit, namun 3,1% dari populasi memerlukan waktu lebih dari 30 menit. Daerah kritis dengan kekurangan ruang publik (penduduk dengan akses rendah ke ruang terbuka) umumnya terletak di sekitar pinggiran inti perkotaan dan terinterkoneksi dengan area infrastruktur besar seperti jalan dan jalur kereta. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam distribusi dan kualitas ruang publik di Semarang, yang berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya perencanaan dan pengembangan ruang publik yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada manusia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan konektivitas antara ruang publik dengan transportasi umum, mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong atau terlantar

sebagai ruang publik sementara atau permanen, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perancangan dan pengelolaan ruang publik.

Analisis lebih lanjut terhadap data spasial mengindikasikan bahwa terdapat tiga kluster utama dari area ruang publik, yang mencakup area hijau yang besar dan tidak terprogram. Kluster-kelompok ini memiliki karakteristik akses publik yang terbatas atau bahkan tanpa akses publik, serta kepadatan hunian yang sangat rendah di sekitarnya. Meskipun area tersebut mungkin dimiliki atau dapat diakses oleh publik, lokasinya yang kurang strategis di pinggiran kota mengakibatkan manfaat per kapita yang terbatas untuk keseluruhan kota. Penting untuk dicatat bahwa ketiga kluster ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi dan pemanfaatan ruang publik di dalam kota. Meskipun secara formal dapat diakses oleh publik, kontribusi dan manfaatnya terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh kota menjadi terbatas.

Oleh karena itu, untuk memastikan pemanfaatan yang efektif dan merata dari ruang publik, disarankan untuk melakukan evaluasi lebih mendalam, melibatkan audit ruang terbuka publik yang mencakup aspek-aspek strategis dan definisi yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, upaya dapat diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas ruang publik yang dapat memberikan manfaat optimal bagi penduduk kota secara keseluruhan. Salah satu aspek strategis yang perlu diperhatikan dalam evaluasi ruang terbuka publik adalah keterkaitan antara ruang publik dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku dan preferensi masyarakat terhadap ruang publik. Selain itu, definisi ruang publik yang berlaku di Indonesia juga harus mempertimbangkan karakteristik lokal, seperti iklim, topografi, sejarah, dan identitas kota. Dengan melakukan evaluasi yang lebih mendalam, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat kota, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 78.

Aksesibilitas Per Kapita Menuju Ruang Terbuka

Sumber: UN Habitat, 2022

Kota Semarang merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang menarik karena memiliki potensi wisata yang cukup beragam. Berdasarkan tabel sebaran daya tarik wisata Kota Semarang tahun 2022 di atas dapat diketahui bahwa kategori

daya tarik wisata kuliner memiliki jumlah unit daya tarik wisata terbanyak dengan 151 unit daya tarik wisata, sedangkan kategori daya tarik wisata pendidikan memiliki jumlah paling sedikit dengan hanya memiliki 3 unit daya tarik wisata. Potensi wisata kuliner di Semarang didominasi oleh makanan khas Semarang seperti lumpia, tahu gimbal, dan babat gongso. Kurangnya daya tarik wisata edukasi di Semarang dapat menjadi peluang untuk pengembangan wisata edukasi baru, seperti museum interaktif atau taman sains.



Gambar 79.

Grafik Sebaran Daya Tarik dan Jumlah Wisatawan Kota Semarang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

Daya tarik wisata belanja di Kota Semarang merupakan wisata yang paling diminati dengan jumlah wisatawan sebanyak 4.792.019 orang kemudian pada urutan kedua terdapat kategori daya tarik wisata kuliner dengan jumlah wisatawan sebanyak 3.576.125. Sedangkan kategori wisata pertanian merupakan kategori wisata yang paling sedikit diminati dengan jumlah wisatawan sebanyak 14.929. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Semarang ikut serta dalam upaya menarik wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hal ini sangat beralasan karena Kota Semarang memiliki daya tarik wisata yang cukup beragam. Berdasarkan tabel jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Semarang di atas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebanyak 7.305.559 wisatawan dengan rincian 7.223.529 wisatawan nusantara dan 82.030 wisatawan mancanegara.

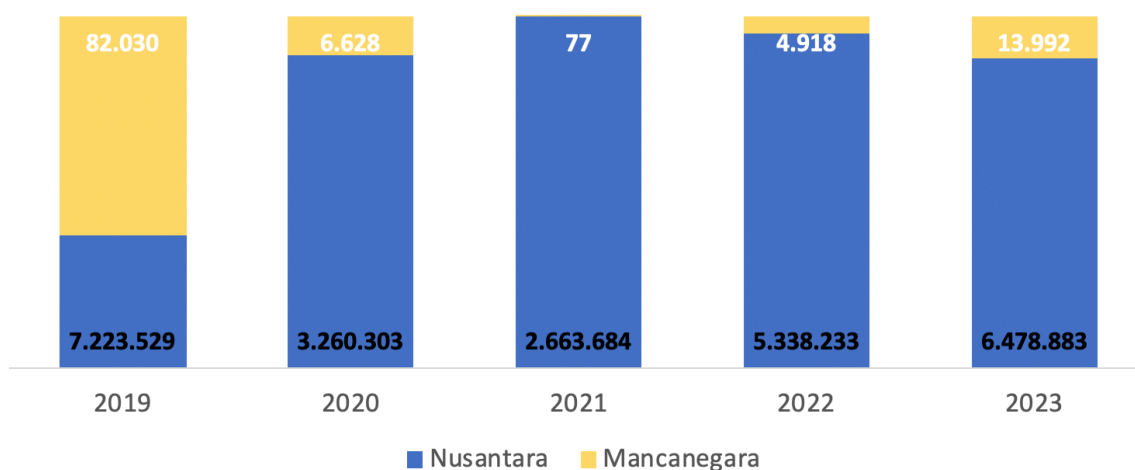
Upaya menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, perlu dilakukan dengan gencar. Perluasan dan diversifikasi pilihan wisata, seperti edukasi dan agrowisata, dapat menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kunjungan ke Semarang. Peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan wisata, seperti transportasi, akomodasi, dan kebersihan, akan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan. Dengan mengembangkan berbagai daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas layanan, Semarang dapat menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan kompetitif, sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kota tersebut.

Pada tahun 2020, Kota Semarang mengalami penurunan drastis dalam jumlah kunjungan wisatawan, yaitu hanya mencapai 3.266.931 orang. Dari angka tersebut, 3.260.303 merupakan wisatawan nusantara dan 6.628 wisatawan mancanegara. Penurunan signifikan ini terjadi akibat berbagai faktor, dengan faktor utama adalah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Pandemi ini menyebabkan pembatasan pergerakan orang, penutupan tempat wisata, dan penurunan daya beli masyarakat. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kondisi cuaca ekstrem, bencana alam, dan persaingan dengan destinasi wisata lainnya. Meskipun mengalami penurunan drastis dalam jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020, Kota Semarang tidak tinggal diam. Berbagai langkah strategis telah diimplementasikan untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas pelayanan bagi para wisatawan, baik lokal maupun asing.

Kota Semarang terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai pilihan wisata baru, seperti wisata edukasi, wisata religi, wisata alam, dan wisata kuliner. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan minat wisatawan yang semakin beragam. Selain itu, upaya promosi gencar dilakukan melalui berbagai platform media, baik online maupun offline. Kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, agen perjalanan, dan media, juga diintensifkan untuk meningkatkan awareness dan menarik wisatawan. Kota Semarang ingin memastikan bahwa semua orang mengetahui tentang berbagai potensi wisata yang ditawarkannya.

2023

Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Semarang



Gambar 80.

Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Semarang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

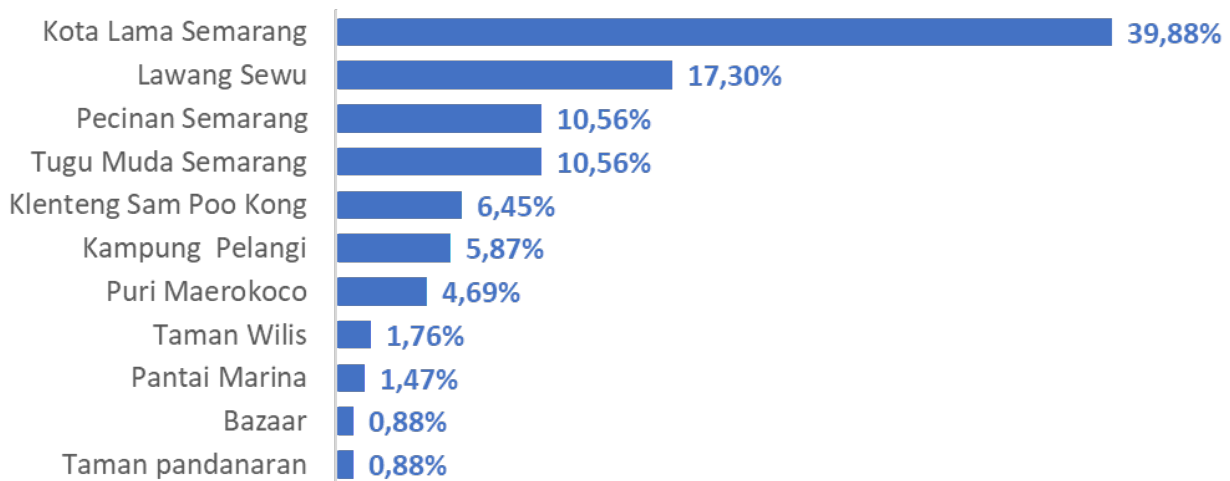
MICE akronim bahasa Inggris dari *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (dalam bahasa Indonesia: Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran), dalam industri pariwisata atau pameran, adalah suatu jenis kegiatan pariwisata dimana pesertanya suatu kelompok besar, biasanya sudah direncanakan secara matang berangkat bersama untuk suatu kepentingan yang sama.

Terdapat 83 usaha industri pariwisata dengan rincian 26 usaha biro perjalanan wisata dan 57 usaha MICE yang ada di Kota Semarang. Berdasarkan Pelaku Usaha Hotel & *Event Organizer* diketahui bahwa jenis usaha hotel memiliki persentase sebesar 97,30% dan jenis usaha *event organizer* memiliki persentase sebesar 2,70%. Lalu, lama usaha kategori 4- 6 tahun memiliki persentase sebesar 37,84%, kategori usaha yang lebih dari 9 tahun sebesar 29,73%, kategori lama usaha 1-3 tahun sebesar 18,92% dan lama usaha 7-9 tahun memiliki persentase sebesar 13,51%.

Berdasarkan Pelaku Usaha Biro Perjalanan Wisata diketahui bahwa jenis usaha biro perjalanan wisata memiliki persentase sebanyak 89,47%, kategori agen perjalanan wisata memiliki persentase sebanyak 5,26% dan kategori travel agen memiliki persentase sebanyak 5,26%.

Strategi pemasaran yang dilakukan pelaku usaha biro perjalanan wisata diatas dapat diketahui bahwa usaha biro perjalanan wisata yang menggunakan pemasaran online memiliki persentase sebanyak 31,58%, kategori dari mulut ke mulut memiliki persentase sebanyak 26,32%, kategori media sosial memiliki persentase sebanyak 21,05%, kategori media cetak memiliki persentase 15,79% dan kategori lainnya memiliki persentase sebanyak 5,26%.

Grafik Daya Tarik Wisata Yang Dikunjungi Peserta MICE



Gambar 81.

Daya Tarik Wisata Yang Dikunjungi Peserta MICE

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Kegiatan *meeting* paling mendominasi terhadap jumlah penyewa ruang pertemuan mendominasi jumlah peserta kegiatan MICE di bidang usaha perhotelan 76,19% untuk diatas 30 orang, antara 11-20 orang sebesar 14,29% dan sisanya 21-29 orang sebesar 16,22%.

Potensi usaha di Kota Semarang didominasi oleh pelaku usaha hotel dan juga *event organizer* sehingga potensi MICE di Kota Semarang sangat memadai untuk ditingkatkan dengan didominasi penggunaan ruang *meeting* dimana segmen marketnya adalah *corporate*, *family* dan lainnya, dimana khusus untuk *exhibition* masih terbatas lokasinya dan perlu penambahan untuk pembangunan ruang *convention*.

10) Kebutuhan Sarana Transportasi

Jalan merupakan prasarana transportasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan, semakin banyak jumlah kendaraan yang berlalu lintas maka dibutuhkan kapasitas jalan yang dapat menampung jumlah kendaraan dan jalan juga diharapkan memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan tersebut. Panjang jalan di Kota Semarang adalah 947,55 km yang terdiri dari 3 status jalan yaitu jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota.

2020 - 2022

Grafik Panjang Status Jalan Kota Semarang



■ Jalan Nasional ■ Jalan Provinsi ■ Jalan Kota

Gambar 82.

Grafik Panjang Status Jalan Kota Semarang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2022

Berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 621/490 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota di Wilayah Kota Semarang, Panjang ruas jalan kewenangan kota 839,90 km dengan jumlah 1012 ruas jalan dengan persentase jalan kondisi mantap 93,004% dan kondisi tidak mantap 6,996%.

2015 - 2022

SK Walikota Semarang Nomor 621/490 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota di Wilayah Kota Semarang

Grafik Kondisi Infrastruktur Jalan (dalam KM)



■ Panjang

Gambar 83.

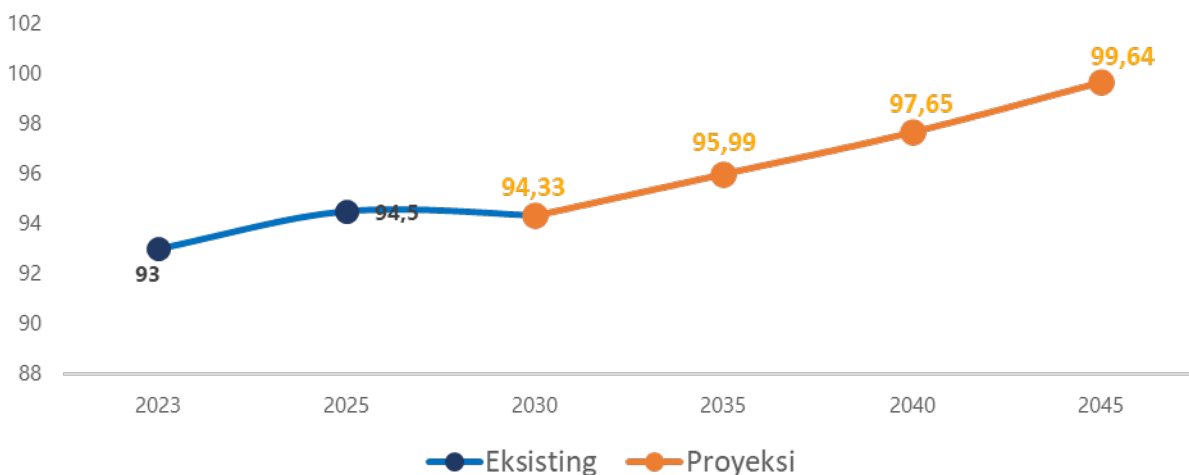
Grafik Kondisi Infrastruktur Jalan Kota Semarang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2022

Dengan bertambahnya mobilitas masyarakat di Kota Semarang selaras dengan perumbuhan jumlah kendaraan di Kota Semarang. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah jumlah kendaraan di Kota Semarang pada tahun 2021 sejumlah 1.875.781 unit.

2023

Grafik Proyeksi Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap



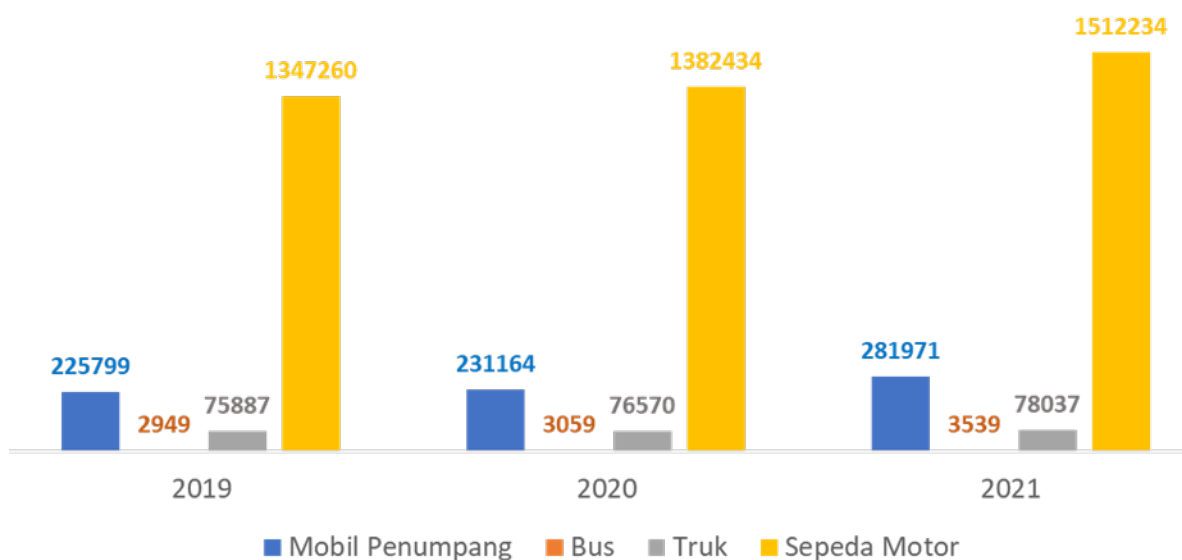
Gambar 84.

Grafik Proyeksi Persentase Kondisi Infrastruktur Jalan Kota Semarang

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2023

Kondisi jalan mantap diartikan sebagai jalan dalam kondisi baik dan sedang. Kota Semarang menargetkan pencapaian 99,64% jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2045.

Grafik Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenisnya



Gambar 85.

Grafik Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenisnya

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2022

Pergerakan mobilitas masyarakat di Kota Semarang ditunjang oleh keberadaan simpul transportasi sehingga memudahkan integrasi antar moda. Konektivitas jaringan transportasi di Kota Semarang ditunjang oleh simpul transportasi udara dengan keberadaan Bandara Internasional Ahmad Yani, simpul transportasi laut terdapat Pelabuhan Tanjung Emas, simpul transportasi darat terdapat terminal tipe A Mangkang, terminal tipe B Penggaron dan Terminal tipe C Terboyo, Cangkiran dan Gunung Pati, simpul transportasi rel terdapat 5 stasiun yaitu Stasiun Poncol, Stasiun Tawang, Stasiun Alastuo, Stasiun Jragah dan Stasiun Mangkang. Selain itu juga terdapat simpul angkutan logistik dengan keberadaan Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo. Selain keberadaan simpul pergerakan di Kota Semarang juga Terdapat angkutan umum yang melayani mobilitas pergerakan masyarakat. Angkutan umum di Kota Semarang dilayani oleh angkutan perkotaan, BRT Trans Semarang dan angkutan tidak dalam trayek/infomal. Trayek angkutan umum di Kota Semarang hampir semuanya bermuara di Pasar Johar. Adapun trayek angkutan kota di Kota Semarang yang masih beroperasi hingga saat ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 16.

Trayek Rute Angkutan Umum Kota Semarang

| Kode Trayek | Rute |
|-------------|---|
| C.1.a | Sub. Term. Rejomulyo-Kaligawe-Genuk-Perum.Sriwulan |
| C.1.b | Sub. Term. Rejomulyo-Kaligawe-Perum Genuk Indah |
| C.2 | Sub. Term. Rejomulyo-Patimura-Dr. Cipto-MT. Haryono-Tentara Pelajar-Kedungmundu |
| C.2.a | Sub. Term. Rejomulyo-Patimura-Dr. Cipto-Tentara Pelajar-Kedungmundu-Salak-RSU-Klipang |
| C.3 | Sub. Term. Rejomulyo-Patimura-Dr. Cipto-Brigjen Sudiarto-Pedurungan-Term. Penggaron |
| C.6 | Sub. Term. Rejomulyo-R. Patah-Depok-DI Panjaitan-Simpang Lima-Pandanaran-Dr. Sutomo-Kelud-Tugu Suharto-TMS. Tinjomoyo |
| C.7 | Sub. Term. Rejomulyo-R. Patah-Depok-Pandanaran-Tugu Muda-Suyudono-Abdurachman Saleh-Manyaran-Perum Pasadena |
| C.8 | Term. Penggaron-Brigjen Sudiarto-Simpang Lima-Tugu Muda-Jend. Sudirman-Kalibanteng |
| C.9 | Sub. Term. Rejomulyo-Thamrin-Pandanaran-Tugu Muda-Jend. Sudirman-Siliwangi-Jragah-Tugu-Term. Mangkang |
| C.10 | Sub. Term. Rejomulyo-Patimura-Dr. Cipto-MT. Haryono-Teuku Umar-Setia Budi-Perumnas Banyumanik |

| Kode Trayek | Rute |
|-------------|--|
| C.10.a | Sub. Term. Rejomulyo-Patimura-Dr. Cipto-Teuku Umar-Perum Banyumanik-Grafika-Mega Mas-Pudakpayung |
| C.1.a | Sub. Term. Rejomulyo-Kaligawe-Genuk-Perum.Sriwulan |
| C.1.b | Sub. Term. Rejomulyo-Kaligawe-Perum Genuk Indah |
| C.2 | Sub. Term. Rejomulyo-Patimura-Dr. Cipto-MT. Haryono-Tentara Pelajar-Kedungmundu |
| C.2.a | Sub. Term. Rejomulyo-Patimura-Dr. Cipto-Tentara Pelajar-Kedungmundu-Salak-RSU-Klipang |

Sumber: Kajian Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Kota Semarang, 2021

Kondisi angkot saat ini semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Para pengemudi angkot mengasumsikan bahwa persaingan dengan ojek online menyebabkan peminat angkot semakin menurun. Sebelum transportasi online hadir dan pandemi terjadi, para pengemudi angkot dapat memberikan setoran setiap harinya dan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi angkot di Kota Semarang saat ini juga semakin memprihatinkan di mana jumlahnya semakin berkurang setiap tahunnya. Sebelum tahun 2016 terdapat sekitar 2.500 unit, sedangkan saat ini hanya tersisa sekitar 700 unit.

Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk mempertahankan keberlangsungan angkot yang tersisa, salah satunya dengan merencanakan proyek dengan Trans Semarang di mana moda transportasi angkot sebagai *sub feeder*. Melalui proyek *sub feeder* ini, angkot akan diberi rute pinggiran kota, sehingga tak ada lagi angkot yang beroperasi melewati jalan protokol dalam kota. Jika sebelumnya masyarakat perlu berjalan kaki menuju halte terdekat untuk mengakses BRT, maka dengan adanya *sub feeder* cukup berjalan ke depan rumah. Angkot *sub feeder* akan menjemput di depan rumah. Diharapkan dengan adanya proyek *sub feeder* ini para sopir angkot akan memiliki pendapatan tetap karena dibiayai oleh APBD, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sopir angkot.

Trans Semarang atau *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang adalah salah satu layanan transportasi angkutan massal yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan beroperasi di Kota Semarang dan sebagian Kabupaten Semarang. Layanan ini dioperasikan guna mengurai kemacetan di Kota Semarang serta untuk mengakomodasi para komuter menuju pusat kota dan destinasi wisata yang ada di Kota Semarang. Trans Semarang beroperasi dari jam 05.30–17.40 WIB (dihitung dari keberangkatan pertama dan keberangkatan terakhir dari masing-masing *pool* / terminal), kecuali Koridor Layanan Malam (LM) yang beroperasi dari jam 18.00 – 23.00 WIB. Sejak beroperasinya BRT pada tahun 2010, BRT Trans Semarang terus melakukan pengembangan layanan yang hingga saat ini telah tersedia 8 koridor yang dilengkapi dengan koridor pengumpan.

Koridor tersebut menghubungkan berbagai wilayah di Kota Semarang, seperti pusat kota, kawasan industri, kampus, bandara, dan tempat wisata. BRT Trans Semarang juga menyediakan fasilitas penunjang seperti halte yang cukup nyaman, tiket elektronik, informasi rute dan jadwal, serta sistem keamanan dan keselamatan. Dengan adanya koridor-koridor ini, Kota Semarang dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas warganya, serta mengurangi kemacetan dan polusi udara. BRT Trans Semarang juga memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya di kota ini. Diharapkan, dengan terus memperbaiki dan mengembangkan sistem transportasi publik yang berkualitas, Kota Semarang dapat menjadi kota yang lebih layak huni, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Terdapat beberapa angkutan tidak dalam trayek atau bersifat informal di Kota Semarang yaitu ojek dan becak. Sebelumnya ojek merupakan angkutan informal yang melayani masyarakat dari jalan utama menuju tempat tinggal yang biasa disebut ojek pangkalan, namun pada era perkembangan teknologi yang pesat, ojek menjadi salah satu primadona angkutan untuk mobilitas masyarakat dengan hadirnya ojek online seperti Grab, Gojek, dan Maxim. Kehadiran ojek online menjadi salah satu angkutan umum yang digemari masyarakat sehari-hari karena memiliki

berbagai keunggulan. Baik ojek konvensional atau ojek pangkalan maupun ojek online, penumpang merasakan banyak kemudahan dari menggunakan ojek, seperti saat harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan waktu yang terbatas, maka ojek online bisa jadi pilihan yang tepat karena lebih efisien di mana dapat langsung mencari pengemudi ojek yang berada di wilayah tersebut secara otomatis. Keunggulan lainnya yang dirasakan adalah kemudahan transaksi dengan beragam metode mulai dari tunai, dompet digital, hingga paylater.

2010 - 2023

Grafik Pertumbuhan Pengguna BRT Kota Semarang

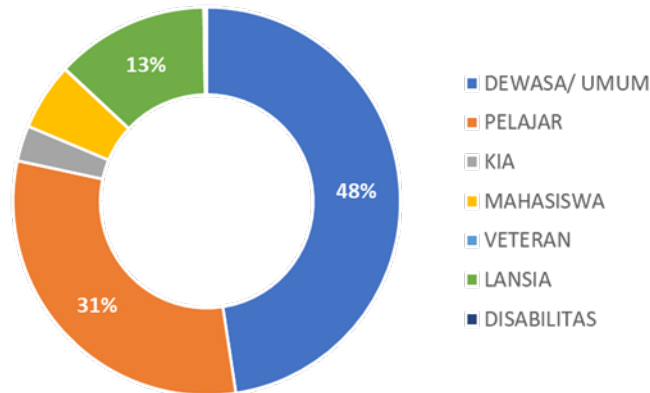


Gambar 86.
Grafik Pertumbuhan Pengguna BRT Kota Semarang
Sumber: <https://transsemarang.semarangkota.go.id/>

Terlihat bahwa jumlah penumpang cenderung meningkat dari tahun 2010 hingga 2019. Pada periode ini, terdapat peningkatan yang konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang drastis dalam jumlah penumpang, mencapai 6.835.778. Hal ini mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang mengakibatkan pembatasan perjalanan dan penurunan aktivitas transportasi. Meskipun masih di bawah angka tahun-tahun sebelumnya, jumlah penumpang tetap relatif stabil pada tahun 2021 dengan 6.207.674 penumpang.

Terjadi lonjakan yang signifikan pada tahun 2022, dengan jumlah penumpang mencapai 11.013.922, yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan lebih lanjut pada tahun 2023 dengan 13.146.318 penumpang. Lonjakan ini mungkin disebabkan oleh pemulihan ekonomi setelah masa-masa sulit selama pandemi atau adanya faktor-faktor lain yang mendorong peningkatan mobilitas. Data juga menunjukkan adanya fluktuasi tahunan yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, peristiwa besar, atau perubahan dalam infrastruktur transportasi. Implikasi dari fenomena ini pada pembangunan kota adalah bahwa perencanaan kota harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti kapasitas jalan, manajemen lalu lintas, pengembangan transportasi publik, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Harapan di masa depan untuk mendukung kota layak huni adalah bahwa mobilitas dapat terjadi secara efisien, aman, nyaman, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat kota serta lingkungan hidup.

Hal ini sesuai dengan ekspektasi karena status veteran biasanya terkait dengan pengalaman militer dan mungkin hanya mencakup segmen kecil dari populasi umum. Lansia, yang merupakan kelompok usia lanjut, memiliki jumlah sebanyak 1.684.073. Ini mencerminkan perbandingan yang signifikan, menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap kebutuhan dan pelayanan untuk populasi lansia. Kategori disabilitas memiliki jumlah yang relatif kecil, yaitu 31.753. Hal ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap inklusi dan dukungan bagi individu dengan kebutuhan khusus.



Gambar 87.

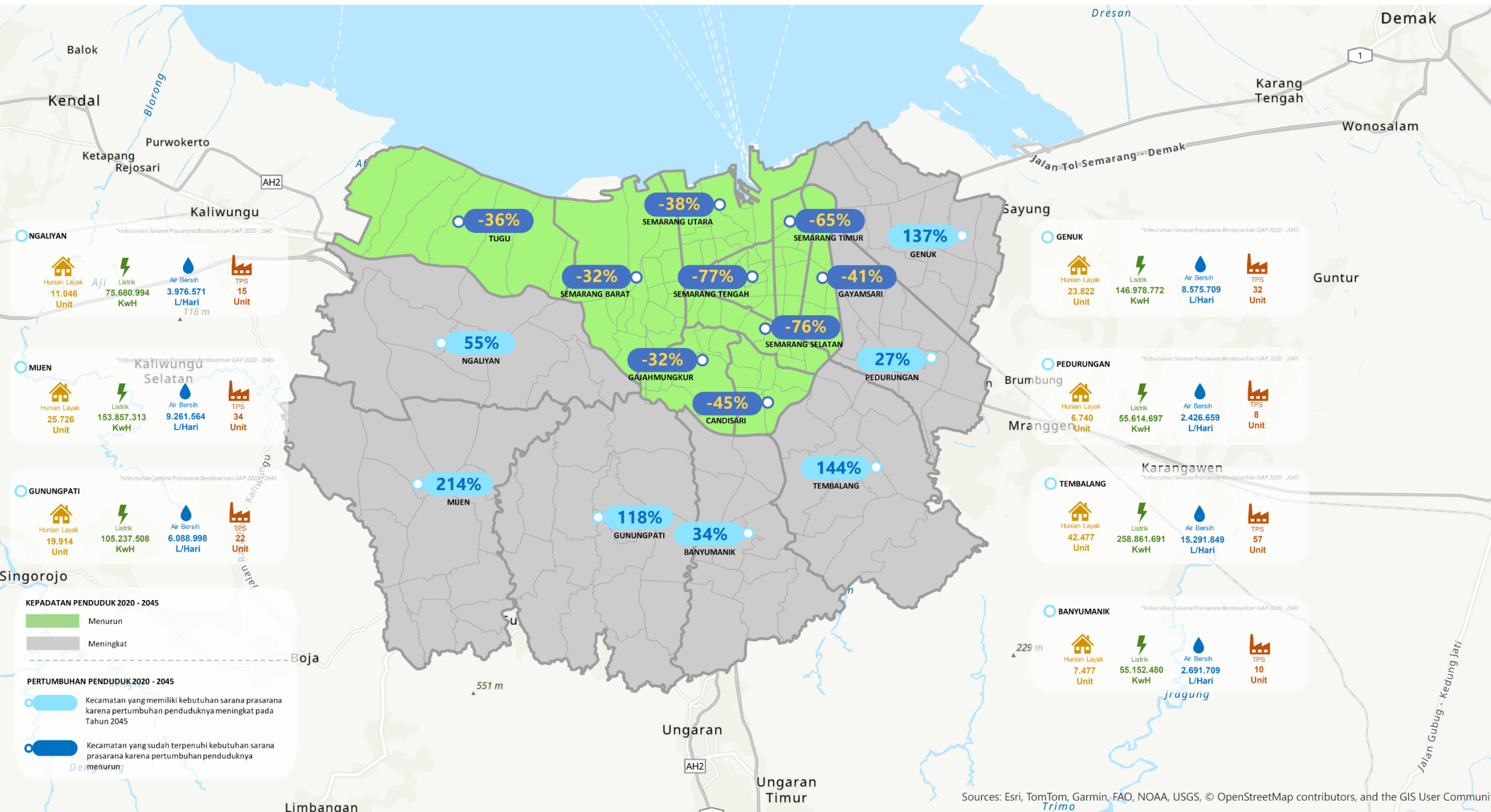
Struktur Pengguna Transportasi BRT Kota Semarang

Sumber: <https://transsemarang.semarangkota.go.id/>

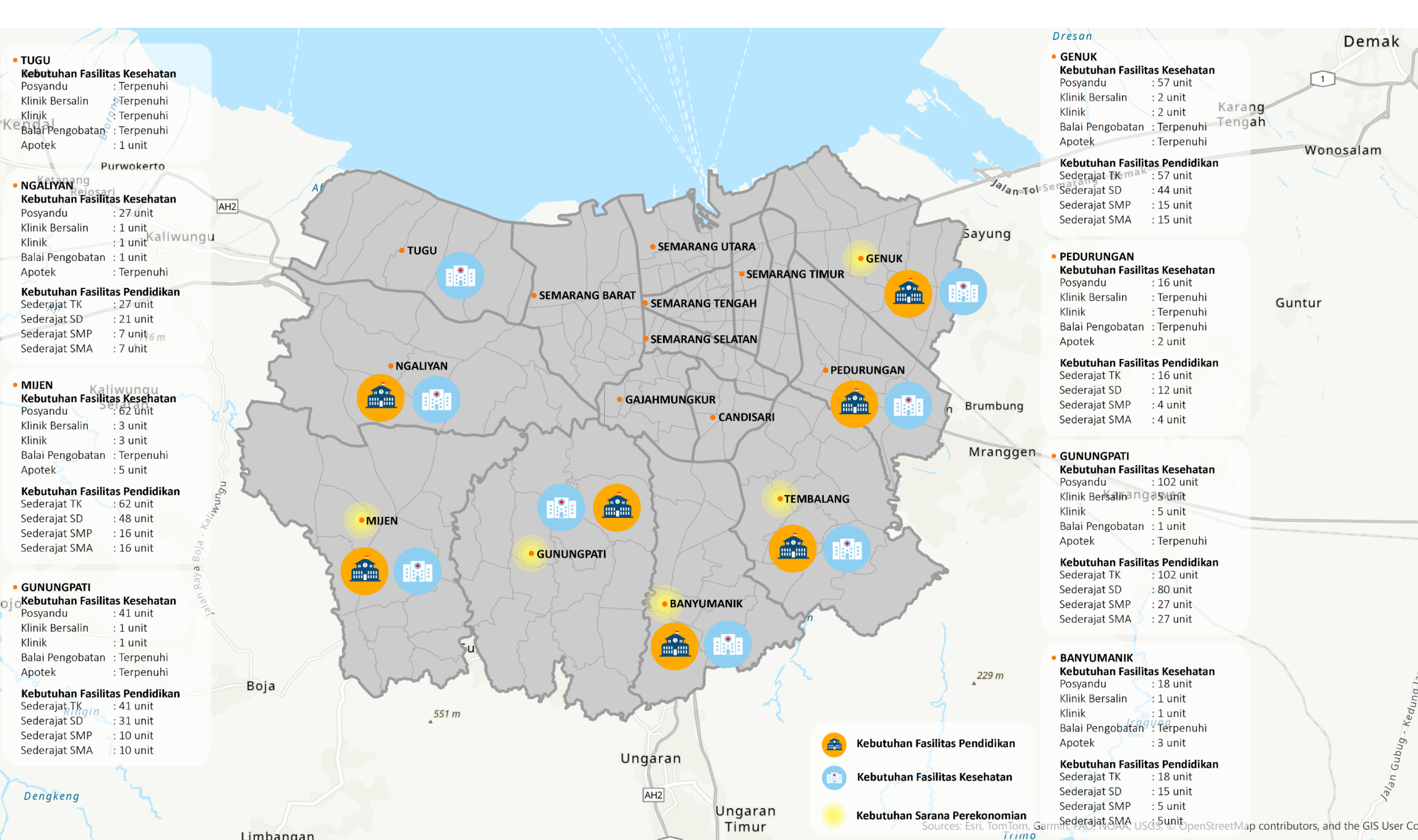
Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah dewasa/umum mencapai 6.257.150, menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan bagian terbesar dari populasi yang tercatat. Disusul oleh kelompok pelajar dengan jumlah 4.043.642, yang juga merupakan kelompok yang cukup signifikan. Kelompok veteran memiliki jumlah yang jauh lebih kecil, hanya sekitar 4.050.

Mobilitas perkotaan di Semarang sangat bergantung pada transportasi darat dengan mayoritas penduduk menggunakan kendaraan pribadi (80%), sedangkan 20% sisanya memilih menggunakan transportasi umum. Kendaraan bermotor, terutama sepeda motor (58%), mobil pribadi (22%), dan transportasi umum (20%) mendominasi penggunaan jalanan. Adapun transportasi umum terdiri dari angkot (mikrobus) sebanyak 50%, *quasi*-BRT (juga dikenal sebagai *Bus Light Transit*-BLT; Trans Semarang) mencapai 40%, dan bus reguler 10%. Pihak berwenang memiliki rencana untuk meningkatkan fasilitas BRT dengan jalur khusus serta merencanakan pembangunan LRT.

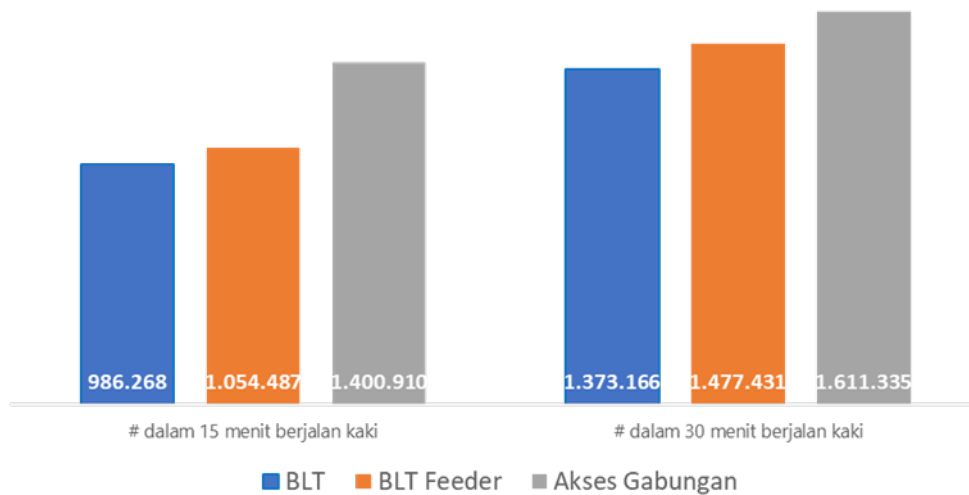
Rencana ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, dan biaya transportasi bagi masyarakat Semarang. Selain itu, rencana ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas penduduk kota yang berjumlah sekitar 1,8 juta jiwa. Namun, rencana ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti pembebasan lahan, pembiayaan, dan sosialisasi. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu melakukan kajian mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi rencana transportasi umum ini.



Gambar 88. Peta Kebutuhan Prasarana di Kota Semarang tahun 2045



Gambar 89. Peta Kebutuhan Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian di Kota Semarang



Gambar 90.

Grafik Akses Penduduk Menuju Transportasi Umum

Sumber: UN Habitat, 2022

Grafik ini mencerminkan ketersediaan layanan dalam jarak berjalan kaki tertentu, dengan persentase menunjukkan proporsi populasi yang memiliki akses ke layanan tersebut dalam waktu 15 atau 30 menit.

Sebanyak 84,6% dari populasi dapat mengakses berbagai jenis transportasi umum perkotaan dengan berjalan kaki selama 15 menit. Sementara itu, sekitar 59,5% dari penduduk memiliki akses langsung ke jalur *Bus Light Transit* (BLT). Hanya 2,7% dari populasi yang perlu berjalan kaki lebih dari 30 menit untuk mencapai tempat pemberhentian transportasi. Sayangnya, jalur 'BLT' dan sistem feeder saat ini belum memiliki jalur khusus, dan kurangnya jalur tersebut, frekuensi keberangkatan yang tidak dioptimalkan, serta kualitas rendah pada kendaraan dan stasiun/terminal menjadi hambatan umum dalam mencapai tingkat penggunaan yang tinggi. Perbaikan pada jalur BRT dengan jalur khusus serta peningkatan kualitas kendaraan dan stasiun/*stops* perlu menjadi fokus untuk mengatasi kendala tersebut.

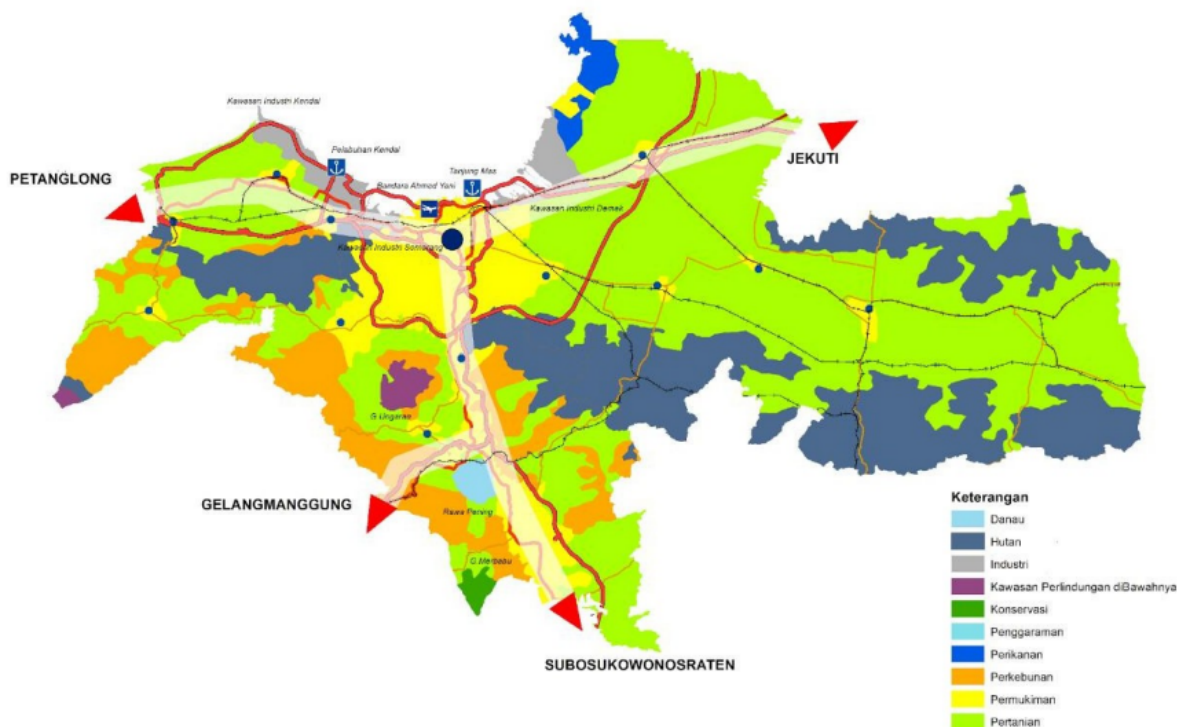
2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1 Arah Pengembangan WP Kedungsepur

Kota Semarang dalam konstelasi Pulau Jawa berada dalam wilayah pengembangan yang disebut WP Kedungsepur, terdiri dari Kendal, Ungaran (Kab. Semarang), Demak, Kota Semarang, Salatiga, dan Purwodadi (Kab. Grobogan). WP Kedungsepur diarahkan pengembangannya dengan mendorong peningkatan pengembangan perkotaan Semarang sebagai salah satu kawasan strategis nasional dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Wilayah Jawa yang memiliki berbagai keunggulan, seperti berbatasan langsung dengan ALKI, memiliki pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan memiliki berbagai perguruan tinggi negeri berkualitas baik diandalkan untuk mendorong pertumbuhan industri baik dalam jangka menengah maupun panjang. Secara khusus, WP Kedungsepur diarahkan pengembangannya pada kawasan industri Semarang, Kendal, dan Demak berdasarkan prinsip mandiri, keberlanjutan, serta kelestarian alam. Selain itu, sektor pertanian terus dikembangkan utamanya pada kawasan penyangga disertai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dan pencegahan *urban sprawl*.

Saat ini, kontribusi Wilayah Jawa terhadap nasional cukup besar yaitu mencapai 56,48% namun masih terdapat tingkat kesejahteraan yang di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, untuk mendorong potensi keanekaragaman budaya, kuliner dan bentang alam maka perlu didukung oleh aksesibilitas serta teknologi maju. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas, maka perlu upaya

pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor Jawa Tengah serta upaya untuk mengurangi biaya logistik di Jawa Tengah. Selain itu, perlu peningkatan kerja sama antar daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana untuk mendukung potensi tersebut.



Gambar 91.
Arah Pengembangan WP Kedungsepur
Sumber: Bappenas, 2022

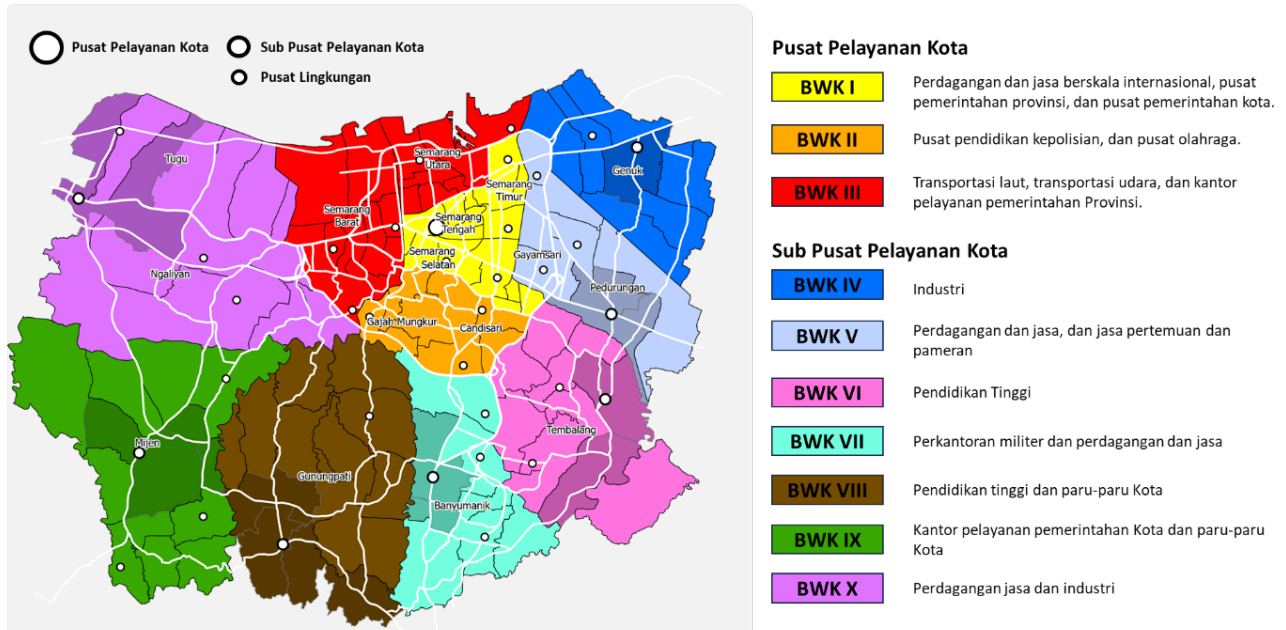
2.7.2 Rencana Struktur Ruang tahun 2011 – 2031

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Adapun tujuan penataan ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Kota Semarang sebagai wilayah yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan memerlukan suatu mekanisme perencanaan wilayah. Kebijakan penataan ruang Kota Semarang ditetapkan dalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 dan telah direvisi dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021. Ruang lingkup wilayah perencanaan tata ruang Kota Semarang meliputi seluruh wilayah Kota dengan luas kurang lebih 39.923 hektar dan area reklamasi sebesar 797 hektar. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Semarang adalah “Terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi struktur ruang dan pola ruang.

Rencana struktur ruang adalah rencana yang mencakup rencana sistem pusat pelayanan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya. Secara struktur ruang, 16 kecamatan di Kota Semarang dibagi menjadi 10 wilayah fungsional yang disebut dengan Bagian Wilayah Kota (BWK). Setiap BWK terdiri dari satu atau gabungan kecamatan yang memiliki kemiripan ruang dan fungsi.

Rencana Struktur Ruang Kota Semarang 2011 - 2031



Gambar 92.

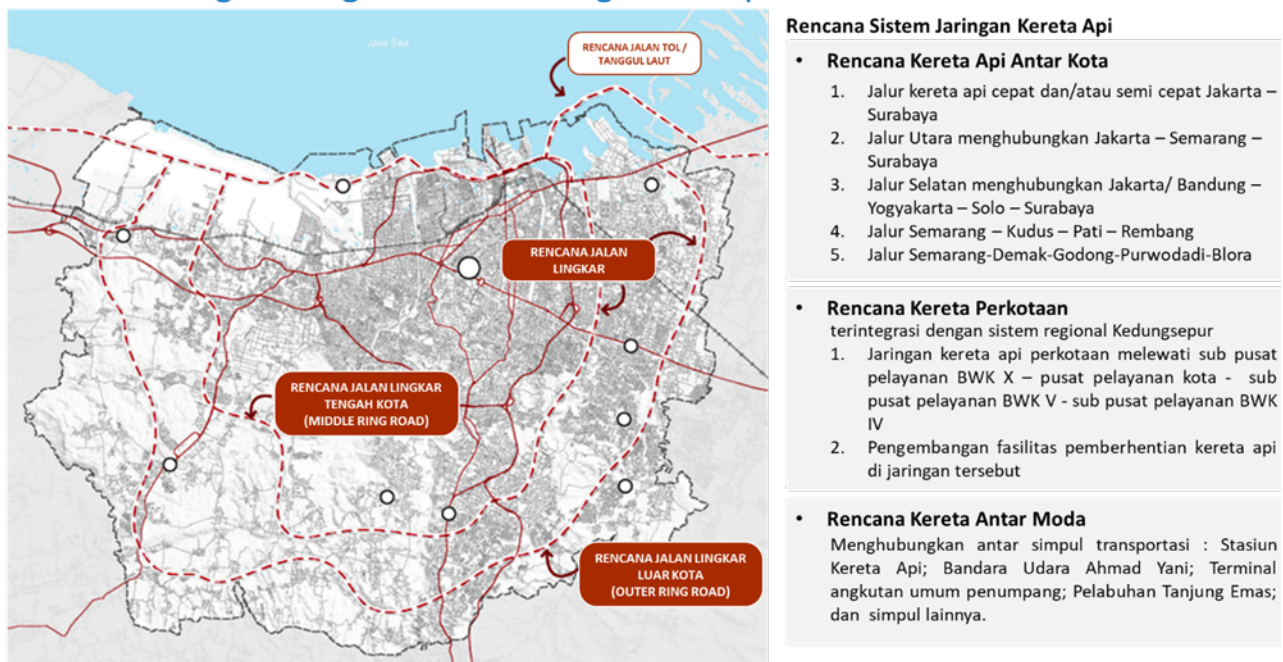
Pembagian BWK dalam Rencana Struktur Ruang

Sumber: RTRW Kota Semarang tahun 2011 – 2031

Rencana sistem pusat pelayanan yang terbagi menjadi sistem Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang terdiri dari BWK I, BWK II dan BWK III yang disebut sebagai Kawasan Pusat Kota Semarang, memiliki fungsi sebagai perdagangan jasa berskala internasional, pusat pemerintahan provinsi dan kota, pusat pendidikan kepolisian, transportasi laut dan udara, dan pusat olahraga. PPK didukung oleh pusat pelayanan yang lebih rendah, yang disebut sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (sPPK) yang terdiri dari BWK IV hingga BWK X yang memiliki fungsinya masing-masing.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan aktivitas dari setiap BWK maka diperlukan aksesibilitas dan konektivitas untuk menghubungkan antar BWK tersebut melalui rencana pengembangan sistem jaringan. Rencana pengembangan sistem jaringan meliputi jaringan transportasi darat, jaringan sungai, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat



Gambar 93.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sumber: RTRW Kota Semarang tahun 2011 – 2031

Rencana pengembangan sistem transportasi darat di Kota Semarang diarahkan pada pengembangan jaringan jalan melalui jalan lingkaran dan rencana sistem jaringan kereta api. Pengembangan jaringan jalan lingkaran terbagi menjadi jaringan jalan lingkaran tengah (*inner*), dalam kota (*middle ring road*) dan luar kota (*outer ring road*) sebagai bentuk strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan. Selain itu, untuk memperkuat aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan dengan wilayah regional Kedungsepur, maka diarahkan pada pengembangan sistem jaringan kereta api. Sistem jaringan kereta api di Kota Semarang akan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu antar kota, perkotaan dan antar moda. Pada saat ini, jaringan kereta api antar kota sudah mampu menghubungkan jalur utara dan Selatan, dan di masa depan akan diperkuat melalui pengembangan kereta cepat dan atau semi cepat Jakarta – Surabaya untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Untuk mengintegrasikan wilayah Kedungsepur, maka akan diarahkan pada pengembangan kereta perkotaan yang menghubungkan PPK dan sPPK dengan kawasan perkotaan lainnya. Titik simpul transportasi, seperti bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan juga akan diintegrasikan dengan menggunakan transportasi massal berbasis rel. Jaringan transportasi darat yang efisien akan mendukung kelancaran pergerakan manusia dan barang, serta meningkatkan kinerja pusat pelayanan dengan menyediakan akses yang cepat dan mudah.

Sementara itu, terdapat pula rencana pengembangan transportasi wisata sungai Kaligarang, Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Kali Semarang dan Waduk Jatibarang yang termasuk dalam sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan. Selain sebagai pengendali banjir dan sistem drainase, pemanfaatan jaringan sungai sebagai transportasi wisata tentunya juga akan mendukung pengembangan wisata sekaligus menambah atraksi wisata baru di Kota Semarang.

Selain dimanfaatkan sebagai atraksi wisata, Waduk Jatibarang juga diarahkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai bagian dari sistem jaringan energi ketenagalistrikan di Kota Semarang dengan potensi sebesar 1,5 megawatt. Infrastruktur pembangkit tenaga Listrik lainnya yang ada di Kota Semarang adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tambak Lorok di Kecamatan Semarang Utara dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Tempat Pengolahan Akhir Sampah Jatibarang di Kecamatan Mijen. Sistem jaringan energi ketenagalistrikan juga dilengkapi dengan gardu induk yang tersebar di lima kecamatan dan infrastruktur penyaluran tenaga Listrik berupa SUTET, SUTT, SUTM dan SKTM.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sungai



Gambar 94.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sungai

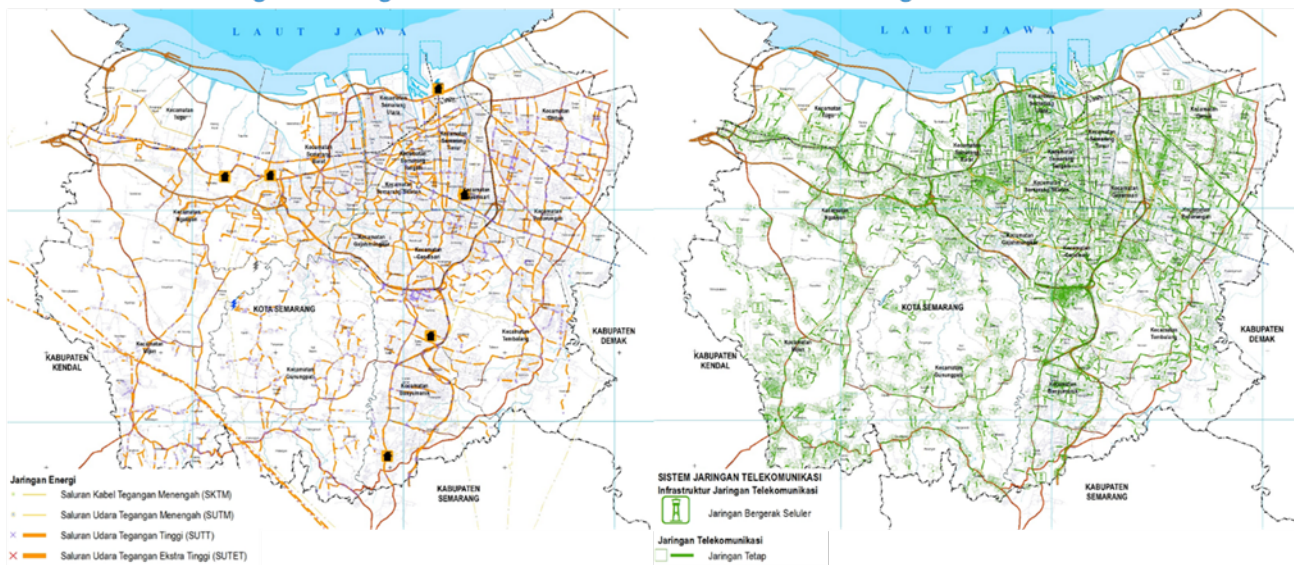
Sumber: RTRW Kota Semarang tahun 2011 – 2031

Di masa depan, kebutuhan akan teknologi informasi semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, Kota Semarang dalam Rencana Struktur Ruang juga akan dikembangkan jaringan telekomunikasi melalui jaringan kabel serat optik dan saluran serat optik untuk memperkuat akses informasi dan komunikasi. Jaringan kabel serat optik berbentuk jaringan udara melalui pemanfaatan tiang bersama antar operator telekomunikasi. Saluran serat optik berbentuk saluran dalam tanah melalui pemanfaatan ruang bersama antar operator telekomunikasi dan antar jaringan prasarana lainnya. Penyediaan sistem telekomunikasi jaringan tetap akan dikembangkan di seluruh wilayah dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan. Jaringan bergerak seluler akan dikembangkan melalui manara telekomunikasi berada di seluruh wilayah dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan dan keamanan lingkungan di sekitar menara telekomunikasi. Pengaturan lokasi menara telekomunikasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Sementara itu, rencana sistem jaringan sumber daya air di Kota Semarang meliputi air permukaan, air tanah dan pemanenan air hujan yang berfungsi sebagai penyediaan air baku dan prasarana sumber daya air sekaligus sebagai sistem pengendalian rob dan banjir. Air permukaan di Kota Semarang yaitu daerah aliran sungai pada wilayah Sungai Jratunseluna dan direncanakan pada pemanfaatan desalinasi air laut. Terdapat pula pengaturan pengambilan air tanah pada CAT Semarang – Demak dan CAT Ungaran melalui pembatasan pengambilan air tanah di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Gayamsari. Sementara itu, pemanfaatan pemanenan air hujan akan diarahkan pada kawasan yang rawan air baku dan kegiatan yang memiliki kebutuhan air baku yang besar. Sebagai sistem pengendalian rob dan banjir maka akan diarahkan pada pembangunan fasilitas penangkap dan penampung air berupa pengembangan kolam tampung air (embung) di seluruh wilayah, normalisasi aliran sungai, dan peningkatan kualitas jaringan drainase. Selain itu, juga didukung dengan pengembangan tanggul Pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk, juga kebijakan pengendalian kawasan terbangun di wilayah pinggiran seperti Gunungpati, Mijen dan Ngaliyan.

Rencana Sistem Jaringan Ketenagalistrikan

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi



Gambar 95.

Rencana Sistem Jaringan Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi

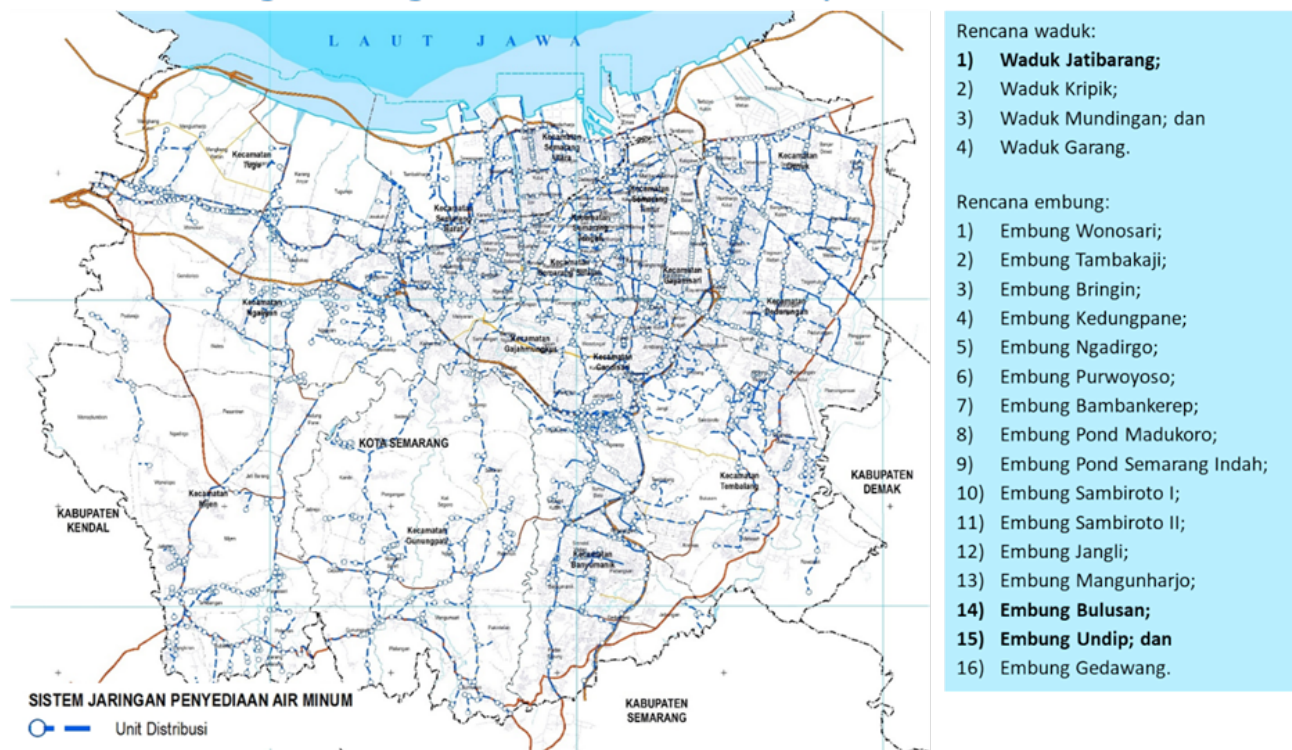
Sumber: RTRW Kota Semarang tahun 2011 – 2031

Untuk mendukung pencapaian indikator persentase sampah terolah di fasilitas pengolahan, peningkatan penanganan sampah perlu direncanakan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Sistem jaringan persampahan di Kota Semarang akan dikelola melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang dan TPA Regional dengan kewenangan pemerintah pusat. Sistem jaringan persampahan juga

didukung oleh Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dilengkapi fasilitas pengolahan sampah, tersebar di kawasan permukiman dan kawasan pusat pelayanan. Sistem jaringan penyediaan air minum diarahkan pada jaringan perpipaan dan non perpipaan. Unit air baku permukaan berada di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan lainnya, sedangkan Unit air baku dari dalam tanah berada di Kecamatan Mijen dan kecamatan Pedurungan. Untuk mendukung sistem jaringan penyediaan air makan akan dilakukan peningkatan sistem jaringan primer dan sekunder dengan unit.

Pelayanan dibagi menjadi lima wilayah, yaitu Semarang Bagian Barat, Semarang Bagian Utara, Semarang Bagian Timur, Semarang Bagian Selatan dan Semarang Bagian Tengah. Sementara itu, non perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa dan fasilitas penampungan air hujan. Sumur dangkal berada di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Banyumanik. Sumur pompa berada di Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan, Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan. Pengambilan melalui sumur pompa diarahkan untuk dikendalikan dan hanya digunakan untuk pemenuhan air minum, sedangkan fasilitas penampungan air hujan akan dimaksimalkan pada seluruh wilayah.

Rencana Pengembangan Sistem Sumber Daya Air



Gambar 96.

Rencana Pengembangan Sistem Sumber Daya Air

Sumber: RTRW Kota Semarang tahun 2011 – 2031

Sistem pengelolaan air limbah akan diarahkan pada dua jenis, yaitu sistem pembuangan air limbah (*sewage*) dan pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*). Pengembangan sistem air limbah diperuntukkan pada kawasan industri dan kegiatan perdagangan jasa. Sementara itu, sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan. Sedangkan sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan sedang dan kepadatan tinggi.

Sistem drainase di Kota Semarang diarahkan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi sistem drainase Mangkang, drainase Semarang Barat, drainase Semarang Tengah dan drainase Semarang Timur. Selain sistem drainase, arah

pengembangan dalam melayani kegiatan perdagangan jasa juga akan didukung dengan jalur pejalan kaki dan sepeda.

2.7.3 Rencana Pola Ruang tahun 2011 – 2031

Rencana pola ruang Kota Semarang tahun 2011 – 2031 terdiri dari rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung bertujuan untuk melindungi fungsi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kekayaan budaya yang ada di Kota Semarang. Rencana kawasan budidaya bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kota Semarang. Rencana pola ruang ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan.

1) Rencana Kawasan Budidaya

- Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 2.171 ha berupa kawasan hutan produksi tetap
- Kawasan perumahan meliputi:
 - perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota yaitu di BWK I, BWK II, BWK III, BWK V
 - perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan di BWK IV, BWK VI, BWK VII, BWK X khusus Kecamatan Tugu
 - perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan di BWK VIII, BWK IX dan BWK X khusus Kecamatan Ngaliyan
- Kawasan perdagangan dan jasa:
 - perdagangan dan jasa skala regional/nasional/internasional
 - perdagangan dan jasa skala kota
 - perdagangan dan jasa skala BWK
 - perdagangan dan jasa skala lingkungan
- Pengembangan kawasan perkantoran meliputi kawasan perkantoran pemerintah dan swasta
- Pengembangan kawasan pendidikan berupa rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi dan pendidikan unggulan di wilayah Kota
- Rencana kawasan industri: Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Mijen, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Genuk
- Pengembangan kawasan olah raga
- Rencana kawasan wisata: wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan
- Rencana kawasan transportasi
- Kawasan pertahanan keamanan
- Rencana kawasan peruntukan pertanian:
 - Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 2.893 ha meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Tembalang, Gunungpati, Ngaliyan, Mijen, dan Tugu.
 - Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 2.102 ha meliputi Kecamatan Tembalang, Gunungpati, Mijen, dan Ngaliyan.
- Pengembangan fasilitas peternakan
- Kawasan peruntukan perikanan: perikanan tangkap, perikanan budaya, dan pengolahan Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tugu
- Kawasan pelayanan umum meliputi kawasan fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, serta fasilitas keamanan dan keselamatan.
- Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) meliputi RTNH lingkungan bangunan, RTNH skala sub-kawasan dan kawasan, RTNH wilayah kota, dan RTNH fungsi tertentu.

2) Rencana Kawasan Lindung

- Kawasan lindung yang melindungi daerah bawahannya, Luas kawasan lindung fisiografis di Kota Semarang adalah 433 ha, terdapat di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan

Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Candisari

- Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas: kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk dan embung
- Ruang Terbuka Hijau: Ruang terbuka hijau kota direncanakan seluas 11.211 ha yaitu ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10% atau kurang lebih 3.737 ha dan ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20% atau kurang lebih 7.474 Ha.
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, meliputi:
 - Taman wisata
 - Kawasan cagar budaya
 - Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove
 - Kawasan pengungsian satwa

3) Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam meliputi:

- Kawasan rawan bencana rob meliputi Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Tugu.
- Kawasan rawan abrasi meliputi di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, dan Kecamatan Semarang Barat.
- Kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan a. Kecamatan Gajahmungkur; Kecamatan Gayamsari; Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Tugu; Kecamatan Semarang Barat; Kecamatan Semarang Tengah; Kecamatan Semarang Utara; Kecamatan Semarang Timur; Kecamatan Pedurungan; dan Kecamatan Genuk.
- Kawasan rawan bencana rawan gerakan tanah dan longsor.

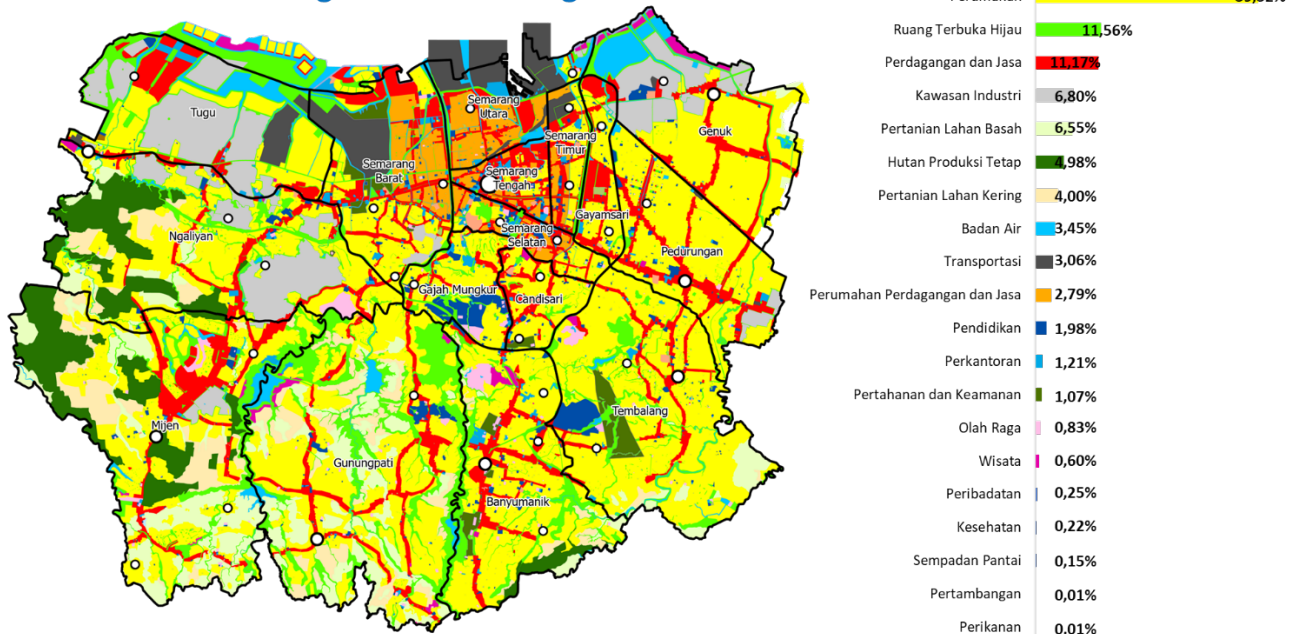
Kawasan rawan bencana gerakan tanah meliputi:

- Kecamatan Mijen: Kelurahan Mijen, Jatibarang, Kedungpane, dan Purwosari
- Kecamatan Gunungpati: Kelurahan Sadeng, Kandri, Pongangan, Nongkosawit, Kalisegoro, Sukorejo, Patemon, dan Pakintelan
- Kecamatan Banyumanik: Kelurahan Gedawang, Tinjomoyo, Sronдол Kulon, Banyumanik, Pudakpayung, Jabungan
- Kecamatan Tembalang: Kelurahan Meteseh, Bulusan, Kramas, dan Rowosari
- Kecamatan Semarang Barat: Kelurahan Manyaran
- Kawasan sesar aktif yang terdapat di:
 - Kecamatan Tembalang: Kelurahan Jangli, Tembalang, Bulusan, dan Kramas
 - Kecamatan Banyumanik: Kelurahan Sronдол Kulon, Tinjomoyo, Pedalangan, Jabungan, Padangsari, Sumurboto, dan Tinjomoyo
 - Kecamatan Gunungpati: Kelurahan Sumurejo, Mangunsari, Pakintelan, Plalangan, Patemon, Sekaran, Kalisegoro, Sadeng, Pongangan, Kelurahan Ngijo, Cepoko, Kandri, Gunungpati, dan Sukorejo
 - Kecamatan Ngaliyan: Kelurahan Ngaliyan, Kalipancur dan Bambankerep
 - Kecamatan Mijen: Kelurahan Tambangan, Jatirejo, Jatibarang, Wonoplumbon, Ngadirgo, Purwosari, dan Cangkiran.
 - Kecamatan Gajahmungkur: Kelurahan Bendan Duwur, Bendan Ngisor, Sampangan, dan Kelurahan Petompon.
 - Kecamatan Semarang Barat: Kelurahan Kembangarum, Manyaran, dan Ngeemplak Simongan.
 - Kecamatan Candisari: Kelurahan Karanganyar Gunung dan Jomblang
 - Kecamatan Semarang Selatan: Kelurahan Lamper Kidul, Peterongan dan Wonodri

- Kecamatan Semarang Timur: Kelurahan Karang Kidul, Sarirejo dan Jagalan
- Kawasan rawan bencana longsor yang terdapat di:
 - Kecamatan Gajahmungkur meliputi Kelurahan Bendungan, Lempongsari, Bendan Ngisor, Bendan Nduwur, dan Gajahmungkur.
 - Kecamatan Candisari: Kelurahan Karanganyar Gunung
 - Kecamatan Tembalang: Kelurahan Kramas, Bulusan, Sambiroto, Mangunharjo, Tandang, dan Sendangguwo
 - Kecamatan Banyumanik: Kelurahan Padangsari
 - Kecamatan Gunungpati: Kelurahan Pongangan, Nongkosawit, Kalisegoro, Sukorejo, Patemon, Pakintelan
 - Kecamatan Mijen: Kelurahan Wonolopo, Jatisari, dan Kedungpane.
- Kawasan rawan bencana angin topan: Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, dan Mijen.

Selain, rencana kawasan budidaya dan lindung, terdapat pula rencana kawasan strategis sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjaga daya dukung lingkungan hidup dan melestarikan kearifan sosial dan budaya, yaitu kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi, dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi Waduk Jatibarang, reklamasi pantai dan Banjir Kanal Barat dan Timur. Kawasan Sosial Budaya meliputi Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Semarang, Kota Lama, Kawasan Pendidikan, Gedong Batu, Kota Lama, Kampung Bahari, dan Kawasan Perbatasan.

Rencana Pola Ruang Kota Semarang



Gambar 97.

Rencana Pola Ruang Kota Semarang Tahun 2011 – 2031

Sumber: RTRW Kota Semarang tahun 2011 – 2031

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah merupakan proses perubahan terencana yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Meskipun tujuannya mulia, prosesnya sering menemui berbagai permasalahan seperti kesenjangan antar daerah, keterbatasan sumber daya, tata kelola pemerintahan yang tidak optimal, dan dampak bencana alam.

Kesenjangan antar daerah terlihat dari ketimpangan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas SDM. Keterbatasan anggaran, manusia, dan alam juga menjadi hambatan. Ditambah lagi dengan tata kelola pemerintahan yang tidak efisien dan praktik korupsi memperparah permasalahan. Dampak pembangunan seperti pencemaran lingkungan dan hilangnya nilai budaya lokal juga perlu diperhatikan.

Permasalahan bersifat kontekstual di mana perubahan tempat dan waktu mempunyai pengaruh terhadap permasalahan itu sendiri. Dengan demikian, sesuatu yang pada saat ini dianggap atau ditentukan sebagai masalah belum tentu menjadi permasalahan di masa yang akan datang. Perspektif kontekstual ini perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan di Kota Semarang. Perumusan permasalahan Kota Semarang tidak saja mempertimbangkan kondisi terkini tetapi juga prakiraan perkembangan aspek tertentu yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Pembahasan mengenai permasalahan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah ini menjadi dasar bagi perumusan solusi terhadap permasalahan yang dituangkan di dalam arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Rumusan permasalahan ini dikelompokkan ke dalam beberapa aspek dasar yang menjadi faktor penting dalam perkembangan sebuah kota seperti Semarang ini. Beberapa faktor yang dimaksud adalah sosial budaya, ekonomi daerah, infrastruktur wilayah dan perkotaan, ketahanan kota dan tata kelola pemerintahan. Berikut merupakan penjelasan lebih lengkap setiap permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Kota Semarang.

3.1.1 Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa, namun akses dan kualitasnya masih belum merata, terutama di Kota Semarang. Masyarakat di wilayah pinggiran masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Secara jumlah, fasilitas pendidikan Kota Semarang sudah terbilang mencukupi namun secara kualitas masih banyak daerah yang belum memadai, Kualitas pendidikan yang belum merata di Kota Semarang tercermin dari beberapa kondisi, yaitu kemampuan literasi dan numerasi, rata-rata lama sekolah, dan lulusan pendidikan tinggi.

Secara individu, kemampuan literasi dan numerasi di Indonesia secara umum masih rendah, tidak terkecuali Kota Semarang. Berdasarkan asesmen nasional, rata-rata angka literasi pada semua jenjang di Kota Semarang hanya mencapai 69,35 – 69,90% dan rata-rata angka numerasi hanya mencapai 38,78 – 47,36%. Angka ini tergolong rendah dan masih jauh dari rata-rata negara maju yang mampu mencapai 90%. Kondisi ini juga semakin diperparah dari rata-rata lama sekolah yang belum mampu mencapai 12 tahun (10,81 tahun di tahun 2023). Akhirnya, kondisi ini menciptakan penduduk Kota Semarang hanya didominasi oleh SMA se-derajat, sedangkan lulusan pendidikan tingginya hanya mencapai 18,25% (2023). Rendahnya indikator ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Kota Semarang di masa depan, dan tentunya mempengaruhi daya saing daerah pada tingkat nasional dan global.

3.1.2 Pemerataan Akses Sarana Kesehatan

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi salah satu penting pilar dalam menuju transformasi sosial sebagai bangsa yang maju. Masyarakat Kota Semarang memiliki angka harapan hidup yang cukup tinggi jika dibandingkan

dengan kota-kota lainnya di Indonesia yaitu mencapai 70,9 tahun. Namun, angka harapan hidup perlu ditingkatkan di masa depan melalui dukungan ketersediaan sarana kesehatan.

Dengan meningkatnya urbanisasi dan meluasnya wilayah perkotaan Kota Semarang, maka kebutuhan akan sarana kesehatan semakin tinggi. Ditambah lagi, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, usia lanjut di Kota Semarang akan mengalami peningkatan pada tahun 2025-2045. Artinya, sarana kesehatan menjadi fasilitas yang penting di masa depan untuk menunjang kesehatan usia lanjut.

Jumlah sarana kesehatan saat ini masih belum merata di seluruh wilayah Kota Semarang. Puskesmas dan rumah sakit masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah pinggirannya masih terbatas. Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di wilayah pinggiran menjadi terbatas.

3.1.3 Keamanan, Kerukunan dan Kesenjangan

Permasalahan keamanan, kerukunan dan kesenjangan merupakan pilar kunci dalam mencapai kemajuan sosial budaya. Masyarakat Kota Semarang yang multietnik dan beragam tentunya memiliki keunggulan juga tantangan di masa depan.

Tingkat keamanan di Kota Semarang masih tergolong lemah, hal ini tercermin dari proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di wilayahnya yang hanya mencapai 74,56%. Selain itu, indeks ketimpangan gender juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yang berarti kesenjangan gender masih dirasakan, khususnya bagi perempuan. Masyarakat yang merasa tidak aman akan selalu diliputi rasa takut dan kecemasan, sehingga menghambat aktivitas dan produktivitas mereka. Ditambah lagi, Kesenjangan gender dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan, seperti KDRT dan pelecehan seksual. Namun, Indeks Kota Toleran di Kota Semarang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan Indeks Kota Toleran ini mencerminkan upaya pemerintah kota dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan setara. Program-program yang melibatkan masyarakat dalam pencegahan kekerasan dan promosi kesetaraan gender dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan setara, Kota Semarang dapat mencapai kemajuan yang lebih baik.

3.1.4 Pelestarian Budaya

Kota Semarang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk cagar budaya dan lokasi sejarah. Namun, pelestarian budaya di Semarang masih menghadapi banyak tantangan, seperti rendahnya pengelolaan dan perawatan cagar budaya serta rendahnya daya tarik lokasi sejarah. Kondisi ini tercermin dari masih rendahnya pengunjung untuk mengunjungi lokasi sejarah yang angkanya hanya mencapai 4.641 orang. Padahal, di proyeksikan pada tahun 2045 kunjungan wisatawan di Kota Semarang mencapai 44.728 orang, sehingga untuk mencapai angka tersebut masih terbilang jauh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran pengelolaan, pengembangan kawasan, dan kesadaran masyarakat, serta kurangnya promosi dan fasilitas di lokasi sejarah. Selain itu, menurut masyarakat, penting juga untuk memiliki pengembangan talenta yang berkaitan dengan pelestarian budaya, seperti kelas musik, tari dan sebagainya. Pemerintah juga perlu untuk menguatkan posisi Dewan Kesenian Semarang sebagai wadah dan jembatan bagi para seniman. Jika kondisi ini tidak ada upaya intervensi maka di masa depan warisan budaya lokal akan cepat tergerus zaman dan peluang ekonomi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kota Semarang sebagai kota metropolitan masih memiliki wilayah yang kesulitan mengakses layanan dasar sosial seperti pendidikan yang berkualitas hingga

persoalan keamanan dan kesenjangan. Kesenjangan yang semakin lebar dapat memicu berbagai permasalahan sosial seperti kriminalitas dan keresahan masyarakat. Di sisi lain, pelestarian budaya juga terancam oleh kurangnya edukasi, infrastruktur penunjang, globalisasi dan modernisasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, Kota Semarang akan tertinggal dibandingkan dengan kota metropolitan lainnya di Indonesia dan menjadikan kota yang tidak aman untuk ditinggali. Oleh karena itu, isu utama yang dihadapi oleh Kota Semarang yang terkait sosial budaya adalah rendahnya akses terhadap pelayanan dasar sosial dan pelestarian budaya.

3.1.5 Ketimpangan Kesejahteraan

Meskipun tingkat kemiskinan di Kota Semarang telah menurun, ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat kaya dan miskin masih tergolong tinggi. Hal ini tercermin dari masih adanya 4,23% (tahun 2023) penduduk yang tergolong miskin, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,99% (tahun 2023), dan indeks gini yang terus meningkat di angka 0,405 (tahun 2023). Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan kesejahteraan di Kota Semarang antara lain akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, kurangnya lapangan pekerjaan yang layak, keterampilan dan pendidikan angkatan kerja yang masih rendah, dan tingginya biaya hidup. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka di tingkat menengah yang masih tinggi yaitu sebesar 16,92% dan TPAK perempuan sebesar 60,64%. Pada tahun 2045, diproyeksikan tingkat kemiskinan dapat turun hingga 0,0 – 0,22% dan tingkat pengangguran dapat turun hingga 1,58 – 1,88%, oleh karena itu selama 20 tahun ke depan dibutuhkan berbagai upaya untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 4,10 – 4,12% dan pengangguran sebesar 4,11 – 4,41%.

3.1.6 Pengembangan Ekonomi Lokal

Upaya pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan pemerintah, seperti pengembangan UMKM dan sektor pariwisata, belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian Kota Semarang. Hal ini tercermin dari jumlah wisatawan mancanegara yang hanya mencapai 13.992 jiwa per tahunnya (2023), padahal proyeksi di tahun 2045 idealnya wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang mencapai 284.608 jiwa. Artinya, dalam 20 tahun ke depan, Kota Semarang perlu menarik wisatawan mancanegara hingga 255,822 jiwa. Selain itu, Kota Semarang yang merupakan metropolitan memiliki proporsi UMKM non pertanian yang sudah mencapai 99,7%. Namun, skala UMKM masih didominasi skala mikro sehingga memiliki kapasitas yang rendah dan sangat rentan terhadap guncangan. Kondisi ini menyebabkan UMKM di Kota Semarang sulit untuk berkembang dan bersaing dengan pengusaha besar. Rasio kewirausahaan daerah Kota Semarang juga masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 3,34%, sedangkan di negara maju dapat mencapai 10 – 12% dari total penduduk. Di masa depan, pengembangan ekonomi lokal, khususnya sektor ekonomi kreatif dapat menjadi solusi yang kolaboratif dan menjadi daya dorong bagi perekonomian kota. Jika tidak menjadi perhatian khusus, dikhawatirkan UMKM dan pariwisata di Kota Semarang akan terus tertinggal dan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

3.1.7 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kota Semarang masih didominasi oleh sektor pajak dan retribusi. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada sektor formal. Di sisi lain, volume usaha koperasi tergolong masih rendah yaitu sebesar 0,2% dari PDRB. Kemampuan aset dan laba bersih BUMD juga tergolong rendah, yaitu sebesar 4,96%, idealnya di tahun 2045 mampu mencapai 9,98%. Artinya masih terdapat gap sebesar 5,02% untuk jangka waktu 20 tahun. Kondisi ini mengindikasikan berbagai hal, yaitu ketergantungan pada sektor formal yang tinggi, kurangnya diversifikasi pendapatan daerah, dan belum optimalnya kinerja koperasi dan BUMD. Dampaknya di masa depan yaitu pembangunan dan kemajuan kota akan terhambat serta ekonomi daerah yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.

3.1.8 Diversifikasi Industri

Perekonomian daerah Kota Semarang masih bergantung pada sektor industri namun sektor industri masih tergolong kurang berkembang dengan skala kecil dan menengah. Hal ini tercermin dari tingkat kapabilitas inovasi yang menurun di tahun 2023 yaitu sebesar 3,46. Penurunan ini menunjukkan bahwa industri di Kota Semarang kurang mampu menghasilkan produk dan layanan baru yang inovatif. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berinovasi, akses yang terbatas terhadap teknologi dan informasi, dan infrastruktur yang kurang memadai. Kondisi ini menyebabkan sektor industri di Kota Semarang sulit untuk bersaing dengan industri di daerah lain. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dan meningkatkan pengangguran.

3.1.9 Akses Hunian Layak dan Berkelanjutan

Urbanisasi dan *urban sprawl* menjadi tantangan besar dalam mewujudkan akses hunian yang layak di Kota Semarang. Meningkatnya permintaan hunian dan meluasnya wilayah perkotaan menyebabkan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Hal ini membuat pembangunan hunian yang layak dan terjangkau menjadi semakin sulit, dan harga hunian pun meningkat pesat. Padahal, diproyeksikan pada tahun 2045 penduduk Kota Semarang dapat mencapai 1,8 juta jiwa. Artinya, terdapat kebutuhan hunian hingga 624.906-unit sedangkan *backlog* di tahun 2023 masih sebesar 124.657 hunian. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit untuk mendapatkan hunian yang layak, dan banyak yang terpaksa tinggal di permukiman kumuh dengan kondisi yang tidak layak huni. Hal ini tercermin dari persentase jaringan jalan yang mantap belum mencapai 100%, persentase air siap minum yang hanya mencapai 56,05% dan persentase sampah yang terolah yang hanya 11%. Berbagai kondisi tersebut jika dibiarkan akan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, kotor dan menimbulkan berbagai penyakit, sehingga membuat kota menjadi tidak layak.

3.1.10 Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan di Kota Semarang merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Kota ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk pencemaran udara dari industri dan transportasi, pencemaran air dari limbah domestik dan industri, serta kerusakan ekosistem pantai dan pesisir akibat pembangunan yang tidak terkendali. Hal ini tercermin dari masih rendahnya IKLH pada bagian indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan. Dampak buruk ini tidak hanya terasa saat ini, tetapi juga akan memperburuk kualitas lingkungan di masa depan. Misalnya, kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan pada penduduk, sementara pencemaran air dapat mengancam pasokan air bersih dan menyebabkan penyebaran penyakit air. Kerusakan ekosistem pantai dan pesisir juga dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan intrusi air laut di masa mendatang. Dampak buruk dari degradasi lingkungan seperti kesehatan yang terganggu, berkurangnya ketersediaan air bersih, dan meningkatnya risiko bencana alam akan menghambat upaya menuju kota yang layak huni.

3.1.11 Ancaman Bencana dan Perubahan Iklim

Ancaman bencana dan perubahan iklim di Kota Semarang menjadi perhatian serius, terutama mengingat masih tingginya risiko bencana banjir dan longsor serta emisi gas rumah kaca (GRK) yang berasal dari sektor energi dan transportasi. Kota ini secara geografis rentan terhadap banjir akibat hujan deras dan rob, ditambah dengan pertambahan jumlah permukaan yang terbangun dan penurunan muka air tanah. Banjir dapat menyebabkan kerugian materiil dan non materiil yang signifikan, serta berdampak pada kesehatan dan keselamatan penduduk. Sementara itu, longsor merupakan ancaman bagi penduduk yang tinggal di daerah perbukitan dan lereng yang rentan terhadap erosi akibat curah hujan yang tinggi. Di sisi lain, emisi GRK dari sektor energi dan transportasi juga menjadi masalah serius karena berkontribusi

pada pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrem. Kendaraan bermotor dan industri menjadi sumber utama emisi GRK di kota ini. Hal ini akan terus memperburuk perubahan iklim global, mengakibatkan dampak yang lebih serius seperti kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan peningkatan muka air laut. Tantangan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas berbasis masyarakat dan keluarga dalam menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim. Ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan praktik-praktik adaptasi, pelatihan keterampilan tanggap bencana, serta penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang dapat digunakan secara efektif dalam situasi darurat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses mitigasi dan adaptasi, tidak hanya akan memperkuat ketahanan kota terhadap ancaman tersebut, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

3.1.12 Penurunan Muka Tanah (*Land Subsidence*)

Permasalahan penurunan muka tanah di Kota Semarang merupakan isu lingkungan yang serius dan kompleks. Penurunan Tanah di Kota Semarang terjadi di beberapa kecamatan dengan tingkat risiko amblesan yang berbeda-beda. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Gayamsari, Genuk, Semarang Timur, dan Semarang Utara. Luasan risiko amblesan (8-9 cm/tahun) terluas 3.706,98 ha disusul Kecamatan Genuk dengan luas 1.009,59 ha. Kecamatan-kecamatan ini berlokasi di pesisir. Penyebab utama dari penurunan tanah ini adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan, di mana air tanah diambil secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga, dan pertanian. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali ini menyebabkan penurunan permukaan tanah karena lapisan tanah kehilangan air dan mengakibatkan kompresi. Selain itu, pembangunan infrastruktur berat seperti gedung bertingkat, jalan raya, dan fasilitas industri menambah beban pada lapisan tanah, mempercepat proses penurunan tanah.

Di masa depan, jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, wilayah pesisir dan pusat Kota Semarang berisiko mengalami kerusakan lingkungan yang lebih parah, hilangnya lahan produktif, dan peningkatan biaya untuk infrastruktur mitigasi, seperti tanggul dan sistem drainase yang lebih kompleks. Upaya mitigasi yang efektif harus mencakup pengendalian pengambilan air tanah, penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam pengelolaan air, dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengurangi tekanan pada tanah. Dengan tindakan pencegahan dan adaptasi yang tepat, dampak negatif dari penurunan muka tanah di Semarang dapat diminimalkan, menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

3.1.13 Risiko Kesehatan pada Kelompok Rentan

Kelompok rentan, yang meliputi penduduk berusia lanjut, anak-anak, perempuan, ibu hamil dan melahirkan, serta individu dengan keterbatasan akses ke layanan kesehatan, menunjukkan risiko kesehatan yang signifikan di Kota Semarang. Hal ini berdasarkan pada masih tingginya angka kematian ibu (79,9 per 100.000 kelahiran), masih terdapat kasus stunting dengan prevalensi sebesar 10,4%, dan angka keberhasilan TBC sebesar 99,80%. Di sisi lain, usia harapan hidup Kota Semarang semakin meningkat setiap tahunnya, namun terdapat peningkatan risiko kesehatan pada usia lanjut, sedangkan anak-anak yang mengalami stunting dapat mengalami gangguan pertumbuhan, perkembangan, dan daya tahan tubuh yang rendah. Kelompok rentan di Kota Semarang juga menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi karena prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang masih tinggi sebesar 7,08%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari mereka mungkin mengalami ketidakcukupan gizi yang berkaitan dengan akses terhadap makanan bergizi dan variasi dalam pola makan. Ketidakcukupan konsumsi pangan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk kurang energi dan nutrisi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak-anak serta meningkatkan risiko penyakit kronis

pada kelompok usia lanjut. Permasalahan ini berimplikasi pada ketahanan kota di masa depan, mengingat pentingnya aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam membangun kota yang berkelanjutan dan inklusif.

3.1.14 Pelayanan Publik dan Tata Kelola

Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kota Semarang menyoroti sejumlah isu krusial, dengan penekanan pada SPBE, risiko korupsi, dan sistem regulasi yang belum optimal. Implementasi SPBE, sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan, menghadapi tantangan dalam hal efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Implementasi yang tidak optimal dapat mengakibatkan kurangnya pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta berdampak pada kesenjangan akses bagi masyarakat terhadap layanan tersebut. Hal ini tercermin dari indeks SPBE yang masih di angka 3,89 yang artinya tingkat kematangan penerapan SPBE di Kota Semarang masih tergolong sedang. Selain itu, risiko korupsi tetap menjadi masalah serius dalam sistem pemerintahan, di mana penggunaan teknologi belum sepenuhnya mengatasi praktik korupsi. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika dan integritas berkontribusi pada risiko korupsi yang masih tinggi. Di samping itu, sistem regulasi yang belum optimal dapat menghambat pertumbuhan sektor swasta dan investasi, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Kondisi ini tercermin dari indeks reformasi hukum yang masih di angka 77,19 dan indeks integritas nasional di angka 74,80. Angka ini masih tergolong rendah jika melihat targetnya di 2045 yang seharusnya sudah mencapai 90 ke atas. Menghadapi proyeksi di masa depan, langkah-langkah perbaikan dalam implementasi SPBE, peningkatan transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik di dalam pengambilan keputusan pemerintah akan menjadi semakin penting. Hal ini harus diikuti dengan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, serta reformasi sistem regulasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

3.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis Kota Semarang tahun 2045 memperhitungkan dinamika megatren global, isu nasional, isu Provinsi Jawa Tengah, dan juga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Di tengah perubahan iklim global yang semakin nyata, Kota Semarang harus beradaptasi dengan tren teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana alam yang semakin sering terjadi. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan dalam upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melalui pengembangan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses industri.

Megatren global secara tidak langsung memiliki dampak yang signifikan bagi pembangunan Kota Semarang. Implementasi *SDGs* membawa fokus pada pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Perkembangan demografi global, khususnya pertumbuhan populasi dan urbanisasi, mempengaruhi pola permintaan dan tekanan terhadap sumber daya kota. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan *middle class* menciptakan peluang baru untuk konsumsi dan investasi, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait ketimpangan sosial dan keberlanjutan lingkungan jika dibiarkan tanpa intervensi. Kemajuan teknologi, seperti digitalisasi dan kecerdasan buatan, mengubah cara masyarakat bekerja, berkomunikasi, dan mengelola kota. Ditambah lagi perubahan iklim membawa ancaman serius seperti kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut, yang membutuhkan adaptasi dan mitigasi yang kuat dari pemerintah kota. Di samping itu, dinamika geopolitik global, seperti hubungan internasional dan ketegangan perdagangan, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan Kota Semarang. Memahami dan mengelola dampak dari megatren global ini akan menjadi kunci bagi Kota Semarang untuk mencapai pembangunan yang maju, berkelanjutan, inklusif, dan tangguh di masa depan.



Gambar 98.
 Isu Strategis Kota Semarang
 Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Pada tingkat nasional, beberapa isu yang dihadapi tentunya secara tidak langsung juga berdampak bagi Kota Semarang. Seperti halnya produktivitas rendah di tingkat nasional akan turut menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing, yang secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian Kota Semarang. Belum optimalnya inovasi teknologi (IPTEKIN) pun juga dirasakan di Kota Semarang yang mengurangi kemampuan untuk menghasilkan solusi inovatif dalam mengatasi

tantangan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan bencana dan perubahan iklim di Kota Semarang. Infrastruktur yang belum memadai dan literasi digital yang rendah menghalangi akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, serta untuk memajukan sektor industri dan pariwisata di Kota Semarang. Selain itu, tata kelola yang belum optimal di tingkat nasional, khususnya terkait dengan korupsi dan efektivitas birokrasi, dapat memperlambat implementasi kebijakan pembangunan dan mempengaruhi investasi serta kepercayaan investor, termasuk dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi kecil.

Isu di Provinsi Jawa Tengah yang lebih berfokus pada daya saing ekonomi, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, dan kekuatan budaya sebagai karakter juga akan berdampak pada Kota Semarang. Daya saing ekonomi yang kuat di tingkat provinsi akan menciptakan peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi Kota Semarang, terlebih Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Namun, ketahanan pangan yang terjamin di tingkat provinsi juga penting untuk memastikan pasokan pangan yang cukup dan berkualitas sehingga untuk memastikan ketahanan pangan perlu sinergi antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, khususnya kabupaten yang dominan pada sektor pertanian. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah akan membantu melindungi lingkungan hidup dan ekosistem yang merupakan bagian penting dari keberlanjutan. Kekuatan budaya sebagai karakter Provinsi Jawa Tengah juga dapat menjadi daya tarik pariwisata yang potensial bagi Kota Semarang, yang dapat mengembangkan sektor pariwisata secara lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara isu-isu di tingkat nasional dan provinsi dengan strategi pembangunan.

Isu KLHS RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 dikelompokkan kedalam 4 pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola sebagai berikut:

1) Pilar Sosial

Pilar sosial saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan. Upaya menjaga ketahanan pangan dan memastikan akses seluruh masyarakat terhadap makanan bergizi masih belum optimal, sehingga berpotensi mengancam kesehatan dan produktivitas masyarakat. Selain itu, kualitas hidup masyarakat yang belum merata serta rendahnya daya saing sumber daya manusia menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan. Perlindungan dan kesetaraan gender pun masih menjadi isu krusial, di mana berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan gender menghambat potensi perempuan untuk berkontribusi penuh dalam pembangunan.

2) Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan potensi daerah dan teknologi secara optimal masih belum terwujud, sehingga belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Selain itu, dukungan terhadap sektor-sektor produktif yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga masih terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan daya saing yang rendah menjadi tantangan tersendiri, menghambat pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan usaha.

3) Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Salah satu isu utama adalah belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan degradasi lingkungan, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, integrasi infrastruktur dan pelayanan kegiatan perkotaan yang belum optimal juga menjadi permasalahan serius. Pembangunan perkotaan yang tidak terencana dengan baik seringkali

mengabaikan aspek lingkungan, sehingga berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat dan berpotensi menimbulkan bencana. Diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana, serta merancang pembangunan perkotaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

4) Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Perlindungan hukum dan pelayanan publik yang belum optimal seringkali menjadi keluhan masyarakat, mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya baik, demokratis, dan bertanggung jawab juga menjadi permasalahan serius. Korupsi, nepotisme, dan kolusi masih menjadi ancaman terhadap integritas pemerintahan dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Diperlukan reformasi birokrasi yang komprehensif, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kota Semarang perlu diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang maju dan berkelanjutan. Berdasarkan pada megatren, isu nasional, isu Provinsi Jawa Tengah dan KLHS RPJPD Kota Semarang Tahun 2025–2045 maka diketahui terdapat lima (5) isu strategis utama yang dihadapi Kota Semarang selama 20 tahun ke depan. Kelima isu tersebut adalah:

1) Rendahnya akses terhadap layanan dasar sosial dan pelestarian budaya

Belum seluruh masyarakat Kota Semarang mampu mengakses layanan kesehatan dan pendidikan secara optimal. Masih perlunya penambahan dan pemerataan akses ke sarana kesehatan tingkat pertama menjadi isu yang harus diselesaikan. Pada urusan pendidikan, masih perlu ditingkatkan kualitas pengajaran dan pendidikan melalui tambahan sekolah, terutama untuk pendidikan menengah atas, penyediaan ruang kelas yang layak, serta peningkatan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi. Pengarusutamaan kebudayaan, serta upaya peningkatan apresiasi seni dan budaya khas Kota Semarang juga menjadi isu ke depan.

2) Ketimpangan kesejahteraan dan rendahnya daya saing ekonomi kota

Meskipun menunjukkan perbaikan dan lebih baik dari sebagian besar kota metropolitan lain, angka indeks gini yang masih cukup tinggi perlu mendapat perhatian dalam 20 tahun ke depan melalui program dan kegiatan yang menysasar langsung ke masyarakat berpendapatan rendah. Transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing perlu dilakukan dengan berfokus kepada sektor unggulan Kota Semarang di sektor perdagangan dan jasa dengan mendorong produktivitas tenaga kerja, kondusivitas wilayah, perbaikan iklim investasi, serta pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3) Rendahnya kualitas infrastruktur perkotaan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim

Peningkatan kualitas infrastruktur yang diawali dengan penuntasan daya dukung dan daya tampung perkotaan diharapkan akan mampu mendorong peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang. Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas juga didorong untuk mampu adaptif terhadap potensi dampak perubahan iklim

4) Tingginya dampak bencana terhadap kelompok rentan, dan

Sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dijaga, dipelihara, dan dilestarikan agar juga mampu mengurangi potensi bencana. Selain itu, peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim perlu terus didorong dengan juga meningkatkan kapasitas dan responsivitas penanganan bencana.

5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang mendorong birokrasi daerah sebagai penyelenggara pemerintahan agar dapat lebih efektif, efisien dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas menjadi isu yang

mengemuka. Pemerintahan juga dituntut untuk mampu adaptif terhadap perubahan yang dinamis dari lingkungan eksternal maupun internal. Integritas penyelenggara pemerintahan serta peningkatan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan mutakhir menjadi kerangka dalam arah pembangunan 20 tahun ke depan.

Kelima isu tersebut mengarah pada satu isu besar yaitu meningkatnya ketimpangan, rendahnya daya saing global, kualitas infrastruktur yang kurang merata, dan tata kelola yang lemah merupakan isu-isu yang memperparah dampak perubahan iklim dan bencana di Kota Semarang. Ketimpangan yang meningkat memperburuk kerentanan masyarakat terhadap bencana serta menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Rendahnya daya saing global, terutama dalam hal teknologi dan inovasi, menghalangi upaya untuk membangun kembali dan memperkuat infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim. Infrastruktur yang kurang merata memperbesar kesenjangan dalam kesiapan dan aksesibilitas terhadap layanan dasar, sementara tata kelola yang lemah menyulitkan koordinasi dan implementasi kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana dan menangani dampak perubahan iklim. Dengan demikian, penanganan isu-isu ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan Kota Semarang dan meningkatkan kesiapannya menghadapi tantangan bencana dan perubahan iklim di masa depan

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 VISI 2045

Terdapat beberapa isu-isu yang dihadapi oleh Kota Semarang, yang meliputi rendahnya akses terhadap layanan sosial, ketimpangan kesejahteraan, kualitas infrastruktur perkotaan yang rendah, tingginya dampak bencana, dan sistem regulasi. Hasil dari diskusi bersama dewan pakar menyatakan bahwa kunci untuk transformasi Kota Semarang adalah fokus pada perdagangan berorientasi wisata, transformasi menjadi *Smart City* dan *Society 5.0*, serta pembangunan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Dengan mendasar pada gambaran kondisi pencapaian pembangunan daerah sebelumnya, isu dan tantangan global, serta dengan memperhatikan rancangan dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 maka disusun Visi “Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi bertujuan untuk mengatasi isu-isu tersebut dengan meningkatkan akses terhadap layanan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur perkotaan, mengurangi dampak bencana, memperkuat regulasi, dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Visi ini berupaya memberikan solusi inovatif dan menjadi inspirasi bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut.

4.1.1 Kota Metropolitan

Mengandung arti peran dan fungsi Kota Semarang sebagai pusat aglomerasi wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Metropolitan Semarang diartikan sebagai metropolitan yang tidak hanya dibatasi oleh delineasi administratif tapi juga berdasarkan keterkaitan fungsi dengan daerah di sekitarnya. Dengan posisi letak Kota Semarang yang strategis yaitu di antara kota Jakarta dan kota Surabaya, berdekatan dengan Kawasan Industri Batang, Kendal, dan Brebes (pusat industri manufaktur dan teknologi di Indonesia), terhubung dengan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) nasional Candi Borobudur, dan peluang kedekatan akses dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru, di tahun 2045 Kota Semarang diharapkan dapat menjadi metropolitan yang berfungsi sebagai *superhub* yang didukung oleh konektivitas dan aksesibilitas yang baik. Dengan demikian perekonomian Kota Semarang akan meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pulau Jawa, yang berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045 diarahkan menjadi megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai Kota Metropolitan, di tahun 2045 Kota Semarang dapat menjadi kota yang meningkatkan kualitas perannya sebagai tempat bermukim, pusat kegiatan dan pelayanan ekonomi (bekerja), serta jasa pendukung lainnya (rekreasi) yang nyaman dan layak, serta dapat mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang dan wilayah sekitarnya.

4.1.2 Kota Layak Huni

Mengandung arti bahwa Kota Semarang di tahun 2045 merupakan kota yang nyaman untuk dihuni dan beraktivitas oleh seluruh warga Kota Semarang maupun oleh warga sekitar Kota Semarang, baik dari sisi fisik (fasilitas perkotaan, permukiman, prasarana, sarana, dan lain-lain) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, karakter budaya, aktivitas ekonomi, dan lain-lain). Sebagai kota

yang layak huni, Kota Semarang diharapkan akan memiliki kualitas hidup tinggi, yang didukung oleh akses yang adil ke layanan perkotaan yang efisien; infrastruktur berkualitas, cerdas dan ramah lingkungan; sistem pemerintahan yang adaptif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pengambilan keputusan; memiliki perencanaan kota yang holistik; tangguh dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim; memiliki sistem ekonomi kota yang sirkular dan inklusif; memiliki sistem transportasi cerdas berkelanjutan.

4.1.3 Kota yang Maju

1) Daya Saing

Perekonomian Kota Semarang mampu tumbuh di atas nasional dan provinsi dan berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan, terutama pada sektor jasa pendukung industri dan perdagangan, dengan sumber daya manusianya yang produktif, kreatif dan unggul serta mampu bersaing di persaingan global.

2) Tangguh

Kota Semarang di tahun 2045 adalah kota yang mampu mengantisipasi, menghadapi dan menangani tantangan dan krisis dari alam dan non alam dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

3) Modern

Kota Semarang yang modern adalah kota yang cerdas dengan dukungan infrastruktur mutakhir, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Pemerintah Kota Semarang dan warganya memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan layanan perkotaan yang cerdas, efisien, efektif, terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau, yang didukung oleh riset dan inovasi.

4) Inovatif

Kota Semarang memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar berpendidikan tinggi, yang mampu menciptakan dan memanfaatkan teknologi terbaru, yang mampu menciptakan dan memanfaatkan inovasi di berbagai sektor untuk menunjang produktivitas dan peningkatan kualitas hidup kota dan warganya. Dengan kota dan warga yang terus berinovasi, maka Kota Semarang menjadi kota yang efisien, efektif dan berkelanjutan, yang mampu menghadapi tantangan global yang kompleks dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.

5) Adil

Kota Semarang yang maju di tahun 2045 adalah kota yang mampu menghadirkan layanan perkotaan dan kesejahteraan yang inklusif ke seluruh masyarakat Kota Semarang secara adil dalam segala aspek tanpa diskriminasi.

4.1.4 Kota yang Berkelanjutan

Mengandung arti bahwa Kota Semarang menerapkan pembangunan yang menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial yang layak bagi kehidupan, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan daya dukung dan daya tampung, dan memperhatikan kearifan lokal.

Tabel 17

Penyelarasan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan Visi RPJPD Kota Semarang

| Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah <i>1</i> | Visi RPJPD Kota Semarang <i>2</i> |
|--|---|
| Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan | Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan. |
| a. Maju, meliputi substansi: - Daya Saing - Modern - Inovatif - Mandiri - Tangguh - Aman | a. Maju, meliputi substansi: - Daya Saing - Tangguh - Modern - Inovasi - Adil |
| b. Berkelanjutan, meliputi substansi: - Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Risiko Bencana | b. Berkelanjutan, meliputi substansi: - Kelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup - Daya Dukung dan Daya Tampung - Kearifan Lokal |
| c. Tema Khusus: - Penumpu Pangan dan Industri Nasional | c. Tema Khusus: - Kota Metropolitan dan Layak Huni |

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

4.2 SASARAN VISI DAERAH TAHUN 2025 – 2045

Visi **“Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan”** yang telah dijelaskan di atas kemudian dirincikan ke dalam beberapa sasaran visi agar lebih spesifik, terukur, dan dapat tercapai. Sasaran visi daerah tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- 1) Transformasi ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.
- 2) Transformasi sosial yang inklusif dan berbudaya.
- 3) Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM.
- 4) Emisi GRK yang semakin menurun.
- 5) Peningkatan kualitas infrastruktur.

Sasaran pertama, transformasi ekonomi yang tangguh dan berkeadilan. Sasaran ini mendukung pencapaian sasaran nasional yaitu pendapatan per kapita setara negara maju dan pencapaian sasaran Provinsi Jawa Tengah yaitu peningkatan pendapatan per kapita. Salah satu indikator keberhasilan dari visi ini adalah peningkatan Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 30,65 pada tahun 2045, yang menandakan semakin kuatnya perekonomian berbasis perdagangan dan jasa dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,13-6,04 pada tahun 2045.

Sasaran kedua, transformasi sosial yang inklusif dan berbudaya. Sasaran ini mendukung pencapaian sasaran nasional yaitu kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, serta sasaran pokok Provinsi Jawa Tengah yaitu pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Indikator keberhasilan dari sasaran ini adalah penurunan Tingkat Kemiskinan secara signifikan sampai 0-0,22 persen pada tahun 2045, selain itu, penurunan Rasio Gini sebesar 0,393-0,387 pada tahun 2045.

Sasaran ketiga, peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM. Sasaran ini mendukung sasaran visi Provinsi Jawa Tengah yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia. Sasaran pokok visi ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM. Sasaran ini diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia yang pada tahun 2045 ditargetkan 91,1-91,9. Kualitas hidup yang baik merupakan hak masyarakat. Dengan memiliki kualitas hidup yang baik, masyarakat akan lebih produktif, kreatif, dan bahagia. Hal ini akan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan kualitas hidup yang meningkat maka berpotensi melahirkan generasi yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global, sehingga kesejahteraan kota semakin meningkat.

Sasaran keempat, emisi GRK yang semakin menurun. Sasaran ini sejalan dengan komitmen global dalam mengatasi perubahan iklim, mendukung sasaran visi pembangunan nasional yaitu intensitas emisi GRK menuju net zero emission, dan mendukung komitmen Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Sasaran ini diukur dengan indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif sebesar 118.836.613,94 TonCO₂eq pada tahun 2045. Dengan demikian, Kota Semarang tidak hanya berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup global, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman bagi warganya.

Sasaran kelima, peningkatan kualitas infrastruktur, sasaran pokok visi ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur yang berkualitas, yang mampu menopang pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Diharapkan Kota Semarang dapat menjadi kota yang nyaman ditinggali, bebas dari bencana, dan mampu menghadapi tantangan perubahan iklim. Sasaran ini diukur dengan indikator Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Konektifitas Wilayah sebesar 100% pada tahun 2045, dan persentase Kawasan Banjir dan Rob 0,05% pada tahun 2045.

Sasaran visi diatas tersebut telah di selaraskan dengan sasaran visi RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 dan menjadi dasar dan fondasi dalam menentukan tujuan maupun melaksanakan pembangunan Kota Semarang. Setiap sasaran visi memiliki beberapa indikator dengan target yang harus dicapai untuk mencapai visi Kota Semarang 2045.

Tabel 18
Persandingan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan Visi RPJPD Kota Semarang

| VISI | RPJPN (2025 – 2045) | | | RPJPD PROV. JATENG(2025 – 204) | | | RPJPD KOTA SEMARANG(2025 – 2045) | | |
|----------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------|
| | NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN | | | JAWA TENGAH MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN | | | SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG LAYAK HUNI, MAJU DAN BERKELANJUTAN | | |
| | No | ISI / SASARAN POKOK VISI | INDIKATOR | | ISI / SASARAN POKOK VISI | INDIKATOR | | ISI / SASARAN POKOK VISI | INDIKATOR |
| Baseline | | | Target 2045 | Baseline | | Target 2045 | Baseline | | Target 2045 |
| 1 | Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju | | | Peningkatan Pendapatan Per Kapita | | | Transformasi Ekonomi Yang Tangguh Dan Berkeadilan | | |
| | •GNI Per Kapita (ribu US\$) | 5,5 | 23 - 30,3 | •PDRB Per Kapita (juta Rp) | 48,53-48,66 | 230,77-276,24 | • Persentase Kontribusi sektor Perdagangan dan Jasa dalam PDRB (%) | 28,98 | 30,65 |
| | •Kontribusi PDB Maritim (%) | 7,6 | 15 | •Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Angka) | 65,3 | 592,13 | • Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,8–6,5* | 5,13–6,04 |
| | •Kontribusi PDB Manufaktur (%) | 20,8 | 28 | •Kontribusi PDRB Sektor Industri (%) | 33,88-34,06 | 35,84-36,65 | | | |
| | | | | •Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%) | 12,7 | 7,2 | | | |
| 2 | Kemiskinan Menuju 0% Dan Ketimpangan Berkurang | | | Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan | | | Transformasi Sosial Yang Inklusif Dan Berbudaya | | |
| | •Tingkat Kemiskinan (%) | 6,0-7,0 | 0,5-0,8 | •Tingkat Kemiskinan (%) | 8,67-9,17 | 0,00-0,50 | •Tingkat Kemiskinan (%) | 3,74-3,98* | 0,00-0,22 |
| | •Rasio Gini (indeks) | 0,379-0,382 | 0,377-0,320 | •Rasio Gini (indeks) | 0,373-0,381 | 0,301-0,345 | •Rasio Gini (indeks) | 0,44 | 0,393-0,387 |
| | •Kontribusi PDRB KTI | 21,5 | 28,5 | •Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 8,01 | 6,82 | | | |
| | | | | •Indeks Ketahanan Pangan (Angka) | 83,05 | 90 | | | |

| VISI | RPJPN (2025 – 2045) | | | RPJPD PROV. JATENG(2025 – 204) | | | RPJPD KOTA SEMARANG(2025 – 2045) | | |
|----------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|-------------|--|--------------------------|----------------|
| | NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN | | | JAWA TENGAH MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN | | | SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG LAYAK HUNI, MAJU DAN BERKELANJUTAN | | |
| | No | ISI / SASARAN POKOK VISI | INDIKATOR | | ISI / SASARAN POKOK VISI | INDIKATOR | | ISI / SASARAN POKOK VISI | INDIKATOR |
| Baseline | | | Target 2045 | Baseline | | Target 2045 | Baseline | | Target 2045 |
| 3 | | | | Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | Peningkatan Kualitas Hidup Dan Daya Saing SDM | | |
| | | | | • Indeks Modal Manusia (%) | 0,55 | 0,7 | • Indeks Pembangunan Manusia (%) | 84,8-85,8* | 91,1-91,9 |
| 4 | Kepemimpinan Dan Pengaruh Di Dunia Internasional Meningkat | | | Kepemimpinan dan Pengaruh dunia Internasional Meningkat | | | | | |
| | • Global Power Index (Peringkat) | 34 | 15 | • Kapasitas Institusi (Angka) | 4,40 | 4,84 | | | |
| | • Daya saing SDM meningkat | | | | | | | | |
| | • Indeks Modal Manusia | 0,54 | 0,73 | | | | | | |
| 5 | Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission | | | Penurunan Emisi FRK menuju net zero Emission | | | Emisi GRK Yang Semakin Menurun | | |
| | • Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 38,6 | 93,5 | • Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 0,32 | 82,75 | • Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO ₂ eq) | 8.058.629,95 | 118.836.613,94 |
| 6 | | | | | | | Peningkatan Kualitas Infrastruktur | | |
| | | | | | | | • Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Konektivitas Wilayah (%) | 54,99 | 100 |
| | | | | | | | • Persentase Kawasan Banjir dan Rob(%) | 3,04 | 0,05 |

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Tabel 19
Indikator Sasaran Visi Kota Semarang Tahun 2025 -2045 Per Tahapan Pembangunan

| VISI | SASARAN POKOK VISI | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TARGET 2025 | TARGET 2029 | TARGET 2034 | TARGET 2039 | TARGET 2045 |
|----------------------|---|--|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| METROPOLITAN | Transformasi Ekonomi yang Tangguh dan Berkeadilan | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa dalam PDRB | % | 28,98 | 29,31 | 29,73 | 30,15 | 30,65 |
| | | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,8-6,5* | 5,67 | 5,50 | 5,3 | 5,13-6,04 |
| MAJU | Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berbudaya | Tingkat Kemiskinan | % | 3,74-3,98* | 3,09-3,31 | 2,06-2,28 | 1,03-1,25 | 0-0,22 |
| | | Rasio Gini Indeks | Indeks | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,393-0,387 |
| | Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM | Indeks Pembangunan Manusia | % | 84,8-85,8* | 86,1 | 87,6 | 89,2 | 91,1-91,9 |
| BERKELANJUTAN | Emisi GRK Yang Semakin Menurun | Penurunan Emisi GRK Kumulatif | TonCO ₂ eq | 8,058,629.95 | 30,214,226.75 | 57,908,722.75 | 85,603,218.74 | 118,836,613.94 |
| LAYAK HUNI | Peningkatan Kualitas Infrastruktur | Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Konektivitas Wilayah | % | 54,99 | 63,99 | 75,24 | 86,50 | 100 |
| | | Persentase Kawasan Banjir dan Rob | % | 3,04 | 2,75 | 1,91 | 1,06 | 0,05 |

* Indikator mengikuti Indikator Kinerja Utama Daerah RKPD Tahun 2025

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

4.3 SASARAN MISI DAERAH TAHUN 2025 – 2045

Visi pembangunan Kota “Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan” pada tahun 2045 akan dapat terwujud melalui rumusan 5 (lima) misi pembangunan daerah. Dengan implementasi misi-misi tersebut Kota Semarang diharapkan dapat mencapai status sebagai pusat metropolitan yang berkelanjutan dengan kualitas hidup yang baik.

Misi 1 - Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berbudaya

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan.
Pendidikan merupakan modal dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Semarang, diperlukan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan akses pendidikan terutama untuk pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, pengarusutamaan kebudayaan pada muatan lokal, dan pemenuhan anggaran pendidikan sesuai ketentuan.
- 2) Peningkatan kesehatan masyarakat.
Kesehatan masyarakat merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Semarang, diperlukan peningkatan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
- 3) Peningkatan kesetaraan gender.
Kesetaraan gender merupakan hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Semarang, diperlukan peningkatan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender, dan penegakan hukum yang adil terhadap perempuan.
- 4) Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama.
Toleransi dan kerukunan umat beragama merupakan hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Semarang, diperlukan peningkatan pendidikan agama, peningkatan dialog antar umat beragama, dan penegakan hukum yang adil terhadap semua umat beragama.
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Semarang, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi, peningkatan akses informasi dan layanan bagi masyarakat, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Misi 2 - Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tangguh dan Berkeadilan

- 1) Mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.
Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Untuk meningkatkan produktivitas industri, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi, dan pengembangan infrastruktur industri.
- 2) Pengembangan sektor ekonomi hijau dan biru yang kreatif dan inovatif.
Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian Kota Semarang. Untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif, diperlukan penguatan ekosistem ekonomi kreatif, peningkatan kualitas produk kreatif, dan perluasan akses pasar, dan skema transformasi ekonomi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
- 3) Pengembangan sektor pariwisata.
Kota Semarang memiliki potensi pariwisata yang besar, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata kuliner. Untuk mengembangkan sektor pariwisata, diperlukan peningkatan kualitas destinasi wisata, peningkatan promosi wisata, dan perluasan akses transportasi, peningkatan aspek 5A

(*Attraction, Accomodation, Access, Amenities, dan Activities*), serta orientasi pengembangan wisata dengan konsep *urban quality tourism*.

- 4) Peningkatan daya saing UMKM.
UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Semarang. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, diperlukan penguatan kelembagaan UMKM, peningkatan akses pembiayaan, dan pengembangan inovasi produk.
- 5) Pengembangan ekonomi digital.
Ekonomi digital merupakan tren ekonomi yang berkembang pesat. Untuk mengembangkan ekonomi digital, diperlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, dan pengembangan bisnis digital.
- 6) Peningkatan investasi dan alternatif pembiayaan daerah
Dengan sangat terbatasnya anggaran pemerintah, maka dibutuhkan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat untuk pembangunan daerah, dimana sumber tersebut dapat berasal dari investasi dan mekanisme pembiayaan lainnya. Dalam rangka peningkatan investasi, diperlukan penguatan kepastian regulasi daerah, pengembangan profil investasi daerah yang berdaya saing, peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah, serta pengembangan proyek-proyek strategis daerah.

Misi 3 - Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Adaptif dan Ramah Lingkungan

- 1) Pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan.
Seperti transportasi umum, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki, dapat membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara.
- 2) Pembangunan infrastruktur energi yang terbarukan.
Seperti pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
- 3) Pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah yang berkelanjutan.
Membantu mengurangi pencemaran air dan meningkatkan kualitas air.
- 4) Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Membantu mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan
- 5) Pengelolaan sampah.
Kota Semarang perlu menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu, yang mencakup pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan, serta mengurangi pencemaran.

Misi 4 - Mewujudkan Ketahanan Kota yang Berbasis Ketangguhan Individu, Keluarga, Komunitas dan Masyarakat

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup
Kota Semarang perlu mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan hidup guna memastikan keberlanjutan ekosistem untuk generasi sekarang dan mendatang. Pengelolaan lingkungan hidup ini di antaranya meliputi peningkatan kualitas air, udara dan lahan.
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat
Kota Semarang perlu memperkuat bangunan-bangunan yang rentan terhadap bencana, serta mengembangkan sistem peringatan dini bencana. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan akibat bencana.

Misi 5 - Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel

- 1) Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah
Aparatur pemerintah yang profesional merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan profesionalisme

aparatur pemerintah, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan remunerasi, dan peningkatan pengawasan.

2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan

Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan merupakan hal yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, diperlukan keterbukaan informasi publik, peningkatan pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas.

3) Peningkatan partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi, peningkatan akses informasi dan layanan bagi masyarakat, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

4) Pemanfaatan teknologi informasi

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Untuk memanfaatkan teknologi informasi, diperlukan peningkatan kapasitas dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran aparatur pemerintah tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota metropolitan yang layak huni, maju dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan arahan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Arahan kebijakan Kota Semarang tahun 2025-2045 akan mencakup empat tahap pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penguatan Fondasi Transformasi (2025-2029)
Fokus pada penguatan fondasi transformasi melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penguatan sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar dengan penekanan pada kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dan penanganan bencana, serta penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis dan kolaboratif.
- 2) Percepatan Transformasi (2030-2034)
Akselerasi mencakup perluasan akses pendidikan dan kesehatan, penerapan ekonomi hijau dan inovasi dalam sektor ekonomi, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas dalam penanganan bencana. Sistem pemerintahan juga ditingkatkan untuk mendukung proses transformasi yang cepat.
- 3) Pemantapan Transformasi (2035-2039)
Fokus diberikan pada kualitas, keberlanjutan, dan efisiensi dalam semua aspek pembangunan.
- 4) Perwujudan Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju dan Berkelanjutan (2040-2045)
Tujuan akhir dari rencana jangka panjang yaitu mewujudkan kesejahteraan semua warga Kota Semarang melalui pembangunan kota metropolitan yang layak huni, maju, dan berkelanjutan.

Berikut merupakan tahapan pembangunan selama dua puluh tahun yang terbagi dalam empat tahap pembangunan:

Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Fondasi Transformasi

Tahap pertama arah kebijakan Kota Semarang tahun 2025-2029 mencakup lima aspek utama yaitu transformasi sosial, ekonomi, infrastruktur yang berkualitas, ketahanan kota dan tata kelola yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Misi 1: Transformasi Sosial.

Diarahkan pada pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang adaptif meliputi: (1) Perluasan upaya promotif-preventif dan budaya hidup sehat, (2) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, (3) Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan berkualitas dan berkompentensi tinggi, (4) Perluasan akses dan perbaikan sarana-prasarana kesehatan, (5) Peningkatan pelayanan kesehatan yang inklusif dan menyeluruh dari bayi sampai lansia, dan kesehatan mental, (6) Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, (7) Pemenuhan wajib belajar 13 tahun dan peningkatan rata-rata lama sekolah, (8) Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan, terutama pada pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, (9) Peningkatan literasi dan numerasi masyarakat, (10) Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi yang tinggi, (11) Dukungan pengembangan *hub* dan kualitas pendidikan tinggi dan pengembangan program STEAM (*Science, Technology, Engineering, The Arts and Mathematics*), (12) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai potensi ekonomi, (13) Peningkatan pendidikan karakter dan budi pekerti, (14) Pelaksanaan pendidikan muatan lokal yang mendorong pengarusutamaan budaya, (15) Peningkatan kualifikasi angkatan kerja, (16) Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial-adaptif dalam peningkatan akses layanan dasar, (17) Perlindungan sosial yang adaptif bagi kelompok marginal dan rentan, (18) Pemberdayaan masyarakat, perlindungan

perempuan dan anak, dan kesetaraan gender, (19) Peningkatan pelaksanaan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, (20) peningkatan apresiasi terhadap budaya lokal termasuk tradisi dan adat Kota Semarang dan (21) Pelaksanaan pengembangan kebudayaan melalui peningkatan nilai-nilai luhur budaya, peningkatan apresiasi terhadap seni dan budaya, memperkaya keberagaman budaya, dan melestarikan warisan budaya bangsa terutama di Kota Semarang.

2) Misi 2: Transformasi Ekonomi.

Diarahkan penguatan perekonomian daerah berbasis digital yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, meliputi: (1) Peningkatan kelestarian sumber daya alam, (2) Ketangguhan dan ketahanan pangan untuk kemandirian pangan, (3) Pengembangan rantai pasok pangan, (4) Pengembangan perikanan tangkap maupun budidaya, (5) Inisiasi penerapan ekonomi hijau, (6) Penguatan sirkularisasi ekonomi sektor-sektor baik unggulan dan non-unggulan di Kota Semarang, (7) Penguatan iklim investasi untuk mendukung penguatan kemandirian ekonomi, dukungan bisnis bagi usaha mikro dan industri kreatif melalui penguatan daya saing yang lebih produktif, inovatif, berbasis riset, inovasi, dan berkeadilan, (8) Pengembangan pariwisata dengan konsep *urban-quality tourism*, (9) Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan MICE, (10) Pengembangan Kawasan strategis pariwisata, (11) Peningkatan kompetensi SDM terkait industri kreatif, jasa, pariwisata, dan digital, (12) Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil dengan fasilitas pembelajaran jarak jauh, (13) Pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, (14) Pengembangan kawasan Kota Semarang yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan daya dukung dan daya tampung, (16) Peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan (17) Penguatan pengendalian inflasi daerah.

3) Misi 3: Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan.

Diarahkan pada penuntasan sarana dan prasarana yang mendorong peningkatan daya dukung dan daya tampung kota melalui penguatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan digital yang berkelanjutan yang mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, meliputi: (1) Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan mendukung perdagangan dan jasa, (2) Pembangunan sarana-prasarana sumber daya air dalam rangka penanganan banjir, rob, dan pemenuhan air minum, (3) Optimalisasi sistem irigasi, (4) Transisi energi bersih, (5) Implementasi transportasi cerdas dan rendah karbon, (6) Pemerataan infrastruktur dasar dan penanggulangan bencana, (7) Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien, (8) Normalisasi dan revitalisasi sungai perkotaan, (9) Peningkatan sistem pengendalian banjir, (10) Aglomerasi transportasi darat, air, dan udara, (11) Pemenuhan rumah layak huni, (12) Optimalisasi lahan perkotaan untuk hunian, (13) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif, (14) Pengelolaan wilayah pesisir terpadu, terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan, (15) Pengembangan jalan akses untuk perluasan dan efisiensi rantai pasok ekonomi, (15) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan inklusif dan global.

4) Misi 4: Ketahanan Kota.

Diarahkan pada penguatan sistem ketahanan kota untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan, risiko, dan tantangan, meliputi: (1) Peningkatan keamanan dengan sarana-prasarana dan pengawasan untuk mengurangi tingkat kriminalitas kota, (2) Peningkatan kegiatan berbasis kerukunan antar etnis dan agama, (3) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, (4) Pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia, (5) Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup, (6) Diversifikasi produk pangan dari pertanian dan perikanan untuk mencapai kemandirian pangan, (7) Penguatan kemandirian *food, energy, and water* (FEW),

(8) Pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan, (9) Mendorong penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi, (10) Sosialisasi dan edukasi pentingnya energi baru terbarukan untuk peningkatan kesadaran masyarakat, (11) Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung, (12) Pengelolaan risiko bencana dengan peningkatan kesiapsiagaan, sistem perencanaan dini, kesadaran, dan literasi masyarakat terhadap potensi bahaya serta mitigasi struktural, (13) Perlindungan pesisir Kota Semarang, (14) Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis ekosistem ekologi di WP Kedungsepur, (15) Pengembangan sistem peringatan dini bencana di seluruh Kota Semarang, (16) Penguatan kapasitas penanggulangan bencana sampai tingkat keluarga, dan (17) Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan dan tingkat kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

5) Misi 5: Transformasi Tata Kelola.

Diarahkan pada penguatan kelembagaan, regulasi, kualitas, akuntabilitas dan integritas ASN, meliputi: (1) Penguatan tugas, pokok, dan fungsi instansi pemerintah daerah, (2) Peningkatan kompetensi ASN, (3) Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait pelayanan dan tata kelola pembangunan, (4) Pengembangan Database dan sistem informasi kepegawaian yang akurat dan solutif, (5) Optimalisasi sistem pembentukan regulasi daerah, (6) Inovasi dalam peningkatan pelayanan publik, (7) Pengelolaan aset daerah yang optimal, (8) Optimalisasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, (9) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang dinamis, kolaboratif dan akuntabel, (10) Perwujudan birokrasi kelas dunia, (11) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, dan (12) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Tahap 2 (2030-2034): Percepatan Transformasi

Tahap kedua arah kebijakan Kota Semarang tahun 2030-2034 mencakup lima aspek utama yaitu transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, dan infrastruktur berkualitas yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Misi 1: Transformasi Sosial.

Diarahkan pada percepatan transformasi sosial yang inklusif dan berbudaya untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

2) Misi 2: Transformasi Ekonomi.

Diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi yang tangguh dan berkeadilan yang progresif dan terarah, meliputi: (1) Pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan pada konteks pangan, energi, dan air, (2) Penguatan siklus kemandirian pangan yang meliputi optimalisasi sistem logistik daerah, pemetaan pangan dan gizi serta manajemen limbah organik, (3) Integrasi sistem sosial terhadap penerapan ekonomi hijau, (4) Sinkronisasi sistem logistik perdagangan skala nasional dan internasional, (5) Pemetaan proses bisnis perkotaan dan supply demand, serta percepatan shifting struktur ekonomi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan, (6) Perencanaan sistem ekowisata berbasis sumber daya alam dan potensi wilayah yang terintegrasi dengan wilayah Kedungsepur, dan (7) Pembentukan pusat inkubasi bisnis dan tenaga kerja yang dinamis baik secara online maupun offline.

3) Misi 3: Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan.

Diarahkan pada percepatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan digital yang berkelanjutan yang mendukung transformasi dan ketahanan kota.

4) Misi 4: Ketahanan Kota.

Diarahkan pada percepatan ketahanan kota secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

5) Misi 5: Transformasi Tata Kelola.

Diarahkan pada peningkatan kolaborasi internal dan eksternal kelembagaan, regulasi, pelayanan, kompetensi ASN, partisipasi masyarakat dan digitalisasi tata kelola.

Tahap 3 (2035-2039): Pemantapan Transformasi

Tahap ketiga arah kebijakan Kota Semarang tahun 2035-2039 mencakup lima aspek utama yaitu transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, dan infrastruktur berkualitas yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Misi 1: Transformasi Sosial.
Diarahkan pada pemantapan transformasi sosial yang inklusif dan berbudaya untuk percepatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Misi 2: Transformasi Ekonomi.
Diarahkan pada pemantapan transformasi ekonomi yang tangguh dan berkeadilan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meliputi: (1) Stabilisasi siklus kemandirian pangan dalam ekosistem lingkungan, (2) Penguatan integrasi sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap sistem ekonomi hijau, (3) Fasilitasi sektor unggulan dan optimalisasi sektor non-unggulan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, (4) Link and match antara badan usaha, pelaku ekonomi hijau dan ekonomi kreatif, serta akademisi, (5) Integrasi dan promosi wisata kedungsepur pada destinasi wisata prioritas unggulan nasional terkait kebudayaan dan sumber daya alam, dan (6) Pembentukan sentra-sentra pariwisata berbasis identitas lokal serta skema bisnis dari industri pariwisata.
- 3) Misi 3: Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
Diarahkan pada pemantapan infrastruktur berkualitas yang adaptif dan ramah lingkungan untuk pembangunan kota yang layak huni, maju, dan berkelanjutan.
- 4) Misi 4: Ketahanan Kota.
Diarahkan pada pemantapan ketahanan kota yang berbasis ketangguhan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat.
- 5) Misi 5: Transformasi Tata Kelola.
Diarahkan pada pemantapan tata kelola yang dinamis dan akuntabel, kelembagaan dan regulasi yang efektif, ASN yang kompeten, dan masyarakat yang mandiri.

Tahap 4 (2040-2045): Perwujudan Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan

Tahap keempat arah kebijakan Kota Semarang tahun 2040-2045 mencakup lima aspek utama yaitu transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, dan infrastruktur berkualitas yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Misi 1: Transformasi Sosial.
Diarahkan pada perwujudan masyarakat kota yang inklusif dan berbudaya.
- 2) Misi 2: Transformasi Ekonomi.
Diarahkan pada perwujudan perekonomian kota yang tangguh dan berkeadilan, meliputi: (1) Kemandirian pangan yang berorientasi pada lingkungan, (2) Perwujudan ekonomi sirkular pada seluruh sektor ekonomi, (3) Stabilisasi sistem investasi digital berbasis ekonomi hijau dan pemberdayaan potensi lokal, (4) Pengembangan wisata kedungsepur pada ranah internasional, dan (5) Integrasi dan stabilisasi industri pariwisata berbasis identitas lokal.
- 3) Misi 3: Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
Diarahkan pada perwujudan infrastruktur berkualitas yang adaptif dan ramah lingkungan.
- 4) Misi 4: Ketahanan Kota.
Diarahkan pada perwujudan ketahanan kota yang berbasis ketangguhan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat
- 5) Misi 5: Transformasi Tata Kelola.
Diarahkan pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.

Tabel 20
Arah Kebijakan Per Tahapan Kota Semarang Setiap Misi

| VISI KOTA SEMARANG 1 | MISI KOTA SEMARANG 2 | ARAH KEBIJAKAN | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| | | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2045 |
| Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan | TRANSFORMASI SOSIAL Mewujudkan transformasi sosial yang inklusif dan berbudaya | Diarahkan pada pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang adaptif | Diarahkan pada percepatan transformasi sosial yang inklusif dan berbudaya untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas | Diarahkan pada pemantapan transformasi sosial yang inklusif dan berbudaya untuk percepatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. | Diarahkan pada perwujudan masyarakat kota yang inklusif dan berbudaya |
| | TRANSFORMASI EKONOMI Mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh dan berkeadilan | Diarahkan penguatan perekonomian daerah berbasis digital yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan | Diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi yang tangguh dan berkeadilan yang progresif dan terarah | Diarahkan pada pemantapan transformasi ekonomi yang tangguh dan berkeadilan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan | Diarahkan pada perwujudan perekonomian kota yang tangguh dan berkeadilan |
| | INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang adaptif dan ramah lingkungan | Diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan digital yang berkelanjutan yang mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola | Diarahkan pada percepatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan digital yang berkelanjutan yang mendukung transformasi dan ketahanan kota | Diarahkan pada pemantapan infrastruktur berkualitas yang adaptif dan ramah lingkungan untuk pembangunan kota yang layak huni, | Diarahkan pada perwujudan infrastruktur berkualitas yang adaptif dan ramah lingkungan |

| VISI KOTA SEMARANG 1 | MISI KOTA SEMARANG 2 | ARAH KEBIJAKAN | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2045 |
| Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan | KETAHANAN KOTA Mewujudkan ketahanan kota yang berbasis ketangguhan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat | Diarahkan pada penguatan sistem ketahanan kota untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan, risiko, dan tantangan | Diarahkan pada percepatan ketahanan kota secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat | maju, dan berkelanjutan Diarahkan pada pemantapan ketahanan kota yang berbasis ketangguhan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. | Diarahkan pada perwujudan ketahanan kota yang berbasis ketangguhan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat |
| | TRANSFORMASI TATA KELOLA Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel | Diarahkan pada penguatan kelembagaan, regulasi, kualitas ASN, akuntabilitas, dan pemberdayaan sipil dalam pembangunan | Diarahkan pada peningkatan kolaborasi internal dan eksternal kelembagaan, regulasi, pelayanan, kompetensi ASN, partisipasi masyarakat dan digitalisasi tata kelola | Diarahkan pada tata kelola yang dinamis dan akuntabel, kelembagaan dan regulasi yang efektif, ASN yang kompeten, dan masyarakat yang mandiri. | Diarahkan pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel |

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Tabel 21

Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang

| RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 | | | RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--|
| No | Sasaran Pokok | Arah Pembangunan | No | Sasaran Pokok | Arah Pembangunan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif | CJ01. Kesehatan Untuk Semua | 1 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inklusif, dan Berbudaya | AP01. Kesehatan Untuk Semua |
| | | CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif | | | AP02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif |
| | | CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif | | | AP03. Perlindungan Sosial yang Adaptif |
| 2 | Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan | CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi | 2 | Terwujudnya Perekonomian Kota yang Tangguh dan Berkeadilan | AP04. Iptek, Inovasi, dan produktivitas Ekonomi |
| | | CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau | | | AP05. Transformasi Digital |
| | | CJ06. Transformasi Digital | | | AP06. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global |
| | | CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global | | | AP07. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi |
| 3 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegras dan Dinamis | CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | 3 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Efektif, dan Akuntabel | AP10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah |
| | | CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegras, Adaptif, dan Kolaboratif | | | AP08. Regulasi dan Tata Kelola yang terintegrasi, Adaptif, dan Kolaboratif |
| 4 | Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial | | | AP09. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial |
| | | CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | | | |

| No <i>1</i> | RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok <i>2</i> | Arah Pembangunan <i>3</i> | No <i>4</i> | RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok <i>5</i> | Arah Pembangunan <i>6</i> |
|-----------------------|---|--|-----------------------|--|--|
| | | CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah | 4 | Terwujudnya Ketahanan Kota yang Berbasis Ketangguhan Individu, Keluarga, Komunitas, dan Masyarakat | AP12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif |
| 5 | Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial | CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter | | | AP14. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan |
| | | CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif | | | AP15. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim |
| 6 | Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana | CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas | 5 | Perwujudan Infrastruktur Berkualitas yang Adaptif dan Ramah Lingkungan | AP13. Lingkungan Hidup Berkualitas |
| | | CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan | | | |
| | | CJ17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | | | |

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

5.2 SASARAN POKOK

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 yang setiap tahapan ini diukur dengan tingkat indikator dampak dan bersifat progresif. Sasaran pokok ini menjadi fokus dalam perumusan kebijakan dan tahapan pembangunan lima tahun selama periode tersebut. Sasaran pokok ini membantu pemerintah daerah Kota Semarang untuk fokus pada prioritas-prioritas kunci yang dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di Kota Semarang. Indikator pembangunan tidak hanya menyediakan kerangka evaluasi yang objektif untuk mengukur kemajuan dalam berbagai sektor, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi perencanaan yang strategis. Dengan memiliki indikator yang jelas dan terukur, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menetapkan tujuan yang konkret dan terukur untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Indikator tersebut membantu mengidentifikasi area prioritas, merinci ketidaksetaraan yang perlu diatasi, dan memberikan panduan bagi alokasi sumber daya yang efisien. Penentuan indikator ini juga dipertimbangkan berdasarkan rincian indikator yang telah ditetapkan pada rencana pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional.

5.2.1 Sasaran 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inklusif, dan Berbudaya

Transformasi sosial diperlukan dalam rangka untuk menjamin ketercukupan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini, diperlukan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif termasuk penyediaan akses pendidikan, kesehatan dan pemberian jaminan perlindungan sosial yang setara untuk semua masyarakat di Kota Semarang. Langkah ini diharapkan dapat mencapai sumber daya manusia Kota Semarang yang sehat, cerdas, dan mampu bertahan dalam berbagai risiko sesuai dengan budaya Indonesia khususnya Kota Semarang. Jaminan tersebut dicantumkan ke dalam 3 arah pembangunan dan arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

AP01. Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terbentuk masyarakat yang berkualitas, unggul, dan produktif. Dalam hal ini, semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Transformasi kesehatan bertujuan untuk mengatasi disparitas dalam akses dan menciptakan sistem yang inklusif, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari kemajuan kesehatan. Transformasi kesehatan menempatkan perhatian terhadap kesehatan primer dengan fokus pada pencegahan dan pengelolaan pencegahan penyakit, pusat kesehatan yang ramah, terjangkau dan mampu memberikan layanan yang holistik yang mencakup aspek fisik, mental dan spiritual. Pelayanan kesehatan juga perlu untuk dilakukan evaluasi dan inovasi yang berkelanjutan dan merupakan evolusi menuju sistem yang lebih proaktif, terintegrasi dan berpusat pada pelayanan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan kesehatan diarahkan pada inklusivitas, pemerataan, dan peningkatan di Kota Semarang dalam dua puluh tahun ke depan seperti:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan budaya hidup sehat,
2. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular,
3. Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan berkualitas dan berkompentensi tinggi,
4. Perbaikan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan,
5. Peningkatan pelayanan akses kesehatan jiwa dan raga yang inklusif dari bayi sampai lansia, dan
6. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

AP02. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompentensi, dan berdaya saing tinggi serta dapat meningkatkan daya saing kota. Transformasi pendidikan merupakan proses perubahan mendalam pada paradigma, metode dan tujuan pendidikan untuk menjawab tuntutan dan perubahan dalam masyarakat dan tantangan global. Transformasi pendidikan mencakup pergeseran dari model pendidikan tradisional ke model yang lebih adaptif, inklusif dan relevan untuk menghadapi tantangan global yang semakin tajam. Masyarakat terdidik merupakan agen perubahan, membawa pengetahuan dan nilai-nilai untuk merancang masa depan yang lebih baik. Ke depan rancangan sistem pendidikan akan dibuat lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta menghilangkan hambatan birokratis dan administratif yang dapat menghambat inovasi dan perubahan positif yang berkelanjutan. Arah pembangunan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas secara adaptif, inklusif, dan relevan antara lain:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Formal:
 - a. Wajib belajar 13 tahun dan peningkatan rata-rata lama sekolah,
 - b. Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan,
 - c. Pelaksanaan pendidikan muatan lokal bahasa daerah dan seni budaya Kota Semarang, dan
 - d. Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dan berkompentensi tinggi.
2. Peningkatan Literasi dan Kompetensi:
 - e. Peningkatan literasi dan numerasi masyarakat,
 - f. Pengembangan program STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*), dan
 - g. Peningkatan pendidikan karakter dan budi pekerti.
3. Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Tinggi:
 - h. Dukungan pengembangan hub dan kualitas pendidikan tinggi; dan
 - i. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai potensi ekonomi.

AP03. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Transformasi perlindungan jaminan sosial juga membawa peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Semarang. Transformasi ini dilakukan sebagai upaya mendalam untuk memperbaharui dan memperkuat sistem perlindungan sosial yang melibatkan perubahan dalam kebijakan, struktur dan praktek-praktek yang terkait dengan jaminan sosial. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada seluruh penduduk Kota Semarang tanpa terkecuali dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Arah pembangunan Kota Semarang dalam 20 tahun mendatang antara lain:

1. Penyediaan Jaringan Perlindungan Sosial yang Luas dan Inklusif:
 - a. Ekspansi program perlindungan sosial untuk mencakup lebih banyak kelompok rentan dan marginal,
 - b. Penguatan sistem identifikasi dan registrasi penerima manfaat agar lebih inklusif dan akurat, dan
 - c. Pengembangan mekanisme pemberian bantuan yang tepat sasaran dan efisien.
2. Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga:
 - d. Pengembangan program-program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga rentan.
 - e. Inovasi dalam pendekatan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
 - f. Peningkatan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga
3. Penguatan Sistem Perlindungan Anak, Perempuan, dan Lansia:
 - g. Implementasi kebijakan dan program perlindungan khusus untuk anak, perempuan, dan lansia,

- h. Penyediaan layanan khusus dan fasilitas perlindungan bagi kelompok rentan tersebut, dan
- i. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan perlindungan kelompok rentan.

Dengan adanya transformasi sosial ini diharapkan ke depan seluruh lapisan masyarakat mampu memiliki hak yang sama dan inklusif dalam memperoleh pelayanan dasar tanpa pandang bulu yang memandang latar belakang, identitas dan status.

AP11. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter

Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter di Kota Semarang untuk 20 tahun mendatang menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang berkualitas, beretika, dan memiliki identitas yang kuat. (1) Mendorong pemahaman dan apresiasi terhadap budaya lokal, termasuk tradisi, seni, dan adat istiadat yang khas Kota Semarang. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan program-program budaya, festival budaya, dan dukungan terhadap seniman dan budayawan lokal. (2) Mengintegrasikan aspek-aspek budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Melalui pembelajaran tentang sejarah, seni, dan kebudayaan lokal, generasi muda Kota Semarang dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya mereka. (3) Mendorong pembentukan karakter yang kuat dan beretika melalui pendidikan karakter di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Ini melibatkan pengembangan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan rasa hormat terhadap sesama. (4) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan budaya dan pendidikan karakter, baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara. Ini dapat dilakukan melalui program-program partisipatif, workshop, seminar, dan kegiatan sosial lainnya. (5) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan budaya dan pendidikan karakter, seperti pusat kebudayaan, perpustakaan, galeri seni, dan ruang pertunjukan. Hal ini akan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan budaya serta pendidikan karakter di Kota Semarang. (6) Membangun kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk pemerintah pusat, lembaga pendidikan, komunitas budaya, dan sektor swasta, untuk mendukung pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter di Kota Semarang. Kota Semarang dapat menjadi pusat kegiatan budaya yang beragam dan kaya dan mendorong tingkat pariwisata, sementara masyarakatnya memiliki karakter yang kuat dan beretika, mencerminkan nilai-nilai budaya yang kokoh dan mendalam.

5.2.2 Sasaran 2: Terwujudnya Perekonomian Kota yang Tangguh dan Berkeadilan

Transformasi ekonomi Kota Semarang dengan perwujudan perekonomian kota yang tangguh dan berkeadilan dilakukan secara bertahap dengan proses secara terus menerus guna mendukung sektor-sektor ekonomi agar mampu memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Transformasi ekonomi dapat melibatkan berbagai aspek, seperti antaranya strukturisasi industri, model pertumbuhan, sumber daya ekonomi, dan sistem ekonomi secara keseluruhan, yang merupakan respons terhadap kondisi global, nasional, dan regional. Transformasi ekonomi yang dilakukan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilakukan ke depan merupakan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, hijau, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Inovasi dan adopsi teknologi akan menjadi pendorong utama transformasi ekonomi, terutama dalam peningkatan jumlah wirausaha baru pendapatan yang merata di Kota Semarang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam upaya untuk meningkatkan potensi terhadap sumber daya manusia Kota Semarang, maka kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan di Kota Semarang juga akan ditingkatkan guna memastikan bahwa pasokan tenaga kerja yang ada mampu

memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan ekonomi ke depan. Dengan demikian, diharapkan menjadi pemerataan pendapatan secara baik, dan terdapat jaminan kesejahteraan masyarakat.

AP04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Kota Semarang telah mengalami pergeseran seiring dengan evolusi menuju kota metropolitan. Awalnya, Kota Semarang didominasi oleh sektor agro-pertanian. Namun, dengan lonjakan populasi terutama dari pendatang dan meningkatnya aktivitas pelabuhan, paradigma ini berubah secara signifikan. Aktivitas ekonomi bergeser dari sektor pertanian menuju perdagangan dan jasa yang berbasis industri, yang kemudian mengakibatkan peningkatan sektor konstruksi melalui pembangunan yang pesat di sekitar wilayah kota sampai mengalami titik jenuh dengan berkurangnya daya dukung dan daya tampung lahan dan lingkungan. Saat ini, Kota Semarang menempatkan perhatian khusus pada pengembangan sektor pariwisata, terutama dalam upaya mengoptimalkan kawasan Semarang Raya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan Kota Semarang yang berlokasi strategis dan dilengkapi dengan konektivitas antara jaringan kereta api, pelabuhan, dan bandara dan kebutuhan akan fasilitas bagi populasi transit yang besar dari daerah *hinterland*. Dampaknya, struktur ekonomi diharapkan bergeser dari industri pengolahan ke sektor perdagangan, jasa, dan konstruksi. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan penurunan aktivitas industri, Kota Semarang berupaya meningkatkan nilai tambah dalam sektor penyediaan industri *hospitality*. Hal ini merupakan dampak dari pergeseran fokus kota dari sektor industri menuju pengembangan pariwisata MICE-HEL (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition – Health, Entertainment, Lifestyle*).

AP05. Transformasi Digital

Transformasi digital melalui Smart City dan Society 5.0 dapat mendukung visi Kota Semarang sampai dengan 20 tahun ke depan dengan mempercepat transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Teknologi informasi menjadi jalan bagi perwujudan solusi untuk menyelesaikan permasalahan kota secara inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran *Super App*, *Dashboard Warga*, *integrated data*, *autonomous system*, dan program lingkungan berbasis teknologi, yang didukung teknologi *Internet of Things* (IoT) dan Kecerdasan Buatan (AI) dapat mengakselerasi solusi-solusi atas permasalahan kota yang berulang dan berkembang dari waktu ke waktu. Pemerintah hadir dalam berbagai kesulitan warganya dan menghadirkan kesempatan bagi kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat semakin merasa nyaman, aman, terpantau, terkoneksi, terintegrasi, maju, inovatif, dan berdaya saing. Arah kebijakan transformasi digital dilaksanakan dengan membangun ekosistem digital tangguh yang diarahkan pada (1) mewujudkan sumber daya manusia Kota Semarang dengan literasi digital yang baik, (2) mewujudkan inovasi pemanfaatan teknologi yang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang, dan (3) mewujudkan teknologi yang berpihak pada lingkungan dan ketahanannya.

AP06. Integrasi Ekonomi Domestik, Nasional, dan Global

Integrasi ekonomi yang kuat antara tingkat domestik, nasional, dan global diwujudkan sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Arah pembangunan tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan (1). Penguatan produk unggulan daerah untuk bersaing di pasar nasional dan global, (2). Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan dan jasa, (3) penguatan sistem distribusi produk perdagangan dan jasa, (4) penguatan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri dan perdagangan, (5) penguatan ekspor produk unggulan daerah.

AP07. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kota Semarang, sebagai kota Metropolitan diharapkan menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi dan menjadi magnet investasi dan bisnis yang menarik pengusaha dan pekerja untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan memperkuat

ekosistem inovasi dan mendukung industri kreatif, Kota Semarang dapat menjadi pusat inovasi dan kreativitas dengan ide-ide baru lahir dan berkembang dan menjadi tempat untuk industri kreatif untuk tumbuh dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Perkuatan pendidikan dan penelitian di Kota Semarang akan dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan berdaya saing yang menunjang pertumbuhan sektor ekonomi yang maju dan inovatif. Dengan memiliki infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan dan aksesibilitas yang mudah dan terintegrasi seperti jalan raya, transportasi umum, dan konektivitas digital, akan memperkuat posisi Kota Semarang menjadi kota Global dan meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Arah kebijakan pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diarahkan pada: (1) pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, (2) peningkatan konektivitas antar wilayah dan penerapan transportasi ramah lingkungan, (3) penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan permukiman yang layak, (4) penguatan pusat inovasi, (5) dukungan bisnis bagi usaha mikro dan industri kreatif melalui penguatan daya saing yang lebih produktif, inovatif, berbasis riset, inovasi, dan berkeadilan, (6) peningkatan konektivitas digital, (7) pengembangan pariwisata dan industri kreatif termasuk MICE, (8) Peningkatan kompetensi SDM terkait industri kreatif, jasa, pariwisata, dan digital.

AP10. Daya Saing dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Arah pembangunan stabilitas ekonomi makro daerah dapat dicapai melalui arah kebijakan antara lain: (1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah, (2) Penguatan pengendalian inflasi daerah. (3) Penguatan iklim investasi untuk mendukung penguatan kemandirian ekonomi, dukungan bisnis bagi usaha mikro dan industri kreatif melalui penguatan daya saing yang lebih produktif, inovatif, berbasis riset, inovasi, dan berkeadilan.

5.2.3 Sasaran 3: Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas yang Adaptif dan Ramah Lingkungan

Upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas yang adaptif dan ramah lingkungan menjadi fondasi bagi pembangunan kota sebagai landasan untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Infrastruktur yang adaptif memungkinkan kota untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dinamis baik dari segi demografis, teknologi, maupun kebutuhan masyarakat. Sementara itu, infrastruktur yang ramah lingkungan adalah investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem kota. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi dengan baik, tanpa meninggalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

AP13. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas

Arah kebijakan dalam mewujudkan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas ini mencakup (1) Pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. (2) Pengembangan kawasan Kota Semarang yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan daya dukung dan daya tampung. (3) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan inklusif dan global.

Pengembangan sistem transportasi dan jalan yang efisien dan berkelanjutan sangat diperlukan, termasuk transportasi publik yang ramah lingkungan seperti konektivitas transportasi, pengurangan jumlah titik ruas/rawan kemacetan, transportasi listrik, jaringan jalur sepeda yang luas, serta trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki. Selain itu pengembangan infrastruktur pendukung lainnya seperti drainase perkotaan, penyediaan air bersih yang cukup dan sanitasi yang layak, lingkungan perumahan yang sehat dan rumah layak huni, sistem manajemen sampah dan limbah yang efisien, serta pengelolaan energi yang berbasis pada sumber energi terbarukan sangat diperlukan. Dengan mengintegrasikan teknologi hijau dan inovasi dalam setiap tahap pembangunan, akan tercipta lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan bagi penduduk Kota Semarang dan mendorong Kota

Semarang menjadi Kota Global. Infrastruktur berkualitas yang adaptif dan ramah lingkungan bukan hanya tentang pembangunan fisik semata, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat untuk hidup lebih baik. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, sehingga kebijakan dan proyek yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

5.2.4 Sasaran 4: Terwujudnya Ketahanan Kota yang Berbasis Ketangguhan Individu, Keluarga, Komunitas, dan Masyarakat

Ketahanan kota yang berbasis pada ketangguhan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat merujuk pada kemampuan mereka untuk bertahan dan pulih dari berbagai tantangan dan krisis yang mungkin terjadi dalam konteks perkotaan. Ini melibatkan pembangunan kapasitas dan sistem yang memungkinkan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menghadapi, menyesuaikan diri, dan pulih dari gangguan dan tekanan yang timbul. Ketangguhan individu mengacu pada kemampuan setiap individu untuk mengatasi tekanan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan mentalitas yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dan bertahan dalam situasi yang sulit. Ketangguhan keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk bertahan dan pulih dari krisis atau tekanan, termasuk dalam hal ekonomi, kesehatan, atau bencana alam. Ini melibatkan perencanaan dan persiapan keluarga dalam menghadapi berbagai risiko dan tantangan. Ketangguhan komunitas mencakup kemampuan komunitas untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai masalah atau krisis. Ini melibatkan pembangunan jaringan sosial, pengembangan keterampilan kolaboratif, dan penguatan infrastruktur sosial dalam komunitas. Ketangguhan masyarakat merujuk pada kemampuan masyarakat secara keseluruhan untuk merespons, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan, termasuk bencana alam, perubahan iklim, atau krisis ekonomi. Ini melibatkan kerja sama antara individu, keluarga, komunitas, dan lembaga sosial untuk mengatasi masalah bersama. Pembangunan ketahanan kota yang berbasis pada ketangguhan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai risiko dan tantangan. Hal ini juga melibatkan upaya untuk memperkuat kualitas hidup, kesejahteraan, dan inklusivitas bagi semua warga kota, sehingga mereka dapat menjadi lebih mampu dan siap menghadapi perubahan dan gangguan yang mungkin terjadi.

AP12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Fokus pembangunan terhadap keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menjadi pondasi yang penting untuk mencapai ketahanan kota yang berkelanjutan. Pembangunan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, nilai, dan kesejahteraan individu. Kesetaraan gender adalah prinsip yang mendasar dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan akan tercipta masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Masyarakat yang inklusif mengakomodasi keberagaman dan menghargai hak-hak semua individu, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau keberagaman. Kota Semarang akan mempromosikan budaya inklusi yang memungkinkan semua warga, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, migran, dan kelompok minoritas, untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kota. Ini akan didukung oleh program-program integrasi sosial, dukungan psikososial, serta peningkatan aksesibilitas fisik dan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Dengan memperkuat keluarga berkualitas, mendorong kesetaraan gender, dan membangun masyarakat inklusif, Kota Semarang akan menjadi lebih tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan yang ada dan yang akan datang.

AP14. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Perwujudan ketahanan energi dan air, Kota Semarang akan mengarah pada (1) pengembangan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, (2) pengelolaan air yang lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk program konservasi air, pengembangan infrastruktur air bersih, serta pengelolaan sungai dan drainase yang lebih baik. Hal ini akan memastikan akses yang memadai terhadap air bersih dan mengurangi risiko banjir di masa depan.

Dalam hal ketahanan pangan, tumbuh sebagai sebagai Kota Metropolitan, kemandirian pangan menjadi salah satu isu dalam 20 tahun mendatang. Dengan luasan lahan pangan dan perikanan yang signifikan, upaya perwujudan kemandirian pangan diharapkan mempertahankan dan mengembangkan budidaya pertanian dan perikanan perkotaan sebagai potensi utama yang terhubung langsung dengan industri *hospitality* (termasuk kuliner) dan sektor pariwisata melalui konsep *foodscape* dan rantai pasok/nilai pendek (*short supply/value chain*). Konsep tersebut mendekatkan antara sisi hulu dan hilir dalam sebuah sistem pangan dengan banyak manfaat, seperti, (1) mendorong budidaya pertanian, perikanan, dan produksi pangan lokal, (2) memperkuat ketahanan pangan lokal, (3) menurunkan risiko keamanan produk, dan (4) mempromosikan perdagangan yang lebih adil, (5) Pengembangan sentra pasok pangan.

AP15. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan Kota Semarang. Letaknya yang terletak di tepi laut dan memiliki topografi yang cenderung datar, berpotensi memiliki risiko yang tinggi terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan intrusi air laut akibat perubahan iklim. Oleh karena itu penting untuk membangun kota yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan ini. Untuk memperkuat ketahanan kota terhadap bencana, arah pembangunan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, (2) penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, (3) peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat terhadap potensi bahaya (3) integrasi teknologi dengan mitigasi bencana.

5.2.5 Sasaran 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Efektif, dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan menjadi kerangka untuk pengarusutamaan transformasi di Kota Semarang dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan. Transformasi tata kelola pemerintahan ini menjadi penting dalam rangka mendorong sistem pemerintahan sebagai lembaga penyelenggaraan eksekutif yang efektif, akuntabel, transparan, inovatif, dan responsif. Dalam upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif ini, maka perlu melibatkan perubahan dalam budaya organisasi, kebijakan, dan tata kelola, sehingga ke depan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih dipercaya publik

AP08. Regulasi dan Tata Kelola yang Terintegrasi, Adaptif, dan Kolaboratif

Penguatan institusi dan kapasitas serta pemanfaatan inovasi dan teknologi di dalam pengelolaan pemerintahan sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pemerintah daerah dalam menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan dalam 20 tahun ke depan. Arah kebijakan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel seperti penguatan institusi dan kapasitas: (1) Penguatan tugas, pokok, dan fungsi instansi pemerintah daerah, (2) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, (3) Pengelolaan aset daerah yang optimal, (4) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara, (5) Optimalisasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, (6) Birokrasi kelas dunia, (7) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, Inovasi dan Teknologi: (1) Optimasi Regulasi Pemerintahan, (2) Inovasi dalam peningkatan pelayanan publik, (3) Peningkatan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait pelayanan dan tata kelola pembangunan, (4) Database dan sistem informasi kepegawaian yang akurat dan solutif, (5) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel.

AP09. Ketenteraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial

Ketenteraman dan ketertiban merupakan fondasi yang penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan sebuah kota. Demokrasi substansial menekankan pentingnya partisipasi aktif dan penuh makna dari semua warga dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan Kota Semarang. Arah pembangunan ketenteraman dan ketertiban, serta demokrasi substansial dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Perkuatan ketenteraman dan ketertiban menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan stabil bagi semua warga.
2. Penguatan mitigasi ekstrimisme, terorisme, radikalisme, dan tindakan kriminal.
3. Penegakan hukum yang adil, pencegahan tindak kejahatan.
4. Penguatan demokrasi substansial melalui pembangunan institusi-institusi partisipatif, konsultasi publik yang terbuka, dan penguatan masyarakat sipil.
5. Peningkatan pengawasan partisipatif.

Tabel 22
Rumusan Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan

| SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|--|---|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | BASELINE 2025 | 2025 - 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inklusif, dan Berbudaya | AP01. Kesehatan Untuk Semua | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 77,59* | 78,96 | 80,67 | 82,39 | 84,44 |
| | | Jumlah Kasus Kematian Ibu | Kasus | 15 | 12 | 9 | 6 | 2 |
| | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | % | 6,36 | 5,40 | 4,21 | 3,01 | 1,58 |
| | | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) | % | 90 | 92,00 | 94,50 | 97,00 | 100 |
| | | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) | % | 90 | 92,00 | 94,50 | 97,00 | 100 |
| | | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | AP02. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif | Rerata Skor Literasi Membaca SD/Sederajat | % | 70,6* | 73,54 | 77,21 | 80,88 | 85,29 |
| | | Rerata Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat | % | 69,90* | 75,82 | 83,22 | 90,62 | 99,5 |
| | | Rerata Skor Numerasi SD/Sederajat | % | 70,5* | 73,80 | 77,93 | 82,06 | 87,01 |

| SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|---------------|---|---|--------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | BASELINE 2025 | 2025 - 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Rerata Skor Numerasi SMP/Sederajat | % | 47,36* | 55,51 | 65,71 | 75,90 | 88,13 |
| | | Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun | Tahun | 11,44 | 11,83 | 12,33 | 12,82 | 13,41 |
| | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,62* | 15,71 | 15,82 | 15,93 | 16,06 |
| | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | % | 21,22 | 23,10 | 25,45 | 27,81 | 30,63 |
| | | Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun | % | 100* | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | AP03. Perlindungan Sosial yang Adaptif | Tingkat Kemiskinan | % | 3,74-3,98 | 3,09 - 3,31 | 2,06 - 2,28 | 1,03 - 1,25 | 0,00 - 0,22 |
| | | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | % | 55,32 | 61,36 | 68,91 | 76,46 | 85,52 |
| | | Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% Bawah) | % | 17,19-17,39 | 18,6-19,1 | 20,6-21,1 | 22,6-23,1 | 24,19-26,39 |
| | AP11. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter | Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah dan | % | 26,71 | 29,55 | 33,09 | 36,64 | 40,89 |

| SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|---|---|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | BASELINE 2025 | 2025 - 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | mengarus-utamakan kebudayaan | | | | | | |
| | | Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan | % | 75,09* | 68,25 | 59,70 | 51,15 | 40,89 |
| | | Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Kumulatif) | Orang | 4,641,338 | 12,658,586 | 22,680,147 | 32,701,708 | 44,727,582 |
| | | Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir | % | 70,13 | 73,05 | 76,70 | 80,35 | 84,73 |
| | | Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan | % | 0,01 | 0,53 | 1,04 | 1,56 | 2,07 |
| Terwujudnya Perekonomian Kota yang Tangguh dan Berkeadilan | AP04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 28,74* | 29,94 | 31,44 | 32,94 | 34,74 |
| | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 3,22 | 3,94 | 4,84 | 5,73 | 6,81 |
| | | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara | Ribu Orang | 28,79 | 79,95 | 143,91 | 207,86 | 284,61 |
| | | Rasio Kewirausahaan Daerah | % | 3,44 | 3,74 | 4,11 | 4,49 | 4,94 |

| SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|---------------|--|--|--------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | BASELINE 2025 | 2025 - 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB | % | 1,36 | 1,83 | 2,41 | 2,99 | 3,69 |
| | | Return on Aset (ROA) BUMD | % | 4,58 | 6,99 | 9,99 | 13,00 | 16,61 |
| | | Kapabilitas Inovasi | Angka | 4,04 | 4,18 | 4,36 | 4,54 | 4,76 |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,61 - 5,31 | 4,68 - 4,38 | 3,75 - 3,45 | 2,82 - 2,52 | 1,88 - 1,58 |
| | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 60,64* | 63,23 | 66,46 | 69,69 | 73,57* |
| | | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa dalam PDRB | % | 28,98 | 29,31 | 29,73 | 30,15 | 30,65 |
| | AP05. Transformasi Digital | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet | % | 82,22 | 84,78 | 87,97 | 91,17 | 95 |
| | AP06. Integrasi Ekonomi Domestik, Nasional, dan Global | Disparitas Harga | % | ±10,00 | ±10,00 | ±10,00 | ±10,00 | ±10,00 |
| | | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | % | 59,68 | 59,65 | 58,58 | 57,50 | 56,21 |
| | AP07. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | % | 98,84* | 99,07 | 99,36 | 99,65 | 100 |
| | | Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap | % | 94,5* | 94,33 | 95,99 | 97,65 | 99,64 |

| SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|--|--|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | | BASELINE 2025 | 2025 - 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota | % | 68 | 70,40 | 73,40 | 76,40 | 80 |
| | | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota | Juta Rupiah | 168.43* | 312,81 - 318,88 | 488,01 - 501,12 | 494,57 - 685,09 | 783,65 - 920,38 |
| | | Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Konektivitas Wilayah | % | 54,99 | 63,99 | 75,24 | 86,50 | 100 |
| | AP10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 1.16 | 1,55 | 2,03 | 2,51 | 3,09 |
| | | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB | % | 60,00 | 63,48 | 67,83 | 72,18 | 77,4 |
| | | Total Kredit/PDRB | % | 41,00 | 50,89 | 63,24 | 75,60 | 90,43 |
| Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas yang Adaptif dan Ramah Lingkungan | AP10. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | % | 12,8 | 29,24 | 49,79 | 70,34 | 95 |
| | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Angka | 64,89 | 65,07 | 65,29 | 65,51 | 65,77 |
| | | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | 14,17 | 29,34 | 48,29 | 67,25 | 90 |

| SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|---|--|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | BASELINE 2025 | 2025 - 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Persentase Kawasan Banjir dan Rob | % | 3,04* | 2,75 | 1,91 | 1,06 | 0,05 |
| | | Persentase Pengembangan Kawasan Strategis | % | 52,76 | 61,96 | 73,46 | 84,96 | 98,76 |
| Terwujudnya Ketahanan Kota yang Berbasis Ketangguhan Individu, Keluarga, Komunitas, dan Masyarakat | AP12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Angka | 0,26 - 0,25 | 0,24 - 0,22 | 0,22 - 0,19 | 0,20 - 0,16 | 0,19 - 0,12 |
| | | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) | Angka | 64,69-68,47 | 69,00-72,00 | 73,00-75,00 | 77,00-79,00 | 80,1-84,78 |
| | AP14. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | % | 5,3 | 4,53 | 3,58 | 2,62 | 1,44 |
| | | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Angka | 91,64 | 92,30 | 93,13 | 93,96 | 94,96 |
| | | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | % | 56,05 | 64,84 | 75,83 | 86,81 | 100 |
| | | Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Angka | 54,62 | 55,49 | 56,59 | 57,68 | 58,99 |
| | AP15. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Angka | 99,43-97,48 | 92,00-93,00 | 83,38-84,38 | 74,75-75,75 | 72,4-57,42 |
| Penurunan Emisi GRK Kumulatif | | TonCO ₂ eq | 8.058.629,95 | 30.214.226,75 | 57.908.722,75 | 85.603.218,74 | 118.836.613,94 | |

| SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | SATUAN | TARGET | | | | |
|--|--|--|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | BASELINE 2025 | 2025 - 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Efektif, dan Akuntabel | AP08. Regulasi dan Tata Kelola yang Terintegrasi, Adaptif, dan Kolaboratif | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 78* | 77,74 | 81,57 | 85,40 | 90 |
| | | Indeks Reformasi Hukum | Angka | 77,19 | 81,25 | 86,33 | 91,41 | 97,51 |
| | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Angka | 4,4* | 4,11 | 4,39 | 4,67 | 5 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | Angka | 4,55 | 4,64 | 4,75 | 4,86 | 5 |
| | | Indeks Integritas Nasional | Angka | 76,43 | 79,69 | 83,76 | 87,83 | 92,72 |
| | AP09. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial | Jumlah Kejadian Konflik SARA | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Indikator mengikuti Indikator Kinerja Utama Daerah RKPD Tahun 2025

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024,

BAB VI PENUTUP

RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan perencanaan pembangunan selama dua puluh tahun ke depan. Dokumen ini juga dijadikan sebagai tolok ukur dan arahan bagi seluruh stakeholder di Kota Semarang untuk turut andil dalam membangun Kota Semarang selama dua puluh tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045, maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan, yang terdiri dari:

1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat;
2. Kerangka pengendalian dilakukan dengan lingkup: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko;
3. Sistem insentif untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya;
4. Mekanisme perubahan dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat adanya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; serta
5. Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pencapaian perwujudan visi dan misi jangka panjang dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 ini akan dapat lebih optimal dengan dukungan dari stakeholder pembangunan Kota Semarang. Untuk itu diperlukan adanya dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif dari berbagai pihak di Kota Semarang dalam mewujudkan pencapaian visi, misi pembangunan daerah Kota Semarang selama dua puluh tahun mendatang. Dengan tercapainya visi pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045 dari Kota Semarang diharapkan pula hal ini dapat mendukung pencapaian perwujudan visi jangka panjang dari Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001